

ANALISIS CSIS

Informasi Global

- Satu Kebudayaan di Abad IPTEK
- Dampak Globalisasi
Bagi Transformasi Masyarakat
- Dimensi Ideologi dan Politik
- Kecenderungan Globalisasi
Media Massa
- Sistem Pengawasan dan Pengamanan
Wilayah Perairan Indonesia
- Inovasi Teknologi "Remote Sensing":
Mengangkat Kembali Prestasi
Agro Industri
- Dokumen: Ringkasan Peristiwa ASEAN
- Timbangan Buku: Katalisator
Pembangunan Nasional



Analisis CSIS

Logo CSIS



Diterbitkan oleh CENTRE FOR STRATEGIC AND INTERNATIONAL STUDIES (CSIS) sebagai jurnal berkala untuk menyajikan tulisan-tulisan tentang berbagai masalah nasional dan internasional. ANALISIS adalah suatu forum terutama untuk para staf peneliti CSIS sendiri. Tetapi sumbangan tulisan dari luar CSIS akan dipertimbangkan untuk dimuat sesuai dengan kebutuhan. Isi tulisan-tulisan yang dimuat dalam ANALISIS sepenuhnya menjadi tanggungjawab pribadi penulis masing-masing.

Mulai tahun 1989 CSIS menggunakan logo baru: *Nalar Ajar Terusan Budi*. Logo berbentuk sebuah piringan cekung berukiran bola dunia yang melatarbelakangi gambaran orang tanpa busana duduk memangku buku terbuka beralaskan kain lampin. Tangan kiri menunjuk ke buku dan tangan kanan menunjuk ke atas menggambarkan orang yang sedang menguraikan pengetahuan yang ditimba dari buku. Ketelanjangan gambar orang di tengah piringan melambangkan keterbukaan budi -- tiadanya sikap a priori -- pada warga CSIS, seperti pada para analis umumnya, dalam kegiatan studinya. Gambar ini menunjukkan kegiatan belajar dan mengajar atau menguraikan pikiran, sebagaimana para analis CSIS melakukan studi dan menguraikan pikiran mereka kepada siapa saja yang membutuhkannya. Sedangkan bola dunia melambangkan alam jagad raya yang menjadi cakrawala dan lingkup CSIS berada dan berkarya. Kalimat *Nalar Ajar Terusan Budi* yang tertera pada lingkaran piringan adalah *surya sengkala*: cara merangkai kata dalam tradisi Jawa untuk menandai suatu tahun penting menurut peredaran matahari dan sekaligus mengemukakan makna yang terkandung dalam peristiwa yang tahunnya ditandai itu. *Nalar* menurut tradisi Jawa itu berwatak 1, *Ajar* berwatak 7, *Terusan* berwatak 9, dan *Budi* berwatak 1. Sebagaimana lazimnya sengkala dibaca dalam urutan terbalik: 1971, tahun CSIS berdiri. *Nalar Ajar Terusan Budi* juga menggambarkan alam pikiran, dan hakikat kegiatan CSIS. CSIS sebagai lembaga profesi keilmuan, yang didukung oleh kreativitas individu, pada hakikatnya mempunyai kegiatan intelektual yang bukan hanya menganalisa kebenaran tetapi juga terpanggil untuk menunaikan kewajiban sosialnya. Makna *Nalar Ajar Terusan Budi* adalah bahwa bagi CSIS, bernalar, belajar serta menguraikan pikiran adalah kelanjutan wajar dari budi yang arif. Logo ini dituangkan dalam wujud piringan perunggu oleh G. Sidharta.

*Pemimpin Redaksi/
Penanggung Jawab*

Rufinus Lahur

Dewan Redaksi

Daoed Joesoef, A.M.W. Pranarka, J. Soedjati Djiwandono, M. Hadi Soesastro, Harry Tjan Silalahi, Jusuf Wanandi, Clara Joewono, Djisman S. Simandjuntak, Onny S. Prijono, Bantarto Bandoro

Redaksi Pelaksana

Bambang Walgito, Sunarto Ndaru Mursito, Medelina K. Hendytio

STT

SK Menpen RI No. 509/SK/DITJEN PPG/STT/1978,
tanggal 28 Agustus 1978

ISSN

0126-222X

ANALISIS CSIS

TAHUN XX, NO. 4, JULI-AGUSTUS 1991

Daftar Isi

• Pengantar Redaksi	290
• Satu Kebudayaan di Abad IPTEK <i>Daoed Joesoef</i>	292
• Dampak Globalisasi Bagi Transformasi Masyarakat <i>Bachtiar Aly</i>	308
• Dimensi Ideologi dan Politik <i>A.M.W. Pranarka</i>	317
• Kecenderungan Globalisasi Media Massa <i>A. Muis</i>	331
• Sistem Pengawasan dan Pengamanan Wilayah Perairan Indonesia <i>Puguh Suharso</i>	345
• Inovasi Teknologi "Remote Sensing": Mengangkat Kembali Prestasi Agro-Industri <i>Sukardi Rinakit</i>	352
• Dokumen: Ringkasan Peristiwa ASEAN <i>Sudibyo, Yoyok Ariessusanto & F. Andrea</i>	364
• Timbangan Buku: Katalisator Pembangunan Nasional <i>Sukardi Rinakit</i>	392

Pengantar Redaksi

PARA pendahulu dan perintis kemerdekaan kita telah menetapkan sikap dan mengambil langkah guna menanggulangi masalah zamannya. Generasi kita sekarang inilah yang menikmati hasil ketepatan dan keberanian pilihan tersebut, serta mengakuinya sebagai suatu kebangkitan nasional. Demikian pula zaman iptek kini mengajukan masalahnya sendiri kepada kita untuk dijawab. Pada jawaban yang kita pilih itulah tergantung pula keadaan hidup dari generasi-generasi yang akan datang. Merekalah yang akan mengalami dan menilai tepat tidaknya jawaban tersebut serta memutuskan apakah jawaban tadi benar-benar dapat dikualifikasi sebagai kebangkitan nasional kedua dan bukan sekadar pembungkus yang indah dari isi yang sama sekali tidak relevan dan tidak fungsional terhadap masalah yang ingin ditanggulangnya. Menurut *Daoed Joesoef*, pembentukan satu budaya yang berintikan ilmu pengetahuan dapat sekali membuat isi ini menjadi sesuai dengan "keindahan" pembungkusnya.

Kehidupan global yang sedang melanda manusia dewasa ini semakin lebih kompleks masalahnya. Perkembangan ini menyadarkan kita bahwa kebersamaan eksistensial haruslah dipelihara, dimengerti dan dimanfaatkan untuk kepentingan umat manusia. *Bachtiar Aly*, mengemukakan bahwa kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi menjadi hampa makna apabila tidak didayagunakan demi peningkatan kesejahteraan umat manusia terutama menaikkan harkat dan martabatnya.

Apabila kita menyimak sejarah konsep-konsep ideologi dalam zaman modern ini, dapatlah dikatakan bahwa ideologi mencakup konsep dan aspirasi kolektif, yang berorientasi pada aksi, untuk menjadikan aspirasi dan konsepsi tersebut menjadi aktual terwujud melalui struktur kekuasaan. Dengan begitu, menurut *A.M.W. Pranarka*, ideologi akan selalu mempunyai hubungan dengan aspek kognitif intelektual, aspek psikomotorik emosional, dan kekuasaan sebagai aspek struktural. Dengan perkataan lain ideologi menyentuh bukan hanya kekuatan intelektual manusia melainkan juga manusia secara total.

Kemajuan di bidang teknologi informasi dan komunikasi akhirnya mampu menerobos lintas bangsa, budaya, hukum, sistem politik bahkan alam pikir manusia seluruh dunia. Arus informasi yang semakin canggih dan cepat boleh dikatakan tidak terbendung lagi. Menurut *A. Muis* berbagai seruan yang banyak dilontarkan negara-negara Dunia Ketiga untuk membentuk Tata Informasi Dunia Baru yang adil dan berimbang kini tampak mereda

dengan derasny proses globalisasi di banyak bidang lainnya. Di sana-sini muncul budaya komunikasi kosmopolit yang melahirkan manusia kosmopolit seperti budayawan global, novelis global bahkan sampai artis film global. Dampaknya terasa bahkan sampai pada tingkat pedesaan di banyak negara berkembang. Yaitu, di samping masalah alienasi dan dehumanisasi yang banyak diderita sebagian pemirsa dan pembaca di negara-negara berkembang, juga jati diri suatu bangsa dan budaya memang sedang diuji ketahanannya.

Informasi mengenai sebagian besar tanah air kita yaitu lingkungan laut, masih remang-remang dan simpang siur, dengan segala akibatnya. Oleh karena itu wilayah perairan laut Indonesia menurut *Puguh Suharso* memerlukan pengamanan dan pengawasan yang sistematis terpadu. Kondisinya begitu rawan terhadap penyelundupan, pencurian ikan, perampokan, kerusakan lingkungan, imigrasi gelap, subversi, infiltrasi dan tindak kriminal lain. Di sini terkait berbagai instansi seperti Bea Cukai, Imigrasi, Polisi Air, TNI-AL, dan Kesatuan Penjaga Laut & Pantai (KPLP), yang berjalan sendiri-sendiri karenanya tidak efektif dan efisien. Maka Suharso menyarankan pembentukan satu badan tunggal, yang bukan saja bersifat koordinatif melainkan berwewenang melakukan pengawasan demi menegakkan hukum di perairan laut kita.

Meskipun "euphoria" terhadap teknologi akhirnya disadari sebagai langkah yang tidak selalu tepat, namun posisi teknologi tetap memegang peranan penting dalam rangkaian proses mempercepat pembangunan. *Sukardi Rinakit* mengemukakan bahwa ekspor agro-industri yang merosot dalam dasawarsa terakhir misalnya, diduga karena tidak lahirnya inovasi teknologi pada sektor ini. Sehingga untuk mengangkat kembali prestasi agro-industri maka loncatan pemanfaatan teknologi harus dilakukan. Tanpa kebijakan seperti itu, maka produk agro-industri Indonesia tidak mempunyai keunggulan komparatif dalam kompetisi pasar yang sedang berjalan. Dan teknologi *remote sensing* tampaknya dapat menjadi salah satu kunci untuk mengangkat kembali prestasi agro-industri di samping kebijakan makro lain yang mempengaruhi infra-struktur.

Perubahan hubungan strategis dan munculnya blok-blok persekutuan ekonomi mempunyai implikasi terhadap Asia Tenggara. Untuk menghadapi keadaan itu, ASEAN harus meningkatkan kerja sama regional dengan memperkuat mekanismenya dan mempromosikan kerja sama dalam sistem perdagangan multilateral yang terbuka. Demikian antara lain isi dari komunike bersama ASEAN Ministerial Meeting (AMM), yang berlangsung di Kuala Lumpur tanggal 19-20 Juli 1991. Berbagai kerja sama ASEAN lainnya dapat diikuti dalam Ringkasan Peristiwa ASEAN bulan Juli sampai dengan Agustus 1991 yang disusun oleh *F. Andrea, Yoyok Ariessusanto* dan *Sudibyo* sebagai editornya.

Satu Kebudayaan di Abad IPTEK*

Daoed Joesoef

Bagaimana menceritakan laut kepada katak yang tidak pernah beranjak dari balongnya?

Bagaimana berkata tentang salju kepada bangau negeri tropis yang belum pernah menjauhi kubangannya?

Bagaimana berbicara tentang masa depan dengan orang yang asyik menatap masa lalu?

Bagaimana berbincang mengenai hidup dengan cendekiawan yang senang terperjara oleh doktrinnya sendiri?

MANUSIA di Abad XX, kita di Indonesia tidak terkecuali, berkenalan dengan semakin banyak benda yang punya kekuatan mekanis, yang tidak hanya dapat berjalan tetapi juga terbang, bahkan terbang melawan daya tarik bumi memasuki angkasa luar. Di banyak negara, termasuk Indonesia, benda-benda perkasa ini secara teratur dipamerkan. Pameran seperti ini pasti menimbulkan kagum dan pesona pada diri pengunjung. Begitu

terkagum dan terpesona sehingga pada saat melihat benda-benda mekanis itu, ada di antara mereka sampai lupa baha *after all* semua benda itu adalah hasil buatan manusia, bukan benda alami, dan pameran itu sendiri dalam dirinya merupakan sinyal, walaupun bukan peringatan, tentang adanya abad baru bagi kehidupan manusia, yaitu abad ilmu pengetahuan dan teknologi.

Sungguh melegakan pikiran karena tahu betapa banyaknya orang di negeri kita, termasuk pelajar-pelajar tingkat SD, yang menyadari akan apa yang ada di balik benda-benda yang memukau itu, yaitu teknologi. Namun tidak sebanyak itu kiranya jumlah

*Makalah ini disajikan dalam Seminar Sehari, Peringatan 20 Tahun CSIS, "Menuju Satu Kebudayaan? Nasionalisme dan Internasionalisme di Persimpangan Jalan," yang diselenggarakan di Jakarta, 28 Agustus 1991.

orang kita yang mengetahui tentang apa yang ada di balik teknologi tersebut, yaitu **ilmu pengetahuan**. Di antara yang mengetahui ini kiranya tidak semuanya menyadari bahwa ilmu pengetahuan itu punya metode dan kekuatan serta disiplinnya sendiri, betapa ia memiliki makna, tuntutan serta kondisinya sendiri dan betapa kegairahan serta vitalitasnya punya arti yang tersendiri pula.

Jadi di negeri kita, walaupun banyak sekali orang yang tahu bahwa di balik benda-benda berenergi masinal yang mengagumkan itu ada teknologi, tidak sebanyak itu yang tahu bahwa di balik teknologi itu ada ilmu pengetahuan. Lebih sedikit lagi yang kiranya menyadari bahwa yang disebut ilmu pengetahuan itu bukanlah sembarang koleksi dari teknik-teknik manufaktur ciptaan penghuni laboratorium yang berkacamata tebal dengan jari-jari tangan yang kuning dekil karena nikotin. Dan berdasarkan pengamatan sejak awal tahun 1970-an saya lihat nyaris tidak ada orang yang tahu, yang peduli, bahwa di balik ilmu pengetahuan itu, di sela-sela tumpukan buku di rak, di dalam rumus-rumus dan botol tabung serta pipa percobaan, pada gilirannya terdapat suatu isi, suatu **budaya**, suatu **budaya baru**. Dan ketidaktahuan, ketidakperdulian ini, sungguh merisaukan, pantas dirisaukan.

Betapa tidak. Ketidaktahuan ini lebih jauh berarti bahwa walaupun orang tahu bahwa tidak ada manusia, atau kelompok manusia, yang tidak berbudaya, orang ini kiranya tidak mau tahu bahwa tidak semua budaya, tidak sembarang budaya, melahirkan ilmu pengetahuan. Sedangkan budaya baru yang saya sebut tadi, budaya yang satu inilah yang melahirkan ilmu pengetahuan -- yang pada gilirannya menciptakan teknologi -- yang telah membuat Abad XXI men-

jadi abadinya ilmu pengetahuan dan teknologi. Maka di Abad Iptek ini, yang sebenarnya mau tidak mau sudah kita masuki, budaya baru inilah yang bisa disebut baru budaya dan kelompok manusia atau bangsa yang tidak menghayatinya pasti sulit untuk dapat *survive* dalam menempuh Abad Iptek yang penuh dengan tantangan, perubahan dan peluang yang serba cepat itu.

Pengetahuan sejarah, sejarah pengetahuan ilmiah sekalipun, tidak terlalu membantu penyadaran keberadaan budaya baru ini. Mempelajari ilmu pengetahuan dalam term **produk** ternyata juga tidak dapat membantu berbuat demikian. Mungkin sekali pendalaman ilmu pengetahuan dalam term **proses** dapat, tetapi itu pun memerlukan waktu serta sikap yang konsisten selama jangka waktu yang bersangkutan dan adanya lebih dahulu ilmu pengetahuan dalam term **komuniti** yang mantap.¹ Namun pengetahuan tentang sejarah pengetahuan itu

¹Ilmu pengetahuan dalam term *produk* adalah pengetahuan yang telah diketahui dan diakui kebenarannya oleh komuniti ilmiah. Jadi dalam dirinya pengetahuan ilmiah terbatas pada kenyataan-kenyataan yang mengandung kemungkinan untuk disepakati dan terbuka untuk diteliti, diuji ataupun dibantah oleh seseorang.

Ilmu pengetahuan dalam term *proses* adalah kegiatan kemasyarakatan yang dilakukan demi penemuan dan pemahaman dunia alami sebagaimana adanya dan bukan sebagaimana yang kita kehendaki. Metode ilmiah yang khas dipakai dalam proses ini adalah analisis rasionil, objektif, sejauh mungkin bersifat impersonal, dari masalah-masalah yang didasarkan pada percobaan dan daya yang observable.

Ilmu pengetahuan dalam term *komuniti* adalah lingkungan studi, kerja dan karya yang dihidupi oleh semangat ilmiah dan pergaulan serta tindak-tanduk, perilaku, sikap maupun tutur-kata para warganya di lingkungan itu diatur oleh empat ketentuan, yaitu universalisme, komunalisme, disinterestedness dan skeptisisme nalariah.

memberikan kita gambaran dari pertumbuhan ilmu pengetahuan sebagai **nilai**, jadi sebagai (bagian yang tak terpisahkan dari) kebudayaan, sehingga setiap benda dan peristiwa teknologis menjadi jelas makna dan kedudukannya di dalam perkembangan dunia sekarang dan di masa depan. Ia dapat dipakai sebagai jembatan ke ilmu pengetahuan dari sudut kepentingan manusiawi mana pun kita bertolak karena ia menyatakan adanya kesatuan tidak hanya dari sejarah tetapi dari pengetahuan manusia. Bukankah kunci bagi orang awam ke ilmu pengetahuan adalah kesatuan pengetahuan ilmiah ini dengan seni/kiat (kerajinan) yang, di mana pun, sudah dianggap tidak hanya sebagai unsur yang maha penting dari kebudayaan, bahkan sebagai budaya itu sendiri. Maka si awam ini, *hopefully*, akan memahami ilmu pengetahuan sebagai suatu budaya bila dia berusaha menelusuri perkembangannya di dalam budayanya sendiri.

Sejauh yang mengenai kita, celakanya, kebudayaan kita tidak merangkum ilmu pengetahuan. Pengetahuan yang lahir dari dan dikembangkan oleh seni/kiat (kerajinan) merupakan unsur budaya, tetapi pengetahuan ilmiah tidak dianggap begitu. Bukan karena pengetahuan ilmiah ini disadari sebagai unsur luar yang diperkenalkan melalui sistem pendidikan asing (Belanda) -- sebab dalam seni/kiat dan pengetahuan klasik kita jelas terlihat kehadiran pengaruh-pengaruh asing (India, Arab, Cina) -- tetapi karena dirasakan ilmu pengetahuan bukan merupakan budaya. Berhubung dengan itu ilmuwan, per definisi, juga bukan budayawan. Sampai detik ini, walaupun ada sarjana kita ditampilkan di media massa (televisi, surat kabar, majalah, buku) sebagai budayawan, bukan karena berdasarkan cara berpikir, sikap serfa karya-karyanya dia dapat dikate-

gorikan sebagai ilmuwan, tetapi karena di samping ini semua dia giat berkarya di bidang kesenian atau bergerak di bidang-bidang "sosial-budaya". Dengan perkataan lain, dia diakui sebagai budayawan karena dia adalah seniman. Maka seniman/seniwati ketoprak diakui sebagai budayawan, sedangkan ilmuwan tidak. Aksi pemilihan ratu kecantikan, yang pada dasarnya merupakan usaha periklanan belaka walaupun bukan narcissisme terselubung, dielu-elukan sebagai suatu peristiwa budaya, sedangkan Lomba Penelitian Ilmiah Remaja dan Lomba Karya Ilmiah Remaja, yang pada dasarnya merupakan kegiatan penghayatan nilai-nilai ilmu pengetahuan, ditanggapi hanya sebagai peristiwa persekolahan.

Masih ada saja orang yang menganggap ilmu pengetahuan semakin lama semakin mencekik seni atau paling sedikitnya memadatkannya demi efisiensi sehingga kebudayaan menjadi "modern" tetapi kerdil. Maka itu seni hanya dapat dikembangkan kembali sesuai dengan kodrat alaminya dengan jalan mengeluarkan ilmu pengetahuan dari ruang lingkup tradisional dari kesenian, yaitu kebudayaan. Berhubung seni sudah dianggap umum sebagai unsur kebudayaan *par excellence*, tiada budaya tanpa seni, tudingan orang ini oleh umum dianggap wajar. Keadaan seperti ini sampai sekarang masih terjadi secara sporadis di Barat. Namun kalau kita renungi lebih dalam, yang dikeluarkan oleh orang atau "pencinta seni" tersebut sebenarnya bukanlah ilmu pengetahuan, tetapi perubahan. Para penuding itu tiba-tiba merasa "asing" di dalam gelombang perubahan yang dituntut oleh zamannya.

Anggapan bahwa ilmu pengetahuan merusak kebudayaan kadang-kadang didukung oleh pernyataan historis bahwa seni berkem-

bang hanya bila pengetahuan ilmiah diabaikan. Ternyata jalannya peradaban lama di Timur dan di Barat membantah hal tersebut. Pujangga Omar Khayam dari Persia bukan hanya membuat puisi tetapi juga mengembangkan matematika dan astronomi. Di Yunani, tempat bermula kebudayaan Barat, pada masa keemasannya seni dan ilmu pengetahuan saling menunjang dan bekerjasama lebih erat daripada yang terjadi sekarang di zaman modern. Pythagoras hidup sebelum Aeschylus menciptakan drama Yunani. Socrates mengajarkan penalaran ilmiah pada waktu seni drama tersebut sedang jaya-jayanya. Lalu apakah Socrates ini seniman atau ilmuwan? Kehadiran tokoh yang sekaligus seniman dan ilmuwan ini membidani kelahiran era modern di zaman Renaissance. Dan yang menjadi tokoh dan lambang dari manusia Renaissance itu dari sejak semula adalah Leonardo da Vinci yang adalah sekaligus pelukis, pematung, matematikawan dan teknikus. Dirinya paling jelas mencerminkan keuniversalan dan kesatuan dari intelek. Di negeri kita pun dahulu tidak dipertanyakan apakah empu atau wali itu ahli sastra atau ahli pengetahuan. Dia disebut pujangga, budayawan, karena ahli sekaligus dalam seni/kiat, pengetahuan (kawruh), orang bijaksana dan dihormati sebagai jauhari tempat bertanya semua hal.

Di Inggris, tempat bermula tumbuh dan berkembangnya ilmu pengetahuan modern, zaman keemasan susastra adalah justru era di mana pengetahuan ilmiah dan seni maju bahu-membahu. Era ini -- meliputi waktu pemerintahan Ratu Elizabeth I di paruh kedua Abad XXI -- ditandai oleh penemuan-penemuan di bidang-bidang perdagangan, industri dan susastra. Ketika itu para pelayar dan petualang, seperti Sir Walter Raleigh, merupakan Leonardo-Leonardonya Inggris.

Lingkungan pergaulan Sir Raleigh tersebut, misalnya, didominasi oleh seorang matematikawan dan seorang astronom, sebab navigasi tergantung pada astronomi yang berkembang seiring dengan pikiran spekulatif baru tentang dunia dan sistem solar. Pelayaran-pelayaran besar ini pada gilirannya mengilhami karya-karya sastra. Kelihatan sekali dalam era ini betapa seni, ilmu pengetahuan dan dunia fisik saling menunjang pemekaran masing-masing. Juga bukan satu kebetulan kalau ketika ini pula diterbitkan tabel pertama dari logaritma.

Enam tahun sesudah Ratu Elizabeth I meninggal timbul era pematangan budaya lainnya di Inggris, yaitu era restorasi yang juga ditandai oleh pembentukan sebuah lembaga yang kemudian ternyata tetap merupakan satu komunitas ilmiah yang paling penting di dunia. Di lembaga inilah enam tahun sesudah didirikan Newton untuk pertama kalinya mengungkapkan pemikirannya yang sangat penting dan menentukan di bidang ilmu pengetahuan pada umumnya, di bidang ilmu alam dan teori gravitasi pada khususnya, dan bukan di ruang Cambridge tempat dia mengajar. Namun keanggotaan lembaga ini tidak hanya terdiri dari ilmuwan, tetapi juga dari seniman, penulis, penjelajah samudera dan benua. Mereka ini sama-sama tertarik pada kepentingan dan keinginan masing-masing, tanpa membuat batas dan jarak apa pun antara perhatian setiap anggota. Perhatian yang aneka ragam itu meliputi hal-hal keilmuan seperti matematika, fossil, mekanika, botani dan hal-hal keteknikan praktis seperti metalurgi dan statistik kependudukan. Pertemuan yang meresmikan pendirian lembaga ini dibuka dengan sebuah ceramah tentang astronomi oleh seorang arsitek (Christopher Wren). Nama lembaga, *The Royal Society*, diberikan oleh yang paling bersemangat di antara

semua pendirinya (John Evelyn), yang adalah seorang *diarist*. Bila lembaga ini memerlukan suatu rangkaian kata-kata yang singkat dan padat namun tetap indah, dibentuklah sebuah panitia yang mencakup salah seorang anggota yang berbakat khusus dalam hal ini, yang adalah seorang penyajak (John Dryden).

Peristiwa yang sama terjadi pula di Perancis. Dalam periode yang sama berdirilah di Paris sebuah lembaga serupa, disebut *Academie Royale des Sciences*. Walaupun dalam nama lembaga ini disebut secara eksplisit "ilmu pengetahuan", keanggotaannya tidak hanya terdiri dari ilmuwan, seperti Descartes, tetapi meliputi pula orang-orang dari berbagai macam keterampilan, keahlian dan pengetahuan. Bahkan lebih jauh lagi, di negeri yang raja dan rakyatnya beragama Katolik, lembaga ini tidak segan-segan mengajak seorang ilmuwan asing (Belanda) yang berbeda agama (Protestan) untuk turut memperkuat pendirian dan pekerjaan ilmiahnya sehari-hari. Dan orang yang berkebangsaan asing serta berlainan agama ini (Huygens) menetap di lembaga ini selama tidak kurang dari empat belas tahun.

Ilmu pengetahuan dewasa ini jelas jauh lebih berkembang dan berkemampuan jauh lebih besar daripada pengetahuan ilmiah di zaman Newton. Sebaliknya seni sastra dewasa ini dinilai tidak semaju seni sastra di masa Dryden, yaitu sastrawan yang sezaman dengan ilmuwan Newton dan sama-sama menjadi anggota dari *the Royal Society*. Namun kenyataan ini bukan berarti bahwa kemajuan ilmiah yang pesat ini terjadi dengan mengorbankan seni. Begitu pula kalau di Indonesia seni dianggap kurang berkembang relatif terhadap ilmu pengetahuan, tidak dengan sendirinya berarti karena di sini untuk seni belum ada "Menteri"-nya sendiri.

Sama halnya dengan seni, ilmu pengetahuan pun selalu gelisah. Namun dalam kegelisahan itu ilmu pengetahuan terus-menerus berusaha mengatasi gagasan-gagasan lamanya dan untuk itu bersedia mengadakan revolusi-revolusi dalam metode, pendekatan dan penalarannya sendiri. Dalam berbuat demikian ilmu pengetahuan memang bersaing dengan seni dalam merebut otak-otak muda yang cemerlang. Persaingan ini sendiri dalam dirinya merupakan bukti nyata bahwa seni dan ilmu pengetahuan sama-sama memerlukan kecerdasan manusia bagi perkembangannya masing-masing. Dan di sinilah tampil salah satu dari sedikit penemuan psikologis masa kini yang dapat dipegang, yaitu betapa konfigurasi faktor-faktor kecerdasan yang membedakan antara kepandaian dan kependiran adalah sama pada diri setiap orang, sama pada seniman maupun pada ilmuwan. Kita bisa saja terpisah oleh pendidikan dan pengalaman; kita juga dapat berbeda dalam sikap. Namun di balik semua ini kita sama-sama berpegang pada suatu dasar yang lebih mendalam dari kemampuan bersama.

Salah satu prasangka modern yang paling merusak adalah anggapan bahwa seni dan ilmu pengetahuan adalah dua jenis kepentingan hidup yang berbeda dan tidak cocok satu dengan lainnya. Kita didorong untuk biasa mempertentangkan temperamen artistik dengan temperamen ilmiah. Ada kecenderungan untuk mengidentifikasikan yang pertama dengan pendekatan kreatif/kritis dan yang kedua sebagai pendekatan spekulatif/individualistis. Bahkan adakalanya pandangan agamis dan etis ikut menuding ilmu pengetahuan sebagai materialistis dan tidak spiritual. Beberapa bulan yang lalu seorang penyajak dan dramawan terkenal kita mengatakan pelajar-pelajar seka-

rang tidak kreatif dibandingkan dengan pelajar-pelajar yang seperiode dengan dia dahulu. Pendapat ini dilontarkan setelah dia melihat majalah dinding SMA tempat dia belajar dahulu lebih banyak memuat analisis-analisis singkat keilmuan ketimbang sajak dan cerpen. Baginya tidak penting kenyataan bahwa dari sekolahnya ini sekarang pernah ada pemenang lomba penelitian/penulisan ilmiah yang kini secara teratur diselenggarakan oleh berbagai lembaga pemerintah. Dia kiranya juga tidak tahu bahwa berkat kreativitas ilmu pengetahuanlah maka karya-karya seni sekarang dapat lebih luas memasyarakat dan dengan lebih cepat serta lebih murah. Dia tidak menyadari bahwa berkat kekritisannya semangat ilmiahlah orang awam dapat mengenal gradasi mutu dari karya-karya artistik. Sebagian besar dari ilmu pengetahuan memang berurusan dengan materi tetapi hal ini tidak berarti bahwa pengetahuan ilmiah dan ilmuwan yang mengembannya bersifat materialistis. Kalau kita amati penampilan dan pandangan hidup dari banyak ilmuwan, terutama yang diakui besar dalam bidang keilmuannya, secara jujur harus kita akui betapa sederhananya hidup mereka sehari-hari, bahkan adakalanya jauh lebih tidak materialistis ketimbang seniman dan agamawan kondang. Saya kira keliru menganggap ilmu pengetahuan dan ilmuwan adalah individualistis. Yang benar adalah bahwa ilmu pengetahuan dan ilmuwan pada umumnya memiliki individualitas. Hal ini wajar karena ilmu pengetahuan adalah nilai yang membiasakan orang yang mengembannya untuk selalu tahu (sadar) tentang apa yang dia lakukan dan mandiri dalam penelitian. Terlepas dari kebiasaan ini, kiranya dapat juga dikatakan bahwa karya seni dan seniman besar juga memiliki individualitas.

Dalam masyarakat di mana berlaku

sistem pembagian kerja, kiranya dianggap wajar pula adanya spesialisasi fungsi. Kalau pun hal ini sampai terjadi di bidang seni dan ilmu pengetahuan, saya pikir hal tersebut demi kemudahan kerja belaka. Memang hanya sebagai suatu kemudahan kita membedakan fungsi ilmiah dengan fungsi artistik. Dengan pertimbangan yang sama pula kita lihat perbedaan, dan komplementaritas, antara fungsi pemikiran dan fungsi perasaan. Namun hendaknya kita tetap sadar bahwa nasib tidak membagi makhluk manusia dalam pemikir dan perasa. Kalau dahulu, baik di Barat maupun di Timur, seni dan ilmu pengetahuan bukan merupakan dua nilai yang saling tidak cocok, mengapa kini dibuat berbeda begitu rupa sehingga yang satu, ilmu pengetahuan, harus dikeluarkan dari kebudayaan.

Kebudayaan adalah sistem nilai. Maka bagi ilmu pengetahuan dan seni, sebagai nilai, budaya bukan hanya merupakan wadah tetapi juga sumber bersama; artinya kedua nilai itu sama-sama berawal dari sumber tunggal tersebut. Kesulitan-kesulitan yang sekarang kita alami dalam memahami perkembangan seni modern bukan tidak penting. Hal ini adalah pertanda tidak adanya suatu bahasa yang sekaligus umum dan luas dalam budaya kita. Demikian pula, kesulitan-kesulitan yang kita alami dalam memahami gagasan-gagasan dasar dari ilmu pengetahuan modern merupakan pertanda hal yang sama. Bukankah dahulu, di zaman empu dan wali, ilmu pengetahuan dan seni memiliki suatu bahasa bersama. Kalau pun sekarang kedua nilai ini sama-sama membusu justru karena keduanya, baik ilmu pengetahuan maupun seni, kini tidak lagi memiliki bahasa bersama itu. Maka tugas kita bukanlah lalu semakin memisahkan mereka dengan jalan mencampakkan yang satu ke luar budaya, tetapi seharusnya

menghidupkan bahasa universal yang satu itu, yaitu satu-satunya bahasa yang mampu mempersatukan ilmu pengetahuan dan seni, yang menyatukan ilmuwan, seniman, agamawan dan orang awam dalam suatu pemahaman bersama.

Sejauh kebudayaan secara esensial adalah sistem nilai, maka tidak ada alasan untuk menganggap ilmu pengetahuan bukan bagian dari budaya karena pengetahuan ilmiah, sama dengan pengetahuan, adalah suatu *nilai*. Di Abad XVI dan XVII memang ada anggapan bahwa ilmu pengetahuan itu adalah bebas nilai. Anggapan ini mengacaukan pengetahuan ilmiah dengan metode ilmiah yang adalah bebas-emosi. Artinya, bila ia diterapkan secara perfek, perlakuannya menjadi begitu ketat hingga tidak mengindahkan nilai-nilai yang mungkin menimbulkan reaksi pro dan kontra. Namun hal ini tidak membuatnya bebas nilai. Ilmu pengetahuan adalah tidak lebih dari penerapan nalar manusia sedapat mungkin dengan cara yang paling logis. Maka itu nalar adalah suatu nilai tempat ia bertumpu. Berhubung yang terlibat itu adalah nalar manusia, maka ilmu pengetahuan juga kukuh bersendi pada kehidupan manusia sebagai suatu nilai dan pada pelaksanaan yang rasional dari kehidupan itu, juga sebagai suatu nilai. Jadi bagaimana mungkin ilmu pengetahuan bebas nilai karena ia sendiri adalah nilai dan bersendikan nilai-nilai.

Tentu masih banyak lagi nilai-nilai lainnya yang diterima dengan wajar sebagai unsur alami kebudayaan, seperti kebaikan, keindahan, berbudi luhur. Namun nilai-nilai tersebut juga ada gemanya dalam ilmu pengetahuan. Sebenarnya lebih banyak lagi nilai yang bergema dalam pengetahuan ilmiah karena pengetahuan ini praktis turut meng-

hayati nilai-nilai dari semua kegiatan manusia. Ia bahkan turut memperkaya khazanah nilai-nilai itu. Dan walaupun ada pergeseran dalam nilai-nilai manusiawi itu, ia turut berperan kreatif dalam pergeseran tersebut. Sebenarnya tidak akan ada eksistensi ilmu pengetahuan tanpa adanya penilaian nilai-nilai. Bukahkah nilai-nilai pada dasarnya bersendikan perbuatan menilai. Dan setiap perbuatan menilai dalam dirinya merupakan suatu pembagian dari bidang pengalaman kita dalam apa-apa yang penting dan mana yang tidak. Dengan perkataan lain, di dasar setiap pemikiran manusia terdapat penilaian tentang apa yang serupa dan apa yang tidak serupa. Maka itu nilai-nilai manusiawi berkaitan erat dengan penilaian kita tentang yang serupa dan tidak serupa itu. Bila ilmu pengetahuan mengubah penilaian itu ia mengubah pula nilai-nilai itu. Ilmu pengetahuan membantu kita menciptakan kephahaman dengan jalan memperluas wawasan mengenai apa yang serupa dan apa yang tidak serupa.

Kecenderungan yang terus-menerus dari ilmu pengetahuan untuk memperluas keserupaan yang dicarinya di antara fakta-fakta bukan tidak penting bagi perkembangan sikap kultural manusia. Pendalaman ilmu pengetahuan, ada dikatakan, membina kebiasaan bersikap kritis. Ini benar, tetapi tidak hanya itu. Bila kita menemukan keserupaan yang lebih luas di antara ruang dan waktu atau di antara bakteri, virus dan kristal, kita memperluas tatanan (order) di dalam alam semesta. Dan yang jauh lebih berarti lagi, dengan begitu kita sebenarnya memperluas kesatuannya. Bila kita telusuri kembali perkembangan ilmu pengetahuan, setapak demi setapak dengan teliti, kita pasti akan memahami betapa gerakan itu selalu menggapai-gapai konsep pemersatu. Pada gerak-

an (ilmu) biologi sejak Ray dan Linnaeus, misalnya, kita lihat hal itu pada adanya pendaftaran spesies yang serupa, penemuan sel-sel, pembagian dan fusi seksualnya; elaborasi mekanisme dari pewarisan dan dari seleksi alami; dan dari semua ini distilasi berkesinambungan dari konsep evolusi yang tadinya luas dan beragam. Di bidang (ilmu) kimia hal yang sama kita lihat sejak dirumuskannya hukum Dalton tentang kombinasi dari bobot-bobot yang sama melalui tabel periodik dari unsur-unsur dan perilaku elektrisnya seperti yang dipikirkan oleh Davy dan Faraday hingga ke konsep struktur molekuler dewasa ini. Perjalanan (ilmu) fisika ke arah kesatuan dapat dilihat pada: kristalisasi konsep universal tentang materi, massa dan bobot di dalam revolusi ilmiah; konsep tentang konservasi massa, tentang energi yang berbentuk banyak -- dalam karya Rumford, Joule dan Clerk Maxwell -- dan tentang konservasinya; lompatan Planck di tahun 1899 ke sifat yang khas dari energi; identifikasi Einstein tentang massa dan energi dalam satu konsep tunggal yang dalam dirinya merupakan karya yang paling gemilang mengenai pandangan pemersatu.

Kita lihat semua ini menyebabkan penciptaan energi dari massa; pembuatan gambaran tentang ruang angkasa yang semakin mendekat tetapi kiranya juga semakin meluas; dan kini dalam dua-tiga tahun terakhir ini, timbulnya spekulasi bahwa dalam proses ekspansi itu energi gravitasional menghilang secara tidak langsung dan bisa tampil kembali sebagai materi baru. Jadi ilmu pengetahuan adalah suatu proses penciptaan konsep-konsep baru yang mempersatukan pemahaman kita tentang alam dan dunia dan proses tersebut kini menjadi semakin tegas dan semakin luas jangkauannya, jauh lebih semarak daripada keadaannya di puncak revolusi ilmiah dahulu. Dan kesatuan alami

ini, di antara yang bernyawa dan yang tidak, yang dibiasakan untuk digapai oleh pemikiran ilmiah, atau pemikiran budaya bila pengetahuan ilmiah diperlakukan sebagai unsur yang tak terpisahkan dari kebudayaan. Kesatuan alami ini adalah suatu konsepsi yang jauh lebih dalam daripada asumsi bahwa alam itu seharusnya seragam. Kita berusaha menemukan alam yang satu, suatu kesatuan yang koheren. Hal ini memberikan kepada siapa pun, yang menghayati semangat ilmiah makna dari misi keilmuannya dan suatu kepuasan estetis: setiap penelitian mengandung perasaan sedang menjalin benang-benang dunia menjadi sebuah jaringan yang terpolakan terpadu.

Einstein telah menyimpulkan pertanyaan-pertanyaan kepada alam selama tiga abad ketika dia menggabungkan energi dan massa dalam satu persamaan: $E = mc^2$. Ini tentu bukan konsep pemersatu yang sama dengan yang dicari-cari oleh Keats ketika dia menutup *Ode on a Grecian Urn* dengan kalimat:

*Beauty is truth, truth beauty, -- that is all
Ye know on earth, and all ye need to know.*

Namun di sini keserupaan jauh lebih penting dari perbedaannya. Keserupaan itu lebih berguna bagi pemahaman kita bahwa konsep ilmu pengetahuan sama saja dengan konsep-konsep nilai, sama-sama merupakan monumen bagi kepekaan kita tentang adanya kesatuan di dalam alam.

Ilmu pengetahuan sering dipersalahkan anti moral atau paling sedikitnya tanpa moralitas apa pun. Karena itu dalam pikiran orang yang mendalami pengetahuan ilmiah akan berkembang ketidakperdulian terhadap moralitas yang pada waktunya akan mematikan kemampuan membuat penilaian

an yang tepat dan melumpuhkan kehendak bersikap baik, bahkan melemahkan kepercayaan religius. Tuduhan seperti ini menurut saya tidak beralasan sama sekali. Betapa tidak. Bukankah yang dicari oleh ilmu pengetahuan adalah **kebenaran**. Sejarah ilmu pengetahuan memang sempat ditaburi oleh kehadiran dari tidak sedikit jumlah ilmuwan yang tercela tingkah-lakunya. Tetapi bukankah sejarah kesenian dan keagamaan juga mengalami hal yang sama. Namun semua ilmuwan yang tercela itu jelas tercatat sebagai orang yang sangat malu berdusta mengenai fakta atau mengenai keinginan ilmiahnya. Semuanya mendasarkan keyakinan ilmiahnya pada suatu kebulatan tekad dan keinginan yang menggebu-gebu untuk menemukan kebenaran tersebut. Tidak ada satu sistem moralitas apa pun yang tidak menilai tinggi kebenaran serta pengetahuan tentang diri sendiri secara sadar dan jujur. Maka itu aneh sekali bila ilmu pengetahuan dikatakan amoral, lebih-lebih bila ucapan itu datang dari orang-orang yang dalam hidupnya sehari-hari menjunjung tinggi kebenaran itu. Hal apa pun yang dikaji oleh ilmu pengetahuan dan metode serta pendekatan apa pun yang dipakainya dalam pengkajian itu, dalam membuat penilaian akhir ia berpegang hanya pada satu kriterium, yaitu bahwa ia harus menyajikan kebenaran. Kalaupun ada satu sistem perilaku yang mengklaim dirinya lebih fanatik terhadap kebenaran daripada yang dikembangkan oleh Lao-tsze, maka pasti sistem itu adalah ilmu pengetahuan.

Saya tonjolkan di sini kebenaran di antara nilai-nilai manusiawi karena kebenaran ini pada umumnya ada di semua sistem nilai, jadi di semua budaya dan peradaban, dan betul-betul fundamental bagi kebanyakan sistem tersebut. Maka itu *kebenaran* tersebut pasti merupakan suatu *nilai*. Namun

bukan berarti bahwa kebenaran itu adalah sesuatu yang *self-evident* dalam ilmu pengetahuan, seperti juga halnya dalam seni, moral atau agama. Dalam semua yang disebut ini kebenaran bersendikan suatu penilaian, suatu perbuatan menilai. Tidak ada satu pun penilaian dapat dilakukan tanpa pengalaman, sebab tidak ada satu pun kebenaran, bahkan tidak kebenaran religius, yang tidak minta didukung oleh fakta. Namun kita tentu tidak bisa mengukur kebenaran dan nilai-nilai manusiawi begitu saja secara faktual. Kita seharusnya merenung lebih dalam apakah, baik pada ilmu pengetahuan, seni maupun etika, kebenaran tidak jauh lebih luas dari sekedar kecocokan dengan fakta. Renungan ini kiranya sekaligus merupakan penelusuran naluriyah untuk mengetahui apakah ilmu pengetahuan memang memiliki nilai-nilainya sendiri.

Ilmu pengetahuan sebenarnya merupakan suatu bagian, suatu bagian yang karakteristik, dari kegiatan manusia pada umumnya. Maka itu gagasan-gagasan ilmu pengetahuan dalam dirinya berupa *common sense*, yaitu generalisasi yang kita simpulkan dari pengalaman sehari-hari dan terus-menerus dipakai sebagai pegangan pelaksanaan hidup. Tiga gagasan kreatif, misalnya, yang kemudian menjadi pengertian sentral keilmuan -- gagasan mengenai tatanan (*order*), mengenai sebab dan mengenai peluang -- sebenarnya sudah lama ada sebelum diterapkan dalam ilmu pengetahuan. Kegiatan alami dari pengetahuan ilmiah untuk melihat ke depan, mengantisipasi, memprakirakan, pada dasarnya juga merupakan keinginan alami dari manusia karena secara naluriyah makhluk Tuhan yang satu ini tahu bahwa dia akan menjalani sisa hidupnya di masa depan, maka itu merasa perlu mengetahui masa depan itu. Metode ilmiah pun sebenarnya merupakan metode dari semua

penyelidikan manusia; bedanya hanyalah bahwa ia adalah eksplisit dan sistematis. Dan perbedaan ini penting sekali, sangat menentukan, lebih-lebih bila mengenai masalah "penilaian yang tepat" dan "tindakan yang tepat" (*correct*).

Dalam kegiatan alaminya melihat ke depan itulah terlihat gambaran konseptual ilmu pengetahuan tentang kebenaran, yang di dalam budaya dan peradaban mana pun diperlakukan sebagai nilai yang dijunjung tinggi. Dalam melaksanakan kegiatan alaminya itu ilmu pengetahuan menghubungkan fakta-fakta. Namun jangan mengira bahwa yang dinamakan pengetahuan ilmiah itu semata-mata adalah suatu deskripsi tentang fakta. Ia sama sekali bukan merupakan suatu catatan netral tentang apa-apa yang terjadi dalam ensiklopedi mekanis yang tak berujung, seperti anggapan keliru yang berasal dari Abad XVIII. Anggapan keliru ini melihat ilmuwan sebagai pengamat yang lepas terpisah dari apa yang diamati dan percaya bahwa alam semesta, termasuk dunia, berjalan baik karena diatur oleh asas gravitasi natural dan *human self-interest*. Anggapan demikian ini keliru karena di Abad XVIII itu sendiri ilmu pengetahuan sebenarnya tidak pernah begitu. Sebab ilmu pengetahuan bukan catatan apa adanya tentang fakta, tetapi suatu pencarian tatanan di dalam fakta-fakta. Dan kebenaran ilmiah bukanlah benar menurut fakta, yang tidak pernah lebih dari aproksimatif, tetapi kebenaran hukum-hukum yang kita lihat (temukan) ada di dalam fakta-fakta. Dan kebenaran jenis ini, harus diakui, sama sulitnya dan sama manusiawinya dengan pengertian kebenaran dalam suatu lukisan, yang jelas bukan sebuah foto, atau rasa kebenaran emosional dalam suatu alunan musik.

Jadi kita baru dapat menetapkan

kebenaran setelah kita beralih dari fakta ke hukum. Yang penting adalah menemukan, mengenali, adanya hukum di dalam fakta. Hukum itulah yang kita verifikasi: pola, tatanan, struktur dari peristiwa-peristiwa. Itulah sebabnya mengapa pengetahuan ilmiah begitu sarat dengan simbolisme angka dan geometri, yang merupakan ekspresi familier dari hubungan-hubungan struktural. Jadi kita tidak semata-mata mengamati dan memprakirakan fakta. Itulah sebabnya mengapa setiap filosofi yang membangun ilmu pengetahuan hanya dari fakta adalah keliru. Yang kita cari adalah hukum, kemudian di samping memakainya untuk tindakan-tindakan, mengujinya ke arah (pencarian) hukum-hukum baru. Yang penting bukanlah bentuk dari hukum yang bersangkutan. Hukum ilmu pengetahuan, sama dengan hukum-hukum yang kita pakai dalam langkah-langkah pribadi kita, tetap berguna dan benar, terlepas dari apakah ia dikatakan "selalu" berlaku atau hanya "acapkali" berlaku. Yang dipegang adalah pengakuan adanya hukum di dalam fakta-fakta.

Dan di dalam batang tubuh hukum itu sendiri, yang tampil sebagai tanda kebenaran adalah koherensi yang teratur dari keseluruhan unsur-unsur bagian. Semua bagian itu cocok satu sama lain seperti berbagai karakter dalam sebuah novel atau laksana kata-kata di dalam sebuah sajak. Analogi yang terakhir ini hendaknya selalu kita ingat karena ilmu pengetahuan adalah suatu bahasa dan sebagai bahasa, ia menetapkan bagian-bagiannya dengan jalan begitu rupa sehingga bagian-bagian tersebut membentuk suatu arti. Pada setiap perkataan dalam kalimat ada ketidakpastian definisi namun kalimat itu menetapkan secara konklusif artinya sendiri dan arti dari kata-kata yang membentuknya. Maka kesatuan intern dan koherensi

dari ilmu pengetahuan itulah yang memberikannya dan membuatnya satu sistem prediksi yang lebih baik ketimbang bahasa lain yang kurang tertata dan kurang teratur.

Demikianlah, setiap hukum ilmu pengetahuan mempersatukan tebaran fakta-fakta. Namun hukum itu sendiri bukan merupakan agen pemersatu yang terakhir. Setiap hukum hanya merupakan suatu aturan dalam pembuatan prediksi. Pikiran-pikiran besar yang mempersatukan itu adalah simpul-simpul di mana hukum-hukum saling menyilang dan saling mengikat, seperti pikiran bahwa semua materi adalah serupa, atau bahwa ruangan bumi terbentang melampaui bintang-bintang, atau bahwa ada suatu kesinambungan fisik dari satu generasi ke generasi berikutnya. Umum cenderung menerima simpul-simpul persilangan itu apa adanya dan tidak peduli berapa lama diperlukan untuk membuat konsep-konsep pemersatu itu. Padahal konsep-konsep itulah yang menciptakan kesatuan: konsep tentang materi, tentang ruang, tentang evolusi dan tentang pewarisan. Konsep-konsep itulah yang merupakan sekaligus kaitan-kaitan dan gabungan-gabungan yang menentukan di dalam keseluruhan struktur dari pemahaman kita. Bila hukum-hukum ilmu pengetahuan mempersatukan fakta-fakta, konsep-konsep ilmu pengetahuan menyatukan hukum-hukum itu ke dalam suatu dunia yang tertata yang memegang teguh simpul-simpul kukuh tersebut di dalam jaringan penalaran yang ada.

Apa-apa yang diamati oleh ilmu pengetahuan, apa-apa yang diprediksi oleh ilmu pengetahuan mengandung semua kekurangan yang ada pada fakta. Fakta-fakta memberikan sinyal untuk masa depan tetapi sinyal ini memang tidak pasti dan penafsiran mengenainya dengan irrelevansi sebagai latar bel-

kang bisa tidak akurat. Prediksi yang dibuat berdasarkan sinyal itu seharusnya berupa prediksi statistik. Ia tidak membaca masa depan tetapi memprakirakannya. Dan praktikan ini punya makna hanya karena ia dikaitkan dengan estimasinya sendiri tentang ketidakpastian. Jadi masa depan dapat dikatakan selalu berada sedikit di luar fokus perhatian dan segala sesuatu yang kita prakirakan ada di situ diselimuti sedikit ketidakpastian. Beginilah situasi keberadaan manusia dan situasi keadaan ilmu pengetahuan. Maka seperti yang dikatakan oleh Karl Pearson, pendiri statistik modern, di Abad XIX, bahwa kita merenungi fakta-fakta tidak tanpa kekeliruan dan karenanya kebenaran yang kita peroleh bukanlah hal yang dapat kita pikirkan tanpa kesalahan. Namun karena kita tahu apa yang kita lakukan, kita bisa bekerja dengan kebenaran itu tanpa takut-takut. Kita tahu apa yang kita lakukan karena penalaran ilmiah adalah pemandu tindakan. Sebab penalaran ilmiah, bukan pengiring atau kondisi dari kemajuan manusia, tetapi adalah kemajuan itu sendiri.

Jadi bila kebudayaan adalah suatu sistem nilai, dan sejauh pengetahuan memang diterima sebagai bagian alami dari kebudayaan, kiranya tidak masuk di akal bila pengetahuan ilmiah tetap dianggap asing oleh kebudayaan. Di Abad Iptek ini sudah bukan zamannya lagi menganggap pengetahuan ilmiah merupakan santapan nikmat intelektual bagi rohani selapisan khusus masyarakat saja. Ilmu pengetahuan bukan lagi merupakan suatu sensibilitas khusus. Maka nilainya sama luasnya dengan makna literer dari nama awalnya, yaitu pengetahuan. Ungkapan *specialised mind* sama barunya dengan sebutan *specialised man*, yaitu *scientist/scholar*, suatu sebutan yang baru berusia seratusan tahun. Ilmu pengetahuan dan pengetahuan adalah sebutan yang se-

padan asalkan dipakai secara tertib untuk menyatakan suatu keakraban yang tertata, teratur dan sistematis dengan suatu tema perhatian yang dasarnya jelas dan eksplisit bersama-sama dengan suatu pemahaman mengenai hubungannya dengan tema-tema perhatian lainnya. Dengan dimasukkannya ilmu pengetahuan sebagai bagian yang tak terpisahkan dari kebudayaan mungkin ada kekhawatiran dari pihak pencinta dan pengembangan seni bahwa budaya lalu menjadi suatu "budaya umum". Menurut saya tidak apa, selama yang dimaksudkan dengan "budaya umum" ini adalah bahwa kini pengetahuan ilmiah sudah dijadikan bagian yang terpenting -- walaupun bukan salah satu inti, di samping seni -- dari kebudayaan. Lagi-lagi tidak apa, selama dengan sebutan "kebudayaan umum" ini menjadi jelas bahwa kini kebudayaan tidak lagi berupa sekedar ornamen rohani atau suatu training bagi karakter dan budi pekerti tetapi, berkat kehadiran pengetahuan ilmiah, menjadi suatu sistem gagasan mengenai dunia dan kemanusiaan yang seharusnya dimiliki oleh manusia sesuai dengan (tuntutan) zamannya.

Sekarang ini saja sudah diketahui bahwa zaman yang akan kita masuki mulai Abad XXI nanti adalah zaman berkuasanya ilmu pengetahuan dan teknologi sehingga abad mendatang ini dikenal pula sebagai Abad Iptek. Demi *survival* kita dalam menempuh Abad Iptek ini, yang membuat dunia semakin menyatu seharusnya kita satukan pula budaya kita. Satu budaya yang berintikan ilmu pengetahuan untuk menghadapi perubahan, tantangan dan peluang dunia yang semakin menyatu karena penerapan ilmu pengetahuan. Walaupun dikatakan bahwa di Abad Iptek itu makhluk manusia semakin tergantung pada dan ditentukan oleh ilmu pengetahuan hal itu karena pengetahuan il-

miah ini mengadakan perubahan-perubahan nilai yang adakalanya sangat fundamental. Perubahan-perubahan ini menjadi tantangan yang mengancam bagi manusia yang tidak mampu menjawabnya secara tepat dan cepat, tetapi pasti merupakan peluang baik bagi siapa yang telah menyiapkan diri secara antisipatif. Ilmu pengetahuan merubah nilai-nilai melalui dua cara. *Pertama*, ia menginjeksikan gagasan-gagasan baru ke dalam budaya (sistem nilai) yang ada. *Kedua*, ia menggiring budaya ini ke bawah tekanan-tekanan perubahan teknis sampai dasar budaya ini berubah, walaupun tidak secara menyeluruh paling sedikitnya sebagian besar.

Penemuan teknik percetakan, misalnya, sepiantas lalu kelihatan tidak terlalu mempengaruhi secara langsung isi dari puisi. Namun bila sebuah puisi dapat diulang-ulang membacanya dan oleh semakin banyak orang, adalah wajar bila perhatian orang bergeser dari ritme persajakan ke makna dan pesan yang dikandung oleh puisi yang bersangkutan. Demikian pula penemuan fotografi membuat pelukis kehilangan minatnya pada keserupaan dan beralih ke pola-pola formal/abstrak. Jadi sensibilitas manusia diubah oleh pergeseran-pergeseran nilai yang digerakkan oleh ilmu pengetahuan. Di bidang ekonomi, tujuh belas tahun yang lalu telah saya ingatkan, betapa ilmu pengetahuan telah merubah ekonomi industrial menjadi ekonomi jasa dan kemudian merubahnya lagi menjadi ekonomi pengetahuan dan melalui intensifikasi dan ekstensifikasi ekonomi pengetahuan ini merubah pula ekonomi internasional menjadi ekonomi dunia. Perekonomian menjadi sekaligus semakin padat dan semakin luas, menyatukan semua ekonomi nasional begitu rupa sehingga batas-batas ekonomi tidak hanya menjadi semakin tidak sinkron dengan batas politik-ketatanegaraan tetap juga menjadi

semakin kabur. Sekarang proses ini disebut globalisasi dan globalisasi ini lambat tetapi pasti merayap ke semua bidang kehidupan.

Abad Iptek tidak mengurangi jumlah dan frekuensi konflik, baik di tingkat nasional maupun internasional. Di tingkat internasional konflik terjadi karena secara esensial saling keterkaitan bisa berkembang menjadi saling ketergantungan yang asimetris berhubung derajat penguasaan iptek tidak sama. Di tingkat nasional konflik timbul karena secara esensial ada perbedaan respons terhadap tantangan dan peluang yang datang dari luar. Orang mengatakan bahwa pertentangan sudah menjadi bagian alami dari kebudayaan/peradaban melalui pola pikir masyarakat manusia yang mengemban kebudayaan/peradaban itu. Pola pikir di masyarakat mana pun merupakan hasil ramuan dari unsur-unsur: generalisasi ilmiah, fakta-fakta empiris, pengertian-pengertian mitologis dan religius serta gagasan-gagasan politis dan etis. Masing-masing unsur berpotensi untuk menimbulkan perbedaan-perbedaan yang bisa saja menjurus ke arah konflik atau bentrokan keras. Namun satu dari keempat unsur tersebut, dan hanya satu unsur, yang bersifat konvergen, yaitu generalisasi ilmiah, sedangkan yang tiga lainnya berpembawaan divergen. Sejarah keintelektualan dari kelompok-kelompok manusia, untuk sebagian besar, merupakan cerita konflik dari aspek-aspek yang konvergen dan divergen itu. Sejarah itu juga mengatakan bahwa tidak ada satu pun masyarakat dapat *survive* kecuali jika ke dalam pola pikirnya semakin banyak dimasukkan nilai-nilai ilmiah sebagai unsur ramuannya. Maka kelalaian kita memasukkan ilmu pengetahuan ke dalam sistem nilai kita bisa berakibat fatal karena pola pikir masyarakat tidak mengandung nilai konvergen yang begitu penting, yang pembawaan

alaminya mempersatu melalui perluasan keserupaan-keserupaan.

Di samping memperlakukan ilmu pengetahuan sebagai bagian dari budaya kita, kita masih harus mengembangkan dan menguasainya begitu rupa sehingga dapat membantu kita membaca buku kedua dari Tuhan. Buku pertama dari Tuhan meliputi kitab-kitab suci yang diturunkanNya melalui Nabi-Nabi yang dipilihNya menjadi Rasul, yang membawa dan menyampaikan pesan-pesanNya kepada umat manusia di dunia. Buku kedua dari Tuhan adalah alam. Setiap buku Tuhan mempunyai bahasanya sendiri dan terbuka bagi setiap orang untuk dipelajari. Seperti juga makhluk manusia yang lain, kita -- manusia Indonesia -- tidak dapat hidup tanpa alam dan alam ini mengandung apa saja yang kita perlukan untuk hidup itu. Alam ini indah dan baik bila kita dapat memanfaatkannya dan hidup sesuai dengan keadaan, perubahan dan ritme yang ditawarkannya. Untuk mengetahui semua kemungkinan dan peluang tersebut kita harus dapat menguasai bahasa buku kedua Tuhan ini dan lalu memikirkan penafsiran yang tepat mengenai apa-apa yang kita baca di situ. Dalam salah satu buku pertamaNya, Kitab Suci Al-Quran, Tuhan Yang Maha Pengasih, Maha Penyayang dan Maha Pemurah jelas menyatakan bahwa Dia memberikan tanda/sinyal (di alam) supaya manusia berpikir. Bahasa buku kedua dari Tuhan ini adalah ilmu pengetahuan.

Galileo Galilei pernah mengatakan bahwa satu-satunya bahasa alam adalah matematika. Namun perkembangan ilmu pengetahuan modern membuktikan bahwa pengetahuan ilmiah jauh lebih mampu mendeskripsikan, memprakirakan dan menafsirkan alam. Dalam melakukan itu pengetahuan ilmiah ini memang tetap menggunakan

matematika terutama untuk mencari pola-pola -- setiap jenis keteraturan di dalam alam yang terus berubah -- serta perumusan hukum-hukum. Namun metode matematika bukan yang cocok untuk pengembangan setiap jenis ilmu pengetahuan. Di samping ilmu-ilmu kealaman ada berbagai ilmu non-matematis yang juga cukup mampu memahami dan menafsirkan hidup alami. Pasti bukan kebetulan kalau di dalam Kitab Suci Al-Quran Tuhan secara eksplisit memerintahkan manusia mempelajari ilmu pengetahuan.

Hasil pemahaman buku kedua Tuhan oleh ilmu pengetahuan ternyata mengingatkan nalar manusia tentang kebenaran ungkapan-ungkapan Ilahiah di dalam buku-buku pertama Tuhan. Ilmu fisika Abad XX mendeskripsikan awal alam semesta dalam term kosmologis yang praktis sama dengan yang tertulis dalam bahasa Alkitab dan bahasa Al-Quran. Ruang, waktu dan materi timbul dalam sebuah ledakan besar cahaya yang keseluruhannya baik bagi kehidupan berdasarkan karbon. Ada ungkapan-ungkapan dalam Al-Quran yang dahulu merupakan teka-teki kini menjadi jelas bagi pikiran manusia berkat pendalaman dan pengkajian ilmu pengetahuan modern. Arkeologi dan geologi modern menjelaskan pelipatan, pematahan dan pelekukan lapisan bumi yang berkaitan dengan pembentukan gunung dan lembah. Sejumlah yang semakin besar dari ilmuwan kimia dan ilmuwan biologi sepakat bahwa asal-usul hidup bersifat akuatis dan bahwa pada tanaman ada perbedaan dan kaitan seks dan mekanisme kausal dalam pertumbuhannya berhubungan dengan hal seks tersebut. Jadi penemuan-penemuan dari pendalaman buku kedua Tuhan yang dilakukan oleh ilmu pengetahuan secara mandiri dan terlepas dari buku pertama Tuhan tidak menggoyahkan ke-

imanan terhadap Tuhan bahkan nalar turut mengatakan dengan mantap *maha benar Allah dengan segala firmanNya*.

Demikianlah, demi *survival* kita mulai Abad XXI, tahap awal dari suatu zaman yang ditata dan dibentuk oleh ilmu pengetahuan beserta anaknya, teknologi, yang pasti penuh dengan perubahan dan peluang yang menantang secara cepat, kita harus masukkan ilmu pengetahuan sebagai nilai pemersatu dalam sistem nilai (budaya) kita. Ya, membina satu budaya berintikan ilmu pengetahuan untuk menghadapi zaman ilmu pengetahuan dan teknologi. Tidak ada lagi kebudayaan artistik di satu pihak, kebudayaan ilmiah di lain pihak, tidak ada 27 kebudayaan, yang ada, bukan sejumlah n kebudayaan, tetapi 1 budaya dengan n penerapan di bidang kehidupan apa pun, termasuk bidang kebudayaan. Dipandang dari sudut masyarakat dan kehidupan sebagai keseluruhan, budaya tetap merupakan sistem nilai, namun dilihat dari sudut manusia individual, berkat kehadiran semangat ilmiah, ia berupa sekaligus pengetahuan, pilihan hidup dan praktek komunikasi, suatu repertoar dari pegangan-pegangan yang menjadi pemandu/nilai efektif bagi kehidupannya di zaman iptek.

Para pendahulu dan perintis kemerdekaan kita telah menetapkan sikap dan mengambil langkah guna menanggulangi masalah zamannya. Generasi kita yang sekarang ini telah menilai tepat sikap dan langkah yang mereka pilih itu dan kita pun telah turut mengenyam, bahkan lebih banyak dapat menikmati hasil ketepatan dan keberanian pilihan tersebut. Maka sebagai penghargaan, hormat dan salut kita, kita akui semua itu sebagai suatu kebangkitan nasional. Zaman iptek kini mengajukan masalahnya sen-

diri kepada kita. Masalah zaman ini menantang jawaban dari kita dan pada jawaban yang kita bentuk dan pilih itu tergantung pula keadaan hidup dari generasi-generasi penerus mendatang. Merekalah nanti yang akan memberikan penilaian akhir mengenai tepat-tidaknya jawaban yang kita ambil sekarang. Merekalah, berdasarkan pengalamannya, akan memutuskan apakah jawaban kita itu secara riil benar-benar dapat dikualifikasikan sebagai kebangkitan nasional kedua dan bukan merupakan sekedar pembungkus yang indah dari isi yang sama sekali tidak relevan, tidak fungsional dan tidak efektif relatif terhadap masalah yang ingin ditanggulangnya. Saya pikir pembentukan satu budaya yang berintikan ilmu pengetahuan dapat sekali membuat isi ini menjadi sesuai dengan "keindahan" pem-

bungkusnya.

Perlu saya ingatkan bahwa walaupun kita memutuskan untuk menerima bentukan satu budaya, ini baru merupakan satu langkah awal, betapapun pentingnya dan beraninya langkah tersebut. Sesudah itu perlu ada langkah penyusul yang tidak kalah berani untuk menjawab pertanyaan yang tidak kalah penting, yaitu bagaimana meraih atau membentuk budaya yang satu itu?! Saya bukan ingin berhenti justru pada saat saya harus mulai, karena saya sudah lama memulainya, namun saya serahkan jawaban terhadap pertanyaan terakhir ini sebagai tantangan juga terhadap nalar Anda, terutama bagi mereka yang merasa terpanggil untuk mengabdikan di bidang pendidikan dan kebudayaan dalam arti yang luas.

KEPUSTAKAAN

Bachelard, Gaston. *La Formation de l'Esprit Scientifique*. Paris: J. Vrin, 1980.

Bronowski, J. *The Common Sense of Science*. Cambridge: Harvard University Press, 1978.

Caratini, Roger. *L'Année de la Science*. Paris: Seghers/Laffont, 1987.

Fichte, J.G. *The Science of Knowledge*. London: Cambridge University Press, 1982.

Fourastié, Jean. *Les Conditions de l'Esprit Scientifique*. Paris: Gallimard, 1966.

Gadner, Howard. *The Mind's New Science*. New York: Basic Books, 1979.

Henbest Nigel & Heather Cooper. *The Restless Universe*. London: George Hilip, 1982.

Joesoef, Daoed. *Plato, Pengetahuan, Ilmu Pengetahuan, Gnosis, Kawruh*. Ceramah di Lembaga Javanologi Yogyakarta, 10/1987.

-----, "Knowledge Economy and World Economy". *The Indonesian Quarterly*, Vol. II, No. 2 (Jan. 1974).

Kuhn, Thomas. *The Structure of Scientific Revolutions*. Chicago: The University of Chicago Press, 1970.

Laborit, Henri. *L'Homme Imaginant*. Paris: Union General d'Editions, 1970.

Minton, Arthur J. *Philosophy, Paradox and Discovery*. New York: McGraw-Hill Book Cy., 1976.

Piaget, Jean. *Main Trends in Interdisciplinary Research*. London: George Allen & Unwin Ltd., 1970.

Poincaré, Henri. *La Science et l'Hypothèse*. Paris: Flammarion, 1968.

Prigogine, Ilya. *From Being to Becoming*. San Francisco: Freeman, 1980.

Prigogine, Ilya & Stengers Isabelle. *Order Out of Chaos: Man's New Dialogue with Nature*. New York: Bantam Books, 1984.

Russell, Bertrand. *The Impact of Science on Society*. London: Unwin Paperbacks, 1976.

Scheurer, P. *Révolutions de la Science et Permanence du Réel*. Paris: Presses Universitaires de France, 1979.

Shills, Edward. "Faith, Utility and Legitimacy of Science", *Daedalus* (Summer 1974).

Weil, S. *Sur la Science*. Paris: Gallimard, 1966.

Dampak Globalisasi Bagi Transformasi Masyarakat

Bachtiar Aly

Pendahuluan

KETIKA filsuf Martin Heidegger mengungkapkan keberadaan manusia sebagai "Zusammen Sein", maka hidup bersama (bukan hidup gaya kumpul kebo!) adalah bermakna hidup secara berdampingan, hidup bersama-sama bukanlah hanya suatu realita belaka, tetapi ia merupakan sesuatu yang harus "diadakan" atau direkayasa dalam bahasa komunikasi politiknya.

Modus eksistensi manusia sebagai "ada bersama" dapat pula disebut sebagai suatu kodrat manusia sebagai makhluk sosial untuk berintegrasi dengan sesamanya, dengan lingkungannya dan bahkan melakukan komunikasi transendental dengan TuhanNya.

Kalau demikian halnya, maka kehidupan global yang sedang melanda manusia dewasa ini dan semakin lebih kompleks masalahnya menjelang penggantian *millennium* beberapa saat lagi, menyadarkan kita bahwa ke-

bersamaan eksistensial haruslah dipelihara, dimengerti dan dimanfaatkan untuk kepentingan umat manusia. Kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi menjadi hampa maknanya, apabila tidak didayagunakan demi peningkatan kesejahteraan umat manusia terutama menaikkan harkat dan martabatnya.

Kemajuan teknologi komunikasi adalah menjadi sia-sia apabila manusia bukan diantar ke tempat yang lebih benderang, melainkan tersesat atau disesatkan oleh suguhan informasi yang pada hakekatnya tidak dibutuhkan dalam kehidupannya.

Kemampuan masyarakat untuk dapat mengerti kebijakan pemerintah dan keandalan aparat pemerintah menyampaikan misi pembangunan kepada masyarakat, merupakan faktor yang harus diperhitungkan dalam mengukur partisipasi masyarakat di dalam pembangunan bangsa dan negara.

Sejauh mana pemahaman kita tentang arti pentingnya informasi dan komunikasi, baik bagi kepentingan pembangunan mau-

pun kemampuan kita menghadapi tantangan dari luar, tidak dapat diabaikan wawasan kita bahwa salah satu kebutuhan primer pembangunan masyarakat Indonesia abad XXI, adalah menyajikan informasi dan komunikasi sebagai tak tertampikan (*basic needs*).

Kebersamaan Informasi

Belum sampai kita melampaui tahun 2000, liku-liku kehidupan yang penuh tantangan terus menghadang di depan kita; aktivitas kemasyarakatan semakin majemuk ragamnya; perubahan sistem nilai silih berganti. Kemajuan ke arah peningkatan kualitas hidup yang tidak hendak dihalangi, pada hakekatnya merupakan transformasi idea yang menjadi kebutuhan manusia *par excellence* yang kita sebut: Informasi.

Perbincangan cendekiawan, perdebatan kaum politisi, analisa para ekonom, kajian kaum teknokrat, kritik ahli media massa, imbauan golongan parlementaria, keikutsertaan wiraswastawan untuk berpartisipasi dalam kehidupan berbangsa dan bernegara sangat ditentukan oleh: Informasi.

Tidak pernah luput pembahasan-pembahasan di forum nasional dan perbincangan di fora internasional tentang berbagai masalah yang memerlukan informasi. Upaya pemerintah menaikkan taraf hidup rakyat yang dikaitkan dengan masalah keadilan sosial, mengubah kebiasaan dan orientasi menjadikan masyarakat bukan sebagai obyek tetapi sebagai subyek pembangunan memerlukan bekal informasi.

Kesiapan kita sebagai bangsa berperan dalam era teknologi canggih mutakhir dengan program tinggal landas pada pelita-

pelita mendatang; peranan BUMN dan swasta yang semakin besar dalam pembangunan; kejelian para pengusaha melaksanakan diversifikasi usaha secara efisien dan profesional; kesemuanya itu hanya dapat terselenggara apabila dibekali dengan: Informasi.

Kebutuhan informasi yang akurat benar sangat diperlukan bagi masyarakat yang sedang membangun dan bahkan oleh masyarakat maju sekalipun. Suatu situasi inovasi dan kreatif hanya akan tercipta manakala bertambah kesadaran masyarakat bahwa apapun idea yang disampaikan kepada pemerintah akan ditolerir dan tidak dicurigai bahkan didorong untuk secara profesional memperoleh pemecahan yang pantas.

Suasana keterbukaan yang diprakarsai oleh kepala negara patutlah dipandang dari sisi yang lain sebagai modal penting dalam upaya kita mengantisipasi perkembangan dalam segala dimensinya.

Meskipun terasa "keterbukaan" sedang mengalami pasang surut dalam implementasinya tetapi semangat dan esensinya tidak boleh pudar, karena itu kemampuan kita berkomunikasi dengan sesama, baik secara vertikal dan horizontal haruslah tetap dipelihara dengan baik.

Informasi yang begitu majemuk kini mengalir deras dari hulu ke muara melalui berbagai saluran, ada yang memperolehnya secara tersendat-sendat, ada yang mendapatkannya sangat banyak hingga bingung menggunakannya dan ada pula yang hampir tidak memperoleh informasi dan menjadikannya buta informasi.

Pola perolehan informasi dari negara maju ke negara berkembang pada dua dekade terakhir ini semakin mendapat sorotan.

Dirasakan adanya ketimpangan-ketimpangan arus informasi yang perlu cepat diantisipasi karena ia sangat mempengaruhi upaya sosialisasi masyarakat global yang diyakini sebagai kehendak zaman. Membentuk kehidupan masyarakat dunia yang lebih baik, saling membantu, memahami aspirasi masing-masing dan mempunyai tekad bersama untuk menciptakan tata kehidupan dunia yang damai-sejahtera merupakan komitmen yang ingin dicapai.

Perubahan yang terjadi kini adalah kecenderungan-kecenderungan yang melampaui teritorial negara, lepas dari masalah ideologi yang sarat konflik, proses perubahan tampak lebih transparan, gagasan-gagasan yang muncul menitik beratkan kepada upaya integrasi "hidup berdampingan" sebagai refleksi "ada dalam kebersamaan" termasuk kebersamaan informasi.

Mengantisipasi Ketimpangan Informasi

Perspektif masa depan bagi bangsa-bangsa di dunia diukur dengan penguasaan teknologi komunikasi. Gambaran umum yang tercakup dalam pengertian era informasi meliputi pengertian "abad komputer dan informatika", "pembentukan bank data" (*data base*), mengoptimalkan telekomunikasi, satelit siaran langsung (*direct broadcastsystem*), penggunaan HDTV, flat-screen video display, teknologi pengenalan suara dan aksara (*voice and character recognition*), pengembangan kecerdasan buatan (*artificial intelligence*), camera ready copy, video display terminal, dan lain-lain yang dirangkum dengan komunikasi komputer kendali.

Masyarakat informasi menurut Rogers

adalah mayoritas terdiri dari para pekerja informasi, mencari nafkah dengan informasi. Kegiatan utamanya adalah mengumpulkan, mengolah, memproduksi, mendistribusikan informasi serta menciptakan teknologi informasi.

Dengan teknologi komunikasi diharapkan akan mampu mengkoordinir dan mengaitkan berbagai aspek kegiatan manusia dalam suatu jaringan pelayanan terpadu.

Gelombang Ketiga (*the third wave*) -nya Alvin Toffler mencoba menjungkirbalikkan realita kehidupan manusia berbudaya. Perubahan total segera dimulai, yang lengah atau tidak siap akan tersingkirkan dan disingkirkan oleh kemajuan zaman. Revolusi informasi yang mengubah gaya hidup manusia modern disebut juga olehnya sebagai "era super industrialisasi".

Kemungkinan teknologi komunikasi membawa perubahan-perubahan pola tingkah laku masyarakat. Eksistensinya Pemuka Masyarakat (*opinion leaders*) akan terancam manakala ia tidak terus meningkatkan wawasan informasi yang lebih, dibandingkan dengan masyarakat sekelilingnya. Perannya masih sangat diperlukan dalam membantu masyarakat untuk lebih memahami masalah dunia dan akhirat.

Tidak kurang dari Daniel Bell yang mengamati perubahan dasar di berbagai bidang kehidupan masyarakat, terutama kesiapan kalangan profesional teknis. Ilmu pengetahuan perlu secara cepat didistribusikan, ia menjadi komoditi yang banyak menghasilkan pekerja pengetahuan seperti diungkapkan oleh Fritzt Machlup atau kekuatan ekonomi yang mengoptimalkan kegunaan informasi seperti dilansir oleh Marc Porat dan para pakar lainnya. Termasuk kecenderungan

masa depan John Naisbitt dengan *Mega-trends* yang paling banyak diperbincangkan orang dari warteg sampai petinggi negara.

Dampak kemajuan teknologi komunikasi sangat mempengaruhi pola hidup bangsa-bangsa. Dampak media massa tidak kecil dalam masyarakat kita yang masih hidup dalam tiga tahapan gelombang. Pemahaman terhadap tradisi masyarakat di pedalaman, kebiasaan masyarakat di pedesaan dan pola hidup masyarakat industri serta kemudahan-kemudahan yang diperoleh masyarakat informasi, perlu disesuaikan dengan model-model komunikasi dengan efek yang ditimbulkan.

Era globalisasi dalam berbagai bidang membawa dampak yang besar pada arus informasi internasional. Informasi menjadi komoditi yang diperdagangkan melampaui batas-batas negara. Perlu disadari arus informasi yang mengalir dari suatu negara ke negara lain tidaklah semata-mata merupakan pasaran informasi bebas. Ia tergantung banyak hal, antara lain pada pemilikan alat-alat informasi. Seperti yang juga terjadi pada dunia ekonomi, negara-negara besar pemilik modal memiliki teknologi komunikasi yang canggih, otomatis menjadi penguasa informasi. Sementara negara-negara berkembang semakin tergantung pada negara-negara maju. Hal ini karena keterbatasan mereka menguasai piranti keras teknologi. Kantor-kantor berita internasional merupakan pengendali berita-berita internasional.

Bukanlah suatu kebetulan bahwa empat negara yang mendominasi pemberitaan adalah pemilik kantor berita dunia: *International and Associated Press* adalah kantor berita AS, *Reuter* (Inggris), *Agence France Press* (Perancis), dan *Tass* (Uni Soviet).

Dalam pemberitaan mereka tentunya mengutamakan berita-berita mengenai negara mereka sendiri: AP dan UPI berkonsentrasi pada Amerika Serikat, TASS pada Uni Soviet, Reuters pada Inggris dan Amerika Serikat, AFP pada Amerika Serikat, Inggris, Uni Soviet, dan Perancis dan DPA melansir berita negara Jerman.

Bahkan formula Lasswell yang dikenal dengan 5W1H juga berasal dari negara industri. Berita-berita dunia lain yang mereka produksi adalah berita-berita yang tidak biasa di mata mereka seperti pemberontakan revolusi berdarah, gunung meletus, banjir yang memakan korban dan lain-lain. Berita-berita ini menjadi sesuatu yang menarik bagi masyarakat negara maju karena kelangkaannya. Meskipun akibatnya citra negara berkembang semakin babak belur karena berita Katastrofal (malapetaka) dan korupsi.

Situasi ini dimungkinkan mengingat bahwa negara-negara maju memiliki segalanya, seperti senjata nuklir, kondisi ekonomi yang kuat, kemajuan sains dan teknologi, dan lain-lain. Penting bagi negara-negara berkembang untuk mengantisipasi kemajuan yang cepat ini. Karena kemajuan itu sendiri berkiblat pada perkembangan di negara-negara maju. Secara tidak disadari apapun yang terjadi di negara maju akan selalu menarik perhatian negara-negara berkembang.

Penguasaan terhadap teknologi komunikasi juga memungkinkan memproduksi berita dengan persepsi yang menguntungkan versi mereka yang mengolah bahan mentah informasi untuk dikirim kembali ke negara-negara berkembang sesuai dengan kepentingan dan pengamatan mereka.

Terbaikannya kepentingan negara-negara berkembang adalah karena struktur

interaksi feodal yang juga terjadi dalam berbagai bidang yang tak mampu menghindari "produksi" negara-negara maju. Negara-negara Dunia Ketiga berusaha menciptakan tata informasi dan komunikasi dunia baru (*New International Communication of International Order*). Langkah ini penting bagi pembangunan negara-negara Dunia Ketiga. Seringkali negara berkembang dihadapkan pada pilihan-pilihan pembangunan dari negara-negara maju dengan model-model pembangunan yang sebenarnya hanya cocok diterapkan di negara industri. Pembangunan di negara berkembang akan lebih berhasil bila berusaha menerapkan model pembangunan yang sesuai dengan kondisi yang ada di negara itu.

Guna memahami ketidakseimbangan yang terjadi pada arus informasi internasional, sekurang-kurangnya ada dua teori yang dapat digunakan: Pendekatan Struktur Interaksi Feodal Galtung dan teori Arus Informasi Internasional dari Al Hester.

Teori Galtung bertitik tolak pada dua asumsi: bahwa ada ketimpangan arus informasi dunia sebagai konsekuensi logis dari ketimpangan dan ketidakmerataan yang terjadi mengakibatkan negara-negara di dunia ini terdiri dari *Center* (pusat) dan *Periphery* (tepi atau pinggiran).

Seperti terjadi dalam berbagai bidang, hubungan yang terjadi antara Center dan Periphery adalah mengikuti berbagai Struktur Interaksi Feodal.

Struktur ini mengembangkan ketimpangan dengan menggariskan empat macam aturan yaitu pertama hubungan pusat dan pinggiran bersifat vertikal, yakni dari pusat ke pinggiran, kedua hubungan antar pinggiran tidak ada sehingga terasing satu sama lain, ketiga hubungan ganda antar pinggiran

tidak ada karena dimonopoli oleh Pusat dan terakhir hubungan dengan dunia luar menjadi monopoli Pusat.

Adanya perbedaan posisi inilah, yang memungkinkan kantor-kantor berita raksa-sa seperti AP, UPI, Reuters, AFP, dan TASS dapat menguasai dunia. Struktur yang ada menyebabkan informasi yang mengalir menjadi tidak seimbang, berat sebelah. Informasi yang mengalir dari Pusat ke Pinggiran menjadi begitu besar sementara arus sebaliknya hanya bervolume kecil. Negara-negara pinggiran menampung begitu banyak informasi mengenai negara-negara Pusat. Tragisnya tidak terdapatnya hubungan antara negara Pinggiran, apalagi antara negara yang berbeda blok. Karena itu informasi mengenai negara Pinggiran tidak diperoleh melalui pertukaran secara langsung tetapi dengan perantaraan Pusat.

Pengamatan Galtung menyimpulkan bahwa tata komunikasi dunia dalam bentuk Struktur Interaksi Feodal merupakan imperialisme komunikasi. Struktur yang timpang ini bukan sekedar masalah informasi dan komunikasi tetapi juga meliputi wilayah budaya sosial politik, ekonomi, dan keamanan.

Dalam tulisannya berjudul *International Information Flow*, Al Hester menerangkan mengenai empat kemungkinan mengalirnya arus informasi internasional secara langsung. *Pertama*, antara individu yang berbeda bangsa; *kedua*, melalui satu rantai yang panjang dengan kemungkinan berubahnya volume maupun isi pesan; *ketiga*, informasi mengalir langsung kepada pembuat keputusan nasional; *keempat*, informasi mengalir kepada masyarakat umum atau pada publik khusus yang tertarik pada sejumlah informasi tertentu.

Informasi merupakan barang mental

yang mesti dicerna dan diinterpretasikan, Informasi dipertukarkan dalam sistem-sistem nasional, kemudian diproses untuk melindungi eksistensi sistem. Hal ini sesuai dengan fungsi komunikasi menurut Lasswell yaitu *Surveillance of the Environment* (pengawasan lingkungan).

Adanya pengawasan dan pengamatan yang cermat terhadap kondisi lingkungan internasional menjadikan segala perubahan yang terjadi dapat diantisipasi dengan cermat dan tepat waktu.

Adanya hirarki bangsa-bangsa, aktivitas kultural, dan hubungan ekonomi. Dipersepsikan oleh Al Hester dengan adanya hirarki dalam hubungan antar bangsa, menyebabkan negara-negara kecil membutuhkan informasi yang cukup banyak, guna dapat mengamati negara-negara besar supaya tidak keliru dalam menginterpretasikannya atau semakin terjatuh menjadi satelitnya.

Faktual informasi yang mengalir dari negara-negara besar ke negara-negara kecil jauh lebih besar daripada sebaliknya. Beberapa faktor yang menyebabkan terciptanya "level" hubungan antar negara, seperti faktor kesejarahan, geografis, populasi, eksistensi kedaulatan termasuk berapa lama telah merdeka, kekuatan militer, pembangunan ekonomi, dan kemampuan penguasaan teknologi, merupakan faktor yang menentukan.

Informasi mengenai negara yang secara potensial dapat menjadi ancaman bagi negara lain juga merupakan hal yang penting. Peragaan kekuatan melalui peningkatan arus informasi ke negara yang kurang mampu dapat dipandang sebagai suatu ancaman di bidang komunikasi. Di pihak lain aktivitas kultural lebih banyak menentukan hubungan yang terjadi karena kedekatan budaya.

Kesamaan budaya seperti bahasa, jumlah imigran yang terdapat antara wilayah, jumlah perkawinan antara bangsa, hubungan antara negara dan bekas jajahannya atau terjalannya hubungan intensif antara negara maju dengan yang sedang berkembang, menjadikan arus informasi dipertukarkan menjadi lebih besar, karena terjadinya secara terus menerus hubungan komunikasi.

Sedangkan hubungan ekonomi yang kuat antar dua negara dapat menyebabkan banyaknya informasi yang "dikomersilkan". Arus informasi dari pihak yang kuat akan mengalir kepada negara-negara *dependent* lebih banyak daripada yang terjadi sebaliknya.

Pada kenyataannya bahwa lebih banyak keragaman dan volume informasi yang mengalir dari negara *high ranking* daripada dari negara *low ranking*.

Arus informasi yang mengalir dari negara yang dianggap sebagai ancaman lebih besar daripada yang tidak dianggap ancaman. Dengan adanya kedekatan historis dan kultural di antara negara-negara maka akan lebih besar mengalirnya arus informasi dibandingkan dengan negara yang tidak mempunyai kedekatan semacam itu.

Arus informasi dari negara maju ke negara berkembang ternyata lebih besar daripada sebaliknya, dan kemampuan untuk mentransfer informasi sangat tergantung pula pada posisi dan ranking sesuatu negara dalam percaturan internasional.

Pendekatan Strategis

Ketimpangan dan kegagalan pembangunan di banyak negara disebabkan antara lain mengabaikan faktor informasi dan

komunikasi yang merupakan bagian integral dari suatu perencanaan pembangunan. Indikasi ketimpangan informasi yang perlu kita upayakan untuk diatasi meliputi berbagai aspek strategis. Aspek politik, misalnya ketidaksamaan sumber-sumber informasi, tidak tersedianya porsi yang cukup untuk berita-berita dunia berkembang dalam media negara maju, pesan-pesan yang tidak sesuai dengan kawasan di mana pesan tersebut disebarluaskan. Dari aspek hukum masih terlihat ketimpangan seperti kebebasan memperoleh informasi dan menginformasikan, serta ketidakefektifan hak koreksi dan hak cipta seperti juga hak akan akses terhadap sumber-sumber informasi. Belum lagi tarif telekomunikasi yang cukup mahal. Semoga saja dengan menjadi Ketua KTT Non Blok Indonesia dapat berbuat banyak untuk hal ini. Memasuki era industrialisasi dalam pelita-pelita berikutnya, maka peranan pemuka masyarakat dan kaum cendekiawan sangat menentukan dalam menyukseskan pembangunan nasional di segala bidang.

Kemampuan menangani dampak sosial budaya akibat kemajuan teknologi, serta bagaimana menggerakkan organisasi fungsional dan swadaya masyarakat untuk berpartisipasi dalam proses reformasi sangat tergantung antara lain oleh faktor bagaimana sistem komunikasi kita secara terpadu dapat didayagunakan secara optimal.

Hubungan kerja sama dengan pemuka masyarakat (*opinion leaders*) adalah semakin menjadi penting karena melalui penyampaian pesan kepada pemuka masyarakat untuk disampaikan kepada masyarakat telah terjadi proses komunikasi dua arah dalam artian yang sesungguhnya.

Pendekatan secara sosio-psikologis dan kultural kiranya dapat dilakukan guna men-

capai sasaran yang diharapkan.

Pendekatan sosio-kultural bukan saja akan menghindari konflik yang tidak perlu, tetapi lebih dari itu anggota masyarakat mempunyai rasa aman, bahwa nilai-nilai luhur yang dimuliakan dalam kehidupannya tetap mendapat tempat yang pasti dan terhormat.

Dalam menjalankan fungsi-fungsi penerangan, hiburan, pendidikan umum, dan kontrol sosial, maka wadah penyalur aspirasi masyarakat, dan media massa seharusnya menjadi wahana bagi pembinaan pendapat umum yang sehat. Hal mana sejalan dengan kondisi di tanah air dewasa ini di mana pemerintah berharap agar masyarakat tidak terpancing oleh pemberitaan-pemberitaan, atau isu-isu yang mengkritik kebijaksanaan pemerintah.

Apapun kritik yang dilontarkan perlu mendapat saluran bukan saja secara konstitusional melainkan dapat menjadi bahan diskusi dan pembahasan dari media komunikasi yang ada. Sesuatu kejadian atau peristiwa di masa lalu, pemerintah kadangkala cukup dibuat grogi di dalam memberikan penerangan kepada masyarakat terhadap kebijaksanaan yang ditempuh. Sehingga seringkali media komunikasi kita hanya memberikan sebagian dari fakta dan "sepotong cerita kebenaran". Akibatnya, masyarakat tetap bertanya-tanya untuk mencari tahu membaca ulasan pers dari luar negeri serta menjadi pendengar setia dari radio BBC, ABC, atau radio Australia dan bahkan siaran dari benua lain. Hal ini mengakibatkan politik media komunikasi pemerintah perlu lebih ditata lagi.

Media massa kita harus lebih mampu merebut kepercayaan masyarakat dengan tetap menjaga integritas dan kredibilitas

dirinya. Dengan demikian saling pengertian dan integrasi sosial dapat tercapai sesuai dengan kerangka kerja dan konsepsi bernegara dan berbangsa.

Perlu selalu kita sadari bahwa komunikasi akan berhasil apabila pesan yang disampaikan komunikator sesuai, cocok dengan kerangka acuan (*frame of reference*) dari komunikasi, yakni paduan pengalaman dan pengertian yang pernah diketahui dan diperoleh oleh komunikan.

Masyarakat Indonesia telah memiliki potensi yang dahsyat untuk didayagunakan bagi kepentingan bangsa dan negara seperti misalnya keandalan ABRI dalam mengamankan proses dan hasil pembangunan kita.

Salah satu indikasi kemajuan suatu negara ditandai dengan telah berfungsinya sistem komunikasi yang bukan lagi arus informasi datang dari atas, melainkan juga timbul dari bawah.

Kesimpulan

Zaman yang menjanjikan banyak harapan dan sedang berlangsungnya perubahan dalam tata kehidupan dunia ini, memerlukan pemahaman yang integral. Perkembangan global yang sedang berlangsung kiranya dapat dipahami sebagai kemampuan manusia memanfaatkan ilmu pengetahuan dan teknologi yang sesungguhnya diperlukan bagi kepentingan kelangsungan kehidupan kemanusiaan.

Kemajuan teknologi tidak dapat ditampik, ia harus diantisipasi dengan upaya menguasai teknologi itu sendiri. Adalah akan sia-sia negara berkembang untuk mengharap suatu alih teknologi secara sukarela dari negara-negara maju, apalagi

mengharapkannya dengan gratis tanpa upaya dan daya untuk merebutnya.

Tingkat pengetahuan dan latar belakang sosial budaya yang beraneka ragam dapat dijumpai dengan pemahaman yang lebih baik tentang hakekat informasi dan pentingnya komunikasi, sehingga khalayak terhindar dari kesimpangsiuran yang membingungkan.

Penanggung jawab dan pengelola media komunikasi harus selalu awas dan tanggap terhadap aspirasi yang berkembang dalam masyarakat; serta mempunyai pengetahuan sosial budaya, dan ekonomi yang baik demi memudahkan analisa masalah masyarakat dan pengkajian aspek kehidupan serta latar belakang masyarakat sehingga sasaran komunikasi dapat lebih terarah.

Transformasi masyarakat dengan menyertakan tujuan komunikasi adalah tercapainya perubahan sikap (*attitude change*) dari masyarakat dan bahkan dari penyelenggara negara sekalipun. Sikap apatis, masa bodoh mau menang sendiri, sok kuasa, hidup bergaya feodal, pamer kemewahan, apriori, mau cepat sukses tanpa kerja keras, memerlukan serangkaian upaya kita untuk mengubahnya. Yaitu, menggeser pola kehidupan santai dan konsumtif, menjadi lebih disiplin, berkesadaran tinggi dan produktif.

Tujuan komunikasi selanjutnya adalah mempercepat proses perubahan pendapat (*opinion change*). Pendapat yang tidak berdasarkan data yang akurat, akan menyesatkan pemerintah di dalam memberikan penerangan kepada masyarakat.

Sikap sementara masyarakat yang sinis melihat gerak pembangunan akibat eksese yang ditimbulkan oleh segelintir penyelenggara kekuasaan, dan pendapat masyarakat (bahwa) usaha pemerataan hanya slogan

belaka, adalah merupakan tantangan bagi cendekiawan untuk meletakkan pada proporsi yang sebenarnya.

Dari perubahan sikap dan pendapat, maka tujuan komunikasi adalah menjabarkan bagaimana perubahan perilaku (*behaviour change*), dapat dicapai sehingga pola tingkah laku yang mendukung modernisasi dapat menjelma menjadi perubahan sosial (*social change*) : hal ini merupakan unsur penting di dalam upaya kita memasuki era industrialisasi dengan tetap menjaga kelestarian di bidang budaya agraris.

Sistem nilai kita mengisyaratkan bahwa bagaimanapun baiknya sesuatu *messages* ia tidak akan memperoleh efek yang sesuai dengan *frame of reference* komunikator apabila disampaikan melalui *channel* yang

tidak tepat.

Dengan kata lain isi pesan itu boleh saja sangat konseptual dan mempunyai nilai substansi yang tinggi, tetapi begitu cara menyampaikannya keliru atau tidak komunikatif dan mengabaikan tata krama ketimuran, maka hampir dapat dipastikan baru saja berlangsungnya "proses" komunikasi sudah kandas di tengah jalan. Kesalahpahaman (*noise*) tak dapat dihindari, jikalau rambu-rambu komunikasi (*simbols*) tidak dimengerti.

Refleksi dari situasi ini menjadikan kita lebih berhati-hati kalau menghendaki tercapainya sasaran yang diinginkan. Berbagai faktor esensial dan pendukung tidak boleh luput dari pengamatan kita.

KEPUSTAKAAN

- Hoehne, Hansjoachim. *Report ueber Nachrichten-agenturen, Band 1 und 2*. Baden-baden, 1977.
- Themenheft von. "International Communication and the Third World Participation," *Gazette*, Jg. 24/1978, Nr. 1, S. 1-95.
- MacBride-Kommission. *Viele Stimmen-eine Welt*. Bonn/Konstanz: Deutsche UNESCO Kommission, 1981.
- Naisbitt, John. *Megatrends*. New York: Warner Book, 1982.
- Rogers, E.M. *Communication Technology: The News Media in Society*. New York, 1986.
- Toffler, Alvin. *The Third Wave*. New York: Bantam Book, 1981.
- William, F. *The Communication Revolution*, New York: 1982.
- Abshire, David M. *International Broadcasting: A New Dimension of Western Diplomacy*. Beverly Hills/London: Sage Publications 1976 (The Washington Papers 35).
- Aly, Bachtar. *Geschichte und Gegenwart der Kommunikationssysteme in Indonesien*. Peter Lang, Frankfurt am Main, Bern, New York, 1984.
- Bell, Daniel. "Communication Technology," *Harvard Business Review* (LXX), 3, 1979.
- Charyk, J.P. *Development of Information and Telecommunication System, Telematics and Informatics*: 1984.
- De Fleur, Melvin/S.B. Rokeach. *Theories of Mass Communication*. New York, 1975.

Dimensi Ideologi dan Politik*

A.M.W. Pranarka

MUNCULNYA gagasan yang dituangkan dalam berbagai penerbitan, seperti *Powershift* dari Alvin Toffler, *Power Management* dari Brewer, Ainsworth dan Wynne, *Managing in Turbulent Time* dari Peter Drucker, serta *The Strategy of Mastering Change*, nampaknya merupakan bagian dari gelombang perubahan besar yang sedang terjadi di dunia dewasa ini.

Kesadaran sejarah manusia menjadi makin meningkat dan dipacu untuk menjawab pertanyaan sekitar ke manakah arah sejarah, karena manusia melihat sejarah sebagai perubahan. Manusia melihat perubahan itu terjadi karena adanya kekuatan yang menggerakkan dan mengubahnya. Mengenal kekuatan dan mengubah sejarah, terutama menguasai dan mengelolanya merupakan kebutuhan yang makin dirasakan urgensinya.

*Makalah ini disajikan dalam Seminar Sehari, Peringatan 20 Tahun CSIS, "Menuju Satu Kebudayaan? Nasionalisme dan Internasionalisme di Persimpangan Jalan," yang diselenggarakan di Jakarta, 28 Agustus 1991.

Kesadaran sejarah bukanlah hal yang baru. Evolusionisme yang menggelombang beberapa abad lalu telah mengawali proses tersebut. Manusia telah lama ingin menemukan hukum evolusi alam semesta maupun evolusi masyarakat dan kebudayaan. Auguste Comte, bapak sosiologi modern, bercita-cita membangun ilmu mengenai masyarakat untuk mengenali hukum-hukum yang mengatur gerak gelombangnya masyarakat. Demikian pula halnya dengan Karl Marx. Ia berusaha membangun pemahaman ilmiah mengenai sejarah dan masyarakat, dan lebih daripada itu bercita-cita untuk menguasai arah sejarah dan mengelola perubahan.

Gejala membesarnya perhatian manusia terhadap arah sejarah dan penguasaan atas kekuatan-kekuatan yang membentuk sejarah itu menunjukkan, bahwa alam pikiran manusia nampaknya telah menjadi semakin bersifat ideologik. Saat itu ada gejala terjadinya transformasi pemikiran dari suasana ilmiah ke suasana ideologi.

Melalui perkembangan dan pengembangan ilmu, manusia berupaya menjawab

pertanyaan: *What do you know?* Akan tetapi melalui pengembangan dan perkembangan ideologi, manusia bergumul untuk menjawab pertanyaan: *What do you want?* Kemauan manusia untuk mengenal kekuasaan sebagai kekuatan sejarah dan perubahan supaya dapat mengelola dan menguasainya, tentulah lebih menampilkan dimensi ideologi daripada dimensi ilmiah.

Dalam ideologi, manusia bergumul dengan konsepsi dan sekaligus dengan aksi, serta dengan aspirasi dan sekaligus juga dengan kekuasaan. Konsepsi dan aspirasi dapat dipandang merupakan aspek kognitif dan psikomotoriknya, sementara aksi dan kekuasaan adalah wahana melalui mana manusia berjuang dengan konsepsi dan aspirasi itu agar dapat menemukan wujud yang aktual dan struktural.

Ideologi

Kalaupun melalui ideologi manusia bergumul dengan pertanyaan *What do you want*, tidaklah berarti bahwa ideologi merupakan suatu konsep yang sederhana. Ideologi telah tumbuh menjadi konsep yang majemuk dan juga bergerak terus.

Dalam bukunya yang berjudul *Histoire des Ideologies*, Chatelet mengatakan *l'ideologie est, a tout le moins, une notion confuse*. (Ideologi, sedikit-banyak, adalah suatu gagasan kabur) Betapa tidak, menurut Ludwig Feuerbach, ideologi adalah representasi kolektif dan proyeksi imajiner dalam situasi yang sama sekali berlawanan, karena itu tidak mungkin terwujud. Karl Marx menggambarkan ideologi sebagai sistem intelektual, legitimasi moral dan bagaikan semerbaknya alam spiritual berupa alat ciptaan penguasa untuk mempertahankan ke-

kuasaannya terhadap kelas yang dikuasai. Dengan kata lain, ideologi merupakan payung ataupun bangunan atas dari struktur kekuasaan. Sedangkan bagi Althusser, ideologi adalah retorika yang tidak mungkin menjadi legitimasi konseptual, dia hanyalah ekspresi ataupun rumus untuk menutupi pamrih maupun kepentingan suatu kelompok atau kelas tertentu dalam masyarakat dan lain sebagainya.

Namun apabila kita memperhatikan sejarah konsep-konsep ideologi selama zaman modern ini, dapatlah dikatakan bahwa ideologi mencakup konsepsi dan aspirasi kolektif, yang berorientasi pada aksi, untuk menjadikan aspirasi dan konsepsi tersebut menjadi aktual terwujud melalui struktur kekuasaan. Maka ideologi itu akan selalu mempunyai hubungan dengan aspek kognitif intelektual, aspek psikomotorik emosional, dan kekuasaan sebagai aspek struktural. Dengan perkataan lain, ideologi menyentuh bukan hanya kekuatan intelektual manusia melainkan juga manusia secara total.

Ketika Destut de Tarcy menggunakan istilah ideologi untuk pertama kalinya, nampaknya unsur-unsur aspirasi dan konsepsi dan bahkan unsur kekuasaan juga sudah mewarnainya. Dipengaruhi oleh alam pikiran Aufklärung serta diresapi aspirasi aliran idealisme untuk membangun satu sistem intelektual yang semesta, memang terbawa pula keinginan agar dapat menguasai dan mengelola segala sesuatu. Tujuan dan cita-citanya adalah menguasai dan mengelola semesta. Karena semesta itu merupakan proses dan produk dari gagasan dan wawasan, maka perlu dibangun satu ilmu yang memuat segala gagasan dan wawasan. Melalui ilmu itu, yang olehnya disebut ideologi, semesta tidak saja dapat dipahami akan tetapi

juga dikuasai.

Aspek konsepsi, aspirasi dan kekuasaan jelas menjadi makin kentara dalam konsep yang diketemukan oleh Karl Marx. Namun motivasi dasarnya kiranya sama: Marx ingin menemukan sistem intelektual melalui mana dapat diketahui hukum masyarakat dan kemudian dapat menguasai serta mengelola arah sejarah masyarakat itu.

Marx melihat evolusi masyarakat terjadi dalam sejarah, yang dibentuk oleh benturan-benturan kekuatan yang satu melawan yang lain, kekuasaan yang satu melawan yang lain. Marx melihat ekonomi sebagai basisnya struktur kekuasaan. Apabila kekuasaan telah menjadi struktural, maka penguasa berusaha mempertahankan kekuasaannya melalui upaya membangun berbagai sistem. Sistem yang memayungi kekuasaan ini, yang disebut sebagai suprastruktur kekuasaan, meliputi antara lain ilmu pengetahuan, filsafat, politik, hukum, agama dan ideologi.

Konsep Masyarakat, Negara dan Kekuasaan yang Diperjuangkan

Dari ulasan sekilas di atas dapat dikemukakan bahwa ideologi akan selalu memuat konsep masyarakat, konsep negara, dan konsep kekuasaan yang menjadi cita-cita perjuangan. Ideologi dapat menjadi konsepnya *establishment*, tetapi juga dapat menjadi konsepnya *anti-establishment*.

Sejarah ideologi mengungkapkan betapa manusia telah melakukan petualangan sejarah melalui konsep-konsep masyarakat, negara dan kekuasaan. Ada saatnya manusia hanya melihat pada faktor-faktor yang membentuk kekuasaan, dan kemudian membuatnya menjadi cita-cita dan konsep

tunggalnya. Ada juga saat manusia melihat bahwa kekuasaan itu menyangkut manusia dan masyarakat, sehingga manusia bertanya: untuk siapakah kekuasaan itu dan untuk apa kekuasaan itu? Tetapi ada saat pula manusia memusatkan perhatian pada kekuasaan yang tertinggi atau hal kedaulatan, sehingga manusia bertanya: untuk siapa, di tangan siapa, untuk apa dan bagaimana struktur dan legitimasinya?

Sekilas Singkat Sejarah Ideologi Modern

Dari Sejarah Eropa kita dapat melihat bagaimana manusia ternyata harus mengalami pergumulan panjang dalam petualangan di medan ideologi. Zaman Modern yang merupakan gelombang reaksi terhadap kejenuhan sistem masyarakat, negara dan kekuasaan dalam Abad Pertengahan telah melahirkan ideologi yang pada dasarnya anti agama dan anti monarki. Muncullah dalam tahap awalnya ideologi-ideologi pengetahuan. Konsep sistem kekuasaan yang dibangun atas dasar ideologi keagamaan digantikan dengan konsep sistem kekuasaan yang dibangun atas dasar pengetahuan manusia. Cha-telet menyebut ini sebagai arus gelombangnya "l'ideologie de savoir, the ideology of knowledge". Manusia melihat pengetahuan sebagai satu-satunya faktor penentu dalam segala sesuatu. Sistem kekuasaan harus dibangun atas pengetahuan, dan segala sesuatunya haruslah ditunjukkan, dikuasai dan dikelola oleh pengetahuan. Dengan kata lain, pengetahuan menjadi faktor legitimasi.

Dari ideologi pengetahuan itu, muncul arus-arus konsepsi dan aspirasi seperti misalnya: rasionalisme, idealisme dan positivisme. Rasionalisme mengaspirasikan agar masyarakat, negara dan sistem kekuasaan di-

bangun atas dasar ratio sebagai satu-satunya acuan. Idealisme merupakan konsep dan aspirasi yang mencita-citakan sistem semesta yang bersifat total berdasarkan atas gagasan. Sedangkan positivisme membawakan konsep dan aspirasi untuk membangun sistem masyarakat, negara dan kekuasaan atas dasar ilmu pengetahuan sebagai satu-satunya acuan. Dalam perkembangan seperti itu, ratio, gagasan dan ilmu telah dijadikan ideologi.

Memudarnya ideologi Abad Pertengahan yang dibangun atas dasar ideologi keagamaan dan monarki dengan sendirinya menguatkan kesadaran akan kemerdekaan dan posisi individu. Karenanya kelahiran Abad Modern pada awalnya juga memacu tumbuhnya sistem kekuasaan dan konsep serta aspirasi kemasyarakatan dan kenegaraan yang dibangun atas dasar kemerdekaan dan individu sebagai acuan tunggalnya. Maka, lahirlah gelombang ideologi liberalisme dan individualisme.

Memudarnya ideologi keagamaan dan tumbuhnya ideologi-ideologi anti ideologi keagamaan menyebabkan terjadinya dua arus dominan yang bertentangan satu dengan lainnya: teokrasi keagamaan sebagai ideologi di satu pihak dan sekularisme anti keagamaan (yang dalam perkembangannya akan menjadi sekularisme ateistik) di lain pihak. Namun demikian kedua arus dominan ini pun akan mengalami perpecahan internal, terutama karena terjadinya perpecahan antara Katolisisme Roma di satu pihak dan Protestanisme, yang antara lain melahirkan ideologi "cuius regio illius est religio" (daerah manapun ada agamanya sendiri) yang pada intinya menekankan sistem kekuasaan yang didasarkan pada ideologi keagamaan setempat. Sekularisme sendiri juga akan mengalami perpecahan dengan

munculnya berbagai ideologi sebagaimana dikemukakan di atas, dan ini masih akan berkelanjutan terus.

Menggelombangnya rasionalisme, idealisme dan positivisme, bersamaan dengan liberalisme dan individualisme, yang masing-masing menjadi aliran ideologi totaliter satu dimensional, menyebabkan konflik dan keterpecahan yang tidak berkesudahan. Belum lagi ditambah dengan konflik antara ideologi monarki (kerajaan) di satu pihak dengan ideologi anti-monarki di lain pihak. Rasionalisme sendiri ternyata menggelombangkan dua aliran: yang satu menentang monarki absolut (John Lock), yang lainnya menerima monarki absolut yang didasarkan pada teori kontrak sosial.

Revolusi Perancis kiranya dapat dipandang sebagai letusan ideologi liberalis, individualis, anti agama dan anti monarki. Dari sinilah menggelombang ideologi republik dan ideologi demokrasi: *liberte, egalite*, dan *fraternite*.

Benturan aliran-aliran disertai dengan konflik-konflik yang tidak berkesudahan itu menyebabkan orang mencari konsep dan aspirasi baru: ada aliran yang membuat negara menjadi ideologi (*etatisme*), ada aliran yang membuat hukum sebagai ideologi (kedaulatan hukum).

Terjadinya Revolusi Industri dengan permasalahan yang dibawanya menyadarkan orang pada ekonomi sebagai ideologi. Di sini pun terjadi keterpecahan antara ideologi ekonomi yang liberal dan individualistik di satu pihak dengan ideologi ekonomi yang bersifat kolektivistik dan sosialis di lain pihak. Inti permasalahan yang dihadapi aliran ini adalah apa yang oleh Chatelet disebut sebagai "l'ideologie de l'ordre" (ideologi penataan). Maka sistem penataan

muncul sebagai asumsi dasar ideologi-ideologi itu: membiarkan evolusi kemasyarakatan berjalan secara liberal (*laissez faire laissez passer*) atau sistem kemasyarakatan yang berjalan secara tertata ketat dan terpimpin.

The ideology of Knowledge, the ideology of Wealth, dan the ideology of Power kiranya merupakan manifestasi dari gelombang-aliran ideologi non-keagamaan di Eropa yang amat dominan. Gelombang tersebut tentulah memacu berbagai kekuatan untuk membangun sistem kekuasaan berdasarkan atas kekayaan dan kekuasaan. Hal ini telah menimbulkan merkantilisme sampai pada usaha ekspansi kekuasaan dan kekayaan tersebut ke dalam bentuk kolonialisme modern, yang mungkin sudah dapat kita pandang sebagai gejala awal dari globalisasi yang ada sekarang ini.

Semua ideologi yang lahir menginspirasi terjadinya suatu masyarakat negara dan sistem kekuasaan yang total semesta bahkan final. Permasalahan yang dihadapi oleh ideologi-ideologi modern itu antara lain adalah menemukan dan membangun sistem strukturalnya. Dan karena masing-masing aliran bersifat dogmatik satu dimensional, apalagi alam pikiran Eropa amat diwarnai oleh pendekatan dialektika negatif saja, maka semuanya bermuara pada benturan konflik yang terus-menerus, baik yang berskala besar maupun yang berskala kecil.

Sebagai bagian dari perkembangan tersebut lahirlah nasionalisme di Eropa sebagai ideologi. Nasionalisme di Eropa pada awalnya amat diwarnai oleh pengelompokan daerah, lalu memadu dengan pengelompokan negara dan tidak jarang pengelompokan bahasa. Dalam hal ini, nasionalisme juga merupakan suatu ideologi yang satu dimensional dan diskriminatif sifatnya.

Tidaklah mengherankan apabila nasionalisme kemudian dibangun dan dipadukan dengan dukungan kekuatan bersenjata (ideologi fasis) dan lebih lanjut dipadukan dengan konsep ras (nasional-sosialisme Hitler).

Menggelombangnya aliran-aliran ideologi tersebut kiranya telah menimbulkan berbagai guncangan yang terus-menerus: sejak dari perang keagamaan, perang antara negara-negara Eropa (Perancis, Inggris, Jerman, Italia, Portugal, Spanyol, Austria, dan lain sebagainya), Revolusi Perancis, Revolusi Industri, perang memperebutkan jajahan sampai akhirnya meletus Perang Dunia I dan Perang Dunia II.

Gelombang Ideologi Sejak Perang Dunia II

Situasi Perang Dunia II masih dilanda oleh luapan imbas aliran ideologi-ideologi sebelumnya. Hal ini menggejala antara lain dalam suasana konflik bipolar antara Barat dan Timur; antara liberalisme-individualisme-kapitalisme di satu pihak dengan kolektivisme-totaliterisme-sosialisme di lain pihak.

Namun demikian situasi setelah Perang Dunia II itu juga diwarnai oleh terjadinya aliran baru yang mempunyai aspirasi untuk melepaskan diri dari belenggu sistem-sistem ideologi lama. Manusia menyadari betapa sejarah sebelum Perang Dunia II itu telah terperangkap dan dikuasai oleh berbagai sistem kekuasaan, yang merupakan aliran-aliran ideologi yang amat banyak dan saling berbenturan, yang masing-masing berusaha menancapkan kedaulatannya atas eksistensi manusia dan semesta. Manusia tidak hanya harus membebaskan diri dari sistem ideologi keagamaan dan ideologi monarki absolut

Abad Pertengahan, tetapi harus juga membebaskan diri dari berbagai sistem yang lahir dari "the ideology of knowledge", "the ideology of wealth" dan "the ideology of power", dalam segala bentuk sekaligus mengatasi strukturnya.

Situasi setelah Perang Dunia II itu telah menggelombangkan ideologi anti sistem sebagai suatu aliran dominan: anti sistem keagamaan, anti sistem intelektual, anti sistem kemasyarakatan, anti sistem politik, anti sistem negara, anti sistem kekuasaan, anti sistem ideologi, dan bahkan menggejala menjadi sebuah aliran yang melancarkan gugatan serta penentangan terhadap segala sistem. Gelombang ini muncul ke permukaan di sekitar tahun 50-an dan 60-an. Eksistensialisme merupakan salah satu pemacu gerakan ini.

Suasana anti sistem tersebut nampaknya telah membawa pula aspirasi untuk memperjelas konsep-konsep dasar, khususnya mengenai pengetahuan manusia. Orang membuat diferensiasi antara ilmu dan ideologi, ilmu dan falsafat, falsafat dan ideologi, begitu pula halnya dengan teologi.

Gelombang ideologi anti sistem ini juga memberikan kritik dan gugatan tajam, baik kepada blok Barat maupun blok Timur. Inilah yang kemudian ikut memacu perkembangan gagasan-gagasan Neo Marxis yang banyak berkembang pada dekade 1970 dan 1980-an, namun menjadi surut memasuki dekade 1990-an terakhir ini.

Walaupun demikian secara diam-diam namun dengan langkah pasti, arus dasar dari "the ideology of knowledge", "the ideology of wealth" dan "the ideology of power" membangun pertumbuhan yang makin kuat. "The ideology of knowledge" tidak lagi tumbuh dalam jalur ilmu, teologi, falsafat

ataupun ideologi, melainkan tumbuh melalui jalur teknologi. Terjadi titik konvergensi antara ilmu, teknologi dan kemudian juga ideologi, terutama karena teknologi itu menjadi terpadu pula dengan tumbuhnya "the ideology of wealth" dan "the ideology of power". "Technology-wealth-power" merupakan paduan peradaban yang tumbuh menjadi makin kuat, dan menjadi ciri utamanya kekuasaan dalam alam modern setelah Perang Dunia II. Tentulah perkembangan ini tidak tanpa kritik serta gugatan, sebagaimana terasa dari gagasan Marcuse, gerakan anti elitisme dan aliran Neo-Marxis. Bagi sementara orang teknologi sempat muncul sebagai ideologi. Ini terjadi di tahun 1970-an, yaitu teknologi merupakan faktor pembentuk kekuasaan.

Gelombang inilah kiranya yang telah memacu tumbuhnya negara-negara industri, satu dan lain hal menjadi penyebab terjadinya perubahan dari situasi bipolar menjadi situasi multipolar. Bahkan dengan adanya aspirasi dan konsep kekuasaan yang secara sadar dibangun atas teknologi dan ekonomi itulah terjadilah revolusi industri gelombang ketiga, dan gelombang globalisasi yang mengguncang perubahan-perubahan dewasa ini.

Dengan demikian dapatlah diangkat suatu kesimpulan betapa sejarah modern (Eropa) sejak abad ke-17 sampai dengan abad ke-20 dewasa ini telah melahirkan begitu banyak sistem ideologi seperti misalnya: ideologi keagamaan, ideologi kerajaan, ideologi keturunan, ideologi pengetahuan yang muncul dalam bentuk ilmu, filsafat, sistem-sistem intelektual dan kemudian teknologi, ideologi kekuatan yang muncul dalam wujud ideologi kekuatan bersenjata, ideologi negara, ideologi pemerintah, ideologi ekonomi, ideologi kemerdekaan, ideolo-

gi individu, ideologi masyarakat, ideologi ras, ideologi penataan dan ideologi dominasi.

Situasi Saat Ini

Munculnya gelombang ideologi anti sistem intelektual pada tahun 1950-an dan 1960-an, dan kemudian ideologi anti sistem struktural (1960-an dan 1980-an) membawa sumbangan dalam perkembangan sejarah ideologi, yaitu adanya suasana yang menjadi lebih kritis dan lebih reflektif.

Secara sederhana dapat dikatakan bahwa manusia mulai menyadari dan menggugat betapa dirinya telah diperbudak oleh sistem-sistem ideologi yang dibuat oleh manusia sendiri. Suasana ideologi yang amat majemuk serta perebutan dominasi antara yang satu dengan yang lain memang menggambarkan keadaan yang telah lama dirasakan sebagai suasana *belum omnium contra omnes* (peperangan antara semua manusia melawan semua manusia pula) dan suasana *exploitation de l'homme par l'homme* melalui gejolaknya sistem-sistem ideologi tersebut. Secara sederhana dapat dikatakan bahwa manusia mulai bertanya dan menggugat: apakah manusia itu untuk sistem ataukah sistem untuk manusia; apakah agama untuk manusia ataukah manusia untuk agama; apakah negara untuk manusia ataukah manusia untuk negara, dan demikian seterusnya terhadap ilmu, falsafah, ekonomi, sistem penataan masyarakat, konsep negara, konsep masyarakat dan industri serta teknologi.

Gelombang yang membawa suasana reflektif kritis tersebut juga menyadarkan manusia betapa perlunya memahami diferensiasi antara ilmu dan ideologi, falsafah, teologi, dan agama sehingga pada tahun 1960-

an orang banyak disibukkan dengan pertanyaan: seberapa jauh ilmu itu mempunyai sifat bebas nilai.

Gelombang kesadaran kritis reflektif ini nampaknya membawa keinginan dan aspirasi untuk menempatkan segala sesuatunya itu pada manusia dan kemanusiaan sebagai acuan tunggal dalam konsep penataan dan penguasaan masyarakat, negara, sejarah dan semesta. Walaupun aspirasi untuk menjadikan manusia acuan tunggal ini sudah menggejolak pada tahun 1950-an, namun karena lebih dilanda dengan aspirasi anti sistem dan anti struktur di samping tetap berhadapan dengan tumbuhnya sistem ideologi yang dibangun atas dasar "knowledge-wealth-power" dengan terjadinya revolusi industri kedua dan mencuatnya teknologi, maka barulah ketika pada akhir 1980-an dan awal 1990-an nampaknya terjadi gejala bangkitnya lagi aspirasi membuat manusia dan kemanusiaan menjadi acuan tunggal. Hal ini satu dan lain hal juga dipacu oleh kesadaran betapa petualangan dan benturan berbagai sistem tersebut terjadi karena manusia lebih membangun geraknya sistem-sistem tersebut atas dasar basis dialektika negatif dan kurang berusaha membangun atas dasar basis dialektika positif.

Situasi dewasa ini mungkin masih diwarnai oleh berbagai suasana yang ikut mewarnai gelombang perubahan besar dewasa ini, seperti:

- suasana yang masih diwarnai oleh mereka yang berpegang pada ideologi-ideologi lama yang timbul dari "the ideology of knowledge", khususnya pengaruh idealisme dan positivisme berdampingan dengan ideologi kemerdekaan, ideologi individu, ideologi penataan kolektif. Demikianlah manusia masih bergumul dengan

liberalisme, individualisme, dan sosialisme;

- suasana ideologi keagamaan, walaupun proses diferensiasi telah berkembang, manusia telah mulai membedakan konsep Tuhan, konsep agama, konsep ideologi, dan manusia masih didorong untuk menjawab pertanyaan mendasar mengenai: *the essence of religion*, sehingga kegiatan agama lebih menyadari dirinya sebagai kekuatan spiritual; etis dan moral;
- suasana ideologi ekonomi (industrialisasi dan sistem keuangan) yang terpadu dengan teknologi serta kekuasaan;
- suasana yang mengaspirasikan tumbuhnya ideologi baru yang dibangun atas pengalaman sejarah masa lampau untuk dapat menguak perjalanan sejarah umat manusia di masa mendatang dengan menempatkan manusia dan kemanusiaan sebagai acuan tunggalnya.

Kiranya dapat dikatakan bahwa gelombang globalisasi serta suasana perubahan besar yang sedang kita alami dewasa ini dari satu pihak merupakan muara dari gelombang-gelombang ideologi di masa lampau itu, dan dari lain pihak merupakan kelanjutan dari aspirasi untuk dapat mengadakan loncatan transendental dari absurditas ideologi-ideologi yang secara terus-menerus mendatangkan benturan perebutan dominasi dan pertentangan-pertentangan.

Keterlibatan dalam situasi seperti itulah yang mengakibatkan banyak perhatian ditujukan pada masalah arah sejarah, dan karena itu pada kekuatan-kekuatan sejarah dan perubahan, dalam arus aspirasi dasar untuk dapat mengelola perubahan dan menguasai arah sejarah. Inilah yang menyebabkan kita mungkin dapat berkata, bahwa situasi alam pikiran dewasa ini justru tumbuh berkembang menjadi makin bersifat ideologik.

Dari sejarah ideologi itu pun kiranya kita dapat mengangkat sebuah kesimpulan, bahwa hakikat ideologi (*the essence of ideology*) terletak pada: adanya aspirasi kolektif untuk memperjuangkan konsep dan cita-cita mengenai masyarakat, negara dan kekuasaan. Kita perlu membedakan antara dinamika esensial dari ideologi di satu pihak dengan bentuk-bentuk aktualisasi, baik secara doktriner maupun secara struktural, di lain pihak; ideologi sebagai isi dan ideologi sebagai bentuk.

Apa yang terjadi di Uni Soviet saat ini kiranya adalah perubahan ideologi sebagai bentuk, sedang ideologi sebagai isi adalah tetap adanya konsep dan cita-cita mengenai masyarakat, negara dan kekuasaan yang ingin diperjuangkan oleh lapisan pembaharu di negeri itu. Beberapa waktu yang lalu komunisme dirasakan dapat menjadi bentuk aktualisasi dari isi ideologi perjuangan Rusia. Namun gelombang ideologi teknologi dan ekonomi yang mempengaruhi perkembangan dunia memaksa dilepaskannya bentuk doktriner maupun struktural, namun demikian aspirasi ideologi dasarnya tentulah tetap sama: cita-cita perjuangan Rusia mengenai masyarakat, negara dan kekuasaan, baik dalam skala dalam negeri maupun dalam skala global.

Situasi dewasa ini memang masih amat fluktuatif. Negara-negara industri tentulah tetap membangun sistemnya atas dasar teknologi dan ekonomi. Ideologi dalam arti esensial bagi negara-negara tersebut tentunya tetap merupakan cita-cita mengenai masyarakat, negara dan kekuasaan yang ingin mereka wujudkan bagi kepentingannya.

Suasana kritis reflektif yang disebutkan tadi juga menyadarkan betapa ideologi itu

dapat bergerak secara manipulatif. Walaupun di atas permukaan terjadi gelombang yang mengaspirasikan demokrasi dan hak-hak asasi manusia, namun di bawah permukaan tentulah masing-masing sedang berusaha membangun *adjustment* (penyesuaian) struktural yang paling tepat bagi kepentingan masing-masing.

Di sinilah dapat dikatakan bahwa globalisasi itu membawa situasi persimpangan sejarah bagi tataran internasional: dari satu pihak masing-masing bangsa dan negara masih tetap berpegang pada aspirasi dan konsepnya sendiri-sendiri, yang merupakan kelanjutan dari suasana ideologi lama, dan dari lain pihak gelombang globalisasi yang membawa interaksi internasional menjadi semakin menyeluruh menampilkan pula pada adanya aspirasi dan konsep yang dapat dijadikan acuan bersama.

Mungkin masih memerlukan pergumulan panjang apakah manusia dan kemanusiaan, sebagai gerakannya humanisme baru, akan dapat tumbuh dari situasi ini menjadi ideologi bersama untuk masa depan. Humanisme ini sudah tentu berbeda dengan humanisme yang berkembang pada abad ke-17, 18 dan 19, yang intinya adalah gerakan anti agama, dan kemudian juga mengalami keterpecahan antara humanisme teistik dan humanisme ateistik, serta antara berbagai sistem humanisme yang dibangun secara satu dimensional dogmatik dan diskriminatif sebagaimana disebutkan di atas. Humanisme ini juga tidak dapat hanya menjadi sekedar gerakan anti segala sesuatu, melainkan harus pula dapat membangun konsep dan cita-cita masyarakat, negara serta tatanan internasional dan kekuasaan yang dibangun secara struktural.

Memang tidak mengherankan apabila salah satu luapan dari gelombang ini adalah

munculnya aspirasi demokratisasi dan hak-hak asasi manusia, tidak hanya dalam skala nasional tetapi juga dalam skala global. Pergulatan untuk ini kiranya masih panjang, karena demokratisasi politik, ekonomi dan hubungan antar bangsa, kiranya masih memerlukan tumbuhnya kekuatan-kekuatan yang mau dan mampu membawa arah sejarah ke arah itu.

Pancasila

Bagaimanakah posisi kita terlibat dan menghadapi perkembangan dan perubahan-perubahan global seperti itu? Pertanyaan ini menjadi relevan dan urgen karena kita secara sadar membangun kehidupan berbangsa, bermasyarakat, dan bernegara atas dasar satu ideologi yang jelas yaitu Pancasila.

Dalam perkembangan ini kiranya kita perlu menyadari bahwa Pancasila adalah produk dari suatu proses. Proses tersebut adalah gerakan perjuangan rakyat Indonesia mencapai Indonesia merdeka yang terjadi pada kebangkitan nasional. Gerakan perjuangan kemerdekaan tersebut adalah gerakan yang sifatnya majemuk. Pluralisme merupakan sifat masyarakat Indonesia, pluralisme juga mewarnai gerakan menuju Indonesia Merdeka itu.

Problem ideologik yang dihadapi zaman kebangkitan nasional tersebut antara lain adalah pertanyaan: kalau suatu ketika nanti Indonesia Merdeka, Indonesia Merdeka itu untuk siapa? Kekuasaan ada di tangan siapa? Legitimasi dipegang siapa? Dan bagaimana implikasi strukturalnya?

Terjadinya permasalahan fundamental itu sebagaimana proses telah menghasilkan lahirnya Wawasan Kebangsaan Indonesia

sebagai produk. Dan dari sini kemudian terjadi Proklamasi Kemerdekaan, yang kemudian dilanjutkan dengan dibangunnya Negara Kesatuan Republik Indonesia dengan Konstitusi dan Dasar Negara serta Ideologi.

Di dalam pergumulan dewasa ini, kiranya perlu kita lihat bersama bahwa Pancasila pada hakikatnya adalah ideologi yang ingin menjawab problem kekuasaan. Apabila kita membaca alinea ke-4 Pembukaan Konstitusi kita, nampaklah betapa Pancasila itu adalah dasar bagi dibangunnya susunan kedaulatan rakyat atau demokrasi. Kedaulatan adalah sebuah konsep kekuasaan. Ia menunjuk pada adanya kekuasaan tertinggi. Pancasila sebagai ideologi menunjuk pada konsep kedaulatan rakyat (demokrasi) yang didasarkan atas Ketuhanan Yang Maha Esa, Kemanusiaan yang adil dan beradab, Persatuan Indonesia, Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan serta dengan mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Sebagai dasar kekuasaan seperti itu Pancasila menolak bentuk-bentuk ideologi modern satu dimensional, dan Pancasila menempatkan kekuasaan (yang erat hubungannya dengan konsep masyarakat dan konsep negara) di dalam haribaannya nilai-nilai dasar eksistensi manusia (yang hakikatnya adalah koeksistensi) dan terbuka bagi aktualisasi vertikal maupun horisontal.

Dalam pemahaman seperti ini tidak jarang kami kemukakan bahwa Pancasila adalah bagaikan *Astabrata* Modern. Apabila *Astabrata* dalam kesusasteraan lama merupakan naskah yang memuat ajaran tentang kepemimpinan (yang erat hubungannya dengan kekuasaan), dengan mentransformasikan sifat-sifat alam ke dalam sifat-sifat kekuatan kekuasaan, maka Pancasila secara

langsung menempatkan kekuasaan itu dalam landasan sifat-sifat baik dari manusia dan kemanusiaan.

Dengan pemahaman ini kita dapat melihat bahwa Pancasila pada hakikatnya adalah sebuah ideologi yang bersifat terbuka:

- terbuka karena tidak membangun sistem secara satu dimensional dogmatik dan struktural;
- terbuka karena menempatkan kekuasaan pada sifat dasar koeksistensi manusia yang multidimensional;
- terbuka karena secara internal tidak membatasi secara sosiologis-eksklusif dan secara internasional tidak menutup diri secara *chauvinistic*;
- terbuka karena mengamanatkan interpretasi kreatif dalam rangka aktualisasi, sekurang-kurangnya sekali dalam lima tahun bangsa Indonesia harus membaca gerak putarannya alam dan zaman;
- terbuka karena ingin mewujudkan demokrasi politik, ekonomi, sosio-kultural dalam rangka mencapai setinggi-tingginya derajat kemanusiaan bangsa sebagai bagian dari keluarga bangsa-bangsa.

Esensi dari Pancasila sebagai ideologi nasional tentulah ingin memberi jawaban terhadap pertanyaan: cita-cita masyarakat, negara dan kekuasaan yang bagaimanakah menjadi pegangan perjuangan kita. Secara ideologik dapatlah dikatakan bahwa keterlibatan kita dengan perubahan global dewasa ini telah dilandasi oleh sebuah ideologi yang secara fundamental telah mengaspirasikan pada ideologi yang mengacu manusia dan kemanusiaan.

Walaupun demikian, kenyataan tersebut tidaklah berarti bahwa Pancasila telah memberikan jawaban operatif dan struktural siap

pakai untuk segala alam dan segala zaman. Di sinilah perlunya interpretasi kreatif dinamis dalam rangka aktualisasi ideologi nasional atau cita-cita perjuangan kebangsaan kita itu.

Berbeda dengan ideologi satu dimensional yang lazim bersifat agresif, Pancasila menjadi ideologi yang meminta adanya pemikiran yang sifatnya mendasar dan menyeluruh: mempertimbangkan berbagai aspek dan dimensi dari gelarnya masyarakat, negara dan kekuasaan.

Berbeda dengan ideologi yang membangun sistem kekuasaan atas dasar hidup, kehidupan dan kekuasaan, seperti Marxisme, Sosialisme, Kapitalisme (yang membangun sistem atas dasar pengembangan kekuatan ekonomi, pasar, sistem keuangan, industrialisasi sebagai acuannya), Pancasila mengamatkan nilai-nilai dasar yang untuk aktualisasinya diperlukan upaya membangun sarana-sarana yang tepat.

Perkembangan dunia akan menghadapi bangsa kita yang membangun konsep negara, masyarakat dan kekuasaan atas dasar Pancasila itu dengan kekuatan-kekuatan yang membangun konsep, negara, masyarakat dan kekuasaan atas dasar ekonomi, teknologi dan kekuatan. Perkembangan dewasa ini juga membawa bangsa, negara dan masyarakat kita menjadi semakin struktural kaitannya dengan perkembangan sistem global.

Semua itu membawa amanat betapa kita harus mampu mengembangkan aspirasi perjuangan bangsa kita saat ini di dalam interaksi yang makin erat dengan gelombangnya ideologi-ideologi dunia, dan bahkan dengan perkembangan dunia yang sedang dalam persimpangan sejarah: mencari ideologi

baru untuk masa depan bersama umat manusia.

Cita-cita demokrasi dan aktualisasi nilai-nilai dasar kemanusiaan yang memang telah menjadi bagian dari ideologi nasional harus berinteraksi dengan gelombang global yang juga makin mengaspirasikan demokrasi dan hak-hak asasi manusia. Ini berarti bahwa kita harus berusaha agar konsep kekuasaan, baik kekuasaan politik, ekonomi maupun kekuasaan dalam lingkup kemasyarakatan, dapat makin menemukan wujud struktural secara nasional, karena sistem nasional itulah merupakan kekuatan kita untuk perca-turan dan pergumulan kita dengan perkembangan dunia.

Konsensus-konsensus Kreatif Diperlukan

Interaksi berbagai sistem ideologi yang berada dalam suasana fluktuasinya gelombang perubahan-perubahan besar sejarah saat ini kiranya secara politis memerlukan kemampuan manusia untuk membangun konsensus-konsensus kreatif sebagai bagian menuju arah sejarah dalam rangka demokratisasi dan aktualisasi nilai-nilai kemanusiaan.

Secara nasional itu berarti bahwa bangsa kita harus dapat membangun konsensus-konsensus kreatif baik dalam rangka aktualisasi ideologi nasional kita ke dalam maupun dalam rangka aktualisasi ideologi kita ke luar.

Tantangan besar bagi dunia politik, baik internasional maupun nasional adalah seberapa jauh kekuatan-kekuatan politik akan dapat membangun konsensus-konsensus itu.

Strategi Sebagai Metodologinya Ideologi

Apabila ilmu pengetahuan (yang dewasa ini makin dibedakan dengan ideologi, namun demikian akan menjadi bagian dari ideologi) mempunyai metodologinya sendiri yang disebut metodologi ilmiah, maka ideologi tentu pula mempunyai metodologinya sendiri.

Perkembangan dewasa ini mungkin menunjukkan, bahwa apa yang dinamakan studi ataupun telaah strategik merupakan jalan atau metoda dalam aktualisasi sebuah ideologi. Studi strategik pada dasarnya adalah studi yang memusatkan perhatian pada kekuatan. Studi strategi adalah sebuah strategi yang bermuara pada pengambilan keputusan. Untuk itu maka strategi lazim dilakukan dengan melalui empat tahapan:

- tahap analitikal: di mana manusia mempertimbangkan medan strategik secara mendasar dan menyeluruh, memperhitungkan berbagai kemungkinan, dan kemudian mengungkapkan berbagai alternatif pilihan;
- tahap politikal: berdasarkan atas pertimbangan analitikal, strategi harus bermuara pada suatu *choice*, suatu pengambilan keputusan. Ini dilakukan melalui kegiatan politik;
- tahap teknikal: bila keputusan telah diambil dan ditetapkan, maka selanjutnya perlulah dilaksanakan. Dalam hal ini perlu sekali dipertimbangkan hubungan antara langkah strategik dan langkah taktik. Langkah taktik diambil dalam rangka mencapai amanat strategik. Tidak jarang langkah taktik menjadi langkah yang mengakibatkan deviasi dari amanat strategik;

- tahap evaluatif: pelaksanaan tersebut harus selalu dievaluasi agar amanat strategik dapat diaktualisasikan. Sementara itu evaluasi juga dapat menghasilkan masukan bagi gerak lebih lanjut di dalam medan yang selalu bergerak, berubah, berkembang.

Penutup

1. Gelombang globalisasi dan perubahan besar dewasa ini masih diwarnai oleh berbenturannya berbagai sistem dan ideologi, yang masing-masing sedang dipaksa untuk menemukan *adjustment* strategik dan struktural.
2. Perubahan-perubahan dewasa ini nampaknya telah membawa manusia bergumul dengan pertanyaan: ke manakah arah sejarah. Dan manusia dipacu untuk berusaha mengenali kekuatan yang mengubah sejarah tersebut dalam rangka mengelola dan menguasai arah sejarahnya. Dalam situasi demikian alam pikiran manusia tumbuh menjadi semakin ideologik.
3. Ideologi lama, khususnya yang mengacu kepada "knowledge, wealth and power" yang amat erat hubungannya dengan konsep dominasi masih amat mewarnai perkembangan dunia dewasa ini, walaupun menggelombang pula gugatan yang mengaspirasikan ideologi bersama umat manusia di masa mendatang, yang mengaspirasikan penempatan manusia dan kemanusiaan sebagai acuan tunggal bersama.
4. Demokratisasi, baik di bidang politik, ekonomi maupun sosio-kultural dan hak-hak asasi manusia (yang mungkin sudah menggejala pula di dalam *Decla-*

ration of Human Rights dari Perserikatan Bangsa-Bangsa pada tahun 1948 dan diteruskan dengan *International Covenant on Civil and Political Rights* serta *Socio Economic and Cultural Rights* pada tahun 1966) kiranya merupakan bagian dari arus aspirasi pada ideologi manusia dan kemanusiaan.

5. Masih dibutuhkan pergumulan panjang untuk dapat menemukan terobosan-terobosan kepada sistem global (tata politik, tata ekonomi, tata dunia) yang humanis dan demokratik. Masing-masing sistem dan kekuatan masih bergumul untuk membangun posisinya sendiri-sendiri. Masih diperlukan kekuatan politik yang dapat membangun interaksi serta konsensus-konsensus untuk itu.
6. Dengan berpegang pada Pancasila sebagai ideologi nasional, kita telah membangun konsep kekuasaan yang didasarkan atas sifat-sifat dasar yang baik dari manusia dan kemanusiaan. Namun demikian, perjalanan di masa depan meminta kemampuan kreatif untuk dapat mewujudkan aktualisasi ideologi tersebut baik ke dalam maupun ke luar.
7. Ke dalam berarti bahwa perkembangan kehidupan bangsa kita akan meminta kemampuan bangsa ini secara bersama mengembangkan demokrasi dan meningkatkan derajat kemanusiaan bangsa, dengan menata kekuasaan politik, kekuasaan ekonomi dan kekuasaan kultural kemasyarakatan, dalam rangka aktualisasi kreatif ideologi nasional kita.
8. Ke luar berarti kemampuan kita untuk berintegrasi baik dalam tingkat ideologi maupun tingkat politik, untuk memanfaatkan berbagai unsur dari perkembangan dunia bagi meningkatnya persatuan, kemajuan peradaban, serta kebudayaan bangsa, dalam arti meningkatkan setinggi-tingginya derajat kemanusiaan bangsa, serta dalam rangka ikut berperanan secara aktif dalam merintis sistem dunia untuk masa mendatang.
9. Apabila dalam hal hak-hak asasi manusia di masa lampau kita secara taktis lebih berjalan secara defensif-reaktif (karena situasi eksternal juga masih fluktuatif dan tidak menentu), saat ini dan di masa mendatang, dengan makin memahami Pancasila sebagai ideologi nasional (yang membangun konsep kekuasaan dalam rangka demokrasi dan nilai-nilai kemanusiaan yang luhur) kita secara taktis perlu lebih bergerak secara aktif, kreatif, manunggal dengan gelombang gerakan ideologi manusia dan kemanusiaan serta demokrasi. Kita berusaha membuat bangsa dan negara kita menjadi bangsa dan negara yang kuat. Bangsa yang kuat dalam arti ideologis-kultural. Negara yang kuat dalam arti demokratik-struktural.
10. Keberhasilan kita mewujudkan sistem nasional sebagai aktualisasi ideologi nasional kita adalah modal yang paling utama bagi keterlibatan kita dengan gerak perubahan dunia. Apabila 20 tahun yang lalu kita dapat menata kekuatan politik secara struktural dalam rangka demokrasi Pancasila, saat ini menjadi tugas bersama untuk menata kekuasaan ekonomi secara struktural dalam rangka demokrasi Pancasila itu pula.
11. Agar hal tersebut akan dapat berlangsung bagi kehidupan nasional dari satu bangsa, maka perhatian perlu ditujukan pada upaya mengangkat lapisan rakyat dan masyarakat yang lemah, untuk dapat secepatnya menjadi bagian yang

kreatif dari wujud sistem nasional yang kuat. Hal ini merupakan bagian dari pelaksanaan strategi membangun kualitas manusia dan kualitas masyarakat.

12. Proses demokratisasi dalam zaman pembangunan ini kiranya perlu dilihat sebagai proses yang berjalan dalam 3 tahap:

- a) tahap inisial: dari pemerintah, oleh pemerintah, untuk rakyat/masyarakat;
- b) tahap partisipasif: dari pemerintah bersama masyarakat, oleh pemerintah bersama masyarakat untuk rakyat/masyarakat;
- c) tahap emansipatorik: dari masyarakat, oleh masyarakat, untuk masyarakat, dengan dukungan pemerintah.

Tahap-tahap tersebut tidak harus dipandang sebagai proses yang berjalan unilinear. Ada bagian yang sudah siap dengan tahap ketiga, ada bagian yang masih berada dalam tahap inisial. Secara umum kita berada dalam upaya memperkuat tahap kedua untuk berjalan lebih lanjut ke tahap ketiga.

13. Gelombang perubahan besar dunia itu perlu kita hadapi dengan menyiapkan kekuatan nasional untuk masa depan melalui pendidikan.
14. Perubahan besar, baik struktural maupun kultural, terutama apabila Indone-

sia harus tumbuh menjadi masyarakat industri (tanpa membuat ekonomi dan teknologi menjadi ideologi, tetapi menjadi peradaban) akan mempunyai dampak terhadap kehidupan masyarakat. Untuk itu masyarakat memerlukan pendampingan, dalam membaca, memahami perubahan-perubahan, dan menemukan dukungan. Pendampingan kreatif-inovatif ini dapat dilakukan oleh Departemen Penerangan, dan kekuatan intelektual yang bergerak di medan media-komunikasi. *If culture is the soul of the nation, communication is the nerve of the nation* (jika kebudayaan merupakan jiwa dari bangsa, maka komunikasi adalah urat syaraf bangsa).

15. Menempatkan *knowledge, wealth* dan *power* dalam konteks aktualisasi koeksistensi manusia di dalam alam sejarah adalah menempatkan ideologi dalam konteks kebudayaan. Pluralisme sistem dan aliran ideologi yang mewarnai gelombang perubahan dewasa ini dan membawa nasionalisme dan internasionalisme berada pada persimpangan sejarah, akan berjalan pula mencari titik konvergensi. Apabila aspirasi pergumulan dalam mengelola perubahan dan arah sejarah harus menuju pada manusia dan kemanusiaan sebagai acuan bersama, mungkin hal ini berarti kebudayaan akan menjadi titik konvergensi untuk masa depan.

Kecenderungan Globalisasi Media Massa

A. Muis

Pengantar

MEMBICARAKAN masalah globalisasi media massa dan informasi sebenarnya kita berhadapan dengan masalah menipisnya batas-batas sistem komunikasi, budaya komunikasi dan hukum komunikasi di masing-masing negara.

Globalisasi media massa berawal pada kemajuan teknologi komunikasi dan informasi semenjak dasawarsa 1970-an. Di dalam pengertian itu kita harus bertemu dengan istilah-istilah banjir informasi, era informasi, masyarakat informasi, era komputerisasi dan era satelit. Arus informasi meluas ke seluruh pelosok dunia. Jaringan komunikasi masyarakat di masing-masing negara mengalami pembesaran volume informasi maupun kecepatan penyebaran informasi.

Globalisasi informasi dan media massa menciptakan keseragaman pemberitaan maupun preferensi acara liputan. Masing-masing sistem media seakan-akan menjadi

bagian dari suatu jaringan informasi dan komunikasi internasional. Kegemaran masyarakat di seluruh dunia untuk memilih berita-berita luar negeri yang dipandang penting cenderung seragam (*audience agenda*). Dengan sendirinya sistem media di masing-masing negara juga cenderung seragam dalam hal menentukan kejadian yang dipandang penting untuk diliput (*media agenda*). Apa yang terjadi di suatu tempat yang terpencil di pelosok dunia akan segera diketahui oleh seluruh dunia pada saat yang hampir bersamaan. Peristiwa yang terjadi di sebuah negara akan segera mempengaruhi perkembangan masyarakat di negara-negara lain. Menurut istilah John Naisbitt dan Patricia Aburdene (1991) dunia kini menjadi sebuah *global village*.

Sekarang dan di masa mendatang terjadi interdependensi pemberitaan di antara masing-masing sistem media di seluruh dunia. Kejadian-kejadian yang diliput oleh *Reuter* atau *CNN*, misalnya, pada saat yang hampir bersamaan diberitakan pula oleh Kantor Berita *Antara*, *TVRI*, *RCTI*, Kantor Berita

Bernama dan *RTM*, atau sebaliknya. Banjir besar dan angin topan dahsyat di Bangladesh pada bulan Juni tahun 1991 dan banjir di Cina bagian timur tanggal 3 Agustus 1991 mempengaruhi sensitivitas media massa di seluruh dunia. Bahkan juga mempengaruhi keperdulian sosial di kalangan masyarakat internasional dan para pejabat tinggi di semua negara. Jaringan komunikasi sosial di masing-masing negara membukakan diri terhadap arus informasi yang menyangkut semua macam peristiwa. Tidak ada lagi kejadian sekecil apapun di semua negara yang mampu menutup diri dari liputan media. Keadaan tersebut sudah tentu membawa serta perubahan bagi konsep-konsep jurnalistik serta kriteria nilai berita. Semua orang dan semua peristiwa setiap saat dapat menjadi pencipta berita (*newsmaker*) bagi semua media.

Kemajuan teknologi komunikasi dan informasi¹ menghadirkan aneka ragam *saluran (media)* yang kian lama kian canggih dan memungkinkan segala macam kejadian meledak menjadi berita yang dramatis di seluruh dunia. Arus berita berlangsung kian cepat. Volumennya serta frekuensinya pun kian besar. Sebagai contoh ialah pers (media cetak). Produksi berita-berita pers kian lama kian besar dan beraneka ragam (diversifikasi) dengan kecepatan yang kian mencengangkan. Hal itu terjadi karena dukungan fax, jaringan telepon antar negara, komputer dan cetak jauh. Perubahan atau kemajuan teknologi komunikasi dan informasi yang luar biasa itu menimbulkan konsekuensi-

konsekuensi teknis bagi konsep-konsep jurnalistik, kriteria nilai berita maupun hukum media massa.

Kesegaran berita (ciri *aktualitas* komunikasi pers) mengatasi kendala geografis (*global timeliness*). Begitu pula kriteria nilai berita *proksimitas* akan memperoleh sifat-sifat baru sebagai akibat mengerutnya jarak antara berbagai tempat di dunia oleh kecepatan pengiriman informasi. Kedekatan tempat kejadian dengan redaksi sebuah penerbitan (stasiun media elektronik) sifatnya cenderung menjadi relatif sebagai akibat kemajuan teknologi komunikasi/informasi. Proksimitas geografis antara sumber berita atau peristiwa berita dan redaksi media tidak lagi terlalu ditentukan oleh faktor "jauh-dekat". Semua tempat seakan-akan berdekatan dengan redaksi media di seluruh dunia. Pengertian *proksimitas global* kini dapat diperkenalkan sebagai proksimitas berita yang netral terhadap proksimitas kultural, politis, psikologis maupun sosiologis.

Gejala tersebut kian jelas kelihatan dalam cara pemberitaan media massa di Indonesia sejak tahun 1970-an. Kejadian-kejadian di mancanegara kerap kali meraih persentase yang cukup tinggi dalam kolom-kolom berita media massa di Indonesia.

Tata Komunikasi dan Informasi Dunia Baru

Kini masalah ketimpangan arus informasi internasional seakan-akan *mereda*. Tidak lagi seperti dahulu tatkala masalah itu berge-ma nyaring dalam sidang-sidang Majelis Umum PBB antara tahun 1970-1980. Anggota-anggota dari Negara-negara Dunia Ketiga (Selatan) menuntut ditegakkannya

¹Konsep informasi kini disamakan dengan data yang diproses dengan komputer. Dalam ilmu komunikasi arti informasi adalah segala sesuatu yang belum diketahui atau yang meniadakan ketidakpastian tentang dua atau lebih kemungkinan (alternatif) yang dihadapi. Biasa disebut "angka-angka ganda" (binary digits/bits).

Tata Informasi dan Komunikasi Dunia yang Baru (*A New World Information and Communication Order*). Yakni sebuah tata informasi dan komunikasi yang lebih adil dan berimbang antara Utara dan Selatan (*fair and balanced flow of information between North and South*). Negara-negara Barat ternyata hanya memperhatikan apa yang mereka sebut "free flow" atau arus informasi internasional yang bebas tanpa kekangan oleh masing-masing sistem nasional.

Isu ketimpangan arus pemberitaan internasional itu menjadi lebih hangat (memuncak) menyusul sebuah resolusi dari Sidang Majelis Umum PBB No. 3201 tentang Tata Ekonomi Dunia Baru. Negara-negara Dunia Ketiga berpendapat, bahwa kurang masuk akal jika mewujudkan sebuah tata ekonomi baru tanpa dilengkapi (didukung) dengan tata informasi dunia baru pula. Sebuah tata informasi dunia baru yang lebih adil (*just*) sangat perlu ditegakkan sebagai bagian integral dalam upaya menciptakan tata ekonomi dunia baru.

Apa yang sedang kita hadapi sekarang seakan-akan merupakan babak penutup kisah ketimpangan arus informasi internasional pada dekade 1970-an dan 1980-an itu. Kini hadir globalisasi ekonomi bersama dengan banyak macam globalisasi lainnya, termasuk globalisasi media massa dan arus informasi. Tidak ada lagi isu divergensi antara tata ekonomi dunia baru dan tata informasi dan komunikasi dunia baru. Sebab kedua fenomena itu kini mengalami proses konvergensi atau pertemuan secara global. Keduanya bersama dengan bidang-bidang lain seakan-akan dipersatukan untuk membentuk sebuah *sistem global* untuk masing-masing bidang. Kini seakan-akan ada sistem informasi dan komunikasi global, sistem hukum global, sistem budaya global,

sistem pendidikan global dan sebagainya.

Memang sekarang dan di masa datang jaringan pemberitaan internasional masih tetap didominasi oleh lembaga-lembaga media massa Dunia Kesatu seperti *Reuter, AFP, AP, UPI, BBC, ABC, VOA* dan lain-lain. Akan tetapi ketergantungan Dunia Ketiga kepada layanan informasi dari Dunia Kesatu tidak lagi terlalu merupakan masalah penting sebab materi pesan atau materi informasi yang tersebar lewat jaringan media internasional itu sudah pula menjadi global. Misalnya hiburan, olah raga, politik, kebudayaan, ekonomi dan sebagainya. Preferensi dan kegemaran *audience* sudah global, sudah sama di mana-mana. Dengan demikian khalayak media tidak lagi merasa perlu untuk menilai apakah informasi, hiburan dan sebagainya yang tersebar melalui jaringan komunikasi massa Dunia Kesatu atau Barat menciptakan ketimpangan arus informasi internasional atau tidak. Perilaku komunikasi (*media habit*), gaya hidup, kegemaran, jenis-jenis makanan, pakaian, kendaraan, olah raga dan pola konsumsi maupun pola hidup, sudah seragam di seluruh dunia atau sudah menjadi global.² Boleh dikatakan kini globalisasi media massa telah menghadirkan "manusia internasional" atau "manusia global". Globalisasi memang bersifat lintas bangsa dan lintas budaya. Bahkan yuridiksi dan sistem politik di masing-masing negara cenderung kabur. Seakan-akan media massa global secara otomatis menawarkan pula sistem hukum dan sistem politik global.

Dahulu isu ketimpangan informasi internasional biasa diidentikkan dengan terjadinya *imperialisme budaya*. Artinya, arus informasi satu arah (*one-way flow of world*

²Lihat John Naisbitt dan Patricia Aburdene, *MEGATRENDS 2000* (Februari 1991), 115-129.

communication) tidak sekedar mempunyai sifat kuantitatif; ia juga mempunyai sifat kualitatif. Volume informasi yang berlangsung timpang itu mengandung pula nilai-nilai komunikasi politik, budaya maupun ekonomi, untuk kepentingan negara-negara Utara (Barat). Misalnya, tayangan-tayangan hiburan dan siaran-siaran tentang kegiatan politik Amerika dan negara-negara Eropa Barat melalui jaringan media siaran (Radio dan TV), film, sinetron dan kaset video. Informasi budaya, politik, ekonomi dan hiburan yang demikian menyebabkan sistem media di negara-negara Dunia Ketiga bersama khalayak (*audience*) makin lama makin cenderung membukakan diri terhadap nilai-nilai asing (Barat) yang tentu saja tidak semuanya sesuai dengan nilai-nilai budaya masing-masing bangsa (negara) Dunia Ketiga. Film-film nasional, misalnya, banyak meniru tema maupun teknik-teknik sinematografi seperti penyutradaraan, penulisan skenario dan setting budaya film-film Barat. Khalayak media pun demikian; menggemari berita-berita yang bersumber dari jaringan media Barat (Dunia Kesatu) maupun film-film dan sinetron-sinetron Barat.

Budaya Komunikasi Global

Globalisasi media massa menghadirkan budaya komunikasi global. Dengan demikian pengertian tentang arus informasi dan komunikasi internasional yang timpang cenderung menghilang. Demikian pula pengertian "cultural imperialism"³ yang "melekat" pada kehadiran arus informasi dunia yang timpang, cenderung menghilang. Kedua fenomena komunikasi massa tersebut

cenderung menyatu (mengalami proses konvergensi) dengan arus globalisasi di segala bidang. Seakan-akan seluruh penduduk planet bumi ini tiba-tiba terseret oleh arus budaya kosmopolit, dan semua warga negara di masing-masing negara menerima *budaya komunikasi kosmopolit*.

Dasawarsa 1970 dan 1980-an menyaksikan terbentuknya banyak lembaga pertukaran berita antara negara-negara Dunia Ketiga. Tujuannya tentu saja untuk mengurangi ketimpangan arus informasi internasional (antara Utara dan Selatan). Akan tetapi peranan jaringan pemberitaan negara-negara yang sedang berkembang tersebut kini agaknya tidak lagi mempunyai arti penting, karena khalayak media di masing-masing negara Dunia Ketiga telah mengalami proses pembudayaan komunikasi yang bersifat kosmopolit. Di tengok dari sudut media massa, kini sejarah sedang menyaksikan hadirnya masyarakat manusia kosmopolit. Di samping itu, materi peliputan atau peristiwa-peristiwa yang diberitakan kian seragam di masing-masing negara. Dengan istilah yang lebih teknis, fungsi pilihan acara media massa (*agenda setting function of the mass media*) di masing-masing negara menjadi seragam. Begitu pula pilihan acara di pihak khalayak media (*audience agenda*) menjadi homogen di seluruh dunia.

Lembaga-lembaga pertukaran berita di antara negara-negara Selatan seperti OANA, ANN, *Islamic News Agency Exchange*, lembaga pertukaran berita non-blok dan *Asia Vision*, seakan-akan tidak lebih penting dari sekedar suatu manifestasi politik.

Kemajuan di bidang teknologi komunikasi yang luar biasa, termasuk telekomunikasi, seakan-akan menjadikan dunia ini kian

³A. Muis, *The Jakarta Post*, 11 Agustus 1983.

kecil (dusun global). Kini muncul *seminar jauh*, pertemuan jarak jauh atau rapat jarak jauh, kuliah jauh dan sebagainya. Komunikasi interaktif (*interactive media*) atau sistem telekomunikasi lintas penerima (*transceiver telecommunication system*) tersebut seakan-akan menjadikan mimpi *dunia selebar daun kelor* kini menjadi kenyataan.

Pada sisi yang lebih khusus, kita bisa melihat terjadinya konvergensi (ketercampuran) antara jaringan komunikasi sosial dari satu negara dan dari negara lain. Di lihat dari sudut masing-masing negara, ada ketercampuran antara jaringan komunikasi sosial eksternal dan internal (nasional). Jalannya keterkaitan jaringan komunikasi masyarakat tersebut secara internasional melibatkan baik komunikasi *formal* (media massa dan telekomunikasi) maupun yang *non-formal*, yang biasanya didominasi oleh lembaga penokohan opini (*opinion leadership*). Pertemuan jaringan-jaringan komunikasi sosial tersebut pada akhirnya melibatkan pula stratifikasi sosial di masing-masing negara. Mau tak mau jaringan komunikasi sosial pada lapisan pejabat (lembaga-lembaga birokrasi) pun tersentuh globalisasi komunikasi. Artinya, kita sekarang menyaksikan lahirnya *pejabat-pejabat global*, di samping pengusaha-pengusaha global, ilmuwan-ilmuwan global, budayawan-budayawan global, novelis-novelis global dan aktor-aktor film global.

Pada tingkat pedesaan terutama di negara-negara yang sedang berkembang terjadi pula perubahan yang luar biasa sebagai akibat globalisasi media massa. Paling sedikit, ada dua corak perubahan yang dialami oleh jaringan komunikasi masyarakat pedesaan. *Pertama*, hadirnya lapisan sosial desa yang berperilaku kosmopolit. *Kedua*, sebagai

dampak perubahan pertama, terjadi proses desentralisasi dan diversifikasi dalam tradisi ketokohan opini. Tokoh-tokoh opini yang non-formal (di samping yang berstatus resmi) harus menjadi *monomorfis* karena terjadinya proses *pluralisasi* nilai-nilai maupun perilaku warga desa. Ketokohan pendapat tidak lagi terpusat pada sekelompok orang (jaringan kecil) tradisional seperti ulama, guru mengaji, guru sekolah, imam desa, sesepuh desa, turunan bangsawan dan sebagainya. Ia menyebar (meluas) keluar dari pusat-pusat ketokohan pendapat tersebut kepada warga-warga lain yang berstatus resmi maupun tidak resmi. Misalnya PPL, dokter-dokter Puskesmas, bidan-bidan beranak, mahasiswa-mahasiswa KKN maupun ahli-ahli pertanian.

Akan tetapi pada sisi lain globalisasi informasi dan komunikasi tidaklah sepenuhnya membawa serta kebahagiaan bagi semua bangsa, semua masyarakat atau semua orang. Pengetahuan yang cenderung seragam dan preferensi terhadap informasi yang juga seragam di masing-masing negara justru dapat menumbuhkan perasaan tidak sama atau kesenjangan internasional dalam berbagai bidang. Para pakar komunikasi di beberapa negara yang sedang berkembang telah lama mengidentifikasi dampak siaran-siaran TV global. Siaran-siaran TV itu membangkitkan perasaan penyesalan di kalangan sejumlah pemirsa di negara-negara yang sedang berkembang tentang nasib mereka yang miskin dan melarat. Masyarakat tani di Amerika Latin, misalnya, merasa diri juga berhak hidup layak seperti yang mereka tonton di TV. Dari sudut teori psikologis komunikasi kejadian itu menggambarkan proses identifikasi optik maupun identifikasi psikologis pada diri pemirsa-pemirsa TV di Amerika Latin itu. Mereka mengidentifikasikan diri dengan kehidupan makmur di negara-

negara asing. Mereka menginginkan agar lingkungan sosial atau negara mereka juga memberikan peluang dan kebebasan kepada mereka untuk hidup seperti halnya di negara-negara maju yang mereka lihat di layar kaca.⁴

Alienasi dan Dehumanisasi Global

Persoalannya kemudian adalah, sejauh mana globalisasi media massa telah membangkitkan *aspirasi* masyarakat di masing-masing negara, ke arah mana aspirasi itu di dorongnya dan sejauh mana dia sanggup menjawabnya. Globalisasi pengalaman atau pengetahuan dapat menyeragamkan aspirasi pada lapisan-lapisan atau kelas-kelas masyarakat tertentu. Akan tetapi ia juga dapat menimbulkan pertentangan dan keanekaragaman aspirasi. Di negara-negara yang sedang berkembang aspirasi buruh dapat bercorak (berorientasi kepada) kebebasan untuk melakukan pemogokan atau demonstrasi. Itulah pengaruh berita-berita tentang kaum buruh di negara-negara asing, yang lebih makmur dan bebas mengajukan bermacam-macam tuntutan, mulai dari upah hingga calon-calon walikota, perdana menteri atau presiden yang dianggap memahami kebutuhan kaum buruh. Aspirasi pegawai juga dapat bercorak demikian. Misalnya merasakan kesenjangan yang besar antara penghasilan (gaji) di negara-negara yang sedang berkembang dan di negara-negara maju. Padahal tugas-tugas dan tanggung jawab sama beratnya. Globalisasi informasi mendatangkan pengaruh yang besar sekali terhadap aspirasi atau kesadaran mengenai

keadaan diri (keterbelakangan) di kalangan bangsa-bangsa yang terbelakang).

Dengan demikian ternyata, bahwa globalisasi media massa maupun informasi banyak menggugah keprihatinan di negara-negara yang kurang maju. Globalisasi itu tidak sanggup memberikan jawaban atau jalan keluarnya. Kegetiran akibat menyadari kesenjangan-kesenjangan sosial ekonomi, kebebasan dan sebagainya akan bertambah karena di dalam negeri pun terjadi kesenjangan. Lapisan tertentu dalam strata sosial sanggup menyamai kemajuan dan kemakmuran di negara-negara maju. Media elektronik khususnya TV menyajikan berita-berita tentang pola hidup mewah dan iklan-iklan barang-barang mewah yang mahal; dapat mendorong budaya konsumerisme di kalangan lapisan sosial yang di bawah, padahal kemampuan ekonomi lapisan itu sangat terbatas. Itu berarti, budaya komunikasi global tidak mendekatkan masyarakat kepada realitas sosial di lingkungannya.

Pada segi itulah terjadi fenomena kemanusiaan yang dapat disebut *dehumanisasi* dan *alienasi*. Banyak orang tidak lagi memiliki kesanggupan untuk menentukan peranannya dalam komunikasi sosial. Mereka dipencilkan dari diri mereka sendiri. Akibat ketergantungan kepada kualitas informasi dan sajian-sajian media massa global banyak orang tidak lagi sanggup memahami kebutuhannya sendiri. Dalam banyak hal nilai-nilai asing itu sudah lama merebut tempat yang strategis dalam perilaku masyarakat. Di sini kita berurusan dengan bidang olah raga, cara berbusana, pemakaian istilah, kepariwisataan dan kemunculan kelas menengah baru dengan pola hidup konsumeristis. Olah raga renang wanita, olah raga bola voli, basket dan angkat besi wanita, tenis wanita dan sebagainya harus menampilkan

⁴David K. Berlo, "The Context for Communication," dalam Gerhard J. Hanneman & William J. McEwen (eds.), *Communication and Behavior*, 1975.

pakaian olah raga global yang mungkin tidak sesuai dengan norma-norma budaya bangsa yang bersangkutan. Globalisasi media massa dan informasi menawarkan pula globalisasi nilai-nilai kultural maupun gaya hidup global.⁵

Dampak atau konsekuensi globalisasi media massa dan informasi adalah terbukanya semua macam saluran komunikasi masyarakat di masing-masing negara. Akibat lebih jauh (rentetan akibat) adalah tidak mudahnya mengendalikan arus nilai-nilai kosmopolit (asing) di sesuatu negara, khususnya negara yang sedang berkembang. Yang perlu dipersoalkan tentulah hanya nilai-nilai asing yang tidak sesuai dengan kebutuhan maupun kepribadian nasional dari negara-negara yang bersangkutan. Misalnya, jika di Indonesia, tidak sesuai dengan keperluan pembangunan maupun norma-norma Pancasila.

Meskipun globalisasi informasi dan media massa tidak lagi terlalu relevan untuk dipersoalkan dari sudut isu ketimpangan arus informasi dan komunikasi dunia (internasional), tetap ada masalah *siapa* yang mengontrol dan *nilai budaya apa* yang dominan dalam globalisasi media massa itu.

Benturan Nilai Budaya

Dalam globalisasi media massa dan informasi dunia menyaksikan peranan telekomunikasi dan media elektronik (khususnya TV, film dan rekaman video) yang luar biasa. Dunia kian menjadi kosmopolitan; manusia saling mempengaruhi dalam hal perilaku. Di bagian dunia yang sedang berkembang tanda-tanda kehadiran budaya internasional di kalangan kaum muda hampir terdapat di mana-mana.

Arus globalisasi informasi itu tidak berdiri sendiri. Ia ditemani oleh perdagangan (globalisasi pasar) dan perjalanan jauh dengan transportasi udara yang cepat ("manusia global"). Perdagangan, travel dan TV bersama-sama meletakkan dasar bagi suatu gaya hidup global. Film dan TV seakan-akan menciptakan citra yang serupa bagi kehidupan manusia di seluruh desa global ini.⁶

Akan tetapi, tentu saja, tata nilai budaya maupun tradisi komunikasi di negara-negara yang sedang berkembang (masyarakat-masyarakat tradisional agraris), masih tetap memelihara kelompok sosial yang *konser-vatif*, atau kelompok *tradisional*. Dalam urusan dengan lapisan atau kelompok sosial yang demikian pandangan haruslah netral, sebab mereka memang mempunyai hak untuk menilai dan mendefinisikan sendiri kebutuhan masyarakat atau bangsa mereka. Sama juga dengan kelompok-kelompok lain yang diberi predikat "modernis" atau "progresif"; mereka pun berhaik untuk menerima inovasi-inovasi atau nilai-nilai asing. Mereka pun seharusnya bebas untuk mendefinisikan kebutuhan bangsa atau masyarakat mereka. Semua anggota masyarakat mempunyai hak untuk menolak atau menerima nilai-nilai asing. Di sini kita berurusan dengan masalah hak asasi.

Meskipun demikian, prinsip-prinsip kekuasaan, kenegaraan maupun kepemimpinan politik adalah hukum yang universal dalam menghadapi arus globalisasi, arus budaya kosmopolit, nilai-nilai asing (dinamika eksternal) maupun perubahan dari dalam. Kelompok yang duduk di puncak piramida masyarakat itu biasanya dijadikan faktor penentu kebijaksanaan. Artinya, para pe-

⁵John Naisbitt (*ibid.*).

⁶*Ibid.*

mimpin itulah yang telah diberi wewenang untuk menerapkan *acuan dasar* dan mempertahankan hukum (undang-undang). Acuan dasar itu bisa berupa Pancasila, sosialisme, liberalisme, Kitab Suci (teokrasi) dan sebagainya. Itu yang dijadikan kriteria atau alat ukur untuk menentukan apakah sesuatu nilai asing dibenarkan atau harus ditolak. Di negara-negara maju yang menganut faham demokrasi liberal sudah tentu acuan dasar atau acuan baku (standar) tersebut adalah undang-undang. Jika sesuatu tingkah laku tidak sesuai dengan undang-undang (misalnya undang-undang hukum pidana) barulah "nilai asing" itu dinyatakan "haram". Di negara-negara yang menganut faham teokrasi (misalnya negara-negara Islam) tentu berlaku hukum Islam sebagai acuan bakunya. Negara-negara lain mempunyai acuan dasar yang lain pula.

Sekitar tiga tahun silam dunia diguncang oleh peristiwa Tiananmen di Cina. Para mahasiswa, para pemuda dan kaum intelektual Cina melakukan demonstrasi berdarah *pro demokrasi*. Dalam tragedi pembantaian politik tersebut sejarah menyaksikan betapa kuatnya arus budaya politik terbuka (demokrasi) melanda negara komunis tersebut. Para penguasa RRC meyakini peristiwa berdarah itu sebagai pengaruh *Barat*.

Salah satu reaksi kultural yang keras lainnya (*backlash*) terhadap Barat ialah revolusi Islam Iran di bawah kepemimpinan mendiang Imam Khomeini. Sedangkan langkah tegas Khomeini terhadap kasus buku jorok dan brutal Salman Rushdie hanyalah merupakan ujung gunung es yang terapung. Para pengamat Barat juga mengatakan, bahwa kaum fundamentalis Islam mulai memperkuat jatidiri kebudayaan dan agama mereka di Mesir, Turki dan Indonesia. Itu semua adalah reaksi mendasar terhadap cengke-

raman pengaruh Barat.⁷

Dengan demikian, justru karena arus globalisasi semakin menawarkan keseragaman gaya hidup di seluruh planet bumi kita ini, maka timbul pulalah isyarat-isyarat kehadiran sebuah kecenderungan yang berlawanan (*countertrend*). Kecenderungan balik tersebut sangat kuat. Ia diarahkan untuk mengobrak-abrik *uniformitas*. Reaksi keras (*backlash*) itu merupakan keinginan untuk mengukuhkan keunikan (jatidiri) kebudayaan dan bahasa masing-masing bangsa di negara-negara yang sedang berkembang. Ia merupakan penolakan terhadap pengaruh asing.⁸

Reaksi-reaksi keras yang berkonotasi "anti Barat" tersebut menggambarkan pendapat, bahwa yang menguasai arus globalisasi media massa dan informasi tidak lain adalah negara-negara liberal (Barat) dan budaya Barat pulalah yang dominan dalam arus budaya kosmopolit.

Realitas globalisasi media massa yang terjadi sekarang adalah meluasnya *pluralisme* nilai budaya di banyak negara yang sedang berkembang. Perluasan kemajemukan budaya itu agaknya merupakan hasil sebuah benturan antara nilai-nilai budaya asing dan nilai-nilai budaya nasional di negara-negara yang sedang berkembang. Benturan kedua jenis nilai-nilai budaya itu menghasilkan semacam kompromi atau status quo. Yakni bertambahnya kemajemukan budaya dan karena itu pula menjadi kompleksnya sistem budaya negara-negara Dunia Ketiga. Kehadiran *nasionalisme kebudayaan* (*cultural nationalism*) dapat dianggap sebagai konsekuensi globalisasi termasuk globalisasi informasi dan media massa.

⁷*Ibid.*

⁸*Ibid.*

Berubahnya Makna Kebebasan Komunikasi

Ditinjau dari sudut konsep kebebasan komunikasi dan informasi boleh dikatakan globalisasi media massa dan informasi berawal pada pasal 19 Pernyataan Umum tentang Hak-hak Asasi Manusia. Pasal 19 tersebut merumuskan konsep *freedom of information* yang diterima dalam Sidang Majelis Umum PBB pada tanggal 10 Desember 1948 di Paris. Di dalamnya tergambar dengan jelas gagasan tentang sistem media massa maupun sistem informasi internasional. Kebebasan mempunyai opini dan menyatakan pikiran atau perasaan (*expression*) haruslah dapat dilaksanakan oleh setiap orang tanpa gangguan. Begitu pula kebebasan untuk mencari, menerima serta menyampaikan informasi dan gagasan boleh mencakup semua macam media (saluran) dan terlepas dari *batas-batas negara*. Bunyi teks aslinya (Inggris) adalah *regardless of frontiers*.

Boleh pula dikatakan, bahwa isu ketimpangan arus informasi sebenarnya berakar pada pasal 19 Deklarasi Universal Hak-hak Asasi Manusia (kebebasan informasi) tersebut. Negara-negara Dunia Kesatu (Barat) dalam upaya melaksanakan pemberitaan internasional lebih mementingkan prinsip *free flow* tanpa harus terlampaui mengindahkan yurisdiksi masing-masing negara maupun sistem-sistem nasional.

Kini arus globalisasi merupakan pengeritian yang tidak lengkap tanpa globalisasi media massa dan arus informasi internasional. Begitu pula globalisasi media massa dan informasi, tidak akan memiliki arti yang lengkap jika tidak berurusan dengan konsep kebebasan informasi internasional dan tuntutan sistem-sistem nasional di masing-masing negara.

Gagasan UNESCO yang kemudian timbul tentang kebebasan untuk tidak berkomunikasi pada hakekatnya hanyalah upaya untuk memberikan makna yang lebih lengkap tentang konsep kebebasan informasi (Pasal 19 Universal Declaration of Human Rights) tersebut.

Gagasan itu berawal dari pikiran beberapa pengamat tentang kebebasan komunikasi dan informasi internasional pada tahun 1970-an.⁹ Kini gagasan tersebut agaknya menjadi lebih relevan dalam arti, apakah arus informasi yang volumenya kian besar dan penyebarannya kian cepat ke seluruh pelosok dunia dapat dianggap suatu kesewenangan komunikasi manusia? Arus informasi cenderung linear, dari satu sumber yang menguasai berbagai saluran penyampaian pesan kepada banyak orang yang berada dalam posisi penerima yang tidak memiliki alternatif. Bukankah industri informasi dewasa ini tidak lagi memberikan cukup kebebasan bagi manusia untuk menyendiri, melepaskan diri dari "serbuan" media massa sepanjang hari? Menonton TV, mendengarkan radio atau membaca surat kabar sudah merupakan *kebutuhan* manusia modern. Jika kita bicara tentang "budaya komunikasi" atau "perilaku komunikasi", itu berarti kita berurusan dengan komunikasi antar pribadi maupun media massa. Kedua macam komunikasi tersebut boleh dikatakan sudah menjadi satu dalam menciptakan kebutuhan sosial. Media massa, khususnya TV, sanggup menjauhkan manusia dari kenyataan hidupnya sehari-hari. TV dapat disebut sebagai sebuah *jendela dunia* yang

⁹Jean d'Arcy dalam buku *Communication and Society Today and Tomorrow, Many Voices One World, Towards New More Efficient World Information Order*. International Communication for the Study of Communication Problems, Paris.

besar. TV mudah menyebabkan penonton-penonton (para pemirsa) menjadi kosmopolit. Adanya budaya TV dan budaya media pada umumnya menjelaskan besarnya ketergantungan manusia kepada media massa untuk memperoleh informasi, pengetahuan dan hiburan.¹⁰

Andaikata pasal 19 Pernyataan Umum Hak-hak Asasi Manusia atau konsep *freedom of information* itu diperluas sehingga mencakup hak untuk menolak komunikasi (*freedom not to communicate*), agaknyasulit dilaksanakan. Yang dimaksud tentulah kebebasan untuk tidak menerima informasi melalui media massa, bukan kebebasan untuk tidak berkomunikasi secara umum (bertemu atau berbicara dengan orang-orang lain). Hal itu memang tidak mungkin dilakukan karena bertentangan dengan makna komunikasi itu sendiri sebagai kebutuhan pokok 'makhluk sosial'.¹¹

Terjadinya jalinan yang kuat antara media massa dan kebutuhan komunikasi manusia sangat kurang memungkinkan terwujudnya hak untuk tidak berkomunikasi dalam arti membebaskan diri dari terpaan media massa.

Dengan demikian makna kebebasan komunikasi cenderung berubah. Artinya, harus ada kebebasan bagi setiap orang untuk memperoleh informasi dan sumberdaya komunikasi yang sesuai dengan tuntutan atau kebutuhan hidupnya. Implikasinya adalah tersedianya alternatif-alternatif dalam upaya mencari, memperoleh dan membagi informasi. Ikhwal itu dapat kita sebut *keadilan*

informasi. Pemerataan informasi saja tidaklah menjamin terciptanya keadilan itu. Karena itu maka *paradigma komunikasi* dalam globalisasi media massa dan informasi haruslah yang menjamin terwujudnya keadilan informasi. Yaitu paradigma yang bercirikan arus komunikasi dan informasi yang mendarat dan banyak arah. Itu berarti, bahwa harus ada kebebasan bagi setiap orang atau setiap kelompok manusia untuk mengelola sumber daya-sumber daya komunikasi dan informasi tanpa pembatasan yang terlampau ketat. Pembatasan kebebasan komunikasi yang "ketat" adalah yang terlalu bersifat politis dan kurang menghormati tanggung jawab komunikasi secara *hukum* (yang dilaksanakan oleh lembaga yudikatif).¹²

Sistem Nasional Lawan Globalisasi

Di Indonesia sistem media dan sistem komunikasi pada umumnya tentu mengalami pula sentuhan arus globalisasi yang tidak kecil artinya.

Dalam bidang *pers* (media massa cetak) sedang terjadi benturan antara arus globalisasi media massa informasi dan sistem pers nasional (Sistem Pers Pancasila). Kaidah-kaidah jurnalistik media cetak (*pers*) cenderung menerima sebuah sistem yang global pula. Seolah-olah ada sistem pers global, jurnalistik global maupun *wartawan global*. Hal itu dapat dilihat pada liputan-liputan surat kabar yang cenderung banyak menyajikan kejadian-kejadian mancanegara secara rinci (proksimitas global). Perubahan itu seakan-akan mengisyaratkan adanya *liberalisasi* jurnalistik, dalam arti pembatas-

¹⁰Samuel L. Baker, *Discovering Mass Communication*, 1987, 443-451.

¹¹Edwin Emery cs., *Introduction to Mass Communications*, 1965, 3.

¹²L.S. Harms, "The Right to Communicate and Its Achievement Within A New World Information Order," *Media Asia*, Vol. 5, Nr. 4, 1978.

an kebebasan pemberitaan harus diperlonggar. Perubahan tersebut mengakibatkan perlawanan yang keras dari sistem nasional. Jadi, di satu pihak arus globalisasi seakan-akan memaksakan lahirnya kebebasan yang lebih besar bagi sistem pers nasional. Tetapi di lain pihak tuntutan sistem nasional menjadi semakin kuat sebagai reaksi terhadap globalisasi. Sistem nasional mempunyai alasan untuk takut kehilangan jatidiri atau kepribadian. Jika jatidiri pers nasional "hilang", maka pastilah ketahanan budaya bangsa kita (ketahanan nasional) dapat terpengaruh.

Itulah sebabnya regulasi di bidang pers cenderung menjadi ketat. Misalnya, Surat Izin Usaha Penerbitan Pers (SIUPP), telah tampil dengan dukungan sistem politik untuk mempertahankan diri.

Dalam memasuki era globalisasi media massa dan informasi sistem-sistem nasional menjadi amat *sensitif*. Seperti diutarakan di muka, di berbagai bagian dunia yang sedang berkembang muncul nasionalisme budaya (*cultural nationalism*) sebagai jawaban terhadap globalisasi.

Globalisasi media massa juga cenderung mempertegas ciri-ciri ambivalensi pada sistem pers nasional. Pers nasional, misalnya, menganut faham atau teori *kebebasan yang bertanggung jawab*, yang lebih dahulu telah dianut oleh sistem pers demokrasi di Amerika dan di Eropa Barat (*free and responsible press*).

Konsep pers yang "sehat, bebas dan bertanggung jawab" itu kemudian memasuki budaya komunikasi tradisional yang paradigmanya adalah *vertikal*. Yang dimaksud ialah bahwa arus pesan berlangsung satu arah dari atas ke bawah (*top-down*). Itulah sebabnya konsep Pers Pancasila, yang dise-

but sebagai "pers yang sehat, yakni yang bebas dan bertanggung jawab" (sama dengan istilah *free and responsible press*) mengandung konsep pembatasan atau tanggung jawab kebebasan yang bersifat *imprimatur* (Surat Izin Terbit atau SIUPP). Di samping cara pembatasan yang bersifat "mencegah berkomunikasi" diakui pula cara pembatasan atau pertanggung jawaban kebebasan pers melalui lembaga peradilan.

Globalisasi media massa mendorong munculnya reaksi keras dari paradigma budaya komunikasi yang berciri "top-down". Sifatnya seakan-akan transparan dengan munculnya nasionalisme budaya yang diutarakan di muka.

Isu *ketahanan budaya* menjadi semacam kesibukan paling penting di Indonesia dewasa ini dan menjadi bagian paling penting dari isu *ketahanan nasional*. Sedangkan *ketahanan Sistem Pers Pancasila* dalam arti mempertahankan kaidah-kaidah hukum pers seperti diutarakan di atas, merupakan bagian penting dari ketahanan budaya maupun ketahanan nasional (politik).

Dalam mempelajari kecenderungan globalisasi informasi dewasa ini dapat diperkirakan akan lahirnya semacam situasi *kompromis* di Indonesia. Yaitu antara pengaruh globalisasi media massa dan tuntutan sistem nasional. Hal itu telah dapat dilihat pada tuntutan kalangan wartawan agar pemerintah memperhatikan keseimbangan antar kebebasan dan tanggung jawab pers. Yang dimaksud adalah membiasakan pemakaian undang-undang melalui *pengadilan* dalam setiap tindakan pembatasan kebebasan pers. Meskipun pemerintah tetap mempertahankan SIUPP, namun pemerintah pun mempergunakan jalur-jalur hukum (khususnya hukum pidana) untuk berurusan dengan delik-delik pers.

Akan tetapi pada sisi yang lain situasi "kompromis" memperlihatkan keganjilan. Perkembangan industri pers di Indonesia cenderung menghindari konflik dengan tuntutan sistem nasional atau sistem politik. Cara yang ditempuh adalah meniru kecenderungan di negara-negara demokrasi liberal. Isi media massa menggambarkan kerasnya orientasi kepada fungsi *hiburan* yang kurang sehat menurut ukuran nilai-nilai budaya Indonesia (moral Pancasila). Akibatnya, pasal 282 Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHPidana) sebenarnya sering harus berurusan dengan banyak macam tulisan (*features*) dan gambar-gambar di majalah-majalah hiburan. Akan tetapi, lembaga *yudikatif* tidak banyak memikirkan aspek seperti itu dalam pelaksanaan fungsi pers nasional. Instansi yang sering disibukkan oleh pelaksanaan fungsi hiburan pers yang tidak sehat ialah Dewan Kehormatan PWI dengan cara melakukan teguran agar penerbitan-penerbitan pers mengindahkan Kode Etik, tetapi sering tidak diindahkan.

Pelanggaran Kode Etik Jurnalistik menyangkut pula *fungsi informasi* dan kontrol sosial. Korban pelanggaran Kode Etik Jurnalistik kebanyakan warga masyarakat (individu-individu) yang dianggap kurang memiliki kekuasaan politik, atau lembaga-lembaga masyarakat dan lembaga-lembaga agama. Pelaksanaan fungsi-fungsi pers nasional dalam globalisasi cenderung tidak lagi senada dengan prinsip-prinsip jurnalistik khususnya kriteria nilai berita. Hal itu disebabkan oleh peranan sistem politik maupun nilai-nilai budaya komunikasi tradisional, yang menentukan cara pelaksanaan fungsi informasi, fungsi kontrol sosial, kritik dan sebagainya dalam UU Pokok Pers. Dalam banyak hal, seperti diutarakan di atas, ha-

nya fungsi *hiburan* media yang menikmati kebebasan.

Penutup

Globalisasi media massa dan informasi menyebabkan lembaga-lembaga media massa di negara-negara Dunia Ketiga menjadi terbuka untuk menerima berbagai nilai baru (kosmopolit). Wartawan menjadi wartawan global atau menjadi kosmopolit. Demikian pula para penulis dan ilmuwan.

Dalam globalisasi media massa (yang diperkuat oleh kemunculan berbagai saluran komunikasi massa yang kian canggih), khalayak media di Indonesia adalah orang-orang yang *lengah*. Mereka berada pada posisi yang tidak lagi terlindung sedikitpun dari terpaan bermacam-macam nilai asing. Situasi komunikasi massa seperti itu (globalisasi) dapat dikatakan menempatkan khalayak (*audience*) pada kondisi kebudayaan dan kerohanian yang penuh dengan polusi. Banyak lembaga tradisional yang tidak lagi sanggup melindungi masyarakat dari polusi kebudayaan yang disebabkan oleh globalisasi informasi dan nilai. Memang masih ada saluran-saluran komunikasi sosial maupun media massa yang tetap bekerja sebagai tandingan bagi arus globalisasi media itu, akan tetapi peranannya ternyata tidak terlalu efektif. Misalnya, lembaga-lembaga agama (lembaga-lembaga dakwah). Informasi tandingan dari lembaga-lembaga seperti itu sebenarnya cukup besar dan dilakukan melalui media massa maupun saluran-saluran komunikasi sosial, akan tetapi keefektifannya relatif kecil.

Globalisasi media massa dan informasi cenderung mendorong perluasan aspirasi kebebasan menyatakan pendapat atau kebe-

basan informasi di masing-masing negara. Di Indonesia aspirasi kebebasan itu ingin mengutamakan pembatasan yuridis melalui pengadilan. Namun, karena sistem yang berlaku tidak/belum memungkinkan hal itu, maka aspirasi kebebasan itu beralih kepada hiburan yang kurang sehat yang justru tidak lagi sesuai dengan tuntutan sistem budaya (norma-norma moral Pancasila). Terjadi semacam kontroversi atau kejanggalan. Tuntutan sistem nasional menjadi ambivalen. Terhadap "kebebasan yang tidak bertanggung jawab politik" dikenakan tindakan berdasar kekuasaan politik (misalnya budaya telepon atau pembatalan SIUPP). Sedangkan terhadap "kebebasan yang tidak bertanggung jawab kultural" tidak dikenakan sanksi politik dan juga tidak dikenakan sanksi hukum.

Khalayak media dalam globalisasi informasi berdiri di tengah-tengah polusi rohani dan polusi kebudayaan (alienasi dan dehumanisasi) tanpa perlindungan karena institusi-institusi tradisional tidak lagi sanggup berperanan sebagaimana mestinya. Informasi pun semakin besar peranannya sebagai alat kekuasaan dan tidak lagi berfungsi sebagai alat kesejahteraan bagi umat manusia (*social goods*). Perlindungan yang diharapkan dari institusi-institusi budaya dan hukum tidak lagi bisa diperoleh, karena institusi-institusi itu juga sudah berubah. Meskipun institusi-institusi itu masih berfungsi sebagai acuan dasar atau acuan baku untuk menilai informasi yang tidak sehat, namun efektifitasnya tidak lagi terjamin. Mungkin hal itu disebabkan oleh badan-badan pelaksana (*enforcing agents*) yang juga tidak lagi berperan sebagaimana mestinya.

Di tengah-tengah arus globalisasi media massa dan nilai, sistem hukum di masing-

masing negara mengalami guncangan yang hebat. Yurisdiksi atau sistem hukum di Dunia Ketiga dalam hal-hal tertentu seolah-olah mengalami proses pemudaran dan mendukung kehadiran semacam sistem hukum global. Di Indonesia, hal itu terbukti dengan besarnya kebebasan yang dinikmati oleh informasi atau hiburan (*features*) yang melanggar pasal 282 KUH-Pidana. Artinya, pornografi semakin memperoleh definisi yang sempit (terbatas).

Arus globalisasi media massa dan informasi (yang membawa serta nilai-nilai baru bagi Indonesia) mempertajam proses *sosialisasi* bagi banyak orang, terutama kalangan usia muda. Ideologi, sistem politik serta sistem budaya di masing-masing bangsa, mau tidak mau, akan tersentuh oleh globalisasi informasi yang membawa nilai-nilai baru itu. Semua bangsa atau negara akan mengalami proses akulturasi. Akan terjadi pluralisasi budaya yang luas dan tajam di semua bangsa. Nasionalisme pun akan dipengaruhi oleh wawasan internasional. Persepsi dan aspirasi banyak orang menjadi senada tentang keadilan, hak asasi dan kesejahteraan umat manusia.

Globalisasi media massa dan informasi dapat membawa serta perubahan pada acuan-acuan dasar (baku) di masing-masing bangsa. Karena itu banyak bangsa akan mengalami ketidakpastian acuan yang baku dalam memahami sekian banyak dan ragamnya nilai-nilai asing. Tolok ukur itu dapat menjadi lemah peranannya karena berubahnya aspirasi maupun persepsi banyak orang tentang makna hidup bernegara. Atau karena adanya tuntutan-tuntutan baru maupun kebutuhan-kebutuhan baru dalam kehidupan sosial, ekonomi dan politik di masing-masing bangsa.

Globalisasi media massa dapat berdampak keresahan dan gejolak sosio-kultural di masing-masing negara. Hal itu disebabkan oleh pengaruh media global (informasi global) yang terutama menciptakan masyarakat manusia kosmopolitan. Artinya banyak orang merasa tidak betah lebih lama berada pada keadaan ekonominya, kehidupan sosial politiknya dan sebagainya setelah sering menyaksikan kondisi yang lebih sesuai dengan aspirasi mereka di mancanegara.

Meskipun demikian bagi bangsa Indonesia agaknya tolok ukur atau acuan dasar yang masih bisa diandalkan untuk memahami arus globalisasi nilai (yang dibawa oleh globalisasi media massa dan informasi) ialah nilai-nilai agama. Paling tidak, bagi sebagian bangsa Indonesia. Di samping itu dalam globalisasi nilai dan informasi turut pula nilai-nilai agama (globalisasi agama), meskipun globalisasi nilai-nilai lain yang tidak sesuai dengan agama lebih dominan.

BACAAN

Asian Mass Communication Research and Information Centre 1984, *Mass Media Tradition and Change*.

Dennis Howitt, *Mass Media and Social Problems*, 1985.

John Naisbitt & Patricia Aburdene. *MEGATRENDS 2000 Ten New Directions for the 1990's* (Februari 1991).

Larry A. Samovar et al.. *Understanding Intercultural Communication*, 1985.

Malvin L. de Fleur and Otto N. Larsen. *The Flow of Information, An Experiment in Mass Communication*, 1987.

Michael Emery and Ted Curtis Smythe. *Mass Communication*, 1980.

M. Alwi Dahlan. *Perkembangan Dunia Komunikasi Dasawarsa Sembilanpuluhan* (Makalah pada Seminar Nasional Ilmu Komunikasi 1991, 7-9 Maret, Ikatan Sarjana Komunikasi Indonesia).

The Journal of Development Communication (Vol. 1, No. 1, 1990). Selangor, Malaysia: Asian Institute for Development Communication.

Sistem Pengawasan dan Pengamanan Wilayah Perairan Indonesia

Puguh Suharso

Pendahuluan

PETA geografi Indonesia yang terdiri dari beribu-ribu pulau dan perairan yang sangat luas merupakan suatu yang unik di dunia. Kondisi demikian merupakan kendala bagi upaya pembangunan nasional maupun pertahanan keamanan. Namun di lain pihak perairan Indonesia sangat potensial keberadaannya, di samping merupakan jalur lintas perekonomian maupun militer oleh bangsa-bangsa lain, juga mengandung sumber daya alam yang besar. Untuk mengatasi kendala dimaksud, agar pembangunan nasional berjalan dengan lancar dan upaya pertahanan keamanan senantiasa tangguh dalam menanggulangi ancaman terhadap kedaulatan negara kesatuan Republik Indonesia, perlu adanya suatu sistem yang terpadu dan kompak. Sistem terpadu adalah pengaturan operasional secara kebersamaan yang menyangkut kepentingan beberapa instansi, dan kompak dapat terwujud dengan diterapkannya suatu bentuk hukum yang tepat.

Dari aspek kesejahteraan yaitu menuju pembangunan nasional untuk mewujudkan masyarakat yang adil dan makmur, tidak jarang terjadi hambatan. Misalnya penyelundupan, pencurian ikan, kegiatan eksplorasi maupun eksploitasi sumber mineral di perairan Indonesia tanpa izin, perusakan lingkungan perairan Indonesia, dan lainnya. Dari aspek keamanan, ancaman yang mungkin terjadi adalah infiltrasi maupun subversi yang bisa datang dari negara luar, penetrasi melalui perairan Indonesia, ataupun kegiatan yang sifatnya mengancam kedaulatan negara kesatuan Republik Indonesia. Untuk mendukung keberhasilan menanggulangi hambatan dari aspek kesejahteraan maupun keamanan, maka sistem operasional yang disebut di atas perlu didukung suatu sistem pengawasan dan pengamanan perairan Indonesia yang mantap. Tentu saja sistem tersebut akan melibatkan teknologi maju agar kecepatan dan ketepatan dalam pengambilan keputusan dapat terlaksana dengan baik, namun sebagai konsekuensinya adalah dana yang diperlukan cukup besar.

Mengingat fungsi lautan atau perairan Indonesia yang sangat besar artinya bagi

pembangunan nasional dan sebaliknya kondisinya yang rawan, perlulah mendapatkan perhatian serius untuk kelestarian dan keamanannya. Apabila setiap kegiatan yang melalui perairan dikelola dengan baik, sumber daya yang ada dapat dimanfaatkan bagi pembangunan nasional secara efektif, efisien serta optimal. Dalam tulisan ini dijabarkan beberapa permasalahan yang berkaitan langsung dengan kegiatan instansi-instansi yang berwenang, kemudian dibuat suatu analisis dengan tujuan manampilkan satu alternatif penyelesaiannya. Data-data diperoleh dari hasil wawancara langsung dengan pejabat instansi yang bersangkutan di Pusat maupun Daerah, metode analisis dilakukan melalui pendekatan kesisteman.

Permasalahan

Permasalahan yang akan dikaji adalah kegiatan instansi-instansi yang saling tumpang-tindih yang disebabkan oleh belum adanya peraturan perundang-undangan secara terpadu. Walaupun dalam kenyataan permasalahan yang dihadapi selalu mencakup aspek kesejahteraan yang juga dapat melibatkan aspek keamanan, nanti dalam analisis akan ditunjukkan kegiatan penanganan yang terpisah. Instansi-instansi yang menjadi bahan kajian adalah Bea Cukai, Imigrasi, Instansi Kesatuan Penjaga Laut dan Pantai (KPLP), Polisi Air dan TNI-AL, serta instansi-instansi pendukung lainnya.

Menghadapi masalah ekonomi dunia yang semakin berat, setiap negara secara tidak langsung dituntut agar senantiasa meningkatkan mutu produktivitas di segala bidang. Sebagai akibatnya apabila tantangan tersebut tidak dapat diselesaikan dengan baik, dalam arti masih terdapat kepincangan, maka masalah akan timbul di

mana-mana dan tidak jarang pula ditemui suatu bangsa dapat menimbulkan permasalahan pada negara bangsa lainnya. Contoh yang berkaitan langsung dengan topik di sini yaitu masalah penyelundupan, di mana instansi yang berwenang menangani kasus ini adalah instansi Bea dan Cukai. Secara kewilayahan bahwa kewenangan itu tidak hanya terbatas di darat saja namun juga di perairan, oleh sebab itu Instansi Bea dan Cukai dalam melakukan pengawasan dan pengamanan meningkat hingga pada perairan lepas pantai. Di lain pihak tidak hanya barang saja yang bergerak secara ilegal, manusia pun sering melakukannya sebagai imigran gelap untuk mengambil manfaat atau keuntungan tertentu. Instansi Imigrasi seperti halnya Instansi Bea dan Cukai melakukan hal yang sama dengan mengawasi dan mengamankan wilayahnya sampai sejauh ke perairan kekuasaannya.

Padahal dalam satu jajaran tertentu wilayah kekuasaan di perairan antara instansi-instansi berikut adalah sama, yaitu:

1. KPLP yang bertugas mengawasi dan mengamankan pantai maupun perairan demi keselamatan pelayaran juga memiliki wilayah kekuasaan perairan yang sama dengan Imigrasi dan Bea & Cukai.
2. Polisi Air yang bertugas mengawasi dan mengamankan perairan terhadap kejadian pencurian ikan, perompakan maupun bentuk tindak kriminal lainnya juga memiliki wilayah kekuasaan perairan yang sama.
3. TNI-AL yang dalam hal ini mempunyai tugas dan wewenang menegakkan kedaulatan negara kesatuan Republik Indonesia, dalam masa damai tetap meningkatkan kewaspadaan nasional dengan senantiasa mengawasi dan mengamankan perairan terhadap segala bentuk ancaman melalui perairan. Wilayah kekuasaan perairan yang dimiliki

oleh TNI-AL juga sama dengan wilayah kekuasaan instansi-instansi di atas dalam satu jajaran tertentu.

Karena setiap instansi mempunyai tugas dan wewenang masing-masing dengan wilayah kekuasaan perairan yang sama, akibatnya adalah sering terjadi hal-hal yang saling tumpang-tindih. Sebagai contoh, Instansi Bea & Cukai di salah satu jajaran wilayah tertentu melakukan operasi di perairan menemukan satu sasaran. Sasaran tersebut setelah dideteksi oleh petugas patroli Instansi Bea & Cukai, dilakukan identifikasi dan ternyata memang sebuah kapal asing memuat barang-barang selundupan, maka langsung dilakukan pemrosesan. Dalam proses dilibatkan instansi-instansi yang lain yaitu Instansi Imigrasi dan Polisi Air. Oleh Instansi Bea dan Cukai dilakukan koordinasi dengan instansi-instansi tersebut. Sementara dilakukan koordinasi, Instansi Imigrasi maupun Polisi Air juga melakukan patroli masing-masing di wilayah yang sama, hanya saja tidak menemukan sasaran tersebut. Kegiatan semacam ini menunjukkan bahwa secara nasional penanganan demikian merupakan kegiatan yang tidak efektif dan efisien (kegiatan yang saling tumpah tindih).

Untuk menghindari hal demikian, Pemerintah pada tahun 1972 telah membentuk suatu badan atas dasar keputusan bersama Menteri Pertahanan Keamanan, Menteri Keuangan, Menteri Perhubungan, Menteri Kehakiman serta Jaksa Agung, yaitu Badan Koordinasi Keamanan Laut (BAKORKAMLA). Untuk melakukan operasi pengawasan dan pengamanan di laut, BAKORKAMLA berada di bawah Komando Pusat dari Panglima ABRI dan Komando Operasi oleh Panglima Armada Kawasan Barat dan Kawasan Timur. Secara operasional BAKORKAMLA terdiri dari gabungan unsur-unsur kekuatan TNI-AL,

Polri, Bea Cukai, Imigrasi dan Kesatuan Penjaga Laut dan Pantai (KPLP).

Karena sifat BAKORKAMLA yang fungsinya hanya melakukan koordinasi saja, instansi-instansi yang termasuk dalam keanggotaan BAKORKAMLA masih tetap saja mengadakan operasi pengawasan dan pengamanan laut secara sendiri-sendiri. Keadaan ini mengakibatkan penyelenggaraan fungsi BAKORKAMLA tidak dapat berjalan secara berdayaguna dan berhasilguna, sehingga dalam kenyataannya sering dijumpai dua instansi atau bahkan lebih melakukan pengejaran secara bersamaan terhadap satu sasaran (*hunting on the same target*). Tentu saja kejadian ini sungguh merugikan, karena di samping tidak efektif dan efisien, tidak jarang menimbulkan permasalahan tersendiri antara instansi-instansi yang berwenang.

Permasalahan di sini menunjukkan betapa kompleksnya penanganan pengawasan dan pengamanan perairan Indonesia. Di satu hal bentuk hukum yang diberlakukan belum sempurna, di lain hal fasilitas dan peralatan operasional masih sangat terbatas. Satu hal lagi, kasus yang muncul di perairan lebih cenderung menjadi tantangan kegiatan penegakan hukum dan melibatkan banyak pihak yang *merasa* berhak untuk menanganinya.

Analisis

Yang dimaksud dengan pendekatan analisis kesisteman di sini adalah pembahasan sistem dinamikanya yang terdiri atas piranti lunak dan piranti keras, sedangkan sistem statikanya terdiri atas sub-sistem pendukung seperti sub-sistem Hukum, sub-sistem Logistik, sub-sistem Komando dan Kendali, sub-sistem Komunikasi, dan sub-sistem Informasi tidak dilibatkan secara

dalam. Piranti lunak mengandung unsur operasional, sedangkan piranti keras mengandung unsur-unsur seperti Pesawat Patroli Jarak Dekat, Kapal Patroli Cepat, Pos Pengamat dan Kantor Pusat (*Head-quarter*).

Piranti Lunak

Sebelum operasi pengawasan dan pengawasan perairan dapat dirumuskan, terlebih dahulu perlu ditinjau kembali kelemahan-kelemahannya yang transparan yang telah dilakukan oleh instansi-instansi terkait. Kelemahan-kelemahan transparan ini dapat diidentifikasi sebagai berikut:

1. Aspek kesejahteraan dan keamanan belum ditata secara tegas bahwa penanganannya adalah terpisah.
2. Setiap permasalahan di perairan yang pada dasarnya menyangkut kegiatan penegakan hukum, dalam prakteknya dilaksanakan oleh beberapa instansi secara sendiri-sendiri.
3. BAKORKAMLA yang berfungsi sebagai badan koordinasi kurang efektif, karena masih terjadi kegiatan yang saling tumpang-tindih.
4. Peraturan perundang-undangan untuk menciptakan satu sistem yang terpadu dan kompak belum ada.

Untuk mengatasi kelemahan-kelemahan transparan tersebut, pertama-tama yang harus diselesaikan adalah wadah organisasi. Jelas bahwa BAKORKAMLA sebagai wadah yang hanya berfungsi koordinasi, tidak memberikan jawaban nyata dalam menanggulangi kegiatan yang saling tumpang-tindih itu. Jadi, wadah yang seharusnya dibentuk adalah satu bentuk badan tunggal yang tugas dan wewenangnya melakukan operasi pengawasan dan pengamanan di perairan, dengan satu tujuan

yaitu penegakan hukum di perairan (laut). Badan ini hanya menangani semua masalah yang menyangkut aspek kesejahteraan, sedangkan aspek keamanan tetap dilaksanakan oleh TNI-AL.

Instansi-instansi seperti Bea dan Cukai, atau Imigrasi melakukan tugas dan wewenangnya seperti yang telah ditetapkan, namun wilayah kekuasaannya hanya sampai di perbatasan darat saja. Sedangkan yang wewenangnya memang di perairan adalah tetap seperti sediakala, hanya saja harus ditegaskan secara hukum bahwa instansi-instansi tersebut tidak memiliki wewenang menangani kasus penegakan hukum. Sebaliknya, badan tunggal yang bertugas dan wewenang menangani kasus penegakan hukum di perairan (laut), wilayah kekuasaannya di perairan juga harus ditegaskan secara hukum, agar tidak terjadi hal-hal yang saling tumpang-tindih.

Misalkan nama badan tunggal tersebut Badan Penegak Hukum di Perairan Indonesia (BPHPI), maka dalam melaksanakan tugasnya secara fungsional BPHPI saling bekerjasama bahu-membahu sejajar dengan TNI-AL. Dari aspek kesejahteraan BPHPI bertugas melakukan pengawasan dan pengamanan perairan demi *penegakan hukum* di laut (perairan). Di sisi lain, TNI-AL juga melakukan tugas pengawasan dan pengamanan perairan demi *penegakan kedaulatan negara kesatuan Republik Indonesia* dari bentuk ancaman jenis apa pun. Di sini harus jelas perbedaan antara penegakan hukum dilaut (perairan) dari aspek kesejahteraan dan penegakan kedaulatan negara kesatuan Republik Indonesia di laut (perairan) dari aspek keamanan.

Dukungan yang paling efektif adalah bila peraturan perundang-undangan yang diberlakukan untuk pembentukan BPHPI menegaskan agar dalam kegiatan operasional tidak terjadi lagi kegiatan yang saling tumpang-tindih. Dalam melaksanakan tugas

dan wewenangnya di perairan (laut), yang dilakukan oleh BPHPI adalah:

- 1. Deteksi sasaran dalam rangka mengadkan pengawasan;
- 2. Identifikasi sasaran dalam rangka mengenali sasaran;
- 3. Melakukan penindakan dalam rangka pengamanan.

Setelah BPHPI melakukan semua kegiatan yang dibebankan ini, sudah selesailah tugas dan wewenangnya walaupun ternyata harus dilakukan proses pengadilan. Barulah kemudian proses pengadilan dilakukan di darat, dengan menyerahkan kasusnya kepada Departemen Kehakiman. Tugas dan wewenang BPHPI secara fungsional dapat digambarkan menurut Diagram 1 berikut:

Diagram 1

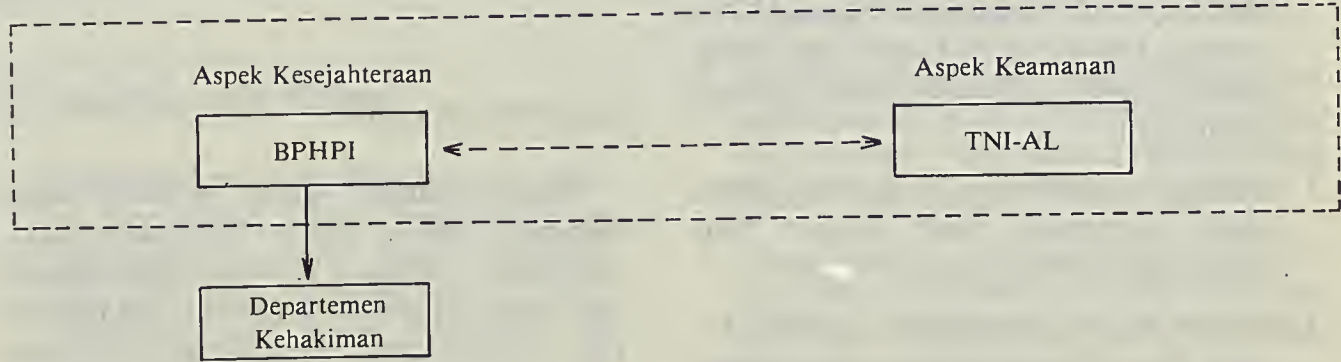
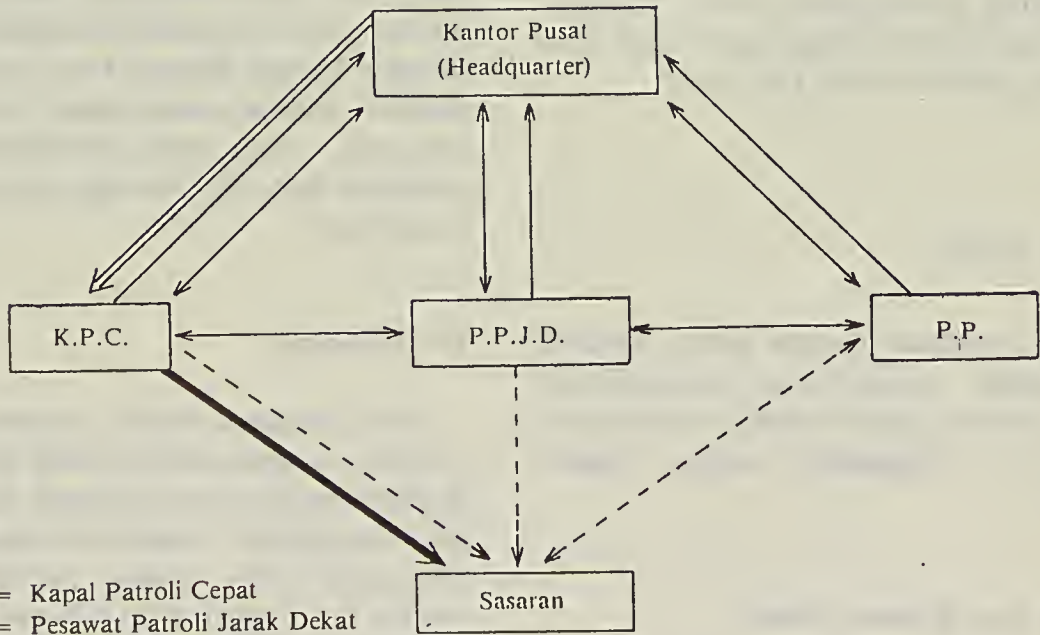


Diagram 2

KONSEP OPERASIONAL BPHPI



Keterangan:

- K.P.C. = Kapal Patroli Cepat
- P.P.J.D. = Pesawat Patroli Jarak Dekat
- P.P. = Pos Pengamat
- - - - -> = Deteksi (Pengawasan)
- <==> = Koordinasi
- > = Melapor
- => = Perintah
- => = Penindakan

Secara operasional tugas dan wewenang BPHPI adalah:

1. Pesawat Patroli Jarak Dekat, Kapal Patroli Cepat maupun Pos Pengamat melakukan pengawasan rutin untuk mendeteksi sasaran di perairan (laut). Selama melakukan pengawasan, mereka menjalin koordinasi satu sama lain dan juga terhadap Kantor Pusat (*Head-quarter*).
2. Apabila ditemukan sasaran, segera dilakukan identifikasi (oleh Pesawat Udara maupun Kapal Patroli Cepat) agar pengamatan dapat mengenali siapa sasaran sebenarnya.
3. Dilakukan pelaporan ke Kantor Pusat, bahwa ditemukan suatu sasaran yang mencurigakan dalam posisi tertentu.
4. Kantor Pusat memberikan perintah kepada Kapal Patroli Cepat yang sedang berada di sekitar posisi tersebut untuk melakukan penindakan.

Demikianlah garis besar operasi yang dilakukan oleh BPHPI, yang demi lebih jelasnya dapat dilihat dalam Diagram 2.

Piranti Keras

Yang dimaksud dengan piranti keras di sini adalah unsur-unsur operasional: Pesawat Patroli Jarak Dekat, Kapal Patroli Cepat, Pos Pengamat maupun Kantor Pusat.

Pesawat Patroli Jarak Dekat

Pesawat Patroli Jarak Dekat berupa pesawat terbang yang digunakan untuk patroli pengawasan/pengamatan dari udara, dapat terbang rendah dan dilengkapi dengan

peralatan navigasi untuk terbang dalam segala cuaca terbatas, radar berkemampuan luas, maupun peralatan perekaman hasil pengamatan sehingga dapat diperoleh dan dikirim data-data yang cepat akurat. Pesawat ini juga harus dilengkapi peralatan komunikasi yang dapat digunakan untuk melakukan koordinasi dengan unsur-unsur yang lain, dan bila diperlukan operasi malam hari (cuaca gelap) harus dilengkapi dengan peralatan infra-merah.

Kapal Patroli Cepat

Sesuai namanya kapal ini harus dapat mengejar sasaran dengan kecepatan tinggi, dilengkapi peralatan navigasi yang canggih dan radar dengan infra-merah yang digunakan untuk patroli pengawasan baik siang maupun malam hari. Kapal dilengkapi peralatan komunikasi yang dapat digunakan untuk koordinasi dengan unsur-unsur yang lain, dan juga dilengkapi peralatan yang mampu mengirimkan informasi yang diperoleh kepada Kantor Pusat secara cepat akurat. Karena menghadapi kemungkinan ancaman, kapal harus dilengkapi dengan peralatan bela diri, mampu memeriksa dan menindak.

Pos Pengamat

Pos pengamat adalah pos-pos yang dilengkapi dengan personel yang ditempatkan di pantai-pantai yang dianggap strategis untuk melakukan pengawasan/pengamatan, dilengkapi radar dengan peralatan infra-merah. Pos Pengamat juga harus dilengkapi peralatan komunikasi agar dapat berkoordinasi dengan unsur-unsur yang lain, dan harus dilengkapi peralatan yang mampu mengirimkan data atau informasi penting kepada Kantor Pusat.

Kantor Pusat

Kantor Pusat berkedudukan di darat merupakan manajemen tunggal, yang berfungsi sebagai komando dan pengendalian. Kantor Pusat ini harus dilengkapi peralatan-peralatan untuk mendukung komando, kendali, komunikasi maupun pemrosesan informasi yang serba komputer. Peralatan serba komputer ini dimaksudkan agar keputusan yang diambil dapat dilaksanakan secara cepat dan akurat.

Kesimpulan dan Saran

1. Permasalahan yang dikaji dalam tulisan ini menyangkut tugas pengawasan dan pengamanan perairan (laut) Indonesia, yang meliputi dua aspek penting, yaitu aspek keamanan dan kesejahteraan. Kegiatan yang dilakukan oleh instansi ter-

kait selama ini saling tumpang-tindih.

2. Hasil analisis adalah: (a) Sistem pengawasan dan pengamanan perairan yang terpadu; (b) Pembagian tugas yang jelas antara TNI-AL sebagai penegak kedaulatan negara Republik Indonesia dan BPHPI sebagai penegak hukum.
3. Untuk menjalin kekompakan dalam menjalankan tugas dan wewenang masing-masing, instansi yang terkait harus diatur melalui peraturan perundang-undangan yang tegas.
4. Instansi terkait yang telah diatur dalam undang-undang yang diberlakukan, harus menaati sepenuhnya pelaksanaan operasional maupun secara fungsional.
5. Hasil analisis ini merupakan usulan untuk bahan pertimbangan bagi pemerintah, agar kegiatan yang saling tumpang tindih dapat dieliminasi.

Inovasi Teknologi ''Remote Sensing'': Mengangkat Kembali Prestasi Agro Industri

Sukardi Rinakit

STUDI tentang ilmu pengetahuan dan teknologi semakin berkembang seiring dengan munculnya kesadaran, bahwa hasil inovasi teknologi dapat mempercepat proses pembangunan suatu negara. Salah satu kurun waktu cukup penting dalam era pengembangan inovasi teknologi adalah setelah Perang Dunia II.¹ Kemajuan di bidang industri, pertanian, kedokteran, transportasi, sistem pertahanan, komunikasi dan energi dicapai dalam kurun waktu itu. Karena demikian pesatnya kemajuan teknologi, tak mengherankan jika dalam dasawarsa 1960-an muncul ''euphoria''; yakni optimisme yang berlebihan, bahwa teknologi diyakini sebagai kekuatan sentral dan faktor kunci dalam pembangunan.²

¹Lebih jauh tentang pendekatan dan pola pemikiran pada dekade ini, khususnya yang menyangkut hubungan industri dengan pembangunan ekonomi, lihat Hollis Chenery dan Moses Syrquin (eds.), *Patterns of Development, 1950-1970* (London: Oxford University Press, 1975).

²H. Tb. Bachtiar Rifai, ''Peningkatan IPTEK Secara Terpadu, Terarah dan Serasi dalam Membina Ketahanan Nasional,'' *Berita Ilmu Pengetahuan dan Teknologi* (Jakarta: LIPI, 1981), No. 1, hal. 21.

Meskipun ''euphoria'' terhadap teknologi akhirnya disadari sebagai langkah yang tidak selalu tepat, peranan teknologi tetap penting dalam rangkaian proses mempercepat pembangunan. Terutama apabila suatu negara menginginkan revitalisasi kemampuan-kemampuan industri mereka, maka persoalan efisiensi, produktivitas dan kompetisi sebagai jalur bawah kehidupan ekonomi hanya dapat didekati dengan inovasi teknologi. Dengan meletakkan kerangka kerja seperti ini, isu inovasi teknologi menjadi sangat strategis dan relevan untuk dibicarakan.

Tulisan ini akan membahas inovasi teknologi yang berperan sebagai perekat antara kemajuan teknologi dan keberhasilan ekonomi di Indonesia dalam lingkup negara-negara ASEAN lainnya. Perhatian utama pembahasan adalah mengenai persoalan inovasi teknologi untuk meningkatkan prestasi agro industri Indonesia yang masih terbelakang bila dibandingkan dengan negara-negara ASEAN. Pada akhir tulisan dikemukakan beberapa alternatif kebijakan untuk mengangkat prestasi agro industri, khusus-

nya menyangkut pemanfaatan teknologi penginderaan jarak jauh (*remote sensing*).

Posisi Agro-Industri vs Manufaktur

Dalam hal industri manufaktur, saat ini Indonesia telah tergeser oleh Thailand. Nilai

ekspor manufaktur Thailand dalam tahun 1988 telah mencapai US\$8,2 milyar, Malaysia US\$9,5 milyar dan Indonesia US\$5,5 milyar. Pada sektor ini posisi teratas ditempati Singapura dengan nilai ekspor US\$29 milyar. Sedangkan Filipina berada di bawah Indonesia, yaitu dengan total nilai ekspor manufaktur US\$4,4 milyar (lihat Tabel 1 dan Grafik 1).

Tabel 1
PERBANDINGAN STRUKTUR EKSPOR, INDONESIA DAN NEGARA ASEAN LAINNYA, 1984-1988
(dalam Harga Berlaku)

	(dalam Juta US\$)					
	1984	1985	1986	1987	1988	Pertumbuhan
INDONESIA						
Ekspor, Fob	20.345	18.711	14.787	17.206	19.504	-1,05
Ekspor Barang Primer	3.585	3.753	3.826	4.025	5.439	10,98
Ekspor Minyak	14.598	12.503	8.097	8.843	8.530	-12,57
Ekspor Industri Pengolahan	2.162	2.455	2.864	4.338	5.535	26,49
MALAYSIA						
Ekspor, Fob	16.484	15.632	13.830	17.911	21.110	6,38
Ekspor Barang Primer	7.146	6.432	5.518	7.273	8.344	3,95
Ekspor Minyak	4.933	4.930	3.160	3.572	3.233	-10,02
Ekspor Industri Pengolahan	4.404	4.271	5.152	7.066	9.533	21,30
FILIPINA						
Ekspor, Fob	5.391	4.629	4.842	5.649	7.074	7,03
Ekspor Barang Primer	2.330	1.951	1.972	2.083	2.530	2,08
Ekspor Minyak	82	35	62	80	144	15,12
Ekspor Industri Pengolahan	2.979	2.644	2.808	3.486	4.400	10,24
SINGAPURA						
Ekspor, Fob	24.055	22.815	22.428	28.592	39.205	12,99
Ekspor Barang Primer	4.102	3.343	3.169	3.592	5.193	6,07
Ekspor Oil	6.162	6.156	4.587	4.523	4.889	-5,62
Ekspor Industri Pengolahan	13.791	13.317	14.672	20.477	29.123	20,55
MUANGTHAI						
Ekspor, Fob	7.413	7.121	8.835	11.659	15.869	20,96
Ekspor Barang Primer	4.780	7.121	8.835	11.659	15.869	20,96
Ekspor Oil	50	99	70	85	80	12,47
Ekspor Industri Pengolahan	2.583	2.800	3.944	6.125	8.192	33,45

Sumber: Diolah dari World Table, *Social-Economic Indicators*, 1989.

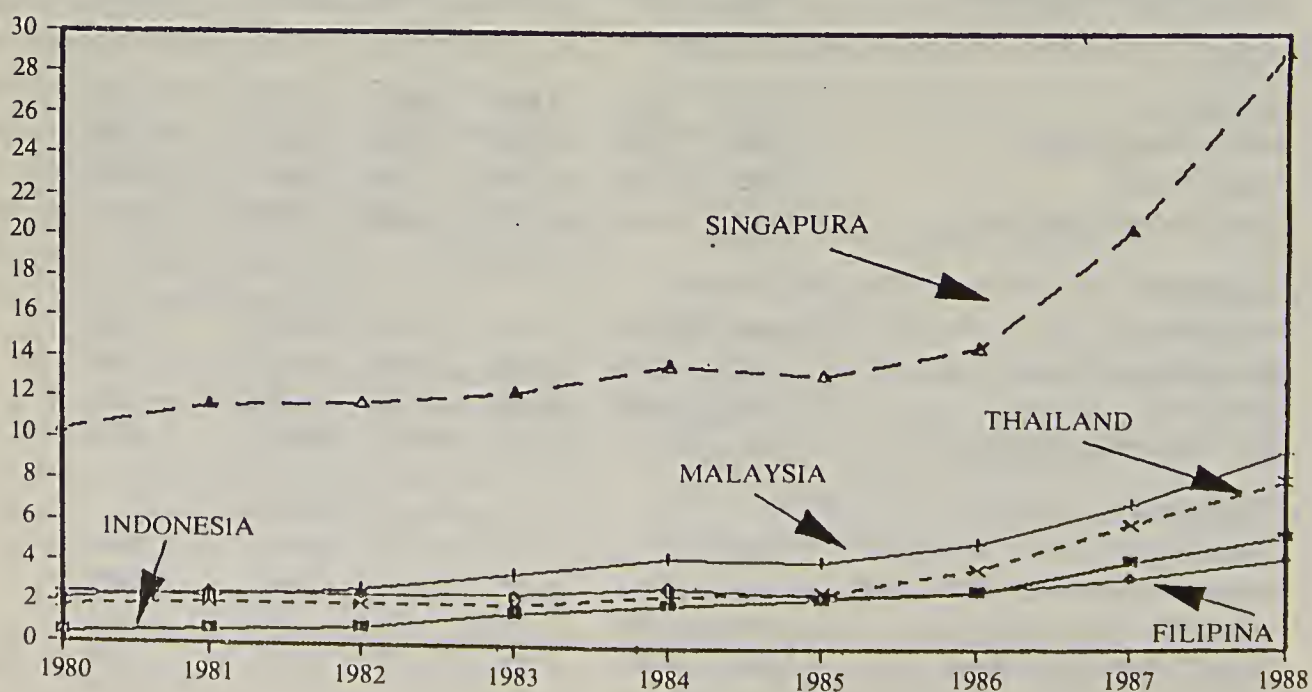
Meskipun Indonesia dalam hal ekspor manufaktur masih berada pada posisi tengah dan sumbangan ekspor manufaktur terhadap total ekspor hanya sekitar 30%, tetapi pertumbuhan sektor manufaktur Indonesia dalam tahun 1984-1988 menempati posisi kedua di bawah Thailand yang pertumbuhan rata-ratanya sekitar 33,45%. Thailand dan Malaysia dalam hal industri manufaktur memang telah berada di atas Indonesia. Kedua negara ini sudah berada pada gelanggang kelompok *Newly Industrialized Countries* (NICs) dengan sumbangan ekspor manufaktur lebih dari 40% dari total ekspor. Sedangkan Singapura tetap memimpin dalam ekspor manufaktur yang berperan sekitar 75% dari total ekspor.

Berbeda dengan pertumbuhan yang terjadi pada industri manufaktur, ekspor agro-

industri Indonesia memberikan sumbangan yang tidak begitu besar pada total ekspor. Tahun 1988 sumbangan yang diberikan sebesar US\$5,4 milyar. Angka ini sedikit di atas Singapura (US\$5,1 milyar). Keberhasilan Singapura mendekati Indonesia dalam ekspor agro-industri menunjukkan keberhasilan jaringan pemasaran dan *trading house* negara tersebut karena pada dasarnya negara ini tidak mempunyai lahan untuk mengembangkan beberapa jenis tanaman seperti rempah-rempah, kopi, karet dan lain-lain. Singapura hanya melakukan re-ekspor komoditi pertanian terutama dari Filipina dan Indonesia. Jika dibandingkan dengan negara-negara ASEAN lain, Indonesia relatif terbelakang dalam hal ekspor agro-industri. Malaysia misalnya, mampu menghasilkan US\$8,3 milyar pada tahun 1988. Thailand di urutan kedua dengan sum-

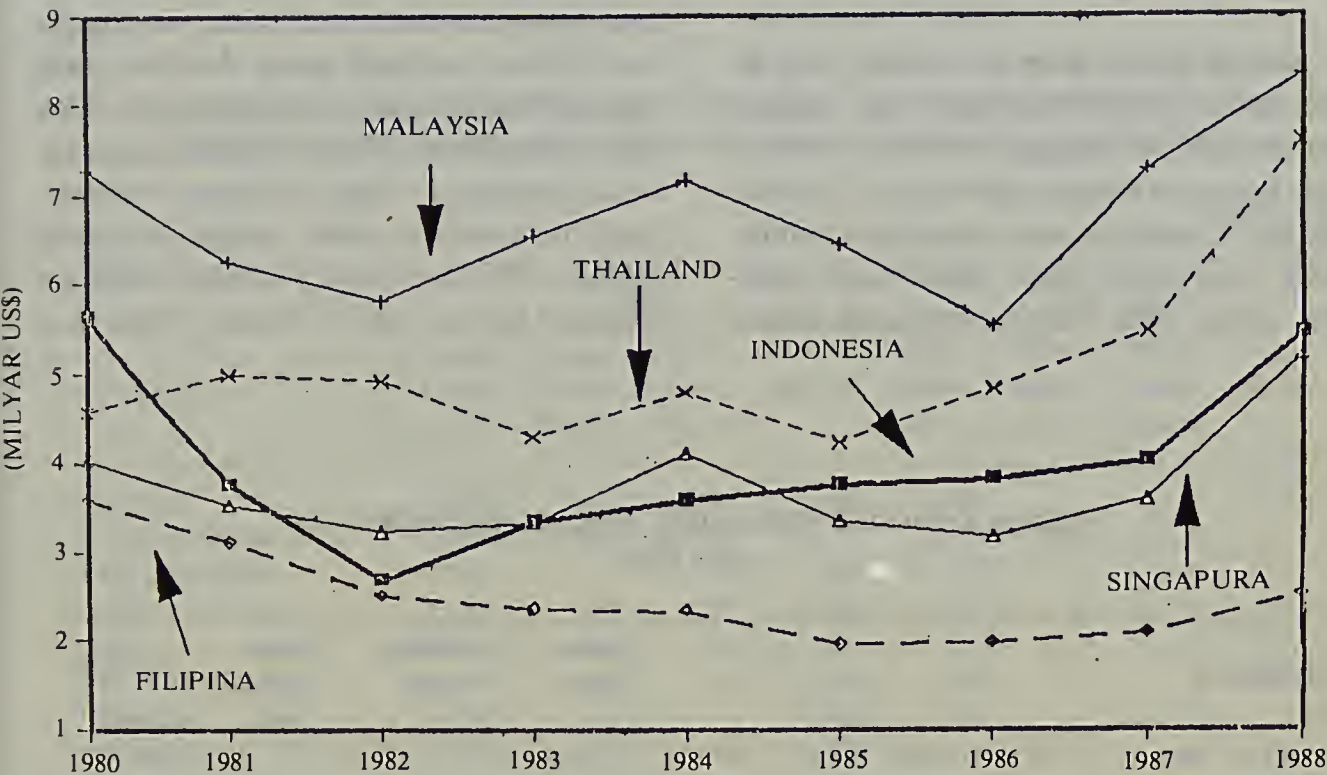
Grafik 1

EKSPOR PRODUK INDUSTRI MANUFAKTUR
ASEAN, 1980-1988



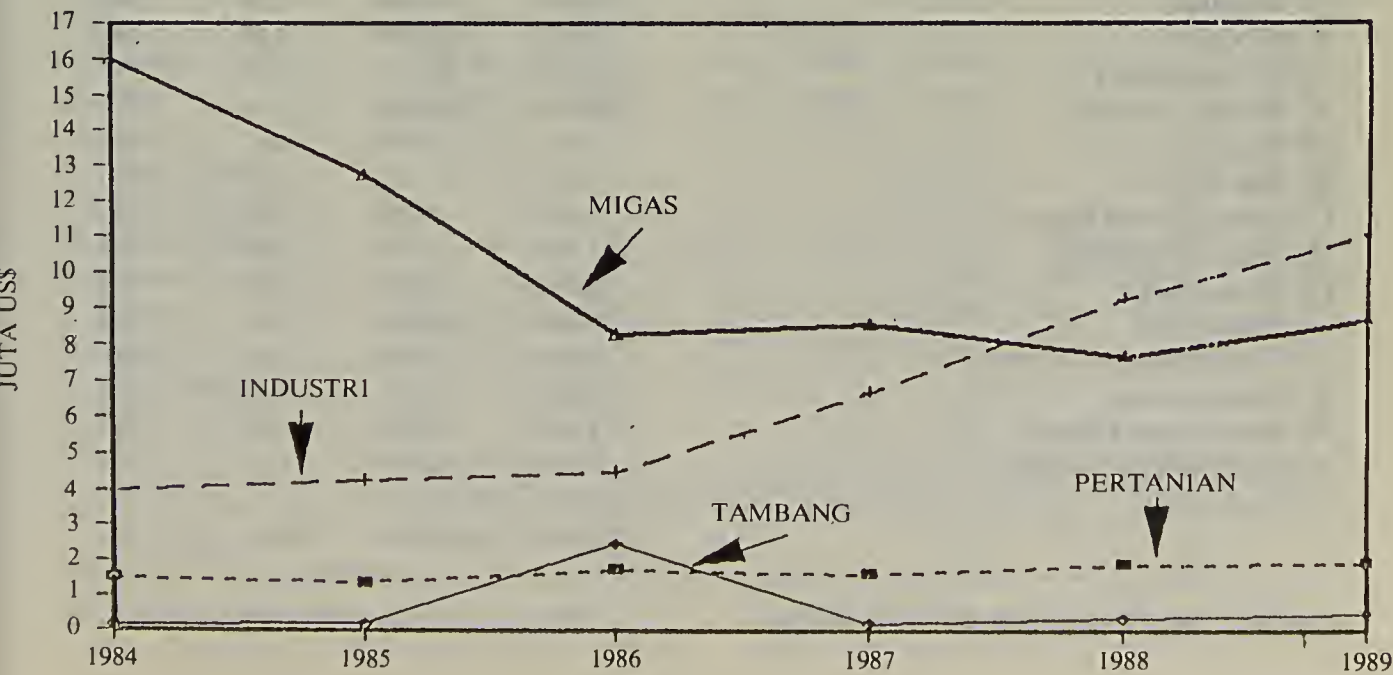
Grafik 2

EKSPOR PRODUK PRIMER (PERTANIAN & TAMBANG) ASEAN, 1980-1988



Grafik 3

EKSPOR INDONESIA MENURUT SEKTOR TAHUN 1984-1989



bangsan hasil ekspor sebesar US\$7,5 milyar. Posisi terendah ditempati Filipina yaitu US\$2,5 milyar (lihat Grafik 2 dan 3).

Kecuali ekspor ikan dan udang yang dalam tahun terakhir melesat dan mampu memberikan sumbangan sebesar US\$636,7 juta, beberapa ekspor agro-industri Indonesia justru menurun atau mengalami peningkatan yang relatif kecil. Getah karet misalnya, tahun 1989 mampu mencapai ekspor

US\$39 juta tetapi tahun 1990 turun menjadi US\$26,2 juta. Penurunan yang terjadi ini mungkin disebabkan karena tidak stabilnya mutu karet Indonesia. Persoalan *over tapping* yang banyak terjadi pada perkebunan karet rakyat menjadi unsur dominan yang mengakibatkan mutu karet Indonesia tidak dapat diandalkan. Tidak mengherankan karena penyadapan yang berlebihan tersebut, hasil perkebunan karet rakyat mencapai sekitar 70% dari total produksi karet Indonesia (1,3 juta ton per tahun). Sedangkan

Tabel 2

EKSPOR KOMODITI PERTANIAN, JANUARI-SEPTEMBER 1990
(Ribu US\$)

KOMODITI	Jan-Sep 1989	Jan-Sep 1990	Share Jan-Sep (%)	Growth (%)
1. Getah Karet	39.098	26.218	1,76	-32,9
2. Kopi	409.465	282.453	18,98	-31,0
3. Kayu Bulat	337	72	0,00	-78,6
4. Udang Segar/Beku	412.928	471.299	31,68	14,1
5. Teh	116.736	130.743	8,79	12,0
6. Rempah-rempah	143.666	112.814	7,58	-21,5
7. Tembakau	36.001	41.349	2,78	14,9
8. Biji Coklat	55.328	66.339	4,46	19,9
9. Ubi Kayu Kering	22.890	48.777	3,28	113,1
10. Ikan dan Lainnya	125.629	165.490	11,12	31,7
11. Biji-bijian	4.213	6.089	0,41	44,5
12. Bulu Bebek	227	52	0,00	-77,1
13. Damar & Getah Damar	7.649	8.763	0,59	14,6
14. Kopal dan Lain-lain	5.707	8.713	0,59	52,7
15. Sayur-sayuran	13.799	16.499	1,11	19,6
16. Buah-buahan	9.486	14.244	0,96	50,2
17. Kulit Kerang dan Lain-lain	10.546	8.011	0,54	-24,0
18. Tanaman Obat	4.081	3.826	0,26	-6,2
19. Bahan Nabati Lainnya	6.744	8.284	0,56	22,8
20. Hasil Pertanian Lainnya	79.406	67.805	4,56	-14,6
	1.503.936	1.487.840	100,0	-1,1

Sumber: Data Ekspor diolah dari Data BPS 1990.

perkebunan negara menghasilkan 18,2% swasta 12,2% atau 157 ribu ton (lihat Tabel (sekitar 235 ribu ton), dan perkebunan 2 dan 3).

Tabel 3

PRODUKSI PERKEBUNAN SELURUH INDONESIA MENURUT PROPINSI DAN STATUS PENGUSAHAAN JENIS TANAMAN KARET DAN KELAPA TAHUN 1988

(dalam Ton)

No. Propinsi	KARET				KELAPA			
	Perke-	Perke-	Perke-	Jumlah	Perke-	Perke-	Perke-	Jumlah
	bunan Rakyat	bunan Negara	bunan Swasta		bunan Rakyat	bunan Negara	bunan Swasta	
1. DI Aceh	14.442	3.143	2.007	19.592	49.933	0	0	49.933
2. Sumatera Utara	173.090	119.801	125.882	418.773	89.173	1.645	2.505	93.323
3. Sumatera Barat	37.612	0	325	37.937	62.625	0	170	62.795
4. Riau	95.505	1.379	2.700	99.584	194.320	0	225	194.545
5. Jambi	169.609	460	1.140	171.209	96.637	600	90	97.327
6. Sumatera Selatan	169.195	7.944	2.241	179.380	18.900	0	2	18.902
7. Bengkulu	16.783	0	0	16.783	7.530	0	0	7.530
8. Lampung	9.208	24.027	490	33.725	108.196	1.434	242	109.872
9. Jawa Barat	8.079	30.638	9.001	47.718	96.338	8.769	340	105.447
10. Jawa Tengah	78	28.887	4.051	33.016	162.316	9.824	170	172.310
11. DI Yogyakarta	0	0	0	0	37.316	0	0	37.316
12. Jawa Timur	0	15.206	6.199	21.405	174.846	755	243	175.844
13. Bali	0	0	129	129	58.966	0	850	59.815
14. NTB	0	0	0	0	32.500	0	74	32.574
15. NTT	0	0	0	0	45.162	0	222	45.384
16. Kalbar	115.621	0	400	116.021	42.701	0	0	42.701
17. Kalteng	52.780	0	0	52.780	16.035	0	3	38.715
18. Kalsel	35.866	4.020	574	40.460	38.712	0	3	38.715
19. Kaltim	3.817	0	0	3,817	14.001	0	0	14,001
20. Sulawesi Utara	0	0	0	0	239.550	0	7.950	247.500
21. Sulawesi Tengah	0	0	0	0	146.084	0	1.045	147.129
22. Sulawesi Selatan	0	0	2.163	2.163	101.184	300	885	102.369
23. Sulawesi Tenggara	0	0	0	0	31.050	300	168	31.218
24. Maluku	0	0	0	0	195.884	1.418	979	198.281
25. Irian Jaya	135	0	0	135	14.625	0	0	14.625
26. DKI Jakarta	0	0	0	0	0	0	0	0
27. Timor Timur	0	0	0	0	8.705	0	0	8.705
Indonesia	901.820	235.505	157.302	1.294.627	2.083.289	24.745	16.163	2.124.197
Share (%)	69,7	18,2	12,2		98	1	1	

Sumber: Diolah dari Data Perkebunan, 1989.

Kasus yang hampir sama terjadi pula pada komoditi kopi, rempah-rempah, kelapa, kayu bulat dan lain-lain. Ekspor kopi tahun 1989 (Januari-September) mencapai US\$409,6 juta tetapi tahun berikutnya (1990) merosot menjadi US\$282,4 juta. Sebagian besar produksi kopi juga dihasilkan oleh perkebunan rakyat (94% atau 372 ribu ton), sisanya (6%) oleh perkebunan swasta dan negara.

Penurunan yang terjadi pada beberapa jenis komoditi ekspor agro-industri tersebut, dapat disebut suatu ironi. Kekayaan alam Indonesia sebenarnya menjanjikan berbagai peluang bisnis dan ekspor yang berpotensi. Tetapi hal ini dapat diraih jika di sektor pertanian dilakukan penelitian dan pengembangan untuk meningkatkan keunggulan komparatif produk. Selain itu jaringan pasar yang efektif dan efisien diciptakan.

Inovasi: Mengangkat Prestasi

Terdapat 4 faktor yang diduga sebagai penyebab utama kemerosotan ekspor agro-industri. *Pertama*, strategi pemasaran yang tidak efisien dan efektif. Hal ini dapat dibuktikan dengan melihat keberhasilan Singapura. Tanpa lahan pertanian -- khususnya untuk kopi, rempah-rempah dan karet -- negara ini telah mampu menyaingi Indonesia dalam ekspor komoditi primer dengan mayoritas hasil pertanian. *Kedua*, konsentrasi Indonesia pada usaha swasembada beras dalam dasawarsa terakhir. Keberhasilan swasembada beras yang telah dicapai saat ini sedikit banyak mengurangi terjadinya peningkatan ekspor agro-industri. Tapi hal ini wajar karena kebutuhan hidup yang paling dasar bagi masyarakat Indonesia merupakan basis terpenting bagi perkembangan masyarakat dan pembangunan Indonesia selanjut-

nya. *Ketiga*, friksi antar organisasi atau perusahaan yang bergerak di sektor pertanian. Gabungan Pabrik Rokok Indonesia (GAPRI), para pedagang dan perusahaan lain, beberapa waktu lalu bergulat dalam hal tata niaga cengkeh. Hal yang hampir serupa terjadi juga pada beberapa organisasi yang bergerak di komoditi pertanian yang lain (misalnya minyak kelapa sawit). *Keempat*, lemahnya inovasi teknologi untuk mengembangkan agro-industri. Faktor terakhir ini merupakan faktor dasar dan terpenting untuk meningkatkan mutu hasil pertanian agar mempunyai keunggulan komparatif. Rendahnya mutu kopi, getah karet dan minyak kelapa sawit merupakan contoh konkrit dalam lingkup ini.

Inovasi teknologi untuk meningkatkan mutu produk agro-industri tampaknya memang kurang mendapatkan perhatian. Padahal inovasi teknologi jika berkaitan dengan kegiatan ekonomi bukan sekedar mencakup faktor-faktor domestik (seperti pertumbuhan nilai tambah, kesempatan kerja dan pemerataan pendapatan), tetapi juga daya saing produk-produk di pasar dunia maupun pasar dalam negeri.³ Lemahnya daya saing produk agro-industri Indonesia bila dibandingkan dengan negara-negara ASEAN disebabkan karena terkonsentrasinya dana penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi pada sektor manufaktur. Tahun 1986/1987 dana untuk

³H.A. Khan dan E. Thorbecke, *Macroeconomic Effects and Diffusion of Alternative Technologies Within a Social Accounting Matrix Framework* (Geneva: ILO, 1988) dalam Sayuli Hasibuan, "Pengembangan Sumberdaya Manusia, Proses Industrialisasi dan Pengembangan Teknologi," *Business News* (Jakarta: PT. Business News, 1990). No. 328 tahun IV, 1c. Lebih jauh tentang arti penting inovasi teknologi lihat Sumitro Djojohadikusumo, *Perdagangan dan Industri dalam Pembangunan* (Jakarta: LP3ES, 1985).

penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi sebesar Rp96 milyar (2,2% dari total dana pembangunan). Tahun 1988/1989 dana yang dialokasikan pemerintah sebesar Rp149 milyar (3,5% dari total dana pembangunan) dan tahun 1989/1990 sebesar 4%. Hanya sebagian kecil dari alokasi dana tersebut dipergunakan untuk kepentingan inovasi teknologi agro-industri.

Banyak contoh dapat diangkat untuk menunjukkan kurangnya perhatian -- dan kecilnya dana -- dalam penelitian dan pengembangan agro-industri. Inovasi teknologi dalam produksi karet misalnya, sampai saat ini boleh disebut setengah terbengkalai. Penurunan ekspor karet yang tajam dalam tahun-tahun terakhir disebabkan ketidakseimbangan pengembangan teknik penyemai-an dengan pengelolaan kebun secara baik. Usaha riset untuk menghasilkan inovasi teknologi guna menopang keandalan teknik produksi atau manajemen tampaknya sedikit sekali dilakukan baik oleh pihak swasta, pemerintah maupun rakyat yang mempunyai prosentase terbesar dalam penguasaan lahan perkebunan karet. Rendahnya kualitas karet yang dihasilkan selain karena persoalan *over tapping* sebenarnya lebih disebabkan karena tidak adanya inovasi teknologi pada lingkup produk ini. Demikian pula halnya dengan produksi kopi. Penurunan hasil ekspor komoditi kopi juga banyak dipengaruhi oleh rendahnya mutu kopi. Banyak kelemahan berkaitan dengan produk kopi; mulai dari pemanenan, pengeringan, sortasi, sampai serangan hama dan bibit. Kurangnya peran penelitian dan pengembangan telah menyebabkan mutu kopi merosot. Berbagai hal seperti penelitian untuk mengembangkan bibit unggul atau memberantas dan mengantisipasi serangan hama, sangat lambat dilakukan karena

keterbatasan dana. Persoalan yang sama terjadi pula pada komoditi coklat, vanili, tembakau dan kayu manis.

Keberadaan Balai Besar Industri Hasil Pertanian (BBIHP) di Bogor, sebenarnya dapat membantu sebagian kesulitan-kesulitan di atas. Tetapi BBIHP ini terbentur pada masalah dana operasional khususnya untuk penelitian dan pengembangan. Lembaga sepenting BBIHP ini hanya mendapatkan anggaran pembangunan sebesar Rp150 juta per tahun padahal anggaran rutin per tahun dapat mencapai Rp450 juta. Dana untuk membiayai aktivitas BBIHP ini seluruhnya ditanggung oleh Departemen Perindustrian. Dengan keterbatasan ini maka penelitian dan pengembangan yang mampu dilakukan oleh BBIHP juga sangat terbatas.

Tampaknya ada generalisasi yang berlaku pada komoditi yang tercaup dalam agro-industri, yaitu kurangnya peran riset untuk menghasilkan inovasi baru yang dapat mendukung peningkatan kualitas produk.

Persoalan inovasi teknologi pada agro-industri dalam kurun waktu mendatang akan menjadi persoalan serius jika tidak mendapatkan penanganan segera. Apalagi kebijakan industri "mulai" dikonsentrasikan pada pengolahan barang primer menjadi sekunder; dan berorientasi pada ekspor manufaktur untuk meningkatkan perolehan devisa, mempertahankan kredibilitas neraca pembayaran dan menghindari beban yang berlebihan sehubungan dengan kewajiban membayar utang luar negeri. Pada konteks kebijakan ini, apabila barang primer yang dihasilkan tidak memenuhi kualitas tertentu maka kebijakan untuk mengubah barang primer menjadi sekunder sebagai bentuk pemecahan masalah terhadap fluktuasi harga komoditi primer

ekspor menjadi kurang berarti. Hasil akhirnya hampir dapat dipastikan, bahwa hasrat untuk meningkatkan perolehan devisa, mempertahankan kredibilitas neraca pembayaran dan menghindari beban utang luar negeri yang berlebihan akan meleset dari perencanaan semula karena barang sekunder tersebut -- sama halnya dengan barang primer -- tidak mempunyai keunggulan komparatif.

Pengalaman merosotnya ekspor kopi, karet dan lain-lain, padahal tahun-tahun sebelumnya komoditi ini memberikan sumbangan yang besar pada total ekspor Indonesia, tampaknya perlu mendapatkan perhatian. Juga meningkatnya ekspor ikan dan udang dalam tahun-tahun terakhir dapat dilihat tak ubahnya seperti posisi kopi dan karet waktu sebelum merosot. Keunggulan komparatif komoditi ikan dan udang sekarang ini suatu saat akan mengalami kondisi yang sama dengan kopi atau karet jika tidak segera mendapatkan perhatian.

Persoalan dana untuk melakukan riset dan menghasilkan inovasi teknologi merupakan persoalan utama untuk mengangkat kembali prestasi agro-industri, di samping variabel lain seperti tenaga ahli dan lain-lain. Jika dibandingkan dengan Singapura dan Malaysia dalam hal mengalokasikan dana untuk penelitian dan pengembangan, Indonesia memang masih ketinggalan. Singapura tahun 1988 mengalokasikan US\$187,4 milyar untuk penelitian dan pengembangan dan Malaysia US\$110 milyar. Sedangkan Indonesia untuk tahun yang sama hanya mengalokasikan US\$75,1 milyar.⁴ Perhatian Singapura dan Malaysia pada penelitian dan pengembangan dapat dijadikan contoh bagi

Indonesia dalam rangkaian upaya peningkatan prestasi agro-industri.

Alternatif Kebijakan: Menekan Hambatan

Mengangkat kembali prestasi ekspor agro-industri Indonesia di antara negara-negara ASEAN merupakan langkah strategis yang masih laik ditempuh Indonesia di samping mengembangkan industri manufaktur. Potensi agro-industri yang ada harus ditunjang dengan kebijakan penelitian dan pengembangan untuk menghasilkan inovasi teknologi dan peningkatan kualitas sumber daya manusia. Kemauan politik yang kuat dari para pembuat kebijakan juga diperlukan untuk melakukan pengawasan konstruktif terhadap segala hal yang mungkin menjadi kendala inovasi teknologi pada agro-industri.

Sekurangnya ada tiga kendala serius yang harus ditekan untuk dapat mengembangkan inovasi teknologi pada agro-industri. *Pertama*, adanya "lingkaran setan" antara kurangnya kemampuan teknologi lokal dan rendahnya permintaan terhadap teknologi lokal. Lingkaran setan ini mengakibatkan terhambatnya inovasi teknologi khususnya pada agro-industri. Perusahaan-perusahaan lokal yang bergerak di agro-industri umumnya kurang yakin terhadap kemampuan teknologi lokal dan mempunyai kecenderungan mempergunakan teknologi asing. Padahal alih teknologi seperti ini tidak selalu secara langsung dapat diterapkan untuk meningkatkan agro-industri, bahkan kadang-kadang membuahkan hasil tidak seperti yang diharapkan. Karena situasi seperti ini tidak mengherankan jika penelitian dan pengembangan

⁴Lihat *Pacific Science and Technology Profile*, PECC, 1991, 5.

teknologi pribumi tidak pernah dapat mendekati masalah-masalah yang dihadapi industri lokal. Alternatif kebijakan yang mungkin ditempuh adalah pemantapan keputusan politik para pembuat kebijakan agar perusahaan lokal semakin mengembangkan penelitian dan pengembangan untuk menghasilkan inovasi yang berguna bagi peningkatan prestasi agro-industri.

Hambatan *kedua*, dalam pengembangan inovasi teknologi agro-industri terdapat dominasi asing terhadap industri di Indonesia yang cenderung diabadikan oleh orang-orang (kelompok elit) yang diuntungkan oleh sistem yang berjalan. Dalam keadaan tersebut pemerintah cenderung mempergunakan pengawasan ketat terhadap impor -- karenanya terlalu melindungi perusahaan lokal dengan monopoli -- sehingga tidak akan mendorong penelitian dan inovasi dalam memperbaiki produk-produk mereka. Kebijakan yang berkaitan dengan monopoli ini juga patut mendapatkan perhatian khususnya yang menyangkut pertanyaan layak tidaknya melakukan monopoli dalam putaran ekonomi sekarang ini.

Ketiga, masih sering diabaikannya hasil penelitian yang dilakukan oleh lembaga penelitian pemerintah maupun universitas. Sebab utama munculnya keadaan ini adalah karena kurang komunikasi antara pemerintah, sektor pendidikan dan industri. Untuk dapat mengembangkan inovasi teknologi maka keadaan ini harus segera dipecahkan.

Ada dua hal yang secara makro mungkin dapat diusahakan untuk merangsang pengembangan inovasi teknologi. *Pertama*, isu tentang ilmu pengetahuan dan teknologi harus ditempatkan secara khusus dalam konteks ekonomi, keuangan dan industri. Saat ini isu tentang ilmu pengetahuan dan teknologi masih digolongkan dalam cakup-

an kebudayaan meskipun secara konseptual hal ini menunjukkan kebenaran.⁵ Pengertian di kalangan pembuat kebijakan tampaknya perlu disamakan khususnya pengertian yang menyangkut cara mencapai pertumbuhan ekonomi seiring dengan perubahan teknologi dan bukan sekedar pengertian teknologi dalam cakupan kebudayaan. *Kedua*, karena gagasan inovasi teknologi tercakup dalam ilmu pengetahuan dan teknologi dan kegiatan industri, maka implementasinya dalam pertumbuhan ekonomi harus melibatkan kerjasama yang erat antara pembuat keputusan, para pengusaha (asosiasi) dan ilmuwan (pemerintah maupun swasta).

Pemanfaatan Teknologi Remote Sensing

Selain alternatif kebijakan makro yang dapat mempengaruhi infra-struktur tersebut, ada satu jenis teknologi modern yang selayaknya diterapkan di Indonesia dalam rangkaian program mengangkat prestasi agro-industri. Jenis teknologi ini adalah teknologi penginderaan jarak jauh (*remote sensing*).⁶ Pemanfaatan teknologi ini jika dilihat sekilas memang tidak menguntungkan bahkan merupakan kebijakan yang dapat dinilai tidak "membumi dan pembo-rosan", tetapi jika dilihat secara lebih luas, justru gambaran sebaliknya yang didapat. Dengan pemanfaatan teknologi ini hasil produk agro-industri Indonesia akan mempunyai keunggulan komparatif seperti awal de-

⁵Lihat GBHN, 1988.

⁶Penjelasan teoritis yang lebih bersifat teknis dapat dilihat dalam Thomas M. Lilliasand dan Ralph W. Kiefer, *Penginderaan Jarak Jauh dan Interpretasi Citra* (Yogyakarta: Gajah Mada, 1990). Sedangkan judul asli buku ini adalah *Remote Sensing and Image Interpretation* (NY: John Wiley & Sons Inc., 1979).

kade 1980-an dan tidak tertutup kemungkinan prestasinya akan meningkat kembali sehingga mampu bersaing dengan negara-negara lain. Peningkatan prestasi ini tentunya akan menutup besarnya biaya untuk transfer teknologi penginderaan tersebut.

Batasan umum penginderaan jarak jauh adalah teknologi yang mempergunakan alat sensor khusus untuk menemukan dan mengukur sesuatu, misalnya panas bumi, keadaan lahan pertanian dan sebagainya. Sedangkan batasan yang diberikan Lillesand dan Kiefer tentang penginderaan jarak jauh adalah ilmu dan seni tentang suatu obyek, daerah atau fenomena melalui analisis data yang diperoleh dengan suatu alat tanpa kontak langsung dengan obyek, daerah, atau fenomena yang dikaji.⁷

Dengan memanfaatkan sensor energi elektromagnetik yang dilakukan dari wahana udara maupun dari antariksa, teknologi penginderaan jarak jauh dapat menginventarisasi, melakukan pemetaan dan pemantauan terhadap sumber daya alam. Apabila teknologi ini diterapkan dalam kaitannya dengan upaya meningkatkan mutu produk agro-industri, maka segala produk yang mempunyai peluang ekspor dapat dipantau perkembangannya dari awal sehingga menghasilkan produk yang mempunyai keunggulan komparatif.

Pada sektor pertanian, penerapan teknologi penginderaan jarak jauh dapat memantau tiga persoalan terpilih: klasifikasi jenis tanaman, penilaian kondisi tanaman, dan penafsiran pola tanggap spektral dan tekstur foto dari tanaman tersebut dapat diinterpretasi oleh foto udara. Tanaman yang dibudidayakan menjadi sasaran pemantauan se-

hingga selalu diketahui perkembangan dan *kondisi tanaman* tersebut. Perubahan karakteristik tanaman selama pertumbuhan, penyakit atau hama yang mungkin menyerang, juga kerusakan tanaman karena bencana dapat dipantau sejak awal sehingga mempermudah upaya penanggulangan. Dengan mengetahui kondisi tanaman tersebut, maka proyeksi tentang *tingkat keberhasilan produksi* juga dapat diperhitungkan dengan baik.

Pada sektor kehutanan, penerapan teknologi penginderaan jarak jauh dapat meliputi pengelolaan kayu, perawatan dan perbaikan tegakan hutan, pengawasan kebakaran, identifikasi species pepohonan, pengukuran hutan dan penafsiran penyakit atau serangan hama. Tetapi dalam bahasan ini hanya akan diuraikan tiga hal yaitu identifikasi species pepohonan, pengukuran hutan, dan penafsiran penyakit atau hama.

Identifikasi species pohon dapat dilakukan oleh foto udara melalui proses eliminasi dengan tahapan: (1) mengeliminasi species pohon yang tidak mungkin atau mustahil ada di daerah bersangkutan karena faktor lokasi, fisiografi atau iklim; (2) menentukan kelompok species mana yang sebenarnya terdapat di daerah tersebut; (3) mengidentifikasi setiap species pohon dengan menggunakan asas pokok interpretasi foto udara. Dalam identifikasi species pohon, dasar yang dipergunakan adalah bentuk, ukuran, bayangan, pola, rona dan tekstur. Untuk *pengukuran hutan*, tujuan yang ingin dicapai adalah menentukan volume kayu yang akan ditebang di suatu daerah. Selain itu -- dengan teknik tertentu -- penginderaan jarak jauh juga dapat menginterpretasi layak tidaknya pohon karet untuk disadap. Sedangkan untuk *penafsiran penyakit* atau *hama* seperti bakteri pohon, jamur, virus dan pelaku lain,

⁷*Ibid.*, 1.

penginderaan jarak jauh dapat menginterpretasi jenis penyakit apa yang sedang menyerang pepohonan. Hal ini bermanfaat untuk melakukan penanggulangan awal sehingga produk dari hutan tersebut mempunyai kualitas tertentu.

Selain kedua sektor tersebut, teknologi penginderaan jarak jauh juga dapat menggalikan potensi sumber daya alam. Pemetaan lokasi sumber daya alam yang berkaitan dengan produk primer, jenis, dan potensi kelautan lain dapat diinterpretasi dengan baik oleh teknologi ini. Pada kondisi sekarang di mana ekspor agro-industri Indonesia semakin merosot (demikian juga ekspor produk primer lain) tampaknya perlu dilakukan loncatan dalam pemanfaatan teknologi. Teknologi *remote sensing* yang selama ini relatif dipergunakan untuk pemantauan se-

gala hal yang berkaitan dengan pertahanan dan keamanan (pemanfaatan teknologi ini pada pemantauan sumber daya alam masih dalam lingkup terbatas yaitu pada jenis sumber alam tertentu, misalnya minyak), sudah saatnya dimanfaatkan pada bidang yang lebih luas. Teknologi penginderaan jarak jauh ini dapat menjadi salah satu katalisator pertumbuhan ekonomi Indonesia. Keberanian para pembuat kebijakan untuk melakukan loncatan pemanfaatan teknologi tampaknya mulai diperlukan untuk mengantisipasi perkembangan ekonomi dunia yang semakin cepat. Untuk mendukung terwujudnya pelaksanaan "loncatan" tersebut diperlukan peran dan kerjasama lembaga-lembaga terkait seperti LIPI, Departemen Pertanian, Departemen Perindustrian, Departemen Kehutanan, BPPT dan lembaga lain serta pihak swasta.

KEPUSTAKAAN

Bachtiar, Tb. H. Rifai, "Peningkatan Iptek Secara Terpadu, Terarah dan Serasi," *Berita Ilmu Pengetahuan dan Teknologi* (Jakarta: LIPI, 1981).

Chenery, Hollis and Hoses Syrquin (eds.), *Patterns of Development, 1950-1970* (London: Oxford University Press, 1975).

Garis-garis Besar Haluan Negara, 1988.

Hasibuan, Sayuti, "Pengembangan Sumber Daya Manusia, Proses Industrialisasi dan Pengembangan Teknologi," *Business News No. 328* (Jakarta: PT Business News, 1990).

Lillesand, M. Thomas dan Ralph W. Kiefer, *Penginderaan Jauh dan Interpretasi Citra* (Jakarta: Gajah Mada University Press, 1990).

Dokumen

RINGKASAN PERISTIWA ASEAN

Kegiatan-kegiatan ASEAN

Penyusun:

SUDIBYO (Editor), Yoyok ARIESSUSANTO, F. ANDREA

- I. ULANG TAHUN ASEAN KE-24
 - A. Menyambut HUT ASEAN
 - B. Forum Panel HUT ASEAN
 - B. Kerja Sama Lingkungan Hidup
 - 1. Seminar Pengaturan Hukum Laut
 - 2. Lingkungan Hidup dalam Ekonomi
- II. SIDANG PARA MENLU ASEAN
 - A. Persiapan
 - B. Jalannya Sidang
 - C. Hasil-hasil Sidang
- III. KERJA SAMA EKONOMI
 - A. Kerjasama Perdagangan dan Pariwisata
 - Konsep Perdagangan Bebas
 - B. Kerjasama Industri, Mineral dan Energi
 - 1. Kerja Sama Industri
 - 2. Kerja Sama Energi
 - C. Kerja Sama Pangan, Pertanian dan Kehutanan
 - Sidang COFAF ke-14
- IV. KERJA SAMA NON-EKONOMI
 - A. Kerja Sama Kebudayaan dan Informasi
 - Pertemuan Menteri Penerangan ASEAN ke-2
- V. HUBUNGAN ASEAN DENGAN MITRA DIALOG
 - A. Pertemuan ASEAN dengan Mitra Dialognya (PMC)
 - B. Hubungan ASEAN-Vietnam
 - C. Hubungan ASEAN-Laos
- VI. USAHA ASEAN MEMBANTU PENYELESAIAN KONFLIK KAMBOJA
 - A. Sidang Dewan Nasional Tertinggi (SNC)
 - B. Pertemuan Informal Anggota Dewan Nasional Tertinggi (SNC)
 - C. Sidang Dewan Nasional Tertinggi (SNC)
- VII. LOKAKARYA PENGELOLAAN POTENSI LAUT CINA SELATAN

I. ULANG TAHUN ASEAN KE-24

A. MENYAMBUT HUT ASEAN

Dalam rangka menyambut HUT ASEAN ke-24, Dubes Filipina untuk Indonesia, Oscar G. Valenzuela, mengatakan bahwa: (1) EAEG bukan merupakan tantangan serius bagi kerja sama ekonomi ASEAN, tetapi bersifat pelengkap bagi kelancaran kerja sama ekonomi di kawasan itu; (2) ASEAN harus meningkatkan kerja sama ekonomi yang lebih konkret agar di masa mendatang dapat mengatasi rintangan yang menghambat kemajuan kerja samanya; (3) langkah kerja sama ekonomi ASEAN harus diprioritaskan untuk dapat memperkuat peranannya di dunia internasional; (4) masalah utama yang harus dibahas dalam KTT ASEAN ke-IV adalah mewujudkan kerangka kerja sama ekonomi ke dalam bentuk perjanjian dan penyusunan anggotanya serta pengaturan masalah keamanan regional; (5) untuk memperkecil dampak EAEG atas ASEAN diperlukan peningkatan kerja sama ekonomi yang melibatkan sektor swasta; (6) keterlibatan swasta dalam perdagangan intra ASEAN harus lebih diaktifkan lagi terutama untuk meningkatkan ekspor tradisional dan manufacturing dari negara anggota ASEAN; (7) bentuk kerja sama perdagangan seperti itu perlu dikembangkan lagi meskipun akan terjadi kompetisi harga antar produk, karena persaingan itu merupakan hal yang wajar dan tergantung pada selera konsumen; (8) kerja sama ekonomi yang konkret dapat diwujudkan jika pihak-pihak yang terkait mencari jalan untuk memasuki pangsa pasar di antara negara anggota ASEAN; (9) tingginya biaya perdagangan intra ASEAN disebabkan oleh kurangnya kapal pengangkut produk ke negara-negara anggota ASEAN; (10) keputusan AS untuk meninggalkan pangkalannya di Filipina menunjukkan adanya perubahan percaturan politik di kawasan ini; (11) sudah waktunya bagi ASEAN untuk memasuki periode menjaga keamanan dan stabilitas kawasannya sendiri, karena itu Filipina mendukung konsep ZOPFAN; (12) fungsi pangkalan AS di Filipina adalah untuk menjaga stabilitas kawasan Asia Tenggara khususnya dan Asia Pasifik pada umumnya; (13) hubungan bilateral Indonesia-Filipina sejalan dengan semangat ASEAN. Hubungan politik kedua negara hampir tidak ada rintangan yang serius, meskipun masih terdapat persoalan kecil, seperti kasus penangkapan ikan yang dilakukan oleh nelayan kedua negara, tetapi dapat diselesaikan secara bersahabat. Meskipun demikian kerja sama ekonomi, terutama perdagangan belum berjalan lancar dan masih menemui banyak rintangan. Kerja sama ini masih

dapat ditingkatkan lagi karena masih banyak potensi yang dapat dikembangkan (*Angkatan Bersenjata*, 9-8-1991).

Ketua delegasi Group ASEAN di Mesir, Dubes RI untuk Mesir, Abdoeracham Djajaprawira, mengatakan kepada pers di Kairo tanggal 6 Agustus 1991 bahwa: (1) ASEAN memilih tahun 1992 sebagai tahun kunjungan ASEAN dalam rangka memperingati HUT ASEAN ke-25; (2) pada prinsipnya Tahun Kunjungan ASEAN merupakan puncak Tahun Wisata bagi negara-negara ASEAN yang telah mengadakan tahun kunjungan secara terpisah; (3) kecuali Singapura dan Muangthai, kerja sama pariwisata ASEAN selama ini kurang kompak bila dibandingkan dengan negara-negara Eropa dan masih ketinggalan jauh dari Mesir; (4) promosi Tahun Kunjungan Wisata ASEAN yang didukung oleh berbagai program pariwisata merupakan langkah awal untuk memperkenalkan ASEAN guna menarik masyarakat turis Mesir; (5) ASEAN telah memperbaiki sarana-sarana penunjang pariwisata, seperti hotel, transportasi dan agenda acara dengan keragaman budaya ASEAN; (6) media massa Mesir sangat jarang memuat berita tentang peristiwa yang terjadi di ASEAN dan jika ada kolomnya sangat kecil. Hal ini disebabkan oleh: (a) kecilnya kepentingan atas perkembangan politik dan kebudayaan ASEAN; (b) budaya dan tradisi masyarakat ASEAN kurang dikenal; (c) kurangnya penerbangan dari ASEAN ke Mesir dan sebaliknya; (7) maskapai penerbangan di ASEAN agar mengadakan penerbangan secara teratur ke Mesir dan mengajak biro-biro perjalanan Mesir untuk bekerja sama menggalakkan pariwisata kedua pihak; (8) kurangnya wisatawan Mesir berkunjung ke negara anggota ASEAN karena jaraknya yang relatif jauh dan biayanya mahal, sebaliknya wisatawan dari ASEAN hanya sedikit yang memilih Mesir sebagai obyek kunjungannya (*Pelita*, 3-8-1991).

B. FORUM PANEL HUT ASEAN

Forum Panel untuk memperingati HUT ASEAN ke-24 yang bertema "Prospek Kerja Sama ASEAN: Antisipasi Terhadap Perkembangan Masa Depan" berlangsung di Jakarta tanggal 7 Agustus 1991, dengan menghadirkan para panelis: Kepala Biro Setnas ASEAN Aswin Darwis MA, Hasnan Habib, Prof. Dr. Sutan Takdir Alisyahbana dan Marzuki Darusman.

Hasnan Habib mengatakan pada forum itu bahwa: (1) prakarsa-prakarsa politik ASEAN, khususnya untuk menyelesaikan masalah Kamboja, telah membuat

ASEAN sebagai organisasi regional yang paling berhasil di Dunia Ketiga, terutama dalam kerja sama politik dan diplomasi; (2) krisis Kamboja selain merupakan ancaman utama atas stabilitas ASEAN, juga merupakan pendorong berkurangnya kekompakan dan solidaritas ASEAN; (3) tanpa faktor perekat baru, masalah intra ASEAN yang belum terselesaikan, seperti sengketa teritorial, ZEE, pendatang haram, pangkalan militer serta gerakan separatistis, akan muncul kembali ke permukaan dan dapat mengancam keutuhan ASEAN; (4) sikap beberapa negara anggota ASEAN yang masih berpandangan bahwa perlu kehadiran pihak asing untuk melindungi keamanan kawasan perlu direvisi; (5) kerja sama ekonomi yang merupakan salah satu tujuan utama ASEAN yang diharapkan dapat menjadi perekat baru, berjalan sangat lamban dan hampir tidak berarti sama sekali; (6) kemajuan ekonomi negara-negara ASEAN dalam beberapa tahun terakhir ini bukan karena hasil kerja sama yang direncanakan ASEAN tetapi lebih disebabkan oleh strategi ekonomi masing-masing negara; (7) negara-negara ASEAN menganut sistem ekonomi yang berorientasi pasar dan mulai mengalihkan strategi yang *inward looking* ke *outward looking*. Strategi itu telah menghasilkan pertumbuhan ekonomi yang rata-rata mengesankan dan menjadikan ASEAN sebagai kawasan yang paling dinamis (*Pelita*, 8-8-1991); (8) dua faktor yang mempermudah pelaksanaan konsep ZOPFAN saat ini adalah; (a) mulai terjalinnya hubungan kerja sama antara Uni Soviet dan AS untuk memelihara keamanan dan perdamaian dunia; (b) semakin terjalinnya ikatan-ikatan persahabatan antara negara-negara besar dan menengah di kawasan Asia Pasifik. Kondisi ini dapat dimanfaatkan ASEAN untuk menggalang kerja sama dan meningkatkan perannya untuk memelihara keamanan dan perdamaian kawasan; (9) pemeliharaan perdamaian dan keamanan di Asia Tenggara khususnya dan Asia Pasifik umumnya memerlukan kemauan politik dan komitmen penuh dari para pemimpin ASEAN untuk membentuk suatu kerja sama yang lebih terintegrasi dan terkoordinasi; (10) agar dapat memberikan sumbangan bagi pemeliharaan perdamaian dan keamanan Asia Pasifik, ASEAN perlu: (a) meningkatkan saling kepercayaan melalui kerja sama keamanan multilateral; (b) meningkatkan saling kepercayaan dengan negara-negara Indonesia serta Myanmar dengan mengikutsertakan mereka dalam pertemuan-pertemuan ASEAN sebagai peninjau lebih dulu. Selain itu juga harus diusahakan agar mereka ikut menjadi penandatangan dari *Treaty of Amity and Cooperation*; (c) menggiatkan pengkajian-pengkajian bersama mengenai ketahanan nasional dan

regional dengan sasaran konsep program pembangunan ketahanan regional yang komprehensif (*Kompas*, 8-8-1991).

Kepala Biro Ekonomi Setnas ASEAN Aswin Darwis MA mengatakan bahwa: (1) salah satu agenda terpenting dalam KTT ASEAN di Singapura adalah rencana liberalisasi perdagangan ASEAN atau *ASEAN Free Trade* yang konsep programnya sedang dibahas oleh kelompok kerja khusus dan akan selesai pada bulan November 1991; (2) ASEAN harus mampu mengatasi berbagai tantangan dan memanfaatkan peluang-peluang baru yang timbul akibat perkembangan perekonomian dunia saat ini, seperti rencana Pasar Tunggal Eropa (PTE), Perjanjian Perdagangan Bebas AS-Kanada dan demokratisasi ekonomi di Eropa Timur; (3) kekuatan ASEAN untuk menghadapi tantangan dan memanfaatkan peluang baru akan ditentukan oleh kondisi perekonomian masing-masing negara; (4) meskipun kemampuan individual ASEAN baik, tetapi kerja sama intra ASEAN belum memuaskan; (5) liberalisasi perdagangan merupakan salah satu terobosan baru yang lebih berani dan inovatif untuk mengatasi kelambanan kerja sama ekonomi ASEAN; (6) akhir-akhir ini ASEAN semakin terbuka dan berani keluar dari kelambanan pola kerja sama; (7) KTT ASEAN IV diharapkan menghasilkan keputusan politik penting di bidang ekonomi yang menetapkan kerja sama ekonomi yang jelas dan konkrit (*Kompas*, 8-8-1991).

Anggota Komisi I DPR RI, Marzuki Darusman mengatakan bahwa: (1) peranan organisasi pemuda jangan terpisah dari perkembangan ASEAN secara keseluruhan; (2) interaksi organisasi pemuda ASEAN di satu sisi akan meningkatkan persatuan dan mengembangkan wawasan untuk menghadapi tantangan-tantangan ekstern, di sisi lain dapat membentuk suatu subkultur baru untuk mengembangkan interaksi intelektual generasi muda (*Kompas*, 8-8-1991); (3) perlu ditumbuhkan identitas ASEAN yang lebih kental pada generasi muda di masing-masing negara anggotanya; (4) hari pemuda ASEAN perlu ditetapkan sebagai perintah untuk membangun pranata dan institusi ASEAN di kalangan generasi muda; (5) pertemuan pemuda ASEAN belum secara serius ditujukan untuk membangun identitas ASEAN; (6) peranan kerja sama ekonomi dan kebudayaan ASEAN dapat memberikan kerangka dasar ke arah perkembangan ASEAN; (7) konsensus ASEAN untuk memberi tempat utama bagi sektor swasta sebagai mesin penggerak ekonomi memiliki implikasi

terhadap interaksi sistem politik ASEAN (*Pelita*, 8-8-1991).

Prof. Dr. Sutan Takdir Alisyahbana mengatakan bahwa: (1) perubahan budaya ASEAN perlu dipercepat agar warga negaranya cepat dapat menyesuaikan diri dengan perkembangan arus globalisasi (*Kompas*, 8-8-1991); (2) Asia Tenggara merupakan satu-satunya kawasan yang dipengaruhi oleh berbagai kebudayaan besar dunia, seperti Cina, India, Timur Tengah dan Eropa; (3) generasi muda ASEAN ditantang untuk memelopori mensiteseikan semua unsur budaya dunia secara kreatif agar menghasilkan budaya baru yang unggul (*Pelita*, 8-8-1991).

II. SIDANG PARA MENLU ASEAN

A. PERSIAPAN

Wakil Menlu Malaysia, Abdullah Fadzil Che Wan, mengatakan kepada pers di Kuala Lumpur tanggal 14 Juni 1991 bahwa: (1) Malaysia dengan persetujuan negara anggota ASEAN lainnya mengundang Uni Soviet dan RRC untuk menghadiri sidang para Menlu ASEAN (AMM) ke-24 di Kuala Lumpur; (2) Malaysia sebagai tuan rumah AMM yang akan berlangsung tanggal 19-20 Juli 1991 telah menyampaikan undangan kepada Menlu Uni Soviet, Alexander Bessmertnykh, dan Menlu RRC, Qian Qi Chen; (3) Uni Soviet akan mengutus Wakil Perdana Menteri Yuri Maslyukov dan RRC mengirim Menlu Qian Qi Chen untuk menghadiri pertemuan tersebut; (4) dialog ASEAN dengan mitra-mitranya akan berlangsung pada pasca pertemuan para Menlu ASEAN tanggal 22-24 Juli 1991; (5) Korea Selatan akan menjadi mitra dialog ASEAN yang ketujuh atau yang terbaru; (6) AMM ke-24 ini mempunyai arti penting karena berlangsung seusai Perang Teluk dan berakhirnya Perang Dingin antara Timur dan Barat; (7) di sela-sela pertemuan formal juga akan terjadi pembicaraan bilateral antara semua negara yang hadir secara informal; (8) Malaysia akan mengadakan pembicaraan dengan Uni Soviet dan RRC secara terpisah sebelum berlangsung dialog antara para Menlu ASEAN dan mitra-mitranya (*Antara*, 13-7-1991).

Seusai membuka seminar tentang Peranan Pelayanan Konsultasi dalam Perekonomian Nasional Malaysia, Deputy Menlu Malaysia, Abdullah Fadzil Che Wan, mengatakan kepada pers di Kuala Lumpur tanggal 14 Juli 1991 bahwa: (1) ASEAN akan melakukan pertemuan terpisah dengan Uni Soviet dan RRC

mengenai penjajakan hubungan ekonomi di masa mendatang; (2) kedua negara itu akan diberi status sebagai tamu dan tidak akan mengikuti jalan sidang AMM serta PMC baik sebagai peninjau maupun mitra dialog; (3) masih terlalu dini untuk mengatakan bahwa ASEAN bermaksud memasukkan kedua negara tersebut sebagai mitra dialog (*Antara*, 14-7-1991).

Menlu Ali Alatas mengatakan kepada pers di Jakarta tanggal 16 Juli 1991 bahwa: (1) KTT ASEAN IV selain merupakan kesepakatan Manila, penyelenggaraannya juga dirasakan sudah sangat mendesak; (2) kehadiran Menlu RRC, Qian Qi Chen dan Wakil PM Uni Soviet, Yuri Maslyukov belum merupakan dialog tetapi baru merupakan pembicaraan pendahuluan; (3) ASEAN harus menghadapi perubahan-perubahan mendasar yang terjadi dalam dunia saat ini; (4) ASEAN perlu meninjau pelaksanaan keputusan Manila yang telah dapat meningkatkan kerja sama perdagangan dan ekonomi antar anggotanya; (5) Indonesia akan meninjau kemajuan yang telah dicapai dalam Kerja Sama Ekonomi Asia Pasifik (APEC); (6) sejak pertemuan AMM di Jakarta telah dicapai berbagai keputusan untuk memperkuat mekanisme dan struktur ASEAN, khususnya untuk memperkuat peranan Sekjen dan Sekretariat Pusat ASEAN; (7) Indonesia dan Malaysia akan menandatangani *Memorandum of Understanding* (MOU) mengenai pembentukan komisi bersama tingkat menteri untuk menangani masalah pulau Sipadan dan Ligitan. Komisi ini diharapkan dapat menyelesaikan persoalan yang dihadapi kedua belah pihak secara memuaskan atas dasar persahabatan dan keakraban sebagai negara tetangga dekat; (8) Presiden Soeharto telah memberi petunjuk secara khusus mengenai berbagai aspek dan merestui pembentukan komisi bersama Indonesia-Malaysia (*Pelita*, 17-7-1991); (9) para Menlu ASEAN akan mendiskusikan gagasan pembentukan Kelompok Ekonomi Asia Timur (EAEG) yang disusulkan oleh PM Mahathir Mohammad; (10) AMM tidak akan mengambil keputusan tentang EAEG karena hasil-hasil diskusi akan dimasukkan dalam agenda KTT ASEAN IV di Singapura, Januari 1992; (11) isu-isu yang akan dibahas dalam AMM dan PMC adalah keamanan regional, situasi ekonomi dan politik internasional, penyelesaian konflik Kamboja, situasi pasca Perang Teluk dan perkembangan di kawasan Asia Pasifik serta putaran Uruguay (*Antara*, 19-7-1991).

Menlu RRC, Qian Qi Chen, mengatakan kepada pers di Bandara Kuala Lumpur tanggal 17 Juli 1991 bahwa: (1) RRC menganggap kehadirannya sebagai tamu pada AMM di Kuala Lumpur merupakan suatu

awal yang baik untuk mempererat hubungan dengan ASEAN; (2) negaranya bersedia memperluas hubungan kerja sama dengan ASEAN; (3) ASEAN memainkan peranan penting dalam perdamaian dan stabilitas regional; (4) hubungan bilateral Indonesia-Malaysia telah berkembang pesat sejak terjalinnya hubungan diplomatik kedua negara, terutama dengan kunjungan para pemimpin kedua negara pada tahun 1990 (*Antara*, 19-7-1991).

Wakil Menlu Uni Soviet, Igor Rogachev mengatakan bahwa: (1) undangan kepada Uni Soviet untuk menghadiri AMM sangat tinggi nilainya dan merupakan langkah awal menuju terwujudnya dialog aktif yang saling menguntungkan bagi kedua belah pihak; (2) di masa lalu negaranya pernah memandang ASEAN sebagai organisasi politik dan militer, karena pikiran-pikiran usang ideologi menumpuk selama bertahun-tahun; (3) perubahan di Uni Soviet dewasa ini, termasuk politik luar negerinya telah memungkinkan negaranya berpandangan yang lebih realistis; (4) ASEAN merupakan organisasi regional yang penuh gairah yang mengutamakan kemajuan teknologi, sosial dan budaya untuk meningkatkan kesejahteraan negara-negara anggotanya; (5) kesempatan ini sangat bermanfaat bagi Uni Soviet untuk mempererat hubungan kerja sama dengan negara-negara ASEAN memecahkan masalah-masalah ekonomi dan politik yang sangat mendasak, serta memperkuat perdamaian dan kestabilan di kawasan Asia Pasifik (*Merdeka*, 18-7-1991).

Pada saat yang sama anggota Delegasi Uni Soviet, Vitaly Churkin, mengatakan bahwa: (1) dialog Uni Soviet-ASEAN merupakan tonggak penting dalam hubungan kedua belah pihak; (2) dialog itu merupakan konsekuensi logis dari kerja sama Uni Soviet dengan masing-masing negara anggota ASEAN dalam berbagai bidang; (3) dialog diharapkan dapat memberikan sumbangan penting bagi keamanan, stabilitas dan kerja sama di Asia Tenggara pada khususnya dan Asia Pasifik pada umumnya; (4) Uni Soviet dan Malaysia selain akan bertukar pandangan mengenai masalah hubungan bilateral, khususnya dalam hubungan ekonomi dan perdagangan, mereka juga membicarakan masalah-masalah regional dan internasional yang mendasak (*Merdeka*, 18-7-1991).

Sesampainya di Kuala Lumpur tanggal 18 Juli 1991, Wakil Menlu Uni Soviet, Yuri Maslyukov mengatakan kepada pers bahwa: (1) Uni Soviet ingin memper-tahankan kontak-kontak yang lebih dekat dengan ASEAN agar hubungan perdagangan, ekonomi dan

politik berkembang lebih cepat dari sebelumnya; (2) pembicaraan dengan ASEAN akan dapat mengarah pada suatu dialog tetap dengan organisasi regional ini; (3) delegasi Uni Soviet akan mengadakan pertemuan dengan perusahaan-perusahaan perdagangan terkemuka di Malaysia untuk menjajagi kemungkinan dan prospek mengembangkan kerja sama; (4) kemampuan untuk saling bekerja sama antara Uni Soviet dan Malaysia belum digarap sepenuhnya; (5) Uni Soviet bertujuan untuk membangun kontak dengan tokoh-tokoh pemerintah dan perusahaan komersial terkemuka guna menjajagi kerja sama ekonomi lebih lanjut (*Pelita*, 19-7-1991).

Siaran pers Kementerian Luar Negeri Muangthai tanggal 17 Juli 1991 mengatakan bahwa: (1) ASEAN akan mengesahkan resolusi pembentukan zona perdagangan bebas di Asia Tenggara; (2) AMM ke-24 di Kuala Lumpur akan membahas masalah tarif dan perdagangan yang telah tertunda selama sepuluh tahun (*Antara*, 18-7-1991).

Dirjen Sekretariat Nasional (Setnas) ASEAN Agus Tarmidzi, mengatakan kepada *Pelita* di Jakarta tanggal 20 Juli 1991 bahwa: (1) untuk mengantisipasi berbagai perubahan di dunia dan peningkatan kerja sama regional wewenang serta peran Sekjen dan Sekretariat ASEAN akan ditingkatkan. Demikian pula penentuan staf Sekretariat ASEAN tidak lagi berdasarkan jatah tiap negara, tetapi berdasarkan profesionalisme; (2) berbagai usulan mengenai perubahan dan peningkatan peran Sekjen dan Setnas ASEAN yang sudah diidentifikasi akan disetujui oleh para Menlu ASEAN; (3) dengan perubahan itu Sekjen ASEAN berperan untuk menyelenggarakan, mempersiapkan dan memimpin sebuah pertemuan ASEAN; (4) agar Sekretariat benar-benar berfungsi, maka berbagai pertemuan yang penyelenggaraannya selama ini selalu berpindah tempat akan ditetapkan pelaksanaannya di Sekretariat ASEAN Jakarta. Pertemuan standing committee tidak akan diketuai oleh Dirjen Setnas ASEAN tetapi akan dipimpin oleh Sekjen dan pertemuannya tidak dilakukan di negara yang mendapat giliran melainkan di Sekretariat ASEAN; (5) dalam pertemuan khusus masih akan dilakukan di luar Sekretariat terutama untuk pertemuan yang dipimpin oleh seorang menteri; (6) meskipun wewenang Sekjen ASEAN telah ditingkatkan perannya tetapi belum dapat disamakan dengan Sekjen PBB; (7) kehadiran RRC dan Uni Soviet dalam AMM berbeda dengan kehadiran PNG yang merupakan pengamat tetap; (8) Korea Selatan yang sejak tahun 1990 telah menjadi mitra wicara sektoral akan dikukuhkan men-

jadi mitra wicara penuh; (9) sejumlah negara di Eropa, Timur Tengah dan Amerika Latin yang telah mengajukan diri menjadi mitra wicara ASEAN masih akan dibahas oleh para pejabat senior dan para Menlu ASEAN; (10) usul EAEG oleh Malaysia tidak akan dibahas dalam AMM di Kuala Lumpur karena telah diputuskan untuk dibahas oleh kelompok kerja SOM (*Pelita*, 20-7-1991).

B. JALANNYA SIDANG

Pertemuan *ASEAN Ministerial Meeting* (AMM) ke-24 berlangsung di Kuala Lumpur tanggal 19-20 Juli 1991 untuk membahas: (1) persiapan landasan bagi KTT ASEAN IV di Singapura; (2) upaya memperkuat peranan Sekretariat ASEAN; (3) kerja sama proyek-proyek ASEAN; (4) penetapan Korea Selatan sebagai mitranya dialog ketujuh; (5) persiapan agenda dialog dengan para mitranya; (6) masa depan ASEAN untuk menghadapi perubahan blok politik dan ekonomi dunia; (7) keamanan regional dan sengketa sejumlah pulau di Laut Cina Selatan; (8) penyelesaian konflik di Kamboja dan masalah pangkalan militer di Filipina (*Antara*, 18-7-1991).

Menjelang pembukaan AMM, para Menlu ASEAN mengeluarkan pernyataan bersama mengenai Kamboja antara lain: (1) ASEAN menyambut positif undangan Dewan Tertinggi Nasional (SNC) Kamboja untuk mengakreditasikan perwakilan pada SNC; (2) pada tahap sekarang ini semua upaya yang dibuat untuk menjamin momentum bagi proses perdamaian di Kamboja perlu dipelihara; (3) SNC yang kini telah berfungsi perlu diperhatikan dan diperluas dukungan internasionalnya; (4) ASEAN telah meninjau kembali situasi di Kamboja dan mencatat adanya berbagai perkembangan penting yang terjadi sejak pertemuan SNC di Jakarta tanggal 2-4 Juni 1991; (5) pertemuan SNC di Pattaya Muangthai, tanggal 24-26 Juni 1991 telah menghasilkan suatu momentum untuk memajukan proses perdamaian menuju penyelesaian politik menyeluruh; (6) ASEAN berbesar hati dan menyambut baik pertemuan informal SNC di Beijing tanggal 17 Juli 1991 yang terutama berhasil memilih Pangeran Norodom Sihanouk sebagai Ketua SNC dengan suara bulat berdasarkan semangat kompromi dan rekonsiliasi nasional; (7) keputusan SNC untuk mendirikan markas besarnya di Phnom Penh memungkinkan SNC untuk melaksanakan fungsinya; (8) ASEAN mendukung usaha-usaha ketua bersama Konperensi Paris tentang Kamboja (PCC), dan kelima anggota tetap DK PBB serta Sekjen PBB, untuk terus membantu kelompok-kelompok di Kamboja mencapai

persetujuan; (9) ASEAN mengharapkan agar ketua bersama Indonesia dan Perancis menyelenggarakan pertemuan PCC kembali secepat mungkin; (10) ASEAN menyerukan perlunya rekonsiliasi di antara kelompok-kelompok Kamboja untuk mengintensifkan usaha-usaha mencari kompromi di antara mereka guna menyelesaikan masalah-masalah yang belum terselesaikan setelah konsultasi antara ketua bersama PCC dan anggota SNC di Jakarta tanggal 2-4 Juli 1991; (11) ASEAN menyambut baik keputusan SNC untuk mengirim delegasi yang dipimpin Sihanouk ke Sidang Umum PBB ke-46 dan mengharapkan SNC dapat menempati kursi Kamboja di PBB (*Antara*, 19-7-1991).

PM Malaysia, Mahathir Mohammad mengatakan pada pembukaan pertemuan itu bahwa: (1) ASEAN menolak upaya negara-negara Barat untuk mengkaitkan isu hak asasi manusia dengan perdagangan, investasi dan keuangan, karena hal itu merupakan cara Barat untuk meningkatkan proteksionisme mereka saja; (2) demokrasi dan hak asasi manusia merupakan landasan bagi keberhasilan pembangunan ekonomi dan sosial, karena itu ASEAN tidak mempertentangkan demokrasi bagi rakyat dan kesempatan bagi individu untuk mengembangkan potensi dirinya; (3) ASEAN tidak sependapat dengan pandangan yang mengatakan bahwa demokrasi merupakan satu-satunya definisi atau sebuah sistem politik yang demokratis dianggap baik bila memenuhi sejumlah ukuran tertentu; (4) norma dan persepsi hak asasi manusia masyarakat yang satu dengan masyarakat yang lainnya berbeda dan juga dari satu periode ke periode lainnya; (5) pengalaman ASEAN, baik di tingkat nasional maupun regional, menunjukkan bahwa keamanan, perdamaian, demokrasi dan kebebasan serta stabilitas hanya dapat tercapai bila rakyat terbebas dari kesulitan ekonomi; (6) ASEAN memprioritaskan stabilitas politik dengan memelihara hak-hak individu dengan kepentingan masyarakat secara menyeluruh, sehingga ASEAN dapat memajukan kehidupan sosial ekonomi rakyatnya (*Antara*, 20-7-1991); (7) kerja sama politik ASEAN mempunyai pengaruh politik di dunia internasional, tetapi kerja sama ekonomi internal dan eksternal ASEAN masih perlu ditingkatkan; (8) meskipun telah ada ASEAN *Preferential Trade Agreement* (PTA), volume perdagangan intra ASEAN saat ini masih di bawah 20% dari total volume perdagangannya; (9) ASEAN harus meliberalisasikan perdagangan intra regionalnya dan membentuk wilayah perdagangan bebas ASEAN pada akhir abad ini; (10) untuk mengintegrasikan ekonomi ASEAN masih terhambat oleh persaingan dan lemahnya kerja sama industri di

samping hambatan lainnya; (11) pembentukan kelompok ekonomi Asia Timur atau *East Asia Economic Grouping* (EAEG) diperlukan untuk memperluas kelompok ekonomi Asia Tenggara; (12) EAEG bukan merupakan suatu blok ekonomi yang baru melainkan merupakan suatu forum konsultasi negara-negara Asia Timur untuk menghadapi perdagangan dunia; (13) EAEG akan memberikan landasan bagi negara-negara Asia Timur untuk bertindak dan berbicara dengan satu suara guna menghadapi setiap permasalahan perdagangan yang berdampak langsung maupun tidak langsung (*Suara Pembaruan*, 19-7-1991); (14) EAEG dapat terbentuk jika ASEAN bersatu dan kuat, baik secara politik maupun ekonomi; (15) ASEAN agar bekerja sama dengan Uni Soviet dan RRC dan menyingkirkan kendala-kendala dalam hubungan antara kelompok ASEAN dan kedua negara itu demi keamanan dan perdamaian di Asia Tenggara (*Pelita*, 20-7-1991).

Menlu RI, Ali Alatas mengatakan pada pertemuan itu bahwa: (1) jika penyelesaian menyeluruh atas konflik Kamboja yang telah berlangsung lebih dari 12 tahun semakin lebih dekat dari dugaan semula bukan merupakan suatu hal yang dilebih-lebihkan, karena SNC telah berfungsi penuh dan memberikan sumbangan yang besar pada proses perdamaian di Asia Tenggara; (2) tiga perempat jalan menuju penyelesaian menyeluruh di Kamboja telah ditempuh dan kini hanya tinggal seperempat jalan yang masih tersisa yang penuh dengan hambatan dan hal-hal yang sensitif; (3) sejak pertemuan Jakarta, Pangeran Norodom Sihanouk telah memimpin SNC yang kemudian menyelenggarakan sidang lanjutan di Pattaya 24-26 Juni 1991, dan di Beijing tanggal 16-17 Juli 1991; (4) sidang SNC berikutnya hendaknya dapat lebih terfokus pada isu-isu mendasar seperti peran PBB dan hubungannya dengan SNC, demobilisasi angkatan bersenjata pihak-pihak yang bertikai dan langkah-langkah nyata untuk mencegah berulangnya praktek pembantaian massal; (5) kerja sama ASEAN dengan mitra dagangnya yang menyangkut kualitas dan jangkauan hubungan kerja sama di bidang akses pasar produk-produk ASEAN, kerja sama industri dan teknologi serta perdagangan umum seharusnya dapat lebih ditingkatkan; (6) ASEAN merasakan adanya kecenderungan umum di negara-negara industri untuk mengkaitkan isu hak asasi manusia dengan lingkungan hidup dalam konteks kerja sama pembangunan; (7) secara institusional ASEAN harus terus meningkatkan kegiatannya secara efisien, baik ke dalam maupun ke luar (*Antara*, 19-7-1991); (8) ASEAN harus dapat memberikan tanggapan kreatif

dan melakukan penyesuaian dinamis untuk menghadapi tantangan ketidakpastian dunia, baik secara politik maupun ekonomi dalam dekade 1990-an; (9) perubahan watak hubungan antar negara, khususnya antar negara besar, akan menghadapkan ASEAN pada suasana strategi global baru, yang cepat atau lambat akan berpengaruh di bidang politik, ekonomi dan konfigurasi keamanan di kawasan Asia Pasifik; (10) proses dan institusi akomodasi dan integrasi yang terjadi di Eropa dan seberang Atlantik tidak dapat dicangkokkan ke Asia Pasifik, karena terdapat perbedaan kondisi secara mendasar; (11) Indonesia berpandangan bahwa untuk meletakkan landasan bagi hubungan yang lebih damai dan stabil, secara realistis tidak dapat dilakukan dengan pembentukan kembali proses kerja sama keamanan Eropa (CSCE) di kawasan Asia Pasifik atau dengan seruan prematur bagi pembentukan kerangka keamanan Asia; (12) untuk meletakkan landasan hubungan yang stabil dan damai di kawasan Asia Pasifik perlu: (a) mempercepat penyelesaian konflik yang ada seperti menghentikan ketegangan di Kamboja dan, Jasirah Korea serta mencegah konflik di kawasan Laut Cina Selatan; (b) menjamin kelangsungan hubungan baik antara negara kawasan, antara negara besar, dan antara kelompok negara-negara tersebut; (c) memulai langkah-langkah selektif untuk membangun kepercayaan, termasuk memperbesar transparansi dalam pengaturan keamanan dan perluasan multilateral dari sejumlah persetujuan bilateral yang sudah ada; (13) pendekatan ASEAN melalui konsep ZOPFAN tetap valid dan relevan untuk menghadapi perubahan dunia; (14) realisasi konsep ZOPFAN dalam semangat transformasi yang cepat dari situasi global dan regional saat ini semakin mendesak; (15) sekarang ASEAN dituntut untuk menilai secara kritis kemajuan dan kekurangan dalam kerja sama intra ASEAN, serta mencari arah baru dan modalitas alternatif untuk intensifikasi dan akselerasi lebih lanjut; (16) upaya untuk meningkatkan kerja sama ekonomi intra ASEAN, khususnya di bidang perdagangan dan industri, selama 24 tahun ini ternyata masih jauh di bawah harapan bersama; (17) Indonesia menyambut baik langkah inovatif yang diambil oleh para Menteri Ekonomi ASEAN dalam pertemuannya yang ke-22 di Bali tahun 1990; (18) Indonesia secara khusus menerima usul pelaksanaan tarif preferensi efektif bersama atau *Common Effective Preferential Tariff* (CEPT) atas produk-produk industri terpilih sebagai kerangka baru untuk mendorong arus barang secara lebih bebas di antara negara anggota ASEAN, sehingga mendorong peningkatan perdagangan dan investasi intra ASEAN (*Suara Karya*, 20-7-1991); (19) kelompok ker-

ja ASEAN untuk membahas gagasan EAEG Malaysia telah melakukan pertemuan pertamanya guna merinci lebih jauh berbagai aspek gagasan itu. Delegasi Indonesia dalam pertemuan sekarang ini bersedia memberikan sumbangan konstruktif untuk membahas kesimpulan pertemuan pertama; (20) Indonesia menyambut baik hasil kerja Panel Lima Tokoh Terkemuka yang dipimpin oleh Tan Sri Ghazalie Shafie untuk memperkuat struktur dan mekanisme Sekretariat ASEAN (*Suara Pembaruan*, 20-7-1991).

Menlu Malaysia, Datuk Abdullah bin Ahmad Badawi, mengatakan bahwa: (1) sejauh ini ASEAN tetap menganggap konsep ZOPFAN dan Zona Bebas Senjata Nuklir di Asia Tenggara tetap valid dan relevan; (2) perjanjian Hidup Berdampingan dan Kerja Sama di Asia Tenggara harus menjadi dasar untuk memperluas kerangka kerja sama perdamaian dan keamanan serta membentuk prinsip-prinsip pengaturan hubungan di antara negara-negara Asia Tenggara; (3) ASEAN perlu menghadapi proteksionisme dan hambatan perdagangan bebas ASEAN (*Suara Pembaruan*, 20-7-1991).

Sedangkan Menlu Filipina, Raul Manglapus mengatakan bahwa: (1) ASEAN hendaknya mendukung perjanjian baru Manila-Washington tentang pangkalan AS di negaranya; (2) jika ASEAN memberitahu fasilitas itu diperlukan maka pangkalan tersebut akan tetap dipertahankan; (3) pemerintahnya mungkin akan dituduh kurang berjiwa nasionalis karena menandatangani perjanjian itu; (4) Filipina telah memperjelas posisinya dan tidak mempersoalkan fasilitas militer AS di Singapura (*Merdeka*, 20-7-1991); (5) kehadiran fasilitas militer AS di Asia Tenggara masih diperlukan; (6) ASEAN hendaknya meninggalkan sikap ambivalen atas kehadiran pangkalan militer asing di kawasan Asia Tenggara; (7) ASEAN hendaknya bersedia membuka konsensus yang tidak boleh menghindari masalah kehadiran pangkalan militer asing mengenai keamanan di Asia Tenggara dan tetap dalam kerangka ZOPFAN; (8) ASEAN harus menanggapi usulan EAEG Malaysia secara serius, karena perundingan GATT yang digalakkan lagi itu kemungkinan gagal tetap ada; (9) sejauh EAEG tidak tumpang tindih dengan APEC dan ASEAN menjadi pusatnya maka sangat penting untuk melakukan pengkajian lebih jauh tentang konsep itu (*Suara Pembaruan*, 20-7-1991).

Menlu Muangthai, Arsa Sarasin mengatakan bahwa: (1) negaranya menyambut baik perkembangan di Kamboja serta perubahan kebijaksanaan di Vietnam dan Myanmar karena dapat membawa mereka untuk berperan lebih aktif di kawasan ini; (2) KTT ASEAN di

Singapura tahun 1992 hendaknya dapat menghasilkan rencana aksi yang konkret dan mencerminkan kematangan, kesiapan dan kejelasan arah ASEAN; (3) realisasi gagasan kawasan perdagangan bebas ASEAN hendaknya bukan merupakan retorika semata (*Suara Pembaruan*, 20-7-1991).

Menlu Singapura, Won Kan Seng, mengatakan bahwa: (1) untuk meningkatkan kerja sama ekonomi ASEAN, usulan Perjanjian Kerja Sama Ekonomi oleh Filipina, CEPT oleh Indonesia dan kawasan perdagangan bebas oleh Muangthai harus dipelajari dengan serius dan tidak hanya menjadi lambang dan retorika; (2) proyek segitiga pertumbuhan Singapura-Johor-Batam merupakan contoh kawasan perdagangan bebas dan proyek semacam ini dapat dikembangkan di kawasan lain; (3) usulan-usulan yang telah masuk hendaknya dibicarakan dalam KTT ASEAN yang akan datang (*Suara Pembaruan*, 20-7-1991).

Menlu Brunei Darussalam, Pangeran Muhammed Bolkiah, mengatakan bahwa: (1) pembentukan kawasan perdagangan bebas ASEAN merupakan upaya untuk terus menumbuhkan ekonomi ASEAN; (2) EAEG mungkin akan mampu memberikan tawaran baru dan kesempatan yang lebih banyak bagi ASEAN; (3) Brunei sedang menjajagi keuntungan potensial yang dapat diraih dalam perdagangan yang melibatkan banyak pihak; (4) langkah perubahan Sekretariat ASEAN merupakan jawaban untuk menyesuaikan diri dengan perubahan tata dunia agar ASEAN tetap efektif dan relevan (*Kompas*, 20-7-1991).

C. HASIL-HASIL SIDANG

Komunike bersama AMM tanggal 20 Juli 1991 mengatakan antara lain: (1) perubahan hubungan strategis dan munculnya blok-blok persekutuan ekonomi memiliki implikasi terhadap Asia Tenggara dan harus dijawab secara kreatif dan dinamis; (2) ASEAN menyadari dirinya telah tumbuh sebagai organisasi regional yang dinamis, kenyal dan mempunyai daya tahan untuk menghadapi peningkatan tantangan ekonomi dan politik dekade 1990-an; (3) ASEAN harus meningkatkan kerja sama regional dengan memperkuat mekanismenya dan mempromosikan kerja sama dalam sistem perdagangan multilateral yang terbuka; (4) ASEAN harus memperluas dan meningkatkan kerja sama ekonomi antar negara Asia Tenggara dan dengan negara-negara di luar kawasan; (5) ASEAN sepakat untuk membentuk kelompok kerja yang akan mempelajari arah dan bentuk hubungan an-

tara ASEAN dengan negara-negara di luar ASEAN; (6) ASEAN mengukuhkan pembentukan kerja sama ASEAN dengan memperkuat Sekretariat ASEAN berdasarkan rekomendasi Panel Lima Tokoh Ternama yang mempelajari kelemahan dan kekuatan Sekretariat ASEAN. Untuk itu dibentuk sebuah kelompok kerja yang dipimpin oleh Dirjen Politik Brunei, Datuk Lim Jock Feng, untuk mempelajari arah rekomendasi Panel Lima dan bentuk hubungan yang diharapkan di masa mendatang; (7) ASEAN mempertimbangkan kesimpulan hasil pertemuan pertama Kelompok Kerja EAEG di Kuala Lumpur tanggal 4-5 Juli 1991 yang telah mencapai kemajuan. Kelompok Kerja EAEG agar mengadakan pertemuan di Singapura untuk mengkaji lebih jauh mengenai masalah tersebut yang hasilnya akan disampaikan pada para Menlu dan para Menteri Ekonomi ASEAN yang akan bertemu di Kuala Lumpur tanggal 7-8 Oktober 1991; (8) ASEAN sepakat meningkatkan status Korea Selatan sebagai mitra dialog penuh dan untuk pertama kali mengizinkan Seoul mengikuti *Post Ministerial Conference* (PMC); (9) ASEAN sepakat untuk memperkuat diri agar mampu dan tetap relevan menghadapi tantangan di masa mendatang; (10) ASEAN menyadari perlunya mulai bergerak ke arah masalah perdagangan bebas di abad mendatang; (11) konsep ZOPFAN, *Treaty of Ainity and Cooperation South East Asia* dan proses dialog dalam PMC merupakan dasar untuk mencapai perdamaian dan keamanan regional dalam dekade 1990-an; (12) dialog antar negara-negara anggota ASEAN dan komitmen menyelesaikan semua perselisihan antar anggota secara damai sangat penting; (13) hubungan dengan mitra dialog telah berkembang dari sebagai negara penerima donor menjadi hubungan yang lebih seimbang; (14) ASEAN menganggap, kecenderungan sejumlah negara mitra dialog untuk mengkaitkan masalah perlindungan lingkungan dan hak asasi manusia dengan kerja sama pembangunan dan komersial merupakan proteksionisme bentuk baru; (15) hak asasi di ASEAN tidak dapat disamakan dengan di Eropa dan negara-negara Barat lainnya; (16) dialog ASEAN-ME di Luksemburg sebaiknya dilanjutkan agar tercapai saling pengertian terutama dalam hak asasi manusia (*Kompas*, 22-7-1991); (17) ASEAN prihatin terhadap masalah pengungsi Indocina. Meskipun telah ada penyelesaian secara menyeluruh mengenai masalah itu tetapi jumlah pengungsi Vietnam di negara penampung sementara saat ini masih sama besarnya dengan jumlah di tahun 1979; (18) tujuan penyelesaian masalah pengungsi adalah penempatan pengungsi di negara ketiga dan repatriasi ke negara asalnya dalam waktu yang ditentukan sesuai

dengan Konperensi Jenewa tentang pengungsi tahun 1989; (19) ASEAN puas terhadap penempatan kembali para pengungsi yang datang sebelum masa akhir mereka diterima sebagai pengungsi telah melampaui target yang ditentukan dalam waktu dua tahun pertama pelaksanaan penyelesaian masalah pengungsi secara menyeluruh atau *Comprehensive Plan of Action* (CPA); (20) meskipun penurunan arus manusia perahu Vietnam ke ASEAN akhir-akhir ini menurun, tetapi ASEAN tetap mengharapkan Vietnam untuk selalu memantau warganya yang meninggalkan tanah airnya secara diam-diam guna menghindari pemulangan mereka secara paksa; (21) meningkatnya pengungsi yang menolak pemulangan kembali merupakan kondisi yang tidak dapat diterima dan sangat memprihatinkan ASEAN; (22) ASEAN mendesak agar dibentuk pusat-pusat penampungan warga Vietnam yang sesuai dengan CPA dan dikelola secara internasional sebagai pemecahan jalan tengah atas masalah repatriasi secara paksa (*Antara*, 21-7-1991); (23) perkembangan di Eropa Timur dan Eropa Tengah telah memberi sumbangan bagi perbaikan iklim ekonomi dan politik dunia, khususnya di Eropa; (24) meskipun Eropa Timur dan Tengah memerlukan bantuan untuk pembangunan, tetapi negara-negara maju agar tetap memperhatikan negara-negara berkembang (*Antara*, 22-7-1991).

Anggota Komisi I DPR RI, Marzuki Darusman, mengatakan kepada Antara di Kuala Lumpur tanggal 22 Juli 1991 bahwa: (1) ASEAN terkadang agak membatasi gerak Indonesia, terutama karena adanya mekanisme musyawarah dan mufakat yang harus mempertimbangkan hubungan dengan negara-negara tetangganya; (2) gerak politik luar negeri Indonesia menjadi terbatas karena beban sejarah masa lalu, sehingga setiap kali untuk melangkah dari tingkat yang wajar dikawatirkan akan dianggap sebagai upaya melakukan dominasi. Beban sejarah masa lalu Indonesia hampir sama dengan Jepang terutama dalam skala geografisnya; (3) Indonesia dihadapkan pada suatu pilihan antara politik luar negeri Indonesia dan politik luar negeri ASEAN yang sering mengurangi fleksibilitas Indonesia, tetapi keduanya juga dapat saling mengisi; (4) beban sejarah itu dapat dikikis sedikit demi sedikit melalui kerja sama intra ASEAN yang lebih kuat dan transparansi politik di masing-masing anggotanya. Pengertiannya adalah: (a) setiap negara anggota ASEAN boleh berkepentingan terhadap perkembangan dalam negeri tetangganya tetapi tidak mencampuri urusan dalam negerinya; (b) jaringan intra ASEAN harus diperkuat untuk cepat meredakan berbagai deviasi politik dan mencari jawaban-

nya; (c) harus dicapai integrasi maksimal untuk memperkecil kemungkinan timbulnya usaha penyelesaian politik atas suatu masalah secara konfrontatif; (d) transparansi politik untuk mengukur situasi politik tentang ada tidaknya persetujuan rakyat terhadap pengambilan keputusan politik tertentu; (e) negara-negara anggota ASEAN harus selalu menyadari perlunya kontrol terhadap politik luar negeri; (5) agar kerja sama ASEAN tetap langgeng maka pola kerja samanya harus dimantapkan dengan meninggalkan pola kerja sama yang bersandar pada aspirasi pada tokoh menjadi pola yang benar-benar dilandasi oleh institusi pembangunan; (6) ASEAN harus berani berpaling untuk mengatasi semua tantangan dengan menterjemahkan aspirasi tokoh menjadi bentuk kerja sama institusional; (7) aspirasi para tokoh ASEAN selama ini telah memberikan landasan kuat bagi kerja sama di antara negara anggotanya, tetapi masih perlu disempurnaan dan dimantapkan; (8) ASEAN perlu melaksanakan program politik untuk saling memperkenalkan tokoh-tokoh pemimpin generasi baru; (9) budaya politik ASEAN mempunyai ciri khas yang lebih menghargai hubungan-hubungan pribadi daripada hubungan formal; (10) pengalihan pola ini tidak akan gagal karena pada dasarnya kerja sama di antara negara lahir dari adanya kebutuhan-kebutuhan praktis untuk menciptakan lingkungan yang lebih baik bagi pembangunan nasional masing-masing; (11) institusi yang akan dibangun dan dikembangkan itu harus memungkinkan tokoh-tokoh yang baru lahir dapat melakukan dialog. (*Antara*, 22-7-1991).

Menlu Filipina Raul Manglapus mengatakan se usai penutupan sidang bahwa: (1) ASEAN harus maju dan meninggalkan sikap lamanya untuk membicarakan masalah keamanan regional secara lebih terbuka; (2) Filipina menginginkan perundingan masa depan pangkalan bukan menjadi proposal ASEAN; (3) ASEAN menyerukan negara-negara di Asia Tenggara lainnya, seperti Vietnam, Myanmar dan Laos, meningkatkan kerja sama keamanan dengan ASEAN (*Bisnis Indonesia*, 22-7-1991).

Menlu Ali Alatas mengatakan bahwa: (1) meskipun pihak-pihak yang bertikai di Kamboja telah mencapai kemajuan besar di Beijing, tetapi ASEAN tidak terlalu optimis karena belum ada kesepakatan mengenai isu-isu kunci; (2) pertemuan AMM di Kuala Lumpur sangat penting artinya bagi persiapan KTT ASEAN IV di Singapura tanggal 27-28 Januari 1992 dan negara anggota ASEAN lainnya harus membantu Singapura agar

KTT itu berhasil; (3) agenda KTT akan disiapkan oleh panitia yang beranggotakan semua negara anggota ASEAN, dan salah satunya adalah gagasan EAEG PM Malaysia; (4) Indonesia masih akan mempelajari secara menyeluruh atas konsep pembentukan kelompok ekonomi Asia Timur; (5) KTT ASEAN akan diselenggarakan setiap tiga tahun sekali. (*Antara*, 22-7-1991).

Sebelum meninggalkan Kuala Lumpur menuju ke Jakarta, Wakil PM Uni Soviet, Yuri Maslyukov, mengatakan kepada pers di Bandara Internasional Subang tanggal 21 Juli 1991 bahwa: (1) kunjungan ke Indonesia akan membicarakan masalah ekonomi, perdagangan, ilmu pengetahuan dan kerja sama teknik serta berdialog tentang masalah politik; (2) Indonesia dan Uni Soviet telah memiliki mekanisme konsultasi politik secara formal yang permanen dan praktis; (3) keinginan Uni Soviet untuk menjadi mitra dialog ASEAN hanya tinggal waktu saja; (4) kehadiran Uni Soviet di AMM merupakan kelanjutan kebijakan umum dari keterbukaan dan perestroika untuk meningkatkan hubungannya dengan negara-negara ASEAN; (5) hasil sidang SNC Kamboja akan dapat memecahkan persoalan yang dihadapi bangsa Kamboja saat ini; (6) negaranya mendukung konsep ZOPFAN dan kawasan bebas nuklir di Asia Tenggara; (7) keterlibatan Uni Soviet dalam pembicaraan masalah keamanan di Asia Pasifik perlu disetujui oleh negara-negara anggota PMC; (8) negaranya tidak akan ikut campur dalam masalah bilateral antara Amerika Serikat dan Filipina; (9) Uni Soviet mencari fasilitas kredit US\$200 juta dari Malaysia untuk membeli hasil-hasil pertanian selama dua tahun, tetapi masih dipertimbangkan karena belum ada keputusan akhir dari pemerintah Malaysia (*Kompas*, 22-7-1991).

III. KERJA SAMA EKONOMI

A. KERJA SAMA PERDAGANGAN DAN PARIWISATA

- Konsep Perdagangan Bebas

Menjelang akhir kunjungannya dua hari di Muangthai untuk membahas upaya meningkatkan kerja sama ekonomi ASEAN, PM Singapura, Goh Chok Tong, mengatakan kepada pers di Bangkok tanggal 24 Juni 1991 bahwa: (1) proposal pembentukan Kawasan Perdagangan Bebas ASEAN (PTA) untuk meningkatkan kerja sama ekonomi ASEAN akan siap pada bulan

Januari 1992 dan akan dibicarakan pada KTT ASEAN di Singapura; (2) proposal itu mencantumkan integrasi perekonomian ASEAN secara bertahap menuju FTA, seperti yang dilaksanakan di Amerika Utara saat ini; (3) proposal yang dibuat Muangthai akan siap pada bulan September 1991 dan akan dibawa ke sidang para Menteri Ekonomi ASEAN; (4) pemerintah Muangthai telah membentuk satu komite yang beranggotakan para Menteri dan akan membicarakan gagasan itu dengan para Menteri ASEAN lainnya; (5) gagasan pembentukan FTA timbul karena ASEAN merasa cemas atas pembentukan kelompok perdagangan Pasar Tunggal Eropa (ME) dan blok perdagangan bebas Amerika Utara (NAFTA); (6) pembentukan blok ME dan NAFTA itu akan memperkuat posisi mereka dalam bernegosiasi dengan satu negara secara individu karena tidak berimbang; (7) satu negara ASEAN tidak akan mampu bernegosiasi secara baik dengan satu blok yang didukung oleh beberapa negara anggotanya; (8) Muangthai menginginkan integrasi pasar ASEAN tercapai dalam 10 tahun, tetapi Singapura menganggap jangka waktu yang paling tepat adalah 20 tahun; (9) langkah awal integrasi akan dimulai dengan pengurangan tarif di dalam ASEAN dan usul Indonesia mengenai tarif efektif bersama (CEPT) dapat digunakan setiap saat akan diperimbang; (10) jika ASEAN berhasil mewujudkan integrasi ekonomi, negara lain yang ingin menjadi anggota ASEAN dapat dipertimbangkan; (11) Korea Selatan, Hongkong dan Taiwan tidak perlu bergabung dalam ASEAN tetapi dapat menjadi anggota ASEAN *Economic Arrangement* (AEA); (12) Singapura mendukung gagasan pembentukan Kelompok Ekonomi Asia Timur (EAEG) yang diajukan oleh Malaysia (*Bisnis Indonesia*, 27-6-1991).

Sementara itu, Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Departemen Perdagangan RI, Paian Nainggolan, mengatakan kepada pers di Jakarta tanggal 6 Agustus 1991 bahwa: (1) konsep perdagangan bebas ASEAN (FTA) yang diajukan oleh Muangthai berkaitan dengan besarnya bea masuk semua komoditi masing-masing negara anggota. Oleh sebab itu semua anggota ASEAN harus meneliti kembali tarif bea masuk setiap komoditi di negaranya; (2) tingginya tarif bea masuk barang menyebabkan sulitnya menurunkan atau membebaskan bea masuk; (3) melalui FTA sangat sulit menyesuaikan bea masuk satu barang yang mencapai 40% menjadi 0%; (4) dua konsep untuk membicarakan masalah perdagangan ASEAN yaitu ASEAN PTA (*Preferential Trade Arrangement*) dan preferensi tarif efektif (CEPT) sulit digabungkan; (5) ASEAN PTA

merupakan konsep perdagangan lama yang memperdagangkan sekitar 15.000 jenis dagangan. Kelemahan konsep ini adalah: (a) cenderung membodohi diri sendiri karena masing-masing negara bertekad dapat mengkontribusi barang yang memperoleh potongan dari PTA; (b) potongan PTA 50% mendorong setiap negara untuk mengajukan barang dalam jumlah besar yang tidak biasa diperdagangkan dan *not even exist trade*; (c) tidak efektif seperti yang diharapkan karena tujuan utamanya adalah bukan tarif barang, tetapi besarnya potongan harga barang; (6) tujuan dasar konsep CEPT yang diusulkan oleh Indonesia adalah tarif yang efektif sehingga terdapat satu tekad bersama agar bea masuk bagi suatu barang efektif di seluruh ASEAN; (7) berbagai langkah yang diperlukan untuk menerapkan CEPT; (a) pelaksanaannya secara berjenjang dan harus dimulai dari bea tarif barang yang terendah yaitu dari 5% menjadi 0%, 10% menjadi 5%, 15% menjadi 10% dan seterusnya; (b) agar mudah disepakati ditetapkan dahulu barang yang bea masuknya rendah; (8) konsep CEPT itu sangat pragmatis karena semua komoditi ASEAN yang bea masuknya 5% mudah disepakati penghapusannya. CEPT juga merupakan konsep yang paling mudah dan pragmatis untuk menuju suatu kawasan perdagangan bebas ASEAN; (9) kelemahan konsep perdagangan bebas (FTA): (a) barang-barang yang diperdagangkan bukan barang konsumsi, tetapi barang-barang *non consumers goods*, seperti semen dan produk kimia; (b) suatu negara akan sulit untuk menurunkan bea masuk barang yang mencapai 40%. Semua barang yang bea masuknya tinggi sangat sulit untuk dibebaskan; (c) ada kemungkinan campur tangan pihak ketiga karena barang yang beredar antar ASEAN dapat berasal dari negara lain (*Pelita*, 7-8-1991).

B. KERJA SAMA INDUSTRI, MINERAL DAN ENERGI

1. Kerja Sama Industri

Antara tanggal 22 Juli 1991 memberitakan bahwa: (1) pada tanggal 20 Juli 1991 para Menlu ASEAN menandatangani kesepakatan tambahan atas proyek pertambangan potash ASEAN yang pembangunannya dikuasakan kepada Muangthai untuk dijadikan salah satu proyek industri ASEAN (AIP); (2) proyek yang berkapasitas satu juta ton potash (garam abu) per tahun itu dijadwalkan mulai berproduksi tahun 1995; (3) proyek yang mencakup daerah seluas 100 kilometer persegi itu akan dibangun di distrik Bannet Narong propinsi

Chaiyaphum; (4) proyek ini diperkirakan akan berusia sekitar 30 tahun dengan perhitungan keuntungan investasi sekitar 18% atau lebih dan mampu memenuhi kebutuhan pupuk potash negara-negara ASEAN dengan harga bersaing; (5) saham proyek itu dari Muangthai 71%, Indonesia dan Malaysia masing-masing 13% serta Filipina, Singapura dan Brunei Darussalam masing-masing 1%.

2. Kerja Sama Energi

Pertemuan para Menteri Energi ASEAN ke-10 berlangsung di Singapura tanggal 22 Agustus 1991, dihadiri oleh Menteri Komunikasi dan Menteri Negara Singapura, Mah Bow Tan, Menteri Pembangunan Brunei Darussalam, Pg. Dato Seri Paduka D.Hj. Ismail bin Pg. Hj. Djamil, Menteri Perdagangan dan Energi Indonesia, Ginanjar Kartasmita, Menteri Energi, Telekomunikasi dan Pos Malaysia, Dato Seri S. Samy Vellu, Direktur Pelaksana Kantor Urusan Energi Filipina, Wenceslao R De La Paz dan Menteri pada Kantor Perdana Menteri Muangthai, Dr. Phaichitr Uathvikul, untuk membahas peningkatan kerja sama energi dan mengkaji ulang sejumlah proyek kerja sama yang telah disepakati (*Kompas*, 23-8-1991).

Deputi PM Singapura, BG Lee Hsien Loong, mengatakan pada pembukaan pertemuan itu bahwa: (1) kerja sama energi ASEAN dapat meningkatkan ketahanan anggotanya untuk menghadapi fluktuasi harga minyak bumi, khususnya anggota yang tidak memiliki tambang minyak; (2) kerja sama energi dibutuhkan untuk menghadapi gejolak harga; (3) para pejabat tinggi yang membidangi energi agar mengkaji ulang sejumlah proyek kerja sama di bidang ini dan membahas proyek-proyek baru yang dapat dikerjakan; (4) kerja sama energi ASEAN telah mencapai banyak kemajuan, khususnya setelah disepakatinya *ASEAN Petroleum Security Arrangement* (APSA), oleh karena itu kerja sama model ini harus dikembangkan oleh ASEAN; (5) kerja sama ekonomi dan energi ASEAN tidak harus selalu melibatkan seluruh negara anggota ASEAN di setiap proyeknya dan menunggu konsensus bersama; (6) proyek yang hanya melibatkan dua atau tiga negara anggota ASEAN dapat dikembangkan dan bila ternyata berpotensi negara anggota lainnya dapat dilibatkan (*Suara Karya*, 23-8-1991); (7) ASEAN perlu mempererat kerja sama dalam bidang yang berkaitan dengan pengembangan dan pemakaian sumber-sumber energi, keahlian manajemen energi dan pemanfaatan infra-

struktur; (8) pengadaan energi dengan harga bersaing sangat vital untuk pembangunan ekonomi, karena itu krisis-krisis minyak seperti tahun 1973 dan 1979 serta invasi Irak ke Kuwait agar dihindari; (9) negara-negara yang tidak mempunyai hidrokarbon dan sumber energi lainnya tidak dapat membatasi ketergantungannya pada energi impor dan tidak luput dari fluktuasi harga minyak; (10) kerja sama energi ASEAN dapat membantu negara konsumen mendeversifikasikan ketergantungannya dan memanfaatkan energi secara lebih efisien; (11) pertumbuhan ekonomi yang tenang atau melambung secara dramatis dapat meningkatkan pemakaian energi; (12) perbedaan tujuan dan prioritas pembangunan di antara negara anggota ASEAN perlu diperhatikan dalam setiap kerja sama agar proyek yang menguntungkan dua atau tiga negara anggotanya dapat dilaksanakan; (13) keputusan Malaysia dan Singapura untuk mensuplai gas alam guna pembangkit tenaga listrik di Singapura adalah tepat dan sesuai dengan putaran waktu dalam lingkungan yang kompetitif dan dinamis; (14) ASEAN memiliki dasar-dasar untuk memperluas kerja sama agar kesinambungan pertumbuhan ekonominya dapat dicapai seperti: (a) saling melengkapi pembangunan ekonomi; (b) tersedianya sumber dalam alam dan manusia; (c) lokasi yang strategis dan stabilitas politik; (15) tujuan utama didirikan ASEAN adalah menciptakan lingkungan yang stabil dan aman agar setiap negara anggotanya mampu dan berhasil melakukan pembangunan; (16) ASEAN telah berperan untuk mewujudkan stabilitas regional sehingga pembangunan ekonomi setiap anggotanya dapat tumbuh tanpa terhambat oleh pertentangan; (17) Singapura akan sulit menarik investasi asing yang mempercepat proses industrialisasi dan pertumbuhan ekonominya tanpa stabilitas yang diciptakan ASEAN; (18) dalam dekade 1990-an kerja sama ekonomi ASEAN harus lebih maju karena lingkungan bisnis global semakin kompetitif; (19) ASEAN harus bekerja sama untuk menerobos proteksi yang dilakukan oleh banyak negara; (20) kekurangan dan kelebihan masing-masing negara dalam kerja sama segitiga Indonesia-Malaysia-Singapura akan dapat saling melengkapi; (21) proyek-proyek di segitiga itu akan melahirkan kekayaan baru dan melebarkan pasar serta menciptakan pasaran baru (*Kompas*, 23-8-1991).

Menteri Pertambangan dan Energi Ginanjar Kartasmita mengatakan: (1) kestabilan harga minyak dunia sesuai dengan harga referensi OPEC, US\$21 barel, adalah penting; (2) masuknya produksi minyak Irak dan Kuwait dalam waktu dekat akan mempengaruhi harga

minyak dunia; (3) Irak diperkirakan dapat memproduksi lebih dari dua juta barrel per hari, tetapi karena dibatasi oleh DK PBB maka produksinya diperkirakan hanya sekitar 0,5 juta barrel per hari seperti kemampuan Kuwait pada enam bulan pertama tahun 1992; (4) bila OPEC mampu mempertahankan tingkat produksinya (ditambah dengan rata-rata produksi Irak dan Kuwait) maka produksi keseluruhan OPEC dalam enam bulan pertama 1992 diperkirakan mencapai 23,3 juta barrel per hari dan 24,3 juta barrel per hari pada enam bulan kedua; (5) masalah harga minyak, selain ditetapkan oleh keseimbangan permintaan dan penawaran, juga dipengaruhi oleh faktor-faktor psikologis yang bersumber pada suhu politik dunia (*Suara Pembaruan*, 23-8-1991).

Pertemuan sepakat untuk: (1) mengembangkan kerja sama ketenagalistrikan dan penggunaan batu bara; (2) membangun sembilan proyek kerja sama kelistrikan yang pelaksanaannya berada di bawah koordinasi pimpinan perusahaan kelistrikan negara masing-masing seperti: (a) pembangunan mini hidro dan riset serta pengembangan engineering (Indonesia); (b) aplikasi komputer, interkoneksi dan pengembangan pelatihan (Malaysia); (c) proyek kelistrikan desa dan kota dan pusat informasi tenaga listrik (Muangthai); (d) pengembangan panas bumi (Filipina), dan standardisasi (Singapura); (3) menjajagi empat buah proyek interkoneksi listrik antar 4 negara anggota ASEAN (Serawak-Kalimantan Barat, Serawak-Brunei-Sabah, Sumatera-Semenanjung Malaysia dan Batam Singapura) (*Suara Karya*, 23-8-1991).

Menteri Pertambangan dan Energi Ginandjar Kartasasmita mengatakan kepada pers di Singapura bahwa: (1) Filipina meminta Indonesia untuk memperjuangkan stabilitas harga minyak; (2) permintaan keringanan harga minyak dari negara anggota ASEAN lainnya diserahkan pada kondisi pasar minyak, sebab Indonesia tidak dapat menjual dengan harga murah; (3) Indonesia hanya dapat memberikan keringanan berupa cara pembayaran yang lebih panjang; (4) pembentukan Komite Energi ASEAN merupakan satu masalah yang belum disepakati, karena terdapat perbedaan prinsip antara Malaysia yang menganggap energi sebagai komoditi dan Indonesia beranggapan energi merupakan suatu yang khusus (*Suara Pembaruan*, 23-8-1991); (5) ada tiga studi *ad hoc* yang dilakukan di bawah koordinasi para pemimpin kelistrikan ASEAN, yaitu: (a) studi *ad hoc* mencakup konsep built, operasional dan transfer (BOT) dilakukan Indonesia; (b) standardisasi pembangkit panas bumi ukuran kecil di Filipina; (c)

pemakaian pembangkit *combined cycle* di Muangthai (*Kompas*, 23-8-1991); (6) menurut hasil studi yang dipublikasikan oleh International Gas Union, Asia Tenggara merupakan tempat penampungan gas alam. Tetapi masih memerlukan pembuktian dengan pemboran karena masih merupakan spekulasi; (7) kemungkinan untuk membagi kekayaan gas alam melalui jaringan pipa gas di Asia Tenggara adalah tepat karena merupakan cara yang paling murah; (8) Indonesia, Brunei Darussalam dan Malaysia merupakan produsen gas alam yang besar, sedangkan Filipina dan Singapura tidak memilikinya; (9) pelaksanaan pembangunan gas sekarang ini disesuaikan dengan tingkat kebutuhan masing-masing negara, sehingga jaringan pipa gas belum menjadi prioritas utama Indonesia; (10) Indonesia sedang merencanakan pembangunan pipa gas dari Natuna dan Matak di Laut Cina Selatan untuk memenuhi kebutuhan energi di Batam dan Singapura. Jaringan pipa itu dapat dilanjutkan ke Arun atau untuk melayani konsumen di Pulau Jawa; (11) pembangunan jaringan pipa gas ASEAN akan dikaitkan dengan hubungan pipa bilateral yang telah direncanakan sebelumnya; (12) jaringan itu akan menghubungkan ekspor Indonesia, Malaysia, Brunei dan Muangthai terus ke Singapura dan Filipina; (13) penelitian pembangunan pipa gas itu mulai dilakukan pada bulan September 1991 dan berlangsung selama 18 bulan (*Kompas*, 26-8-1991).

Pada saat yang sama, Dirut PLN Ir. Ermansyah Jamin mengatakan bahwa: (1) proyek interkoneksi Batam-Singapura dapat segera direalisasi karena Singapura memiliki kelebihan kapasitas listrik yang diekspor ke Batam melalui kabel laut. Singapura dapat mengeksport listrik ke Batam jika Indonesia bersedia menggelar kabel laut sepanjang 28 kilometer untuk menghubungkan kedua tempat tersebut; (2) Indonesia menawarkan kepada negara anggota ASEAN lainnya, terutama Malaysia, Filipina dan Muangthai untuk membeli produksi batu baranya dalam kontrak jangka panjang, karena pembelian selama ini dilakukan melalui tender biasa; (3) negara anggota ASEAN lainnya dapat meningkatkan impor batu baranya dari Indonesia, terutama Malaysia yang 60% kebutuhan batu baranya di impor dari Australia (*Suara Karya*, 23-8-1991).

Ketua Komisi IV DPR RI, Tadjuddin Noer Said, mengatakan kepada Merdeka tanggal 24 Agustus 1991 bahwa: (1) kerja sama energi ASEAN sangat tepat untuk mengantisipasi pertumbuhan ekonomi di kawasan Asia Pasifik dan sangat menguntungkan bagi Indonesia yang memiliki cadangan energi yang relatif besar; (2) negara-negara anggota ASEAN harus meningkatkan

saling pengertian agar potensi energi yang terkandung di masing-masing negaranya dapat dimanfaatkan secara optimal; (3) ASEAN harus mampu melihat potensi gas alam yang dimilikinya untuk jangka panjang dan berorientasi pada azas kemanfaatan sumber daya, baik untuk dalam negeri maupun untuk diekspor; (4) hampir semua negara penghasil gas di ASEAN cenderung berorientasi pada pasar Jepang, karena harganya cukup menarik; (5) ASEAN harus memulai memperluas pemasaran gas alamnya agar tidak tergantung pada satu negara. Dengan demikian harganya tidak dapat dipertahankan, sehingga terhindar dari kerugian; (6) pertumbuhan ekonomi di kawasan Asia Pasifik dan cadangan sumber daya energi yang dimiliki ASEAN merupakan pendorong untuk lebih memperbaiki kerja sama ASEAN; (7) kerja sama energi ASEAN akan memberi keuntungan bagi masing-masing negara anggotanya, baik secara langsung maupun tak langsung; (8) kerja sama di bidang kelistrikan dan batu bara merupakan peluang untuk memanfaatkan sumber daya energi yang ada di wilayah terdekat; (9) untuk mengembangkan potensi sumber energi batu bara di salah satu negara ASEAN diperlukan perlindungan tarif bea masuk bagi energi yang dihasilkan oleh salah satu negara anggota ASEAN yang dijual ke negara anggota lainnya agar harganya lebih rendah dan mampu bersaing dengan produsen di luar kawasan ASEAN; (10) negara anggota ASEAN yang membeli batu bara dari Indonesia memiliki keuntungan yang relatif besar karena jaraknya yang dekat sehingga biaya angkutnya menjadi lebih murah; (11) jika preferensi tarif ini diberlakukan di ASEAN tentu akan mendorong pengembangan batu bara di Indonesia yang memiliki cadangan besar untuk memenuhi kebutuhan energi di kawasan ini; (12) pemerintah Indonesia harus melakukan penataan yang mendasar untuk mengembangkan potensi batu baranya. Untuk menghindari persaingan yang tidak sehat di antara produsen batu bara di Indonesia yang dapat merugikan penerimaan devisa negara diperlukan penataan eksplorasi, eksploitasi dan pemasaran yang lebih tertib; (13) penataan pasar batu bara sangat strategis di masa mendatang karena pemanfaatan sumber daya ini dapat lebih optimal, sebab batu bara penjualannya dilakukan oleh swasta dan berbeda dengan minyak bumi yang pemasarannya dilakukan oleh pemerintah; (14) untuk menjadikan batu bara sebagai komoditi strategis pengganti minyak, penataannya harus dilakukan sejak dini sebelum dikembangkan secara maksimal.

Dirjen Listrik dan Energi Baru Prof. Dr. Artono Arismunandar mengatakan kepada Kompas tanggal 23

Agustus 1991 bahwa: (1) diperlukan dana US\$3,8 juta untuk meneliti pembangunan jaringan pipa gas alam trans ASEAN; (2) selain dari negara anggota ASEAN sendiri, dana itu juga diperoleh dari suatu sindikat di Italia dan Perancis; (3) setiap negara anggota ASEAN akan memberi sumbangan dalam bentuk natura, seperti tenaga ahli yang telah bekerja di bidang perminyakan; (4) proyek pipanisasi trans ASEAN semakin gencar dibicarakan karena secara ekonomis dapat dilaksanakan untuk melayani kebutuhan energi gas alam seluruh anggota ASEAN; (5) pelaksanaan proyek ini baru dapat direalisasikan setelah hasil studi yang dilakukan disepakati para Menteri Ekonomi Bidang Energi ASEAN; (6) Indonesia mempunyai peluang untuk memasarkan batu baranya yang selama ini telah dirintis ke Filipina, Malaysia dan Muangthai; (7) Muangthai akan segera menandatangani kerja sama untuk penambangan batu bara di Jambi dan hasilnya akan dimanfaatkan untuk bahan pembangkit listrik di negaranya; (8) usaha interkoneksi kelistrikan akan dikembangkan melalui studi kelayakan proyek antara Serawak-Kalimantan Barat, Serawak-Brunei Darussalam, Sumatera-Semenanjung Malaysia dan Batam-Singapura. Tetapi usaha itu hanya akan difungsikan sewaktu-waktu jika di salah satu negara membutuhkan suplai dari negara lainnya; (9) sistem interkoneksi yang merupakan perpaduan kelistrikan seperti Jawa-Bali belum pernah dilakukan dan belum dikenal di ASEAN; (10) kerja sama interkoneksi Indonesia Singapura masih akan diteliti, karena selain masih membutuhkan listrik, Singapura juga tidak akan mempersoalkan pembangunan pusat pembangkit listrik di Batam; (11) Singapura akan segera membangun pembangkit listrik sendiri berkekuatan 100 MW di Pulau Bintan sejalan dengan pengembangan kawasan pariwisata di daerah itu dengan memanfaatkan BBM untuk memenuhi kebutuhannya sendiri; (12) pengadaan listrik di Batam sangat mendesak sehingga perlu segera dibangun sebuah pembangkit gas turbin; (13) untuk membangun jaringan kabel bawah laut dari Batam ke Singapura perlu pertimbangan yang matang karena sifatnya hanya sementara selama pulau itu belum mendapatkan tenaga listrik yang cukup (*Kompas*, 26-8-1991).

C. KERJA SAMA PANGAN, PERTANIAN DAN KEHUTANAN

- *Sidang COFAF ke-14*

Sidang Komite Pangan, Pertanian dan Kehutanan ASEAN berlangsung di Jakarta tanggal 7 Agustus 1991

untuk membahas: (1) penentuan standar vaksin, impor embrio, karantina hewan dan riset; (2) masalah alih teknologi laboratorium dan program pengawasan penyakit rabies (*Antara*, 7-8-1991).

Seusai membuka pertemuan, Dirjen Peternakan Soehadji mengatakan bahwa: (1) hambatan pembangunan peternakan di wilayah ASEAN adalah rendahnya produktivitas, harga yang tidak stabil dan proteksi oleh negara-negara maju serta kurangnya strategi pasar; (2) 40% penduduk ASEAN adalah peternak yang berpendapatan rendah, karena itu kerja sama peternakan ASEAN perlu ditingkatkan untuk meningkatkan pendapatan mereka; (3) kerja sama peternakan akan lebih ditekankan dalam pengembangan bahan pangan hewani untuk meningkatkan kualitas manusia, perdagangan ternak, kerja sama bidang bioteknologi dan upaya pengamanan plasma nutfah; (4) untuk memajukan program peternakan, pemerintah Indonesia telah meminta pihak swasta agar berperan aktif dalam agribisnis dan agro industri (*Angkatan Bersenjata*, 8-8-1991); (5) Indonesia ditunjuk sebagai pusat informasi penyakit dan produksi ternak di ASEAN, dan sedang berupaya menjalin kerja sama dengan badan-badan internasional agar dapat menjalankan fungsinya dengan baik; (6) di wilayah ASEAN masih terdapat jenis penyakit hewan mulut dan kuku (PMK), sampar sapi dan radang paru-paru yang dapat merugikan para peternak; (7) Indonesia telah dinyatakan bebas PMK; (8) potensi dan prospek peternakan ASEAN cukup baik karena populasi ternaknya cukup besar (*Antara*, 7-8-1991).

IV. KERJA SAMA NON EKONOMI

A. KERJA SAMA KEBUDAYAAN DAN INFORMASI

- Pertemuan Menteri Penerangan ASEAN ke-2

Pertemuan para Menteri Penerangan ASEAN ke-2 berlangsung di Kuala Lumpur tanggal 29 Juli - 2 Agustus 1991 untuk mengevaluasi: (1) pengembangan teknologi modern melalui satelit; (2) hasil pertemuan Menpen ASEAN ke-1 di Jakarta 1989 dan upaya pelaksanaannya. Delegasi Indonesia yang diketuai oleh Menpen Harmoko terdiri atas Sekjen Deppen Emir Mangawang, Dirjen PPG Subrata, Dirjen RTF Alex Leo Zulkarnaen, Pemimpin Umum LKBN ANTARA Handjojo Nitimihardjo serta Karo Pengembangan dan Analisa ASEAN Deplu Juwana (*Antara*, 1-8-1991).

Seusai diterima Presiden Soeharto di Bina Graha tanggal 19 Juli 1991, Menteri Penerangan Harmoko mengatakan bahwa: (1) pengembangan teknologi modern perlu dilakukan, karena udara ASEAN kemungkinan akan banyak terpengaruh oleh siaran-siaran yang datang dari luar kawasan; (2) ASEAN memerlukan langkah baru yang mengacu pada era globalisasi untuk memandu udara dan ruang angkasanya; (3) penyewaan satelit Palapa mendorong anggota ASEAN cenderung untuk mengembangkan transponder-transponder, sehingga memerlukan pemikiran bersama untuk mengatasinya, khususnya mengenai penyediaan dana; (4) Presiden Soeharto mengharapkan delegasi Indonesia mampu membawakan pemikiran-pemikiran untuk menegakkan tata informasi di ASEAN yang dapat membantu meningkatkan kesejahteraan masyarakat; (5) peningkatan arus informasi yang mendukung pengembangan ASEAN sangat penting, karena itu pengembangan informasi dan komunikasi yang sesuai sangat diperlukan (*Pelita*, 19-7-1991); (6) pertemuan pejabat senior penerangan (SOM) yang berlangsung tanggal 29 Juli 1991 dibagi dalam dua kelompok dan tertutup untuk mempersiapkan bahan-bahan yang akan dibahas oleh para Menpen ASEAN (*Antara*, 1-8-1991).

Menpen Harmoko mengatakan kepada pers di Bandara Internasional Subang tanggal 31 Juli 1991 bahwa: (1) kerja sama penerangan antar negara ASEAN perlu lebih diperdalam lagi sejalan dengan majunya teknologi informasi. Indonesia mengajak anggota ASEAN lainnya untuk mengambil langkah bersama guna menghadapi kemajuan teknologi informasi dan sekaligus mengantisipasi kecenderungan gerak kemajuannya di masa mendatang; (2) ditingkatkannya kerja sama penerangan ASEAN semakin memperkuat ketahanan nasional masing-masing negara anggotanya dan ketahanan regional kawasan Asia Tenggara; (3) sejak sekarang ASEAN harus mengantisipasi teknologi modern dan tidak perlu takut menerimanya agar pada sepuluh tahun mendatang tidak tertinggal; (4) informasi telah menjadi kebutuhan pokok manusia, karena itu kerja sama informasi ASEAN harus diarahkan untuk mendorong dan menopang pembangunan kawasan dan sekaligus dapat memperkuat ketahanan nasional dan regional (*Antara*, 1-8-1991).

PM Malaysia, Mahathir Mohammad, mengatakan pada pembukaan pertemuan itu bahwa: (1) ASEAN perlu menyeimbangkan toleransi kepada pers dalam melaksanakan kebebasan yang mereka miliki. Tetapi

toleransi tidak perlu diberikan jika pers terbukti dengan sengaja mengungkapkan kebohongan yang dapat merusak kehidupan bangsa; (2) tugas para Menpen ASEAN berat karena harus bertanggung jawab untuk mewujudkan arus informasi yang bebas dan menjamin terciptanya stabilitas di negara masing-masing; (3) ketidakstabilan di salah satu negara anggota ASEAN selain akan mempengaruhi stabilitas negara anggota lainnya juga stabilitas regional; (4) pemerintah akan gagal melaksanakan tugasnya, jika penyalahgunaan kebebasan pers dibiarkan; (5) tugas pemerintah bukan hanya melindungi kebebasan dan demokrasi tetapi juga menciptakan kehidupan sosial ekonomi yang baik bagi rakyatnya; (6) hak-hak dan kebebasan dalam demokrasi tidak berdiri sendiri, tetapi harus diimbangi dengan tanggung jawab, karena itu pemerintah wajib membimbing untuk mewujudkan kebebasan tanpa harus mengubah esensi demokrasi menjadi demokrasi terkendali (*Antara*, 1-8-1991); (7) pemerintah harus menuntun media massa karena kebebasan pers gaya Barat dapat merusak negara-negara yang sedang berkembang. Wartawan Barat hanya membuat cerita-cerita demi hiburan dan uang; (8) meskipun kebebasan pers merupakan esensi demokrasi tetapi pelaksanaannya hanya sepihak; (9) sangat sulit melarang surat kabar dan mengusir reporter tanpa mendapat tamparan dari pihak keempat (*fourth estate*) yang menganggap dirinya lebih bersih (*Kompas*, 2-8-1991).

Pertemuan sepakat untuk: (1) mengkaji penggunaan teknologi informasi canggih bagi kawasan Asia Tenggara; (2) mencari jalan untuk meningkatkan citra ASEAN di dunia internasional; (3) meningkatkan kerja sama media massa, baik media cetak maupun elektronik; (4) mengantisipasi penggunaan teknologi canggih, karena penggunaan teknologi ini mempunyai implikasi yang sangat jauh dan berjangka panjang atas kawasan ASEAN; (5) membuat kajian dan bertukar pengalaman mengenai dampak teknologi canggih terhadap tradisi, budaya dan nilai-nilai asli ASEAN; (6) menugaskan para pejabat senior masing-masing untuk memikirkan cara pendekatan bersama terhadap penggunaan teknologi canggih; (7) menyelenggarakan pertemuan SOM berikutnya di Filipina pada bulan Mei 1992 yang hasilnya akan disampaikan dalam Pertemuan Menpen ASEAN ke-3 di Filipina tahun 1993; (8) menetapkan pertemuan SOM minimal setahun sekali; (9) menggalakkan kerja sama penerangan di antara anggota ASEAN dalam basis bilateral (*Antara*, 3-8-1991).

Menteri pada Kantor Perdana Menteri Muangthai, Meechai Viravaidhaya, mengatakan kepada pers di

Bangkok tanggal 3 Agustus 1991 bahwa: (1) wartawan asing perlu didukung untuk mengunjungi negara-negara ASEAN agar memahami kawasan ini; (2) sulit menghentikan wartawan, tetapi ASEAN dapat menunjukkan pentingnya pemberitaan yang lebih baik; (3) para editor merupakan poros penting dalam penyiaran pemberitaan yang tidak fair, karena mereka hanya mempunyai sedikit pengetahuan tentang laporan yang diterima; (4) menetap dalam jangka waktu yang lama akan membantu memperbaiki kualitas pemberitaan; (5) Muangthai sepakat untuk mendirikan sebuah pusat layanan informasi ASEAN pada konperensi Bank Dunia bulan Oktober 1991 di Bangkok; (6) pembentukan kantor itu merupakan peluang baik bagi negara-negara ASEAN untuk meningkatkan peranannya dalam masyarakat internasional, dan memudahkan anggota ASEAN memberikan informasi kepada negara lain; (7) para wartawan asing akan dapat memperoleh informasi tentang individu negara-negara secara langsung dari kantor tersebut; (8) setiap negara anggota ASEAN hendaknya menyediakan tempat khusus bagi warga negara ASEAN agar mencerminkan kerja sama yang lebih kuat (*Antara*, 5-8-1991).

Menpen Harmoko mengatakan pada pers di Bandara Soekarno-Hatta sepulangnya dari Kuala Lumpur mengikuti Konperensi Menpen ASEAN bahwa: (1) ketimpangan arus informasi antara negara maju dan berkembang akan dijadikan agenda penting dalam pertemuan kerja sama ASEAN di masa mendatang; (2) kerja sama penerangan antar negara ASEAN selama ini mencapai banyak kemajuan; (3) arus informasi media cetak dan elektronika yang ada harus diarahkan ke sasaran yang tepat, dengan demikian dapat memperkuat ketahanan masing-masing negara dan stabilitas regional; (4) perlu segera diadakan pertemuan para pejabat senior penerangan ASEAN yang lebih khusus untuk membahas tentang kehadiran teknologi canggih dalam era globalisasi informasi; (5) setiap wartawan asing yang bertugas di ASEAN seharusnya memahami dan mengerti sistem nilai yang dianut oleh masyarakat ASEAN; (6) media asing bukan saja memiliki hak untuk mengembangkan kebebasan persnya, tetapi juga harus mampu mengembangkan tanggung jawabnya atas sistem nilai yang dianut oleh masyarakat ASEAN, agar pemberitaan yang memutar balikan fakta dapat dihindarkan; (7) Indonesia dan Malaysia sepakat untuk mengembangkan arus informasi yang dapat langsung menyentuh masyarakat di pedesaan; (8) Indonesia akan mengeluarkan izin cetak jarak jauh seperti yang telah dilakukan oleh Malaysia dan Singapura, karena itu masyarakat pers Indonesia harus sudah berani dan siap menerimanya; (9) cetak jarak jauh bagi media massa In-

donesia mempunyai arti yang sangat penting, karena setiap warga Indonesia yang berada di tempat terpencil mempunyai hak yang sama untuk memperoleh informasi yang akurat dan tepat; (10) konsep cetak jarak jauh ini diusulkan oleh sebuah konsorsium swasta nasional, dan bahkan Harian Singgalang dari Sumatera Barat telah mengajukan proposal untuk melakukannya di Jakarta (*Angkatan Bersenjata*, 5-8-1991).

PM Malaysia, Mahathir Mohamad, mengatakan kepada pers di Kuala Lumpur tanggal 12 Agustus 1991 bahwa: (1) negara-negara Barat menggunakan organisasi non pemerintah untuk menyabot stabilitas negara-negara sedang membangun; (2) beberapa kelompok lingkungan dari Barat telah berhasil memanfaatkan orang-orang Malaysia sebagai alat untuk menghambat pembangunan ekonomi dan ekspor lokal untuk bersaing dengan produk Barat; (3) beberapa negara maju telah memanfaatkan NGO untuk mempertahankan kepentingan ekonomi mereka dan mengaitkannya dengan masalah perlindungan lingkungan serta hak asasi manusia (*Pelita*, 14-8-1991).

Menteri Penerangan Malaysia, Mohamed Rahmat, mengatakan kepada pers di Kuala Lumpur tanggal 13 Agustus 1991 bahwa: (1) media Barat dan kelompok pers asing tidak menginginkan PM Malaysia Mahathir Mohammad berhasil membangun negerinya; (2) pemerintah Malaysia sedang mengambil langkah-langkah untuk menjamin rakyatnya agar tidak dijajah secara mental; (3) pemerintah sedang merancang kebijaksanaan penyiaran dan informasi baru serta membentuk sebuah unit internasional dalam Radio dan TV Malaysia; (4) Malaysia tidak akan mengizinkan pihak swasta menggunakan piringan-piringan satelit untuk menerima siaran televisi asing.

B. KERJA SAMA LINGKUNGAN HIDUP

1. Seminar Pengaturan Hukum Laut

Seminar Nasional Pengaturan Hukum Laut yang diselenggarakan oleh Universitas Padjadjaran membahas masalah Perlindungan dan Pelestarian Laut berlangsung di Bandung tanggal 29 Juli 1991.

Mantan Menlu RI, Prof. Dr. Mochtar Kusumaatmadja, mengatakan pada seminar itu bahwa: (1) ASEAN sejak sekarang agar menyusun rencana kerja sama darurat regional untuk melindungi pencemaran dan mencegah masuknya bahan-bahan beracun ke da-

lam laut; (2) ASEAN perlu membentuk Badan Regional untuk mencegah pencemaran laut; (3) banyak sumber pencemaran yang berbahaya bagi lingkungan laut di Asia Tenggara, seperti kapal tanki dan akibat pemberisihannya serta pembuangan bahan-bahan beracun ke dalam laut; (4) ASEAN sebaiknya belajar pengalaman dari berbagai negara maju yang telah menimbulkan kerusakan lingkungan; (5) Indonesia telah dihadapkan pada berbagai studi dan penelitian yang mendesak sehingga memerlukan tenaga ahli, dana dan komitmen bersama untuk melakukannya; (6) lima macam studi yang perlu segera dilaksanakan Indonesia adalah: (a) *baseline studies* untuk mengembangkan dan mengelola kekayaan alam, baik yang dapat diperbarui maupun tidak; (b) studi iklim global sebagai pemandu; (c) studi tingkat pencemaran yang harus segera dilaksanakan, karena selain bermanfaat bagi eksplorasi juga bagi kesejahteraan penduduk secara langsung; (d) studi ekosistem pantai yang perlu diamati secara tuntas untuk mengetahui bentuk-bentuk koral, delta dan lain-lainnya; (e) studi untuk menentukan kawasan suaka atau taman laut (*Suara Pembaruan*, 30-7-1991).

Sementara itu, Prof. Dr. H. Koesnadi Hardjo-soemantri mengatakan bahwa: (1) ASEAN perlu terlebih dulu melakukan suatu kaji banding untuk mengelola kekayaan ZEE; (2) potensi perguruan tinggi di Indonesia Bagian Timur dalam bidang kelautan harus benar-benar dikembangkan; (3) persoalan lingkungan tidak berhenti di tapal batas, karena itu diperlukan kerja sama antar negara anggota ASEAN; (4) sebelum pengambilan kekayaan laut menjadi suatu yang berbahaya dan tidak menguntungkan lagi perlu segera diambil langkah dan tindakan yang konkret; (5) perjanjian antara Indonesia dan negara tetangga untuk mengatur pengambilan kekayaan laut sangat diperlukan dan hendaknya juga meliputi penangkapan ikan; (6) usaha ke arah tercapainya menuju perjanjian tentang perikanan secara yuridis bagi Indonesia tidak akan mengalami hambatan karena dijamin oleh adanya UU Perikanan No. 9 Tahun 1965, meskipun masih perlu perjanjian untuk memperjelas ZEE Indonesia (*Suara Pembaruan*, 30-7-1991).

2. Lingkungan Hidup dalam Ekonomi

Asisten Menteri KLH Dr. Suta Djajadiningrat mengatakan kepada pers di Jakarta tanggal 30 Juli 1991 bahwa: (1) Indonesia bersama dengan negara anggota ASEAN lainnya berusaha mencari kesepakatan untuk

memasukkan faktor lingkungan hidup dalam sektor ekonomi; (2) ASEAN akan membuktikan teori konvensional ekonomi yang menilai sumber daya alam adalah nol sudah tidak dapat dipertahankan lagi; (3) unsur sumber daya alam seharusnya masuk dalam modal produksi, sebab sumber daya alam yang tidak dapat diperbarui akan habis; (4) sumber daya alam yang tidak dimasukkan sebagai nilai ekonomi seharusnya mendapat harga tertentu; (5) Singapura merupakan salah satu negara anggota ASEAN yang telah memasukkan faktor lingkungan hidup ke dalam sektor ekonomi, dengan menetapkan batasan jumlah mobil pribadi yang dapat masuk kota. Ini untuk mengatur agar udara tetap bersih; (6) pemerintah Singapura menetapkan efisiensi pemakaian dengan: (a) sistem banyaknya penumpang dalam satu mobil; (b) sistem lisensi mobil berdasarkan mekanisme pasar secara lelang; (7) sistem lisensi membatasi setiap orang yang ingin memiliki mobil kedua dan ketiga untuk terlebih dulu mempertimbangkannya secara matang. Pemilikan mobil yang kedua akan dikenakan beban biaya, misalnya pajak, yang lebih besar dari pemilikan mobil pertama (Merdeka, 1-8-1991).

V. HUBUNGAN ASEAN DENGAN MITRA DIALOG

A. PERTEMUAN ASEAN DENGAN MITRA DIALOGNYA (PMC)

Seusai mengadakan sidang tahunan, para Menlu ASEAN mengadakan pembicaraan dengan mitra dialognya (*Post Ministerial Conference - PMC*) yang diwakili oleh Menlu AS, James Baker, Menlu Jepang, Taro Nakayama, Menlu Australia, Gareth Evans, Menlu Selandia Baru, Don McKinnon, Menlu Kanada, Barbara McDougall, Menlu Korea Selatan, Lee Sang Ock dan Komisioner ME, Hans van Den Broek, di Kuala Lumpur, tanggal 22-24 Juli 1991. Pertemuan itu akan dilangsungkan secara 6 + 7 (enam negara ASEAN dan tujuh negara mitra dialog). Tetapi dalam sidang-sidang tertutup dilangsungkan secara 6 + 1 (enam negara ASEAN dan setiap negara mitra dialog).

Selain kecenderungan-kecenderungan regional dan keamanan, mereka juga membahas kerja sama ekonomi dengan rincian sebagai berikut: (1) ASEAN-Jepang: kerja sama perdagangan, investasi, industri, kerja sama pembangunan dan kerja sama kebudayaan; (2) ASEAN-Korea Selatan: kerja sama perdagangan,

pariwisata, investasi dan berbagai masalah lain; (3) ASEAN-Selandia Baru: perdagangan, investasi, kerja sama pembangunan dan berbagai masalah lain; (4) ASEAN-AS: hubungan ekonomi dan berbagai permasalahan lain; (5) ASEAN-Australia: perdagangan, investasi, kerja sama pembangunan, pendidikan, sains dan teknologi, telekomunikasi, lingkungan hidup dan lain-lainnya; (6) ASEAN-Kanada: kerja sama industri dan perdagangan, kerja sama pembangunan dan lain-lainnya; (7) ASEAN-ME: kerja sama perdagangan dan ekonomi serta kerja sama pembangunan (Suara Karya, 22-7-1991).

Korea Selatan yang pada mulanya merupakan mitra sektoral negara-negara ASEAN, kini statusnya mulai ditingkatkan menjadi mitra penuh.

Menlu Korea Selatan, Lee Sang Ock, mengatakan bahwa: (1) walaupun dunia sekarang sedang dilanda proteksionisme dan resesi, pertumbuhan ekonomi negara-negara ASEAN cukup pesat; (2) kerja samanya di bidang politik dan keamanan dengan negara-negara ASEAN mempunyai arti penting (Antara, 22-7-1991).

Menlu Australia, Gareth Evans, mengatakan bahwa ada beberapa kemajuan penting dalam penyelesaian masalah Kamboja. Masyarakat internasional hendaknya mengikuti cara ASEAN dan Australia untuk mengakreditasikan wakil-wakilnya pada Dewan Nasional Tertinggi (ANC) (Antara, 22-7-1991).

Menteri Luar Negeri dan Perdagangan Selandia Baru, Don McKinnon mengatakan bahwa: (1) kerja sama dengan negara-negara ASEAN mempunyai arti penting; (2) ASEAN tidak saja penting bagi keamanan dan kemakmuran di Asia Tenggara tetapi juga bagi Selandia Baru. Ada 5 masalah penting yang harus dibicarakan: (a) masalah Kamboja; (b) ketergantungan antar negara; (c) keamanan Asia-Pasifik; (d) kerja sama perdagangan dan ekonomi Asia-Pasifik; (e) perundingan perdagangan multilateral Putaran Uruguay; (3) ASEAN agar terus memperkuat kerja sama ekonomi dan perdagangan dengan Selandia Baru (Antara, 22-7-1991).

Dalam pidato pembukaan PMC Menlu Malaysia, Datuk Abdullah Badawi, mengatakan bahwa: (1) pengaturan keamanan seperti *Conference on Security and Cooperation in Europe* (CSCE) tidak bisa diterapkan di Asia Pasifik; (2) masalah keamanan harus dilihat secara menyeluruh, dan bukan hanya menekankan pada pentingnya elemen militer, karena hal itu akan merusak

persepsi hubungan antar negara. Pendekatannya dilakukan dengan cara saling ketergantungan dan kepercayaan melalui kerja sama ekonomi dan komitmen untuk menyelesaikan masalah secara damai. Masalah keamanan dan kesejahteraan negara tergantung pada kerja sama ekonomi dan pertumbuhan ekonomi negara masing-masing; (3) peningkatan keamanan di Asia Pasifik dapat dilakukan berdasarkan konsep ZOP-FAN, *Treaty of Amity and Cooperation* dan pengaturan keamanan bilateral yang sudah ada di negara-negara ASEAN; (4) negara-negara yang mengakibatkan terjadinya kerusakan lingkungan, baik di masa lalu maupun sekarang, harus bertanggung jawab untuk mengatasi persoalan itu; (5) ASEAN meminta kepada masyarakat internasional untuk mempertimbangkan pemulihan hutan-hutan oleh negara-negara yang dianggap telah merusak lingkungan (*Suara Pembaruan*, 22-7-1991); (6) peningkatan kerja sama ekonomi regional yang tidak menjurus ke arah pembentukan blok-blok ekonomi merupakan salah satu faktor yang mampu mendorong stabilitas kawasan dan terbentuknya keamanan wilayah; (7) negara-negara mitra dialog mengakui bahwa ASEAN merupakan salah satu badan regional yang mampu bertahan dan berkembang dengan baik; (8) sebuah forum yang bersifat konsultatif yang didasarkan pada kerja sama ekonomi ASEAN, dan mengikutsertakan negara-negara Asia Timur akan menunjang perkembangan ekonomi dan memantapkan sistem perdagangan terbuka (*Kompas*, 23-7-1991).

Menlu Jepang, Taro Nakayama, mengatakan bahwa: (1) sebagian besar peningkatan investasi Jepang di ASEAN adalah di bidang industri yang berorientasi ekspor, yang diharapkan akan mempercepat proses alih teknologi; (2) hubungan ASEAN-Jepang selama sepuluh tahun terakhir, di bidang perdagangan, investasi dan pariwisata berjalan lancar; (3) Jepang perlu meningkatkan peranan politiknya sebanding dengan peranannya di bidang ekonomi di Asia Pasifik dan dunia; (4) Jepang mengajak ASEAN untuk memperluas dialog, tidak saja di bidang ekonomi tetapi juga di bidang politik, keamanan dan sebagainya; (5) dalam kerangka persetujuan kerja sama keamanan Jepang-AS, Jepang menyediakan kurang lebih 140 jenis fasilitas dan tempat bagi angkatan bersenjata AS. Untuk itu Jepang menanggung keuangan, US\$3 milyar lebih per tahun dalam bentuk dukungan tuan rumah (*host nation support*). Pada tahun 1995 dukungan tuan rumah ini, direncanakan mencapai 70% dari pengeluaran angkatan bersenjata AS yang berkedudukan di Jepang, tidak ter-

masuk gaji personil militer dan komponen-komponen sipil (*Antara*, 23-7-1991); (6) secara tradisional Jepang menjalankan pendekatan komprehensif atas masalah keamanan, yang difokuskan dalam tiga hal: (a) pengaturan keamanan dengan operasi yang akurat antara Jepang dengan AS; (b) mempertahankan kemampuan bela dirinya; (c) penggunaan gagasan-gagasan diplomatik; (7) untuk mempertahankan stabilitas kawasan sekitarnya, Jepang telah menyediakan dukungan bagi AS untuk mempertahankan kekuatan militernya, serta memperluas kerja sama ekonomi untuk mempromosikan stabilitas dan pembangunan di negara-negara tetangga; (8) perluasan peranan diplomatik Jepang di Asia Pasifik menimbulkan kekhawatiran negara-negara sekitarnya. Mereka khawatir tentang seberapa jauh peranan diplomatik Jepang bisa diperluas dan apakah akan melibatkan dimensi militer; (9) partisipasi Jepang dalam kegiatan-kegiatan diplomatik menjadi bagian terpenting dalam proses dialog politik untuk memenuhi kewajiban politik Jepang di Asia Pasifik dalam peningkatan keamanan semua pihak di masa yang akan datang; (10) pengaturan keamanan seperti *Conference on Security and Cooperation in Europe* (CSCE) tidak dapat diterapkan di Asia Pasifik, sebab kondisi geopolitik dan lingkungan strategis Asia Pasifik sangat berbeda dengan Eropa; (11) negara-negara Asia Pasifik adalah membutuhkan stabilitas jangka panjang berdasarkan pada pengaturan kerja sama internasional dan forum-forum dialog yang selama ini sudah ada, yang terutama mengacu pada forum kerja sama ekonomi, seperti ASEAN, ASEAN-PMC, APEC, dan PECC, ataupun upaya diplomatik untuk menyelesaikan konflik dan perselisihan di kawasan, misalnya pendekatan yang dilakukan oleh beberapa negara dalam menyelesaikan masalah Kamboja, serta kerangka kerja sama internasional dalam Dialog Utara-Selatan, Semenanjung Korea Selatan; (12) komunike bersama PMC merupakan dasar bagi pembicaraan isu keamanan dan perdamaian di kawasan Asia Pasifik (*Kompas*, 23-7-1991).

Menlu Korea Selatan, Lee Sang Ock, mengatakan bahwa: (1) ASEAN merupakan sarana yang efektif untuk kerja sama di kawasan Asia Tenggara, tidak seperti organisasi-organisasi regional lainnya; (2) dalam lima tahun terakhir ini perdagangan ASEAN-Korea Selatan meningkat rata-rata 30%; (3) dibandingkan dengan tahun 1990, dalam empat bulan pertama tahun 1991 perdagangan ASEAN-Korea Selatan mencapai US\$4 milyar, berarti meningkat sebesar 37%; (4) pada akhir tahun 1991, perdagangan ASEAN-Korea Selatan diha-

rapkan mencapai US\$13 milyar; (5) jumlah investasi Korea Selatan di ASEAN mencapai US\$1 milyar lebih. Terdapat 300 perusahaan Korea Selatan yang menanamkan modalnya di negara ASEAN; (6) sehubungan dengan perubahan-perubahan dunia yang berlangsung begitu cepat, maka kerja sama ASEAN-Korea Selatan perlu terus ditingkatkan (*Antara*, 23-7-1991); (7) faktor penyebaran, heterogenitas, dan perbedaan tingkat pembangunan ekonomi, seringkali menjadi hambatan untuk mencapai kerja sama yang efisien di Asia Pasifik. Tetapi faktor-faktor keragaman (heterogenitas) dapat menjadi aset yang menguntungkan jika ingin membentuk kerja sama di Asia Pasifik yang didasarkan pada keterbukaan dan keluwesan sesuai dengan paham globalisasi; (8) pertumbuhan ekonomi yang memacu perkembangan industri dan urbanisasi menimbulkan masalah lingkungan dan narkoba di negara-negara berkembang (*Kompas*, 23-7-1991).

Sementara itu Menlu Ali Alatas mengatakan se usai menandatangani protokol amandemen persetujuan RI-Belanda tentang penghapusan pajak berganda yang telah diberlakukan sejak tahun 1973, bahwa: (1) ASEAN bersedia membahas masalah hak asasi manusia dan masalah lingkungan hidup dengan ME. Tetapi ASEAN tidak setuju apabila masalah hak asasi manusia dan masalah lingkungan hidup dijadikan sebagai kondisionalitas baru dalam kerja sama ekonomi atau perdagangan. Dalam komunike bersama AMM ke-24 di Kuala Lumpur tanggal 19-20 Juli 1991, para Menlu ASEAN telah menegaskan sikap mereka bahwa masalah hak asasi manusia tidak bisa diterapkan begitu saja dalam hubungan antar negara tanpa memperhatikan kompleksitas kenyataan ekonomi, sosial dan budaya; (2) Indonesia tidak keberatan masalah keamanan dibahas dalam pertemuan ASEAN dengan mitra wicaranya; (3) Indonesia tidak menolak usul Jepang untuk membahas masalah politik setelah pertemuan PMC; (4) Indonesia tidak setuju tentang pembentukan institusi baru seperti SOM ASEAN yang sudah ada, untuk membahas masalah politik dan ekonomi; (5) dalam sidang PMC tercapai persamaan pandangan tentang mulai berfungsinya Dewan Nasional Tertinggi (SNC) Kamboja dan dukungan kepada Pangeran Sihanouk sebagai pemimpin SNC, serta penyelesaian menyeluruh masalah Kamboja yang dapat menjamin stabilitas di Indocina sesuai dengan kerangka Konperensi Paris tentang Kamboja (PCC); (6) ASEAN terbuka bagi negara-negara Indocina (Laos, Vietnam, Kamboja), yang ingin bergabung. Meskipun proses pencapaian perdamaian di Kamboja masih berlangsung, ketiga negara itu dapat

mempertimbangkan kemungkinan bergabung dengan ASEAN melalui Persetujuan Kerja Sama dan Hidup Berdampingan Secara Damai (*ASEAN Treaty of Amity and Cooperation*) (Antara, 23-7-1991).

Menlu Kanada, Barbara McDougall, mengatakan bahwa ASEAN adalah organisasi regional yang paling berhasil di Pasifik, dan diharapkan nantinya ASEAN harus mencakup semua negara Asia Tenggara.

Menlu Belanda Hans van Den Broek yang menjabat sebagai Presiden Dewan ME mengatakan bahwa masalah keamanan dan perdamaian di kawasan Asia Pasifik menjadi perhatian ME. Pembangunan ekonomi hanya bisa dilakukan dengan perdamaian, keamanan dan stabilitas. Dia berpendapat bahwa CSCE di masa pasca Perang Dingin berbeda dengan sebelumnya. CSCE membahas masalah ekonomi, keamanan, lingkungan hidup, demokrasi dan sebagainya, dan bukan masalah konflik ideologis. CSCE mempunyai nilai universal.

Sementara itu Menteri Luar Negeri dan Perdagangan Australia Gareth Evans mengatakan bahwa situasi keamanan di Asia Pasifik sangat kompleks dan selalu berubah-ubah. Dia menolak deskripsi-deskripsi skematis dan jawaban-jawaban menyeluruh mengenai keamanan. Australia mengharapkan AS dan sekutunya tetap hadir di kawasan Asia Pasifik.

Wakil Menlu AS, Robert Zoellick, mengatakan bahwa kehadiran militer, komitmen dan jaminan AS di Asia Pasifik merupakan pengimbang informal dan membentuk struktur keamanan yang efektif selama empat dekade. Kerja sama subregional antara AS dan sekutunya tentang keamanan di Asia berjalan dengan baik (*Kompas*, 23-7-1991).

Dalam sidang yang dilangsungkan 6+7 (enam negara ASEAN dan tujuh negara mitra dialog) masalah EAEG yang diperkirakan akan menjadi isu yang paling kuat, ternyata pihak Malaysia hanya menyebutkan dalam satu bab saja. EAEG merupakan konsep ekonomi yang mampu mempertahankan semangat pembangunan ekonomi kawasan Asia Timur dan menekankan pada sistem perdagangan multilateral (*Kompas*, 23-7-1991).

Menlu Ali Alatas mengatakan bahwa: (1) ancaman yang dihadapi ASEAN di Asia Pasifik datang dari interaksi antar empat negara besar, yaitu Uni Soviet, AS, Cina dan Jepang. Secara substantif, dinamika keempat negara besar itu merupakan inti persoalan yang dihadapi negara-negara di Asia Pasifik; (2) untuk

menghadapi interaksi keempat negara itu, ASEAN harus memperkuat diri; (3) ASEAN perlu mengembangkan kerja sama keamanan secara ASEAN; (4) usul tentang pengaturan keamanan seperti CSCE atau gagasan Pan Asia, tidak dapat diterapkan karena corak perimbangan kekuatan negara-negara Asia-Pasifik lebih beragam; (5) masalah keamanan perlu dibahas untuk meningkatkan saling percaya (*confidence building measure*) melalui kebijakan militer masing-masing negara. Pembangunan pertahanan Jepang untuk mengawasi jalur lautnya merupakan suatu contoh diplomasi perang (*gun boat diplomacy*). Ini kurang efektif untuk mengintegrasikan kepentingan keamanan dengan kepentingan regional. Yang diperlukan adalah memperkuat negara-negara ASEAN dengan bantuan negara-negara besar untuk memiliki kemampuan mengawasi jalur laut dari segala aspek (*Kompas*, 24-7-1991).

Pertemuan ASEAN dengan tujuh negara mitra dialog berakhir dengan perbedaan pendapat mengenai masalah hak asasi manusia di Myanmar.

Para Menlu ASEAN sepakat untuk tidak mengisolasi Myanmar, dan akan mengutus Menlu Filipina, Raul Manglapus, ke negara itu untuk mengundangnya agar menghadiri konferensi informal tentang masalah keamanan Asia Pasifik, bulan November 1991. Dan juga akan membicarakan masalah hak asasi manusia (*Kompas*, 25-7-1991).

Menlu AS, James Baker, mengakui adanya perbedaan pendapat antara ASEAN dengan AS tentang hak asasi manusia. Tetapi ia mengharapkan ASEAN agar tetap menggunakan pengaruhnya, baik secara kolektif maupun sendiri-sendiri, untuk lebih memperhatikan isu hak asasi manusia, pemilu dan tahanan politik di Myanmar.

Sedangkan Menlu Muangthai, Arsa Sarasin, mengatakan bahwa ASEAN telah sepakat untuk melakukan pendekatan secara konstruktif dengan Myanmar guna menciptakan perdamaian, stabilitas dan kesejahteraan di ASEAN dan Asia Pasifik (*Kompas*, 25-7-1991).

Dirjen Politik Deplu Wiryono Sastrohandoyo mengatakan kepada pers bahwa: (1) APEC sebagai wahana untuk menjembatani negara ASEAN dan negara-negara Asia Pasifik merupakan forum yang tepat; (2) untuk mewujudkan gagasan pembentukan kelompok-kelompok ekonomi baru di kawasan Asia Pasifik perlu waktu yang cukup lama; (3) forum APEC sudah cukup mapan, tetapi pelaksanaan proyek-proyek dan arah

masa depan APEC masih memerlukan persetujuan dari semua pihak; (4) forum APEC yang saat ini sifatnya konsultatif dapat ditingkatkan menjadi bentuk organisasi, agar lebih efisien dan mekanismenya dapat ditingkatkan; (5) ada harapan dari beberapa negara agar ASEAN dapat menjadi dasar dari APEC. Untuk itu kerja sama intra ASEAN harus jelas bentuknya; (6) negara-negara Asia Pasifik menduduki tingkat kelima sebagai mitra dagang AS (*Kompas*, 25-7-1991).

Presiden Dewan ME Hans van Den Broek mengatakan dalam konperensi pers penutupan sidang PMC bahwa ASEAN dan negara mitra dialognya mengharapkan Putaran Uruguay dan GATT tahun 1991 ini berhasil.

Dalam pada itu Menlu Korea Selatan, Lee Sang Ock, dan Menlu Muangthai, Arsa Sarasin, mengemukakan hal yang sama tentang peranan APEC dalam masalah ekonomi di Asia Pasifik.

Menlu AS James Baker juga mengatakan bahwa APEC merupakan forum penting bagi kerja sama perdagangan dunia, dan AS akan terus bekerja sama dengan negara-negara anggota APEC demi kesuksesan APEC (*Kompas*, 25-7-1991).

Menlu Australia, Gareth Evans, mengatakan bahwa: (1) hubungan ASEAN-Australia semakin meningkat dan kompleks dengan dibentuknya forum ASEAN-Australia yang mempunyai tugas mengidentifikasi kerja sama telekomunikasi, pendidikan, sains dan teknologi serta lingkungan; (2) masih mungkin timbul masalah dalam kerja sama ekonomi, politik dan keamanan antara ASEAN dan Australia; (3) pertumbuhan investasi Australia di ASEAN lambat jika dibandingkan dengan investasi ASEAN di Australia. Investasi ASEAN di Australia berbentuk real estate, pasar uang dan bursa saham, sedangkan investasi Australia di ASEAN dalam bentuk modal ventura teknologi industri, eksplorasi mineral dan manufaktur (*Suara Karya*, 25-7-1991).

Menlu Kanada, Barbara McDougall, mengatakan bahwa: (1) hubungan antara ASEAN dan Kanada perlu ditingkatkan, meskipun hubungan dagang ASEAN-Kanada dalam empat tahun terakhir ini meningkat; (2) total nilai perdagangannya pada tahun 1990 mencapai 3,4 milyar dolar Kanada, meningkat dua kali dari nilai tahun 1986; (3) Kanada merupakan sasaran ekspor barang manufaktur dari negara-negara ASEAN, yang mencapai 70%; (4) melalui Lembaga Pembangunan Internasional Kanada, pemerintah Kanada setiap tahun

menyediakan dana sebesar 7 milyar dolar Kanada lebih, bagi perusahaan-perusahaannya yang melakukan investasi di negara-negara ASEAN; (5) perluasan liberalisasi perdagangan di Amerika Utara tidak akan mempengaruhi akses ASEAN ke pasar Amerika, tetapi justru bermanfaat bagi semua pemasok, khususnya produsen dari ASEAN yang telah melakukan penetrasi ke pasar Kanada; (6) pihaknya telah melakukan pengamatan mengenai kemungkinan akibat negatif dari persetujuan perdagangan bebas Kanada-AS terhadap hubungan dagang ASEAN-Kanada; (7) Kanada mendukung struktur APEC yang fleksibel dan konsultatif (*Kompas*, 25-7-1991).

B. HUBUNGAN ASEAN-VIETNAM

Siaran Radio Hanoi tanggal 24 Juli 1991 mengatakan: (1) Vietnam menyambut baik usaha-usaha ASEAN untuk menyelesaikan konflik Kamboja, tetapi organisasi non-komunis itu sendiri sedang menghadapi ancaman-ancaman serius ketidakmantapan di bidang politik dan ekonomi; (2) Konperensi Tingkat Menteri ASEAN yang diadakan di Kuala Lumpur tanggal 19-22 Juli 1991, merupakan petunjuk jelas bahwa ASEAN berniat memperkuat peranan dan posisinya di Asia, tidak terbatas di bidang ekonomi saja; (3) Vietnam memuji ASEAN karena dalam pertemuan tingkat menteri tersebut mengundang wakil-wakil dari Uni Soviet dan RRC; (4) ASEAN tidak dapat mengabaikan potensi-potensi dan pengaruh Uni Soviet dan Cina di kawasannya; (5) Vietnam memuji usaha-usaha ASEAN untuk menyelesaikan konflik Kamboja, meskipun ASEAN mengecam Vietnam karena mencetuskan perang dengan serbuannya tahun 1987; (6) pergolakan-pergolakan yang dihadapi negara-negara ASEAN masih mengancam kemandirian negara-negara ASEAN (*Antara*, 25-7-1991).

C. HUBUNGAN ASEAN-LAOS

Wakil Menlu Laos, Soulivong Phrasithideth, mengatakan di Vientiane tanggal 11 Agustus 1991 bahwa: (1) Laos akan mempertimbangkan usul ASEAN untuk melakukan kerja sama dengan negara-negara Indocina, tetapi Laos juga meragukan, apakah semua negara ASEAN ingin bekerja sama dengan pihaknya; (2) Laos telah meminta untuk menjadi anggota perjanjian yang mendasari berdirinya ASEAN; (3) hubungan Laos dengan ASEAN tidak akan memperburuk hubungan-

nya dengan Kamboja dan Vietnam; (4) Muangthai telah meningkatkan hubungannya dengan Laos, Kamboja dan Vietnam; (5) meskipun hubungan Laos dengan Muangthai berjalan baik, tetapi masih ada halangan yakni masalah perbatasan, hubungan dagang dan isu-isu pengungsi di kamp-kamp penampungan; (6) ia puas dengan hasil perundingan antara faksi-faksi Kamboja yang diadakan pada bulan Juni-Juli 1991 di Muangthai dan Cina (*Kompas*, 12-8-1991).

VI. USAHA ASEAN MEMBANTU PENYELESAIAN KONFLIK KAMBOJA

A. SIDANG DEWAN NASIONAL TERTINGGI (SNC)

Sidang Dewan Nasional Tertinggi (SNC) Kamboja yang juga dihadiri oleh Ketua Bersama PICC dan Wakil PBB berlangsung di Muangthai tanggal 24-26 Juni 1991 untuk membahas masalah penunjukkan Ketua SNC dan Wakilnya, masalah gencatan senjata, dan penghentian pemasokan senjata.

Pangeran Sihanouk mengatakan: (1) keempat kelompok Kamboja yang saling berperang berjanji akan melaksanakan gencatan senjata mulai tanggal 23 Juni 1991, dan sepakat untuk mendirikan markas besar SNC di Phnom Penh; (2) dua pemerintahan yang saling bersaing yaitu CGDK dan Pemerintahan Negara Kamboja di Phnom Penh, akan tetap ada sampai pemilu diselenggarakan; (3) SNC yang mewakili kedaulatan Kamboja akan mulai menerima surat-surat kepercayaan dari para perwakilan asing dan kedutaan besarnya akan berada di Phnom Penh; (4) masalah kepemimpinan SNC adalah masalah yang sulit (*Antara*, 24-6-1991); (5) ia mengusulkan adanya sekjen untuk memecahkan masalah kepemimpinan dalam SNC, dan lima diktum agar SNC segera berfungsi, serta tercipta penyelesaian masalah Kamboja. Kelima diktum tersebut adalah: (a) karena penyelesaian masalah ketua dan wakil ketua SNC belum dapat dicapai, maka diusulkan agar SNC menjadi *collegial presidency* yang berdaulat dan juga menjadi *United Cambodia*; (b) agar SNC berfungsi maka harus menduduki kursi Kamboja di PBB, di Badan Internasional, di Konperensi Gerakan Non-Blok dan di forum-forum lainnya; (c) rencana perdamaian usulan lima anggota tetap DK-PBB akan dikaji dan diterapkan melalui konsensus yang dicapai SNC; (d) perlunya lokasi markas besar SNC di Phnom Penh; (e) kedaulatan besar yang diakreditasi SNC akan dibuka di lokasi markas besar SNC (*Kompas*, 24-6-1991).

Julio Jeldres, Kepala Sekretariat Kantor Sihanouk, mengatakan bahwa Hun Sen: (1) setuju tentang usulan Sihanouk mengenai sekjen dengan syarat bahwa Hun Sen harus sebagai Deputi Sekjen berdasarkan kesepakatan pertemuan lanjutan kedua PICC dengan SNC di Jakarta tanggal 2-4 Juni 1991; (2) setuju tentang akreditasi duta besar dan gencatan senjata asal dikaitkan dengan penghentian pemasokan senjata dari luar negeri. Sedangkan mengenai bendera dan lagu kebangsaan keputusannya harus disetujui parlemen; (3) mengusulkan perlunya konsensus dua pertiga suara SNC yang anggotanya berjumlah 12 orang. Di samping itu, sidang SNC sekarang ini bersifat konsultatif sehingga tidak ada agenda yang tetap (*Kompas*, 24-6-1991).

Sementara itu PM Kamboja Hun Sen mengatakan bahwa: (1) Phnom Penh menerima peranan PBB untuk mengawasi gencatan senjata guna mengakhiri perang saudara Kamboja yang telah berlangsung selama 12 tahun; (2) dia setuju mengenai rencana lima anggota tetap DK-PBB yang bertugas mengawasi pemerintah baru (*Antara*, 25-6-1991).

Sidang hari pertama SNC menyetujui empat keputusan yang disepakati oleh semua faksi yang bertikai, yakni: (1) gencatan senjata mulai berlaku tanggal 24 Juni 1991 tanpa batas waktu dan menghentikan penerimaan bantuan militer dari luar negeri; (2) Sihanouk akan memimpin delegasi yang menduduki kursi Kamboja dalam sidang Majelis Umum PBB tahun 1991; (3) Sihanouk ditunjuk sebagai pemimpin sidang SNC; (4) bentuk bendera dan lagu kebangsaan Kamboja yang baru akan diterima setelah pemilu (*Kompas*, 25-6-1991).

Komunike akhir pertemuan SNC yang dibacakan oleh Pangeran Sihanouk mengatakan bahwa: (1) Sihanouk diberi tugas untuk memimpin sidang-sidang SNC Kamboja di masa-masa yang akan datang; (2) mereka menerima bendera dan lagu Kamboja seperti yang diusulkan oleh Sihanouk tanggal 22 Juni 1991. Bendera berwarna biru muda, seperti bendera PBB dengan silhouete wilayah Kamboja berwarna putih dan ditengahnya bertuliskan "Kampuchea" dalam bahasa Khmer. Sihanouk diminta menulis surat ke Sekjen PBB untuk memberitahukan bendera dan lagu SNC Kamboja; (3) gencatan senjata dan moratorium bantuan militer dari luar negeri diterapkan mulai tanggal 24 Juni 1991. Cara pengawasan PBB akan dirundingkan dalam sidang selanjutnya; (4) delegasi SNC yang dipimpin Sihanouk akan dikirim ke sidang Majelis Umum PBB, bulan September 1991; (5) Sihanouk diperintahkan menulis

permintaan, atas nama SNC kepada Sekjen PBB agar memasukkan candi Angkor Wat ke dalam daftar UNESCO tentang warisan peradaban dunia; meminta badan eksekutif Komite Mekong menerima Kamboja sebagai anggota Komite Mekong; meminta Bank Dunia dan IMF agar delegasi SNC dapat menghadiri sidang kedua lembaga keuangan tersebut di Bangkok pada bulan Oktober 1991; meminta Sekjen PBB memberikan bantuan kemanusiaan dan latihan ketrampilan untuk rakyat Kamboja; (6) mereka sepakat untuk membentuk sekretariat SNC dan markas besar SNC di Phnom Penh dengan fasilitas dan jaminan sebagai berikut; (a) anggota SNC dari setiap faksi memiliki kediaman di Phnom Penh yang dilindungi pasukan faksinya. Pasukan SNC menjamin keamanan di kompleks kediaman anggota SNC dan pasukan faksi Phnom Penh menjamin keamanan dari luar kompleks; (b) perwakilan PICC memiliki misi permanen yang diakui SNC, perwakilan khusus Sekjen PBB atau wakilnya memiliki misi permanen di SNC, perwakilan negara-negara yang berpartisipasi dalam PICC, atau wakil lima anggota tetap DK-PBB, dan juga wakil negara-negara ASEAN, memiliki misi yang diakui SNC; (7) sambil menunggu pembangunan markas SNC di Phnom Penh, sidang SNC berikutnya akan dilangsungkan di bekas Kedutaan Besar Kamboja di Bangkok; (8) suatu kelompok kerja akan dibentuk mempelajari prosedur kerja SNC, peraturan pemilu dan prinsip-prinsip konstitusi baru Kamboja (*Kompas*, 27-6-1991).

Sementara itu pada pertemuan informal SNC, PECC dan utusan khusus Sekjen PBB, tanggal 27 Juni 1991 tidak dikeluarkan suatu keputusan.

B. PERTEMUAN INFORMAL ANGGOTA DEWAN NASIONAL TERTINGGI (SNC)

Pertemuan informal SNC berlangsung di Beijing tanggal 16-17 Juli 1991 dihadiri oleh 9 dari 12 anggota SNC, anggota tetap DK-PBB, Ketua Bersama PICC dan Wakil Menlu RRC, Xu Dunxin, untuk membahas perjanjian-perjanjian akhir tentang rencana pengiriman delegasi SNC ke Sidang Majelis Umum PBB bulan September 1991 dan pendirian markas besar SNC di Phnom Penh, November 1991.

Pangeran Sihanouk mengatakan pada pembukaan pertemuan itu bahwa: (1) meskipun anggota SNC tidak dapat hadir seluruhnya, tetapi tidak berarti bahwa mereka yang tidak hadir tidak dapat mencari kompromi

penyelesaian masalah-masalah; (2) sejauh pelaksanaannya mengutamakan proses perdamaian, ia memberi kesempatan kepada anggota SNC untuk mendiskusikannya; (3) sebagai Ketua SNC, ia tetap netral dan tidak memihak (*Kompas*, 17-7-1991).

Sementara itu Pangeran Norodom Ranaridh mengatakan kepada para diplomat asing bahwa ada lima kesempatan yang dicapai dalam pertemuan tersebut, yaitu: (1) SNC akan mengirimkan surat kepada Sekjen PBB agar PBB mengirim tim yang akan mengevaluasi dan mengawasi gencatan senjata dan penghentian bantuan senjata dari luar negeri; (2) delegasi untuk Komite Mekong akan segera dibentuk dan akan bertemu pada bulan Agustus dan November 1991, tanpa menyebutkan di mana pertemuan akan berlangsung. Delegasi ini akan terdiri dari satu wakil untuk setiap faksi. Komite Mekong adalah sebuah tim yang dibentuk tahun 1970-an, terdiri dari empat negara Indocina (Laos, Kamboja, Vietnam dan Muangthai) untuk melaksanakan kerja sama guna mengatur penggunaan Sungai Mekong. Komite ini kemudian tidak berfungsi karena meletusnya perang Kamboja; (3) komposisi Sekretariat SNC akan segera diumumkan. Sekretariat SNC akan mulai beroperasi seminggu sebelum berlangsungnya sidang SNC di Bangkok bulan Agustus 1991. Sekretariat SNC terdiri dari enam orang dengan pembagian masing-masing tiga dari rezim Phnom Penh dan tiga lainnya dari faksi perlawanan Kamboja; (4) mereka sepakat agar kelompok kerja SNC segera berfungsi untuk merumuskan prosedur sidang-sidang SNC. Prioritas utama kelompok kerja SNC adalah merumuskan aturan main sidang SNC. Kemudian setelah itu, kelompok kerja SNC yang terbentuk akan menyusun rancangan konstitusi dan prosedur pemilu; (5) modalitas bagi perwakilan tetap asing di Kamboja perlu diatur untuk menentukan tempat perwakilan tetap (*Kompas*, 17-7-1991).

Komunike akhir dari pertemuan informal itu yang dibacakan oleh Pangeran Sihanouk mengatakan: (1) Pangeran Sihanouk terpilih sebagai Presiden SNC; (2) untuk menjalankan fungsi Presiden SNC, dia akan melepaskan seluruh jabatan resminya sebagai pemimpin faksi perlawanan Kamboja dan Pemerintahan Nasional Kamboja; (3) masalah Wakil Presiden SNC tidak disinggung dalam pertemuan itu, (*Kompas*, 18-7-1991).

Pada pertemuan informal SNC di Jakarta tanggal 2-4 Juni 1991 telah terjadi kesepakatan tentang Sihanouk sebagai Ketua SNC dan Hun Sen sebagai Wakil Ketuanya. Namun kesepakatan di antara ke-

duanya ditolak oleh anggota SNC lainnya, terutama dari pihak Khmer Merah yang diwakili oleh Khieu Samphan. Mereka menolak Hun Sen menjadi satu-satunya Wakil Ketua SNC.

Sementara itu bersamaan dengan terpilihnya Sihanouk sebagai Presiden SNC, lima anggota tetap DK-PBB juga mengadakan pertemuan tertutup dengan Wakil Ketua PICC dan tuan rumah RRC yang dipimpin oleh Wakil Menlu Xu Dunxin (*Kompas*, 18-7-1991).

Jusuf Wanandi dari Centre for Strategic and International Studies (CSIS), mengatakan di Jakarta tanggal 20 Juli 1991 bahwa: (1) ada faktor baru dalam upaya mencari penyelesaian politik tentang konflik Kamboja, yaitu adanya keinginan Pangeran Sihanouk untuk menyelesaikan konflik tersebut dengan Hun Sen melalui cara apapun. Keinginan Sihanouk yang didukung oleh Cina, akan sangat membantu proses penyelesaian masalah Kamboja; (2) perubahan sikap Sihanouk yang memihak Hun Sen, dan mulai meninggalkan Khmer Merah mempunyai arti yang sangat penting bagi penyelesaian masalah Kamboja; (3) keadaan di Kamboja sekarang ini tidak lagi membuat ketidakstabilan di kawasan Asia Tenggara, sebab aktor-aktor eksternalnya, yaitu RRC dan Vietnam, sudah melepaskan diri dari pertikaian bangsa Kamboja; (4) persoalannya sekarang adalah bagaimana mencari cara untuk mendekatkan faksi-faksi yang sedang bersengketa di sana; (5) meskipun tidak dinyatakan secara terbuka, dukungan RRC terhadap sikap Sihanouk merupakan faktor penting; (6) dengan kehadiran Hun Sen di Beijing membawa akibat perubahan sikap RRC, yang selama ini dikenal pro Khmer Merah; (7) bentuk penyelesaian masalah Kamboja sekarang ini, sangat menguntungkan pihak Hun Sen. Sebab dengan Sihanouk memilih Hun Sen, pertarungan di antara keduanya sudah berakhir. Sebelumnya Sihanouk dalam kedudukannya sebagai pemimpin CGDK selalu menolak kompromi dan kerja sama dengan pihak Phnom Penh yang dianggap sebagai boneka Vietnam (*Kompas*, 20-7-1991).

Sementara itu Hasnan Habib, mantan Duta Besar Indonesia untuk AS, mengatakan bahwa: (1) upaya pertemuan informal SNC di Beijing itu merupakan permainan politik internasional. Upaya tersebut merupakan *take and give* antara Sihanouk dengan RRC; (2) pertemuan informal tersebut yang hanya memilih Presiden SNC dan tidak menetapkan wakilnya, akan mengakibatkan SNC tidak mempunyai arti apabila Sihanouk secara kebetulan tidak berada di tempat atau sakit; (3) ada dua hal yang dapat mempercepat penyelesaian

masalah Kamboja, yaitu: (a) kesediaan Muangthai untuk melarang wilayahnya digunakan sebagai tempat penyaluran bantuan RRC kepada kelompok perlawanan Kamboja. Vietnam juga bersedia menghentikan bantuan kepada Phnom Penh, termasuk bantuan militer; (b) urusan dalam negeri Kamboja diselesaikan oleh orang Kamboja sendiri, yaitu antara kelompok Hun Sen, Khmer Mrah dan Son Sann (*Kompas*, 20-7-1991).

C. SIDANG DEWAN NASIONAL TERTINGGI

Sidang SNC sebagai kelanjutan dari pertemuan informal di Beijing tanggal 16-17 Juli 1991, berlangsung di Pattaya, Muangthai tanggal 26-29 Agustus 1991.

Pada hari pertama, sidang SNC menemui jalan buntu kembali. Wakil-wakil pemerintah Phnom Penh telah bertahan pada sikapnya yang menolak pembubaran seluruh kekuatan bersenjata, kecuali terbatas hanya 40% dari kekuatan yang ada. Namun ada beberapa kemajuan penting dalam pertemuan tersebut, yaitu: (1) dicapainya kesepakatan gencatan senjata; (2) semua anggota SNC setuju agar Sihanouk mengirim surat kepada Sekjen PBB untuk minta badan dunia tersebut segera mengirim pasukan pengawas gencatan senjata; (3) PBB diminta mengawasi penghentian semua suplai senjata dari luar (*Kompas*, 27-8-1991).

Pemimpin KPNLF Son Sann mengatakan para anggota SNC harus menerima usul perdamaian yang disponsori oleh 5 anggota tetap DK-PBB. Jika anggota SNC tidak bersedia menerima usul tersebut, maka kelima negara anggota DK-PBB akan berpaling pada persoalan yang jauh lebih penting yang menyangkut tatanan dunia, seperti Timur Tengah, Eropa Timur dan Afrika.

Pemimpin Khmer Merah Khieu Samphan mengatakan: (1) dengan menerima usul PBB, maka perdamaian di Kamboja akan terwujud, dan masing-masing pihak tidak akan saling berperang; (2) keuntungan lain apabila menerima usul PBB adalah pembiayaan personil dalam pasukan pengawas keamanan ditanggung PBB; (3) negara-negara anggota DK-PBB akan membantu membiayai proyek-proyek rehabilitasi dan rekonstruksi Kamboja (*Kompas*, 27-8-1991).

Demobilisasi kekuatan bersenjata faksi-faksi merupakan salah satu tawaran yang diajukan oleh PBB bagi perdamaian Kamboja. Badan dunia ini menghendaki seluruh kekuatan bersenjata yang ada di Kamboja harus dibubarkan. Senjata dan peralatan militer harus digudangkan di bawah pengawasan PBB.

Hun Sen yang selama ini menolak usul PBB itu kini mulai berubah sikapnya. Dia menawarkan 40% angkatan bersenjata didemobilisasi. Sementara itu tiga faksi yang bergabung dalam CGDK setuju dengan usul PBB.

Sihanouk mengatakan bahwa masalah pelaksanaan demobilisasi belum dapat ditentukan waktunya karena masih menunggu reaksi dari anggota tetap DK-PBB, khususnya AS.

Pemimpin Khmer Merah Khieu Samphan mengatakan bahwa pelaksanaan masalah gencatan senjata akan mengalami kesulitan, karena terdapat unit-unit gerilya yang tergabung dalam milisi, tetapi hidup dan tinggalnya bersama rakyat. Mereka bukan merupakan kekuatan reguler seperti yang dikategorikan dalam pengertian angkatan bersenjata. Khieu Samphan mengusulkan agar hitungan yang dilakukan bukan berdasarkan persentase, melainkan jumlah personil. Jumlah kekuatan bersenjata yang ditawarkan adalah 6.000 personil bagi pemerintah Phnom Penh dan 6.000 lainnya bagi kelompok perlawanan yang tergabung dalam 3 faksi (*Kompas*, 28-8-1991).

Sementara itu PM Hun Sen menghendaki agar pasukan khusus A-3 tetap bertahan untuk menjalankan tugas-tugas kepolisian saja. Sebaliknya, pemimpin Khmer Merah, Khieu Samphan menghendaki agar pasukan khusus A-3 Pemerintah Phnom Penh dimasukkan sebagai kekuatan bersenjata.

Dalam usahanya memecahkan masalah Kamboja, DK-PBB mengusulkan agar semua kekuatan bersenjata di Kamboja dibubarkan. Untuk sementara kekuasaan akan diserahkan kepada UNCTAD (kekuasaan transisional PBB di Kamboja) hingga pemilu diselenggarakan dan terbentuk pemerintahan baru.

Setelah beberapa kali berunding dan menemukan jalan buntu, akhirnya dicapai kesepakatan untuk membubarkan 70% dari seluruh kekuatan bersenjata masing-masing faksi Kamboja.

Pernyataan bersama yang dibacakan oleh Pangeran Norodom Sihanouk menyebutkan bahwa: (1) sidang SNC berhasil mencapai kompromi mengenai demobilisasi kekuatan bersenjata masing-masing faksi Kamboja. Kompromi ini merupakan kunci perdamaian Kamboja yang telah mengalami peperangan selama 12 tahun; (2) empat faksi Kamboja telah sepakat untuk mengurangi jumlah pasukannya hingga 70%; (3) SNC menghimbau agar PBB segera mengirim kontingen bagi pengawasan

keamanan dan perlucutan senjata; (4) SNC akan memberi saran-saran bagi UNCTAD mengenai pelaksanaan perjanjian yang telah disepakati. Jika ada isu yang sulit dikompromikan di antara anggota SNC, Sihanouk diberi kekuasaan untuk mengambil keputusan (*Kompas*, 28-8-1991).

Pangeran Sihanouk mengatakan bahwa: (1) meskipun telah dicapai kompromi, kontingen PBB belum dapat segera dikirim sebelum usul-usul baru itu disetujui AS dan Inggris, sebagai anggota tetap DK-PBB; (2) tiga dari lima anggota DK-PBB yaitu Perancis, RRC dan Uni Soviet setuju dengan usulan baru SNC (*Kompas*, 29-8-1991).

Sidang SNC berakhir tanpa kesepakatan mengenai soal sistem pemilu. Namun ada beberapa kemajuan penting, yaitu: (1) pemerintah Khmer Merah yang semula menarik isu genocide dalam kerangka perdamaian usulan PBB, meminta agar dimasukkan; (2) pemerintah Phnom Penh bersedia menarik usul tentang hak asasi manusia yang dianggap mendeskreditkan Khmer Merah; (3) pasukan khusus A-3 di Phnom Penh tetap dipertahankan sebagai elemen kepolisian; (4) sidang SNC berikutnya direncanakan berlangsung di Muangthai tanggal 21-23 Oktober 1991 (*Kompas*, 30-8-1991).

Dalam jumpa pers PM Hun Sen mengatakan: (1) usul Khmer Merah tentang polisi yang tidak boleh membawa senjata tidak masuk akal; (2) sistem pemilu berdasarkan mayoritas tunggal telah dianut sejak Kamboja merdeka, dan terbukti sangat demokratis (*Kompas*, 30-8-1991).

Walaupun 4 faksi dalam SNC belum mencapai kompromi mengenai sistem pemilu yang akan diterapkan di Kamboja, namun wakil-wakil anggota DK-PBB setuju untuk dirundingkan secara bertahap.

Sementara itu pembantu Menlu AS, Richard Solomon, mengatakan bahwa pemerintah AS: (1) menyambut baik tercapainya kompromi di antara faksi-faksi yang bertikai di Kamboja; (2) tetap berpegang pada penyelesaian menyeluruh di Kamboja berdasarkan rancangan yang diajukan DK-PBB; (3) harus mempelajari hasil pertemuan SNC sebelum memutuskan untuk menerima atau menolak hasil kompromi, khususnya mengenai demobilisasi; (4) memberi bantuan darurat US\$50.000 bagi korban bencana alam di Kamboja (*Kompas*, 29-8-1991). Selanjutnya pembantu Menlu AS itu mengatakan bahwa akan memulihkan hubungan dengan Vietnam setelah kerangka perdamaian PBB

ditandatangani di Paris pada bulan Oktober 1991 mendatang. Pemulihan hubungan itu akan dilakukan secara bertahap, dimulai dengan hubungan perdagangan dan kemudian dilanjutkan dengan hubungan diplomatik (*Kompas*, 31-8-1991).

VII. LOKAKARYA PENGELOLAAN POTENSI LAUT CINA SELATAN

Lokakarya Pengelolaan Potensi Laut Cina Selatan berlangsung di Bandung tanggal 15-18 Juli 1991 dihadiri oleh wakil-wakil dari ASEAN, Vietnam, Laos, Cina dan Taiwan untuk mencari cara-cara guna mengubah wilayah potensial konflik yang menjadi arena klaim tumpang tindih menjadi suatu daerah kerja sama.

Menlu Ali Alatas mengatakan pada pembukaan lokakarya bahwa: (1) lokakarya pengelolaan potensi Laut Cina Selatan bukan berarti suatu forum perundingan yang difokuskan pada sebagian atau semua tuntutan kedaulatan dan yurisdiksi negara-negara di kawasan tersebut; (2) maksud lokakarya adalah untuk menemukan cara-cara menransformasikan sumber-sumber konflik potensial kepada bentuk-bentuk konstruktif bagi kerja sama dan keuntungan bersama; (3) pembicaraan dan diskusi tentang masalah-masalah yang terdapat di Laut Cina Selatan, seperti pengelolaan sumber-sumber maritim, keselamatan navigasi, perlindungan terhadap lingkungan termasuk penanganan pencemaran laut dan penelitian ilmiah akan banyak bermanfaat bagi negara-negara yang terlibat dalam konflik itu, termasuk negara-negara yang secara tidak langsung mempunyai tuntutan terhadap wilayah tersebut; (4) dengan posisi netralnya, Indonesia memprakarsai pertemuan negara-negara yang mempunyai tuntutan yang tumpang tindih di kawasan itu; (5) lokakarya itu merupakan kelanjutan dari pertemuan serupa di Bali bulan Januari 1990, yang hanya dihadiri oleh negara-negara ASEAN (*Suara Pembaruan*, 15-7-1991); (6) pengaturan kerja sama itu dapat dilakukan tanpa harus menunggu penyelesaian isu politik, keamanan, teritorial dan yurisdiksi; (7) perubahan pola hubungan antar negara, khususnya antar kekuatan dunia, akan menciptakan lingkungan strategis global baru. Di samping itu perubahan tersebut juga berpengaruh atas konstelasi geopolitis dan ekonomi Asia Pasifik; (8) perubahan yang terjadi di Eropa berupa proses akomodasi dan integrasi karena kondisi yang berbeda, tidak dapat diterapkan di Asia Pasifik dan tidak mengurangi upaya untuk mulai meletakkan dasar bagi hubungan yang damai dan lebih stabil bagi lingkungan strategis baru;

(9) penyelesaian konflik di Kamboja dan di Semenanjung Korea perlu menjadi prioritas; (10) konsultasi dan kerja sama antar negara mengenai isu-isu penting yang menjadi perhatian semua negara perlu dikembangkan untuk membangun saling kepercayaan, misalnya tentang Laut Cina Selatan (*Kompas*, 16-7-1991).

Hasjim Djalal, salah satu ketua sidang mengatakan: (1) ada enam masalah yang diidentifikasi pada lokakarya: (a) kerja sama keamanan pelayaran; (b) kemungkinan kerja sama di bidang lingkungan; (c) bagaimana mengatur kekayaan alam di dasar laut seperti migas; (d) isu yang berhubungan dengan yurisdiksi nasional meliputi klaim teritorial, kedaulatan atas pulau, klaim batas-batas yurisdiksi teritorial, zona ekonomi dan landas kontinen; (e) masalah yang berhubungan dengan politik dan keamanan, seperti misalnya bagaimana melihat hubungan Asia Tenggara dengan kawasan lainnya; (f) isu yang berkaitan dengan lembaga kerja sama, seperti misalnya syarat-syarat untuk memajukan kerja sama; (2) tujuan lokakarya bukan untuk meneari penyelesaian masalah klaim teritorial; (3) jika ada klaim yang bertentangan agar diselesaikan secara damai; (4) jika tidak dapat dicapai kesamaan mengenai perbatasan negara, maka dapat ditempuh secara *joint development*, misalnya kerja sama seperti Timor Gap; (5) kerja sama dalam bentuk apapun harus memperhatikan masalah lingkungan (*Kompas*, 16-7-1991).

Prof. Ian Townsend Gault, Direktur Center for Asian Legal Studies University of British-Columbia, Vancouver, Kanada, mengatakan: (1) kerja sama antar negara di perbatasan Laut Cina Selatan merupakan hal yang penting untuk mengatasi perselisihan di antara negara-negara yang berkepentingan; (2) masalah yang penting adalah pemanfaatan sumber daya alam di wilayah Laut Cina Selatan, dan bukan masalah tentang kepemilikan wilayah masing-masing negara (*Kompas*, 16-7-1991); (3) pihaknya telah memberi bantuan US\$250 ribu untuk penyelenggaraan lokakarya tentang Laut Cina Selatan dan akan ditambah dalam pertemuan-pertemuan selanjutnya (*Pelita*, 16-7-1991).

Lee Lai Toi dari Institute of International Affairs Singapura, mengatakan: (1) periode pascaperang Dingin perlu mendapat perhatian; (2) setelah era Perang Dingin berakhir muncul isu masalah keamanan di Asia. Pengaruh AS dan Uni Soviet mulai berkurang, sedangkan Jepang berperan lebih aktif; (3) Cina akan berperan lebih aktif dalam masalah Laut Cina Selatan; (4) kehadiran AS di Asia perlu terus dilanjutkan; (5) isu kedaulatan merupakan isu yang sangat sulit untuk disele-

saikan; (6) masih ada kesempatan untuk melakukan kerja sama sains, teknologi, riset dan pelayaran bagi negara-negara di sekitar Laut Cina Selatan; (7) Cina dan Vietnam memegang posisi kunci dalam penyelesaian masalah di Laut Cina Selatan (*Kompas*, 17-7-1991).

Tang Cheng Yuan, Deputy Direktur Departemen Perjanjian dan Hukum Kemlu Cina, mengatakan: (1) pemerintah Cina setuju diadakannya berbagai kerja sama di Laut Cina Selatan, seperti misalnya perlindungan lingkungan dan pencegahan pembajakan; (2) isu kedaulatan wilayah di Laut Cina Selatan sulit untuk diselesaikan; (3) kerja sama dalam bentuk pertukaran pikiran merupakan langkah yang baik untuk perundingan lebih lanjut; (4) AS dan Uni Soviet belum tentu meninggalkan Laut Cina Selatan, karena wilayah ini bagi dua negara adikuasa itu sangat penting dan strategis (*Kompas*, 17-7-1991).

C.P.F. Luhulima mengatakan: (1) lokakarya mengenai Laut Cina Selatan sekarang ini baru pada tahap pengumpulan dari berbagai usulan dan masalah, belum menentukan bagaimana kerja sama yang akan diadakan pada pertemuan selanjutnya; (2) terdapat usul tentang perlunya dibentuk suatu lembaga untuk menyelesaikan masalah Laut Cina Selatan; (3) masalah Laut Cina Selatan jangan menjadi konflik baru setelah masalah Kamboja selesai (*Kompas*, 17-7-1991).

Hasjim Djalal mengatakan: (1) tiga macam kerja sama di Laut Cina Selatan telah diusulkan sebagai tindak lanjut dari lokakarya itu, yakni: (a) membentuk Dewan Konsultasi Maritim Laut Cina Selatan (*Maritime Consultative Council for the South China Sea - MCCSCS*); (b) membuat program konkrit yang dilakukan oleh semua negara di sekitar Laut Cina Selatan; (c) melanjutkan lokakarya tentang Laut Cina Selatan; (2) beberapa usul lain yang muncul dalam lokakarya mengarah pada rekomendasi pembentukan lembaga atau mekanisme penanganan berbagai masalah di Laut Cina Selatan (*Kompas*, 18-7-1991).

B.A. Hamzah, anggota Institute of Strategic and International Studies (ISIS) Malaysia, mengatakan: (1) tujuan pembentukan MCCSCS antara lain untuk saling tukar pikiran, meningkatkan saling pengertian, mengantisipasi masalah dengan mendeteksi isu yang dapat meningkatkan ketegangan, dan melembagakan pengaturan sementara semua masalah di Laut Cina Selatan; (2) MCCSCS adalah semacam organisasi non pemerintah (NGO) negara-negara di sekitar Laut Cina Selatan, yang terdiri dari para pejabat pemerintah dan

orang-orang swasta. Lembaga ini berfungsi menemukan konsensus, bersifat pragmatis, berorientasi pada kebijaksanaan (*policy oriented*)¹ dan antisipatoris; (3) MCCSCS melakukan kerja sama dengan ASEAN, IMO (*International Maritime Organization*) dan PBB; (4) struktur MCCSCS terdiri dari sidang umum setiap dua tahun dengan sistem rotasi, komite tetap, kelompok koordinasi, dan gugus tugas (*task force*) yang terdiri dari para ahli MCCSCS; (5) gugus tugas yang penting adalah gugus tugas lingkungan ekologis dan riset ilmiah, gugus tugas navigasi, komunikasi, soal pembajakan dan pelayaran serta gugus tugas pengaturan sumber daya alam; (6) ia mengusulkan pembentukan gugus tugas yang menangani isu seperti keamanan, politik, teritorial dan yurisdiksi (*Kompas*, 18-7-1991).

Juwono Sudarsono mengatakan: (1) ia mengusulkan agar dibentuk kelompok kerja (*working group*) antar negara ASEAN dan kelompok kerja Cina dan Vietnam; (2) kelompok kerja intra ASEAN akan membicarakan masalah Laut Cina Selatan di antara negara anggota ASEAN, terutama Malaysia, Brunei Darussalam dan Filipina; (3) setelah kelompok kerja ASEAN dan Cina-Vietnam berjalan, maka secara periodik kedua kelompok ini mengadakan pertemuan-pertemuan; (4) negara-negara di sekitar Laut Cina Selatan tidak cukup kuat untuk melakukan kerja sama pengelolaan sumber daya alam di daerah tersebut sebab kemampuan ekonomi dan teknis tidak memiliki; (5) perlu dilibatkan perusahaan-perusahaan swasta dari negara-negara maju untuk pengelolaan di daerah itu; (6) negara-negara di

sekitar Laut Cina Selatan agar meningkatkan kemampuannya di bidang pengelolaan laut, sehingga tidak selalu tergantung pada perusahaan asing (*Pelita*, 18-7-1991).

Kesepakatan bersama mengatakan: (1) setiap sengketa wilayah dan yurisdiksi di Laut Cina Selatan hendaknya diselesaikan dengan cara damai melalui dialog dan perundingan, serta menghindarkan penggunaan kekerasan atau kekuatan militer; (2) pihak-pihak yang terlibat dalam masalah daerah sekitar Laut Cina Selatan agar mengekang diri untuk tidak mempersulit keadaan; (3) di daerah-daerah yang diklaim oleh beberapa negara agar diusahakan kerja sama yang saling menguntungkan, termasuk pertukaran informasi dan pembangunan bersama (*joint development*); (4) pemerintah masing-masing akan diberikan rekomendasi tanpa prasangka terhadap klaim wilayah dan yurisdiksi untuk menjajagi bidang-bidang kerja sama di Laut Cina Selatan. Bidang-bidang kerja sama itu ialah langkah-langkah untuk menciptakan navigasi dan komunikasi, peningkatan usaha memerangi bajak laut dan perampokan bersenjata serta peningkatan usaha pencarian dan penyelamatan (SAR); (5) diperlukan usaha untuk meningkatkan penggunaan sumber daya hidup, perlindungan dan pelestarian lingkungan laut, riset ilmiah kelautan dan penghapusan pengedaran narkotika di Laut Cina Selatan; (6) lokakarya semacam ini hendaknya diteruskan, dan meminta Indonesia untuk melanjutkan prakarsa tersebut (*Antara*, 18-7-1991).

Timbangan Buku

Katalisator Pembangunan Nasional

Penginderaan Jauh dan Interpretasi Citra, oleh Thomas M. Lillesand dan Ralph W. Kiefer (terjemahan), UGM Press, 1990, XV + 709 + 16 lampiran.

MESKIPUN kedua penulis sepakat, bahwa *Penginderaan Jauh dan Interpretasi Citra* merupakan buku permulaan untuk pengenalan penginderaan jauh, tetapi isi buku ini cukup padat dan penjelasannya akurat. Bagi pembaca yang paham teknologi penginderaan karena hidup kesehariannya bersentuhan langsung dengan teknologi tersebut, terbitnya buku ini tentu sangat menggembirakan. Tetapi bagi pembaca dengan latarbelakang ilmu sosial dan humaniora, buku ini memberikan kejutan tersendiri. Para ilmuwan sosial jika membaca buku ini, mungkin semakin menyadari kebenaran dari ampuhnya pendekatan multidisipliner. Dalam konteks ini pemanfaatan teknologi penginderaan jauh dapat membantu mempermudah pemecahan masalah-masalah yang menjadi keprihatinan masyarakat dan pemerintah, seperti masalah

tanah, tata kota dan sebagainya.

Bagi mereka dengan latar pengetahuan bukan teknik, buku ini menuntut konsentrasi tersendiri. Banyak istilah teknis yang harus diraba artinya, meskipun istilah tersebut sudah diterjemahkan dalam bahasa Indonesia. Istilah *Overlap* oleh penerjemah dipadankan dengan "tampalan", *Range* diterjemahkan dengan "julut", *Supervised* dengan "terselia", tetap merupakan istilah yang sulit dipahami awam. Selain itu, penyunting juga menambah jumlah istilah sulit tersebut yang dikutip dari Profesor Johannes, seperti *Attenuation* menjadi "pelaifan", *Permeable* menjadi "telap" dan sebagainya. Usaha maksimal dari penerjemah dan penyunting dalam mencari padanan istilah-istilah teknis tersebut -- meskipun tetap harus dihargai -- tetapi hanya membawa sedikit manfaat bagi pemahaman pembaca. Istilah teknis dalam bahasa Indonesia ternyata juga masih sulit dimengerti kandungan artinya. Bahkan -- kalau boleh disebut -- inilah kelemahan umum apabila seseorang ingin memahami sepenuhnya

buku ini, bahwa pemahaman dalam bahasa Inggris ternyata lebih memberikan gambaran konkrit daripada padanan Indonesianya.

Buku *Penginderaan Jauh dan Interpretasi Citra* terdiri dari sepuluh bagian. Bagian 1 membahas Konsep dan Landasan Penginderaan Jauh. Penginderaan Jauh adalah ilmu dan seni untuk memperoleh informasi tentang suatu obyek, daerah atau fenomena melalui analisis data yang diperoleh dengan suatu alat tanpa kontak langsung dengan obyek, daerah atau fenomena yang dikaji. Dengan pemanfaatan gelombang elektromagnetik, maka informasi tentang suatu obyek dapat diketahui melalui *pemantulan*, *penyerapan* atau *pentransmisian* sebagai hasil kontak antara gelombang elektromagnetik dengan obyek sasaran. Penginderaan ini dapat dilakukan dari udara atau dari antariksa. Bab pertama buku ini secara luas memberikan pemahaman tentang konsep dan landasan penginderaan sehingga pembaca dapat menangkap maksud dari penginderaan jauh dan memahami pula sistem penginderaan ideal. Atas dasar landasan seperti ini dimungkinkan para ahli di luar bidang teknik dapat menangkap manfaat lain berkaitan dengan bidang yang digeluti.

Mulai Bab 2 hingga Bab 9, pembahasan memang harus disatukan karena pembahasan ini menjadi sangat teknis dan hanya sekelompok kecil orang yang memahami. Tetapi di antara kesulitan pemahaman ini, Bab 3 dan Bab 4 perlu mendapatkan sorotan khusus karena menyangkut penyajian dasar interpretasi foto udara untuk sejumlah terapan dan analisis dari interpretasi foto tersebut. Kedua bab inilah yang dapat menjelaskan keberadaan teknologi Penginderaan Jauh sebagai salah satu katalisator pembangunan. Pembahasan teknis pada Bab 2 ber-

kisar antara alat dasar yang dipergunakan untuk memperoleh foto udara, seperti filter, film dan kamera udara. Keistimewaan bab ini cukup lengkapnya foto-foto kenampakan bumi yang diambil dengan film berwarna. Pada bagian ini juga dibahas tentang fokus, hamparan dan teknik pemrosesan film. Bab 5 membicarakan proses untuk memperoleh pengukuran spasial dan pemetaan dengan foto udara. Bab 6 membahas *optical density* di mana titik-titik di dalam foto udara dapat diukur dan dipergunakan untuk mempelajari sifat pantulan obyek. Jika pada Bab 2 sampai Bab 6 penginderaan jauh yang dilakukan adalah dengan fotografik, pada Bab 7 subyek pembahasan adalah sebaliknya (non-fotografik). Bab 7 menguraikan perolehan maupun analisis data pembesaran termal. Bab selanjutnya membahas tentang perluasan konsep dasar dan teknik bekerjanya pembesaran spektrum termal hingga penyiam multisaluran, dari panjang gelombang ultraviolet sampai termal. Pada bagian ini pembaca awam semakin kesulitan mengerti tentang istilah-istilah teknis dan kontekstual peristilahan tersebut. Tetapi bagi pembaca yang kesehariannya berdekatan dengan teknologi penginderaan, penjelasan dari Bab 2 sampai Bab 9 memberikan wawasan cukup luas -- meskipun penulis buku ini sendiri mengatakan bahwa jika dilihat dari kedalaman, pembahasan buku ini masih dangkal. Secara keseluruhan delapan bab buku ini membahas perkembangan penginderaan dari spektrum elektromagnetik bergelombang pendek hingga gelombang panjang dengan pembahasan dipusatkan pada fotografi dalam daerah ultraviolet, inframerah pantulan, penyiaman termal sampai penginderaan radar pada spektrum gelombang mikro. Sedangkan Bab 10 membahas garis besar penggunaan umum tiap sensor dari antariksa dengan analisis berdasarkan

data satelit Landsat.

Bagi para ahli bidang pertanian, ekonomi, sosial-humaniora dan tata kota, pembahasan Bab 3 dan 4 mampu memberikan inspirasi dalam kerangka pendekatan multidisipliner. Terapan Teknologi Penginderaan Jauh dalam bidang pertanian, kehutanan, sumber daya air, perencanaan kota dan wilayah, ekologi satwa liar, kepurbakalaan, penilaian dampak lingkungan dan lain-lain, menjadi indikator pentingnya teknologi ini dalam keseluruhan proses pembangunan nasional. Bahkan Teknologi Penginderaan Jauh ini dapat menjadi salah satu katalisator pembangunan nasional. Penerapan teknologi ini pada bidang pertanian misalnya, secara cepat mampu mengklasifikasi jenis tanaman, penilaian kondisi tanaman sampai pada penafsiran besarnya produk. Kemampuan teknologi ini dalam menilai kondisi tanaman sangat menguntungkan karena perubahan karakteristik tanaman dan penyakit (hama) yang menyerang dapat diketahui secara dini. Dengan demikian upaya penanggulangan hama pun dapat segera dilakukan. Dengan dininya upaya penanggulangan terhadap hama tersebut, maka produk yang dihasilkan oleh tanaman tersebut akan mempunyai keunggulan komparatif jika sudah dilempar ke pasar.

Penerapan Teknologi Penginderaan Jauh untuk perencanaan kota dan wilayah, sepenuhnya dapat membantu para ahli tata kota. Tata kota yang kacau dan tidak terpantaunya lingkungan-lingkungan kumuh yang marak sebagai salah satu gambaran banyaknya masalah sosial di perkotaan, juga tumbuhnya sentra-sentra industri dan beberapa hal lain yang mengganggu tata kota, dapat segera dipantau oleh teknologi ini. Kecepatan pemantauan ini tentunya juga menghasilkan ketepatan strategi pemecahan masalah. Para ahli ilmu sosial pun dapat memanfaatkan teknologi ini untuk melihat berkembangnya lingkungan-lingkungan kumuh dan selanjutnya mereka dapat memproyeksikan masalah-masalah sosial yang akan muncul dan sekaligus memikirkan strategi pemecahannya. Demikian juga untuk pencemaran lingkungan, teknologi ini dapat memantau secara dini adanya pencemaran lingkungan yang membahayakan kesehatan masyarakat. Sebagai salah satu katalisator pembangunan, teknologi Penginderaan Jauh dapat mengenali kekayaan sumber alam Indonesia dan apabila sumber alam itu diolah dan didayagunakan, berarti akselerasi pembangunan berputar semakin cepat.

Sukardi Rinakit

Para Penulis

- **Aly, Bachtiar,**
Sarjana Muda Publistik di UNPAD (1971); studi ilmu komunikasi, sosiologi dan ilmu politik pada Westfaelische Wilhelms Universitaet, Muenster, Jerman Barat. Selama 12 tahun di Eropa melakukan studi perbandingan di bidang komunikasi massa. Lulus Moderne Management Praktiken dari Ausbildungszentrum Riedenburg der Kuebel Stiftung. Memperoleh Dr.Phil. dengan Besondere Auszeichnung dari Rektor Universitas Muenster atas prestasi tertinggi Summa Cum Laude, yang untuk pertama kalinya diberikan kepada orang asing. Kini Dosen Tetap FISIP dan Fakultas Pasca Sarjana UI serta PTIK; Pimpinan Research and Documentation Centre for Manpower and Development - Yayasan Tenaga Kerja Indonesia (RDCM-YTKI).
- **Joesoef, Daoed,**
Sarjana Ekonomi, Universitas Indonesia (1959). Certificat Doctorat de l'Université dari Faculté du Droit et des Sciences Économiques Université de Paris (1966) dan Diplôme d'Etudes Supérieures (1969). Doctorat d'Etat di Université Pluridisciplinaire de Paris I (Panthéon-Sorbonne), 1973. Pengamat masalah-masalah strategi, perdamaian, pendidikan dan kebudayaan. Sampai sekarang Ketua Dewan Direktur CSIS. Pernah menjabat sebagai Menteri Pendidikan dan Kebudayaan pada Kabinet Pembangunan III (1978-1983) dan sebagai anggota Dewan Pertimbangan Agung (1983-1988).
- **Muis, A.,**
Sarjana Hukum dan Doktor Ilmu Komunikasi; Guru Besar Tetap pada FISIP dan Fakultas Pasca Sarjana UNHAS Ujungpandang. Di samping itu menjadi anggota Asian Mass Communication Research and Information Centre (AMIC) di Singapura sejak tahun 1971 hingga sekarang.
- **Pranarka, A.M.W.**
Memperoleh gelar Sarjana Filsafat dari Athenaeo, Poona, India (1965); Sarjana Hukum dari Fakultas Hukum, Universitas Katolik Parahyangan, Bandung (1969) dan gelar Doktor dalam Ilmu Hukum, dari universitas yang sama tahun 1984. Sekarang Anggota Dewan Direktur CSIS dan Ketua Departemen Politik, CSIS Jakarta dan Ketua Konsorsium Lembaga Pengkajian Kebudayaan Sarjanawiyata, Tamansiswa Yogyakarta.

- **Rinakit, Sukardi,**
Sarjana Kriminologi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Indonesia (1989); sejak Februari 1990 menjadi staf analis Departemen Sosial Budaya CSIS.
- **Suharso, Puguh,**
Sarjana Matematika Fakultas MIPA, Institut Teknologi Surabaya (1979); training Ilmu Informatika di Technische Hochschule Darmstadt, Jerman Barat (1983-1984). Sejak 1979 bekerja di Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi; sebagai anggota Studi Pengawasan dan Pengamanan Perairan Indonesia mulai tahun 1981 sampai sekarang; di samping sebagai Ketua Kelompok Pengolahan Data Elektronik (sejak 1986), pada Deputi Bidang Analisa Sistem.

Catatan:

tempel
perangko
di sini

Kepada:

Biro Pemasaran

**Centre for Strategic and
International Studies**

Jl. Tanah Abang III/23-27

Jakarta 10160

Telepon: 356532-5

jang 20-30 halaman kuarto, termasuk referensi dalam bentuk catatan kaki dan/atau daftar bacaan. Pengiriman naskah hendaknya disertai nama lengkap dan alamat penulis yang jelas. Untuk tulisan-tulisan yang dimuat akan disediakan honoraria yang pantas. Naskah-naskah yang tidak dimuat akan dikembalikan kepada penulis jika hal itu dikehendakinya. Surat menyurat yang berhubungan dengan hal tersebut harap ditujukan ke Redaksi ANALISIS CSIS.

Langganan

Harga pengganti ongkos cetak Rp 3.000,00 per eksemplar; langganan setahun (6 nomor, sudah termasuk ongkos kirim biasa) Rp 15.000,00. Surat menyurat yang berhubungan dengan langganan ditujukan ke Biro Pemasaran, CSIS.

Alamat

Jalan Tanah Abang III/23-27, Jakarta 10160, Telepon 356532, 356533, 356534, 356535.